



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

RPJMD

KABUPATEN KATINGAN

TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

TAHUN 2019



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 1) (Nomor Register Kalimantan Tengah Nomor 1 Oktober 2017);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
7. Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Katingan untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Dokumen yang memuat struktur dengan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun, melalui RKPD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP

(2) Ketentuan mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra-PD, RKPD dan Renja-PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. Pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD;
 - c. Hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar di tingkat daerah dan nasional; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan nasional.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat daerah yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

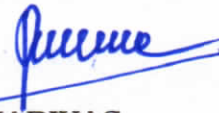
Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

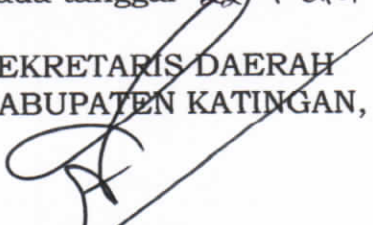
Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR : 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,24/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai Ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMD Provinsi, selain itu RPJMD tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan dengan periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang terdiri dari :

1. RKPD Tahun 2019 (yang masih mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019);
2. RKPD Tahun 2020;
3. RKPD Tahun 2021;
4. RKPD Tahun 2022;
5. RKPD Tahun 2023.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada Tahun 2024, namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD menjadi utuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Renstra-PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah semua ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini menyesuaikan dalam ketentuan dalam Peraturan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan t di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh setiap SOPD yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Hal ini dimaksudkan bahwa target-target yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD ini bersifat asumptif terhadap kondisi yang ada dan selanjutnya memproyeksikan target tersebut sampai dengan Tahun 2024 sehingga ada kekhawatiran asumsi akan dapat berubah terhadap kondisi obyektif yang berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi perubahan target dengan alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan PPAS untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 58

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2018-2023**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta bentuk dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Katingan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, serta politis. Selain itu, secara substansi, RPJMD ini disusun dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

RPJMD Kabupaten Katingan akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 **"Katingan Bermartabat untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera"**. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD ini, kami ucapkan terima kasih.

Kasongan, Maret 2019

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xviii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Penyusunan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3 Topografi	II-4
2.1.1.4 Hidrologi	II-5
2.1.1.5 Klimatologi	II-8
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	II-10
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana	II-13
2.1.3 Demografi	II-20
2.1.4 Potensi Sumber Daya	II-26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-52
2.2.1 Pertumbuhan PDRB	II-54
2.2.2 Laju Inflasi	II-58
2.2.3 PDRB Per kapita	II-59
2.2.4 Indeks Gini	II-60
2.2.5 Persentase Penduduk Miskin	II-62
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia	II-63
2.2.7 Angka Melek Huruf (AMH)	II-64
2.2.8 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-65
2.2.9 Angka Usia Harapan Hidup	II-65
2.2.10 Persentase Balita Gizi Buruk	II-65
2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-66
2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-67
2.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-67
2.2.14 Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-69

2.2.15	Indeks Kepuasan Masyarakat	II-70
2.2.16	Persentase PAD terhadap Pendapatan	II-71
2.2.17	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-72
2.2.18	Opini BPK	II-73
2.2.19	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	II-73
2.2.20	Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan	II-74
2.2.21	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Tanaman Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	II-76
2.2.22	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan (Palawija) terhadap PDRB	II-76
2.2.23	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	II-77
2.2.24	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	II-78
2.2.25	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	II-78
2.2.26	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	II-79
2.2.27	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	II-80
2.2.28	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	II-81
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-82
2.3.1	Layanan Urusan Wajib	II-82
2.3.1.1	Pendidikan	II-82
2.3.1.2	Kesehatan	II-86
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-97
2.3.1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	II-103
2.3.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	II-104
2.3.1.6	Sosial	II-107
2.3.1.7	Tenaga Kerja	II-110
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-110
2.3.1.9	Pangan	II-113
2.3.1.10	Pertanahan	II-113
2.3.1.11	Lingkungan Hidup	II-115
2.3.1.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-121
2.3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-124
2.3.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-124
2.3.1.15	Perhubungan	II-128
2.3.1.16	Komunikasi dan Informatika	II-131
2.3.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-132
2.3.1.18	Penanaman Modal	II-134
2.3.1.19	Kepemudaan dan Olahraga	II-136
2.3.1.20	Statistik	II-137

	2.3.1.21	Kebudayaan	II-138
	2.3.1.22	Perpustakaan	II-140
	2.3.1.23	Kearsipan	II-141
2.3.2		Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-143
	2.3.2.1	Kelautan dan Perikanan	II-144
	2.3.2.2	Pariwisata	II-144
	2.3.2.3	Pertanian	II-145
	2.3.2.4	Kehutanan	II-146
	2.3.2.5	Energi Dan Sumber Daya Mineral	II-148
	2.3.2.6	Perdagangan	II-149
	2.3.2.7	Perindustrian	II-155
	2.3.2.8	Transmigrasi	II-156
2.3.3		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-156
	2.3.3.1	Perencanaan	II-156
	2.3.3.2	Keuangan	II-160
	2.3.3.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-160
	2.3.3.4	Pengawasan	II-162
	2.3.3.5	Sekretariat Daerah	II-163
2.4		Aspek Daya Saing Daerah	II-165
	2.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-165
	2.4.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita	II-166
	2.4.3	Produktivitas Total Daerah	II-168
	2.4.4	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	II-173
	2.4.5	Rasio Ketergantungan	II-173
	2.4.6	Jumlah Desa Tertinggal	II-175
BAB III		GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1		Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
	3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
	3.1.2	Neraca Daerah	III-10
3.2		Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-15
	3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-21
	3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	III-28
3.3		Kerangka Pendanaan	III-32
	3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-32
	3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-36
BAB IV		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1		Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.1.1	Identifikasi Permasalahan RPJPD Kabupaten Katingan	IV-1
	4.1.2	Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)	IV-4
	4.1.3	Kemiskinan	IV-12

4.1.4	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian	IV-14
4.1.5	Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan	IV-20
4.1.6	Lambatnya perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Katingan	IV-25
4.1.7	Tata Kelola Pemerintahan	IV-26
4.2	Isu Strategis	IV-31
4.2.1	Isu Internasional	IV-30
4.2.1.1	Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	IV-30
4.2.1.2	Lingkungan Hidup	IV-32
4.2.1.3	Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)	IV-33
4.2.2	Isu atau Kebijakan Nasional	IV-35
4.2.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019	IV-35
4.2.2.2	Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	IV-38
4.2.2.3	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	IV-41
4.2.2.4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	IV-41
4.2.2.5	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	IV-43
4.2.3	Isu atau Kebijakan Provinsi	IV-44
4.2.3.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	IV-44
4.2.3.2	Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035	IV-48
4.2.3.3	Heart of Borneo	IV-51
4.2.4	Isu atau Kebijakan Kabupaten Katingan	IV-52
4.2.4.1	Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan	IV-53
4.2.4.2	Telaah RTRW Kabupaten Katingan	IV-54
4.2.4.3	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	IV-56
4.2.4.4	Telaah RPJMD Daerah Lain	IV-66
4.2.5	Isu Strategis Kabupaten Katingan	IV-72
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi dan Misi	V-1
5.2	Tujuan dan Sasaran	V-5
5.3	Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih	V-11

5.4	Keselarasaan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Katingan, RPJMN Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN	V-13
5.4.1	Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025	V-13
5.4.2	Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	V-15
5.4.3	Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJMN 2015-2019	V-18
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Strategi dan Arah kebijakan	VI-1
6.2	Program Pembangunan Daerah	VI-19
6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	VI-28
6.3.1	Pembangunan Wilayah Pengembangan Sektor Pertanian dan Pengembangan Komoditi Unggulan	VI-33
6.3.2	Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan untuk mendukung Kegiatan Pertanian, Industri dan Pariwisata	VI-40
6.3.3	Pengembangan Ekowisata pada Kawasan Punggualas Taman Nasional Sebangau untuk Kegiatan Pariwisata berbasis Alam	VI-43
6.3.4	Pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara	VI-44
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2	Pedoman Transisi	IX-2

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan	II-2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Katingan per Kecamatan	II-5
Tabel 2.3	Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang di Kabupaten Katingan	II-5
Tabel 2.4	Rata-Rata Suhu Udara dan Kelambaban Relatif Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2017	II-9
Tabel 2.5	Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2017	II-10
Tabel 2.6	Luasan Tata Guna Lahan Kabupaten Katingan	II-10
Tabel 2.7	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup per Kecamatan	II-11
Tabel 2.8	Potensi Banjir Setiap Kecamatan	II-14
Tabel 2.9	Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan	II-17
Tabel 2.10	Potensi Lahan Kritis Setiap Kecamatan	II-19
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-22
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-23
Tabel 2.13	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2017	II-24
Tabel 2.14	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-25
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2017	II-26
Tabel 2.16	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Setiap Kecamatan	II-28
Tabel 2.17	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Setiap Kecamatan	II-29
Tabel 2.18	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Setiap Kecamatan	II-31
Tabel 2.19	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Setiap Kecamatan	II-32
Tabel 2.20	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Setiap Kecamatan	II-34
Tabel 2.21	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Setiap Kecamatan	II-35

Tabel 2.22	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Setiap Kecamatan	II-36
Tabel 2.23	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Setiap Kecamatan	II-37
Tabel 2.24	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Setiap Kecamatan	II-39
Tabel 2.25	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Setiap Kecamatan	II-40
Tabel 2.26	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Setiap Kecamatan	II-41
Tabel 2.27	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Peyerbukan Alami Setiap Kecamatan	II-42
Tabel 2.28	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Setiap Kecamatan	II-44
Tabel 2.29	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Budaya TTRH Setiap Kecamatan	II-45
Tabel 2.30	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturisme Setiap Kecamatan	II-46
Tabel 2.31	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam Setiap Kecamatan	II-47
Tabel 2.32	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Setiap Kecamatan	II-49
Tabel 2.33	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara Setiap Kecamatan	II-50
Tabel 2.34	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Setiap Kecamatan	II-51
Tabel 2.35	Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Setiap Kecamatan	II-53
Tabel 2.36	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (miliar rupiah)	II-54
Tabel 2.37	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (miliar rupiah)	II-55

Tabel 2.38	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (persen)	II-56
Tabel 2.39	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (Persen)	II-57
Tabel 2.40	Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.41	PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-59
Tabel 2.42	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-61
Tabel 2.43	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-62
Tabel 2.44	Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2012-2017	II-64
Tabel 2.45	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-65
Tabel 2.46	Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-65
Tabel 2.47	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-66
Tabel 2.48	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2012-2015	II-66
Tabel 2.49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.50	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-68
Tabel 2.51	Keluarga Pra Sejahtera I, II, III dan III Plus di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-69
Tabel 2.52	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Kabupaten Katingan Tahun 2015 dan Tahun 2016	II-71
Tabel 2.53	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-73
Tabel 2.54	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.55	Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Katingan	II-75
Tabel 2.56	Sumbangan Sektor Pariwisata PAD dan Jumlah Kunjungan Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.57	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.58	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.59	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017	II-83

Tabel 2.60	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-84
Tabel 2.61	Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-85
Tabel 2.62	Rasio Murid Guru menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.63	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-86
Tabel 2.64	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2017	II-87
Tabel 2.65	Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2017	II-87
Tabel 2.66	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2017	II-88
Tabel 2.67	Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.68	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.69	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.70	Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.71	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 2.72	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2013-2017	II-92
Tabel 2.73	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-92
Tabel 2.74	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.75	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-94
Tabel 2.76	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-95
Tabel 2.77	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-95
Tabel 2.78	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.79	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-96
Tabel 2.80	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-97

Tabel 2.81	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-98
Tabel 2.82	Panjang Jalan Yang Dapat Dilalui Roda Empat di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-98
Tabel 2.83	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.84	Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.85	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2018	II-100
Tabel 2.86	Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Katingan, 2013-2017	II-101
Tabel 2.87	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-101
Tabel 2.88	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-102
Tabel 2.89	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-103
Tabel 2.90	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-103
Tabel 2.91	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-104
Tabel 2.92	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan Menurut Penerangan Utama Tahun 2014-2017	II-104
Tabel 2.93	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.94	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.95	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-106
Tabel 2.96	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-107
Tabel 2.97	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2016	II-107
Tabel 2.98	Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-108
Tabel 2.99	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-109
Tabel 2.100	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-110

Tabel 2.101	Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Tahun 2016 dan 2017	II-110
Tabel 2.102	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-111
Tabel 2.103	Rasio KDRT Di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-111
Tabel 2.104	Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-112
Tabel 2.105	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2013-2017	II-113
Tabel 2.106	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-113
Tabel 2.107	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-114
Tabel 2.108	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-115
Tabel 2.109	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-115
Tabel 2.110	Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan	II-116
Tabel 2.111	Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan	II-117
Tabel 2.112	Hasil Analisis <i>Overlay</i> Tutupan Lahan dan Pola Ruang	II-118
Tabel 2.113	Total Stok Karbon untuk Hutan di Setiap Kecamatan	II-119
Tabel 2.114	Total Stok Karbon untuk Hutan di Kabupaten Katingan	II-120
Tabel 2.115	Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-122
Tabel 2.116	Persentase Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-122
Tabel 2.117	Pasangan Akte Nikah di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-123
Tabel 2.118	Persentase Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-123
Tabel 2.119	Jumlah LSM/Ormas Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-124
Tabel 2.120	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-124
Tabel 2.121	Angka Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-125
Tabel 2.122	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-125
Tabel 2.123	Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-126

Tabel 2.124	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayana Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-126
Tabel 2.125	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need) di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-127
Tabel 2.126	Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-127
Tabel 2.127	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-128
Tabel 2.128	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-128
Tabel 2.129	Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-129
Tabel 2.130	Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-129
Tabel 2.131	Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2016	II-130
Tabel 2.132	Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-130
Tabel 2.133	Dermaga sungai yang tersedia di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-131
Tabel 2.134	Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-131
Tabel 2.135	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-133
Tabel 2.136	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-133
Tabel 2.137	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-134
Tabel 2.138	Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-134
Tabel 2.139	Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-135
Tabel 2.140	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-136
Tabel 2.141	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017 (jutaan)	II-136
Tabel 2.142	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-137
Tabel 2.143	Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-138
Tabel 2.144	Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-138

Tabel 2.145	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-139
Tabel 2.146	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-139
Tabel 2.147	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-140
Tabel 2.148	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-140
Tabel 2.149	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2016	II-141
Tabel 2.150	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-142
Tabel 2.151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-143
Tabel 2.152	Produksi Perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-144
Tabel 2.153	Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-144
Tabel 2.154	Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-145
Tabel 2.155	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018	II-146
Tabel 2.156	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-147
Tabel 2.157	Kawasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-147
Tabel 2.158	Persentase Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-148
Tabel 2.159	Pasar Tradisional di Kabupaten Katingan	II-149
Tabel 2.160	Sarana Gudang di Kabupaten Katingan	II-150
Tabel 2.161	Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-155
Tabel 2.162	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-155
Tabel 2.163	Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-156
Tabel 2.164	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-157
Tabel 2.165	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-158
Tabel 2.166	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-159

Tabel 2.167	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-160
Tabel 2.168	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-161
Tabel 2.169	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-161
Tabel 2.170	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017	II-162
Tabel 2.171	Persentase Tindak Lanjut BPK Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-163
Tabel 2.172	Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-164
Tabel 2.173	Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-164
Tabel 2.174	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan, 2016-2017	II-166
Tabel 2.175	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua di Kabupaten Katingan, 2012-2017	II-174
Tabel 2.176	Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2017	II-175
Tabel 2.177	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-176
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-6
Tabel 3.3	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016-2017	III-7
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-9
Tabel 3.5	Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-11
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-13
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-22
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-25
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2017	III-26
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-27
Tabel 3.11	Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-29
Tabel 3.12	SiLPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-30

Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-30
Tabel 3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-31
Tabel 3.15	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	III-32
Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	III-34
Tabel 3.17	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	III-36
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	III-37
Tabel 3.19	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	III-39
Tabel 3.20	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023	III-41
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-3 (2018-2023)	IV-2
Tabel 4.2	Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia	IV-11
Tabel 4.3	Pemetaan Permasalahan Kemiskinan	IV-13
Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Perekonomian	IV-19
Tabel 4.5	Pemetaan Permasalahan Infrastruktur	IV-24
Tabel 4.6	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Desa	IV-26
Tabel 4.7	Capaian Prosentase Pelaksanaan dan Penerapan SPM di Kabupaten Katingan Tahun 2017	IV-27
Tabel 4.8	Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	IV-30
Tabel 4.9	Proyeksi Target Indikatif Pembangunan 2020-2024	IV-39
Tabel 4.9	Indikator TPB yang Rekomendasinya (Program dan Kegiatan) Diintegrasikan ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	IV-61
Tabel 4.10	Identifikasi RPJMD Daerah Lain Yang Berdekatan Dengan Kabupaten Katingan	IV-67
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023	V-7
Tabel 5.2	Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Katingan 2018-2023	V-11
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023	VI-14
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023	VI-20
Tabel 6.3	Penjabaran Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih ke Dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2018-2023	VI-21

Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Katingan	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023	VII-3
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan 2018-2023	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan 2018-2023	VIII-5

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Katingan	II-3
Gambar 2.2	Persentase Daya Dukung dan Daya Daya Tampung	II-12
Gambar 2.3	Daya Dukung dan Daya Tampung	II-13
Gambar 2.4	Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Banjir,	II-15
Gambar 2.5	Peta Potensi Banjir	II-16
Gambar 2.6	Peta Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kebakaran	II-18
Gambar 2.7	Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kritis	II-19
Gambar 2.8	Potensi Lahan Kritis	II-20
Gambar 2.9	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	II-29
Gambar 2.10	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	II-30
Gambar 2.11	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat	II-32
Gambar 2.12	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Energi	II-33
Gambar 2.13	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik	II-34
Gambar 2.14	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	II-36
Gambar 2.15	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	II-37
Gambar 2.16	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	II-38
Gambar 2.17	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami	II-39
Gambar 2.18	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	II-40
Gambar 2.19	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	II-42
Gambar 2.20	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami	II-43
Gambar 2.21	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	II-44
Gambar 2.22	Peta Jasa Ekosistem Budaya TTRH	II-46
Gambar 2.23	Peta Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturisme	II-47
Gambar 2.24	Peta Jasa Ekosistem Estetika Alam	II-48
Gambar 2.25	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	II-50

Gambar 2.26	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara	II-51
Gambar 2.27	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer	II-52
Gambar 2.28	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas	II-53
Gambar 2.29	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017	II-58
Gambar 2.30	Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017	II-60
Gambar 2.31	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017	II-62
Gambar 2.32	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017	II-63
Gambar 2.33	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017	II-69
Gambar 2.34	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 - 2017	II-71
Gambar 2.35	Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017	II-73
Gambar 2.36	Peranan Sub Sektor Pertanian Tanaman Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-76
Gambar 2.37	Peranan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-77
Gambar 2.38	Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-77
Gambar 2.39	Peranan Sub Sektor Pertambangan dan Pengendalian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-78
Gambar 2.40	Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012 - 2016	II-79
Gambar 2.41	Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017	II-80
Gambar 2.42	Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kab. Katingan Tahun 2013-2017	II-80
Gambar 2.43	Peta Stok Karbon	II-121
Gambar 2.44	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016	II-159

Gambar 2.45	Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2015-2017	II-166
Gambar 2.46	Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017	II-167
Gambar 2.47	Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017	II-168
Gambar 2.48	Produktivitas Tenaga Kerja, Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja dan Produktivitas Jam Kerja di Kabupaten Katingan, 2011 - 2015	II-170
Gambar 2.49	Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Katingan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2014 dan 2015 (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	II-171
Gambar 2.50	Kontribusi PDRB dan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Tenaga Menurut Kategori di Kabupaten Katingan Tahun 2015 (Persen)	II-172
Gambar 2.51	Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016	II-173
Gambar 2.52	Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan, 2012 - 2017	II-175
Gambar 3.1	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Tahun 2013-2017	III-4
Gambar 4.1	Kerangka Pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	IV-40
Gambar 5.1	Keselarasan Misi RPJMN Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025	V-15
Gambar 5.2	Keselarasan Misi RPJMN Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	V-18
Gambar 5.3	Keselarasan Misi RPJMN Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019	V-19
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan	VI-19
Gambar 6.2	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Padi Ladang Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	VI-35
Gambar 6.3	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	VI-36

Gambar 6.4	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	VI-37
Gambar 6.5	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	VI-38
Gambar 6.6	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	VI-39
Gambar 6.7	Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut	VI-42
Gambar 6.8	Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	VI-45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada dan Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa janji yang disampaikan oleh Bupati terpilih sewaktu kampanye dituangkan kedalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, pemenuhan pelayanan dasar, dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Pelantikan **Bapak Sakariyas, SE dan Bapak Sunardi** menjadi **Bupati dan Wakil Bupati Katingan** periode 2018-2023 pada tanggal 24 September 2018 menjadi awal bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Pelaksanaan penyusunan RPJMD Katingan ditempuh dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Mengingat pentingnya RPJMD Kabupaten Katingan, maka dalam proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan. Hal ini selaras dengan 4 (empat) pendekatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Penjelasan masing-masing pendekatan perencanaan tersebut, yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Selain pendekatan secara proses sebagaimana dijelaskan di atas, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi, meliputi:

- a. Pendekatan Holistik-Tematik : dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan Integratif : dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Pendekatan Spasial : dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 disusun dengan berpijak pada hasil rancangan teknokratik RPJMD yang telah dilakukan pada tahap persiapan. Rancangan teknokratik RPJMD memberikan informasi berupa gambaran pencapaian pembangunan beberapa tahun terakhir. Bertolak dari gambaran capaian pembangunan beberapa tahun terakhir yang meliputi kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka akan dapat diidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, dirumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Katingan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan yang diselaraskan dengan perwujudan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan 2018-2023. Selain program pembangunan daerah yang dipilih sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, terdapat juga program perangkat daerah lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bentuk penyelenggaraan urusan/fungsi penunjang pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Katingan.

Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun, baik di tahap perencanaan, penganggaran maupun pengendalian dan evaluasi tahunan. Dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat bersinergi antartingkatan pemerintahan maupun mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023, meliputi:

1. Undang–Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor 35).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 24).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Katingan diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Katingan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Rancangan awal RPJMD akan disusun bersamaan dengan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dalam proses penyusunannya, Renstra PD akan mempedomani RPJMD. Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 ditetapkan dengan Perda, maka akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RTRW. Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan disusun dengan tidak meninggalkan aspek pelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana amanat dalam peraturan, bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan dokumen lain salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dalam penyusunan RPJMD Katingan juga memperhatikan dokumen tersebut. KLHS diperhatikan dalam proses penyusunan RPJMD untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Katingan ke dalam perencanaan strategik yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini, meliputi:

- a. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir.
- b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
- d. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Katingan.
- e. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi, yang disertai dengan indikator kinerja dan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
- f. Menetapkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan.
- g. Menetapkan program perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus upaya mencapai sasaran pembangunan.
- h. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur penilaian kinerja pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan

RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah, Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan/isu di tingkat internasional, nasional, regional/provinsi maupun di internal Kabupaten Katingan

yaitu RPJPD dan RTRW. Selanjutnya, dilakuka juga penelaahan terhadap KLHS RPJMD yang memberi masukan bagi muatan RPJMD. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Katingan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IX Penutup, Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan/atau diperhatikan untuk pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD 2018-2023 telah berakhir dan RKPD Tahun 2024 akan disusun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km². Dalam perkembangan setelah dilakukan kesepakatan tata batas dengan daerah sekitarnya, luas administrasi Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi 20.393,84 km². Adapun dasar hukum penetapan batas wilayah administrasi Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penataan administrasi wilayah tersebut, Kabupaten Katingan berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa

Adapun rincian luas per kecamatan dan jumlah desa sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Katingan

NO	KECAMATAN	LUAS		JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
		Km ²	%		
1	Katingan Kuala	1.483,72	7,28	14	2
2	Mendawai	2.392,11	11,73	7	-
3	Kamipang	2.854,30	14	9	-
4	Tasik Payawan	808,22	3,96	8	-
5	Katingan Hilir	671,51	3,29	6	2
6	Tewang Sanggalang Garing	894,75	4,39	9	1
7	Pulau Malan	649,37	3,18	14	-
8	Katingan Tengah	1.635,38	8,02	15	1
9	Sanaman Mantikei	2.768,77	13,58	14	-
10	Petak Malai	1.642,74	8,06	7	-
11	Marikit	2.123,30	10,41	18	-
12	Katingan Hulu	1.461,35	7,17	22	1
13	Bukit Raya	1.008,32	4,94	11	-
LUAS		20.393,84	100	154	7

Sumber : Peta Batas Administrasi Kabupaten Katingan, 2019, diolah

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Katingan terletak antara 0°20" - 3°38" Lintang Selatan dan 112°00" - 113°45" Bujur Timur. Gambar Peta Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut :



Gan



Sumber : Peta Administrasi Kab. Katingan, Bappelitbang, 2018

Wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

1. Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.
2. Kabupaten Katingan yang secara geografis berdekatan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau *hinterland* bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Implikasi tidak langsung mengakibatkan Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk

bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Wacana Kabupaten Katingan menjadi salah satu dari 3 (tiga) kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang akan menjadi ibukota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Palangka Raya sebagai ibukota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang pernah digaungkan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno, dan terakhir ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat kunjungan ke Palangka Raya dalam rangka HKSNI tanggal 20 Desember 2016. Upaya yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung rencana tersebut, antara lain : 1) koordinasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan tata ruang guna penyiapan rencana lokasi ibukota Pemerintahan NKRI di Provinsi Kalimantan Tengah; 2) melakukan identifikasi lokasi, diantaranya mengkaji status lahan dan letak (kawasan), serta melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota; 3) pengembangan potensi wilayah dan mencadangkan lahan dengan pengembangan komoditas unggulan baru di wilayah hinterland-nya seperti padi organik, singkong, tebu, bambu, sengon; 4) mencadangkan lahan untuk rencana lokasi ibukota NKRI seluas 300.000 sampai 500.000 hektar, yang mencakup 3 (tiga) wilayah administrasi, yakni Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, dimana ketiga Kepala Daerah tersebut berkomitmen untuk menyediakan lahan dimaksud; dan 5) membuat kajian hingga sosialisasi kajian-kajian tentang potensi sumberdaya, sarana prasarana dan tata ruang.

2.1.1.3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 10-50 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Katingan diperoleh kecamatan Bukit Raya merupakan kecamatan dengan posisi ketinggian 50 meter diatas permukaan laut, sedangkan kecamatan Katingan Kuala berada di dataran yang paling rendah, yaitu 13 meter diatas permukaan air laut.

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Katingan per Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
Katingan Kuala	Pegatan	13,00
Mendawai	Mendawai	15,00
Kamipang	Baun Bango	17,00
Tasik Payawan	Petak Bahandang	19,00
Katingan Hilir	Kasongan	22,00
Tewang Sangalang Garing	Pendahara	32,00
Pulau Malan	Buntut Bali	27,00
Katingan Tengah	Tumbang Samba	30,00
Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	32,00
Petak Malai	Tumbang Baraoi	40,00
Marikit	Tumbang Hiran	40,00
Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	40,00
Bukit Raya	Tumbang Kajamei	50,00

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Katingan dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang 650 Km. Sungai yang bermuara di laut Jawa ini melewati hampir seluruh kecamatan di kabupaten pemekaran ini, seperti Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing (TWSG), Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala.

Selain sungai besar tersebut, wilayah Kabupaten Katingan dialiri pula oleh puluhan anak sungai dan danau. Sungai dan danau-danau itu biasanya merupakan jalur penghubung antar satu perkampungan/pedukuhan dengan lainnya. Di antara anak sungai tersebut adalah Sungai Kalanaman, Sungai Samba, Sungai Hiran, Sungai Mahop, Sungai Bemban dan Sungai Sanamang

Tabel 2.3
Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang
di Kabupaten Katingan

No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
I.	KATINGAN KUALA			
	Desa Selat Baniang	Sungai Sebangau Kecil	8.000	3.000
		Sungai Sebangau Besar	8.588,54	
		Anak Sungai Sebangau Besar	4.876	
		Sungai Selat Labaning	4.500	2.000

No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
	Pegatan Hilir	Sungai Kaki	5.000	2.500
	Desa Kampung Tengah	Sungai Selat Saluang	6.750	5.000
II.	MENDAWAI			
	Desa Tewang Kampung	Sungai Tarusan Hantipan	14.630	14.630
	Desa Mendawai	Sungai Bakung	24.300	15.000
	Desa Perigi	Sungai Perigi	6.669	
	Desa Tumbang Bulan	Sungai Bulan	2.747	
III.	KEC. KAMIPANG			
	Desa Gelinggang	Sungai Runen	6.240	3.000
		Sungai Puri	2.500	1.000
	Desa Tampelas	Sungai Tampelas	3.400	2.000
	Desa Telaga	Sungai Telaga	4.100	2.500
	Desa Jahanjang	Sungai Jahanjang	7.520	3.500
	Desa Baun Bango	Sungai Kamipang	6.300	4.000
		Sungai Baun Bango	6.996	
	Desa Parupuk	Sungai Parupuk	4.600	2.000
		Sungai Kalaru	9.200	6.000
	Asam Kumbang	Sungai Asem Kumbang	7.340	3.500
IV.	KEC. TASIK PAYAWAN			
	Desa Telingke	Sungai Telingke	3.350	2.000
	Desa Handiwung	Sungai Pasur Mereng	5.000	2.000
	Desa Tumbang Panggu	Sungai Panggo	9.324	
	Desa Luwuk Kanan	Sungai Hampangen	19.000	17.000
V.	KEC. KATINGAN HILIR			
	Desa Tumbang Liting	Sungai Liting	4.250	1.000
	Kelurahan Kasongan Lama	Sungai Sala Ngawa	17.100	8.200
		Sungai Sala Ngaju	13.450	6.000
	Desa Banut Kalanaman	Sungai Kalanaman	75.000	45.000
	Desa Telangkah	Sungai Telangkah	4.310	1.500
	Desa Talian Kereng	Sungai Tambawu	8.200	4.000
		Sungai Tehang	36.250	7.000
		Sungai Simpur	4.500	2.500
VI.	KEC. TEWANG SANGALANG GARING			
	Desa Tewang Beringin	Sungai Mandahi	3.200	3.200
	Desa Hampalam	Sungai Tarusan	450	
	Desa Tarusan Danum	Sungai Sepang Kanan	14.100	14.100
		Sungai Sepang Kiri	23.000	16.000
		Sungai Batarung	2.400	1.000
	Desa Pendahara	Sungai Danum Matei	11.500	10.000
		Sungai Tuyun	7.300	5.000
		Sungai Parit	5.600	1.000
	Desa Tewang Rangkang	Sungai Pajunjung	17.500	8.000
		Sungai Bua	4.300	4.300
	Desa Tewang Manyangen	Sungai Manten	24.900	20.000
		Sungai Barira	1.400	
VII.	KEC. PULAU MALAN			
	Desa Dahian Tunggal	Sungai Jahawei	12.350	10.000
	Desa Buntut Bali	Sungai Tatas	987	
		Sungai Babahe	2500	

No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
	Desa Manduing Lama/Taheta	Sungai Lipa	5.500	4.000
		Sungai Tarusan Pinang	2.300	
		Sungai Tarusan	2.600	
		Sungai Pangalawan	6.840	5.000
	Desa Tumbang Banjang	Sungai Banjang	1.250	1.250
		Sungai Rait	5.200	4.000
	Desa Tumbang Lawang	Sungai Panya	2.350	2.500
	Desa Tewang Karangan	Sungai Kamapit	4.200	2.000
		Sungai Bawin	11.720	7.500
	Desa Garagu	Sungai Geragu	5.441	6.500
		Sungai Mantian 1	3.100	2.000
		Sungai Mantian 2	4.200	1.500
	Desa Tumbang Tungku	Sungai Tungku	10.040	
	Desa Tumbang Tanjung	Sungai Tanjung	10.050	1.000
		Sungai Kadarai	2.310	1.500
VIII.	KEC. KATINGAN TENGAH			
	Desa Tumbang Lahang	Sungai Lahang	8.100	2.500
		Sungai Biduh	2.400	
	Desa Tewang Panjang	Sungai Pahawei	6.500	5.000
	Desa Telok	Sungai Singa	4.500	3.227
	Desa Samba Bakumpai	Sungai Mare	1.650	1.650
		Sungai Labaning	2.200	1.560
		Sungai Undeng	2.000	1.680
	Desa Samba Danum	Sungau Su'un	5.350	3.125
IX.	KEC. SANAMAN MANTIKEI			
	Desa Tumbang Kaman	Sungai Kaman	10.000	
		Sungai Pesei	4.000	2.500
		Sungai Saki	8.5000	
	Desa Tumbang Labehu	Sungai Labehu	2.000	1.000
		Sungai Pana'an	10.000	3.000
	Desa Tumbang Manggu	Sei Kabirok	3.000	1.000
		Sungai Kambeo	1.245	
		Sungai Manggo	2.000	
		Sei Bahungai	3.000	
		Sungai Doho	780	
		Sei Panga	2.000	
		Sei Manyangan	3.000	
	Desa Kamanto	Sungai Patenei Hae	15.000	10.500
		Sungai Patenei Kurik	8.000	4.250
		Sei Kambe	2.000	
		Sei Keruh	2.000	
		Sei Kamanto	1.000	
		Sei Engan	3.000	
	Desa Habuhus	Sungai Talunei	25.000	20.000
	Desa Tumbang Kanei	Sei Balawei	10.000	7.000
	Desa Tumbang Pangka	Sungai Pangka	6.540	2.000
	Desa Tumbang Atei	Sei Mantikei	25.000	20.000
		Sungai Atei	17.250	2.500
		Sei Kucu	20.000	3.000
		Sei Gagu	2.000	1.000
		Sei Emban	8.000	2.000
		Sei Masilei	10.000	2.000
	Desa Tumbang Papi	Sungai Papie	1.200	

No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
		Sei Rawu	15.000	2.000
	Desa Taranei	Sei Taranei	5.000	2.000
	Desa Tumbang Manggara	Sei Manggara	2.000	1.500
		Sei Kabirum	2.000	750
X.	KEC. PETAK MALAI			
	Desa Tumbang Baraoi	Sungai Baraoi	27.823	25.000
		Sungai Samukah	6.310	
	Desa Tumbang Tangoi	Sei Tangoi	10.000	5.500
	Desa Tumbang Jala	Sungai Jala	5.000	3.000
	Desa Tumbang Habangoi	Sungai Habangoi	6.320	2.000
XI.	KEC. MARIKIT			
	Desa Tumbang Hiran	Sungai Hiran	12.500	12.000
	Desa Tumbang Bemban	Sungai Bemban	18.470	16.000
	Desa Tumbang Dakei	Sungai Dakei	2.470	
	Desa Tumbang Paku	Sungai Paku	9.720	
	Desa Tumbang Mandurei	Sungai Mandurei	5.360	
	Desa Tumbang Pahanei	Sungai Pahanei	1.390	
	Desa Pariyei	Sungai Parie	3.700	
XII.	KEC. KATINGAN HULU			
	Desa Tumbang Sanamang.	Sungai Sanamang	23.400	21.000
	Desa Tumbang Hangei II	Sungai Hangei II	13.200	5.000
	Desa Tumbang Mangketai	Sungai Mangketai	4.100	
	Desa Tumbang Manangei	Sungai Manangei	5.400	
	Desa Tumbang Mahop	Sungai Mahop	12.345	10.000
	Desa Tumbang Sabetung	Sungai Sabetung	3.800	1.500
XIII.	KEC. BUKIT RAYA			
	Desa Tumbang Kajamei	Sungai Kajamei	25.700	5.000
	Desa Tumbang Kaburai	Sungai Kaburai	4.520	
	Desa Tumbang Karuei	Sungai Karuei	32.000	7.500
	Desa Tumbang Gaei	Sungai Gaei	24.700	12.000
	Desa Tumbang Dahuei	Sungai Dahuei	13.500	
	Desa Tumbang Kataei	Sungai Kataei	3.100	

Sumber : Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPRHUB Kabupaten Katingan,2019

Selain sungai/anak sungai dalam tabel di atas, terdapat pula beberapa sungai/anak sungai lainnya yang masuk dalam wilayah daerah Kabupaten Katingan tapi belum dilakukan pendataan.

2.1.1.5. Klimatologi

Kelembaban merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap aktifitas organisme di alam. Kelembaban merupakan salah satu faktor ekologis yang mempengaruhi aktifitas organisme seperti penyebaran, keragaman harian, keragaman vertikal dan horizontal. Kelembaban udara juga

merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kondisi/keadaan cuaca dan iklim di suatu wilayah tertentu. Secara ilmiah, kelembaban merupakan jumlah kandungan uap air yang terkandung dalam massa udara pada suatu saat (waktu) dan wilayah (tempat) tertentu.

Rata-rata suhu terendah di Kabupaten Katingan pada Tahun 2017 berkisar 27,5 °C, sedangkan rata-rata suhu tertinggi 31,1 °C.

Tabel 2.4
Rata-Rata Suhu Udara dan Kelambaban Relatif Setiap Bulan
di Kabupaten Katingan Tahun 2017

Bulan	Suhu Udara (Celcius)			Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	
Januari	21,6	34,9	30,2	68
Februari	24,1	33,4	29,40	70
Maret	20,7	36,9	30,2	71
April	25,8	32,0	29,2	73,9
Mei	20,5	31,7	28,9	72,6
Juni	21,7	31,7	28,4	72,6
Juli	24,0	32,3	28,5	71,8
Agustus	25,7	32,2	28,9	71,1
September	25,1	33,0	29,8	66,3
Oktober	25,9	36,4	31,1	66,0
November	26,4	33,9	30,0	96,6
Desember	19,7	35,3	27,5	74,0

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Jadi, jumlah curah hujan yang diukur, sebenarnya adalah tebalnya atau tingginya permukaan air hujan yang menutupi suatu daerah luasan di permukaan bumi/tanah.

Pada Tahun 2017, Curah hujan terbesar pada Kabupaten Katingan terjadi di bulan November yaitu 475,5 (mm³), sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Agustus yaitu hanya 122,83 (mm³). untuk jumlah hujan, hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari yaitu selama 14 hari dan pada bulan November 15 hari sedangkan hujan tersedikit terjadi pada bulan Juni, yaitu hanya 5 hari saja.

Tabel 2.5
Rata-Rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan
di Kabupaten Katingan Tahun 2017

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hujan (hari)
Januari	271,82	14
Februari	122,83	7
Maret	287,84	9
April	172,8	9
Mei	185,3	10
Juni	126,5	5
Juli	139,4	7
Agustus	330,2	12
September	338,8	12
Oktober	275,3	10
November	475,5	15
Desember	209,6	6

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Sekitar ± 60 persen wilayah Kabupaten Katingan masih berupa hutan belukar dan hutan lebat. Secara keseluruhan tata guna lahan di wilayah Kabupaten Katingan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Luasan Tata Guna Lahan di Kabupaten Katingan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering primer	187.729,38	9,19
2	Hutan lahan kering sekunder	550.006,12	26,93
3	Hutan tanaman	7.217,58	0,35
4	Semak belukar	127.009,19	6,22
5	Perkebunan	68.077,45	3,33
6	Pemukiman	3.450,58	0,17
7	Tanah terbuka	40.467,89	1,98
8	Tubuh air	17.027,00	0,83
9	Hutan mangrove sekunder	5.337,10	0,26
10	Hutan rawa sekunder	475.023,29	23,26
11	Semak belukar rawa	251.234,79	12,30

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
12	Pertanian lahan kering	26.756,89	1,31
13	Pertanian lahan kering campur semak	190.869,11	9,35
14	Sawah	20.042,55	0,98
15	Transmigrasi	1.239,34	0,06
16	Tambang	26.222,84	1,28
17	Rawa	44.288,90	2,17
	Total	2.042.000,00	100,00

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Berdasarkan data dari Peta Ekoregion Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung di Kabupaten Katingan, termasuk kategori Sangat Tinggi sebesar 437.415,21 ha (21,46%), kategori Tinggi sebesar 1.302.322,84 ha (63,88%), kategori Sedang sebesar 94.385,39 (4,63%) dan kategori Rendah sebesar 204.624,73 ha (10,04%). Untuk sebaran wilayah kecamatan, daya dukung dan daya tampung dominan tersebar di wilayah utara seperti Kecamatan Sanaman Mantikei, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.

Tabel 2.7
Status Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup per Kecamatan

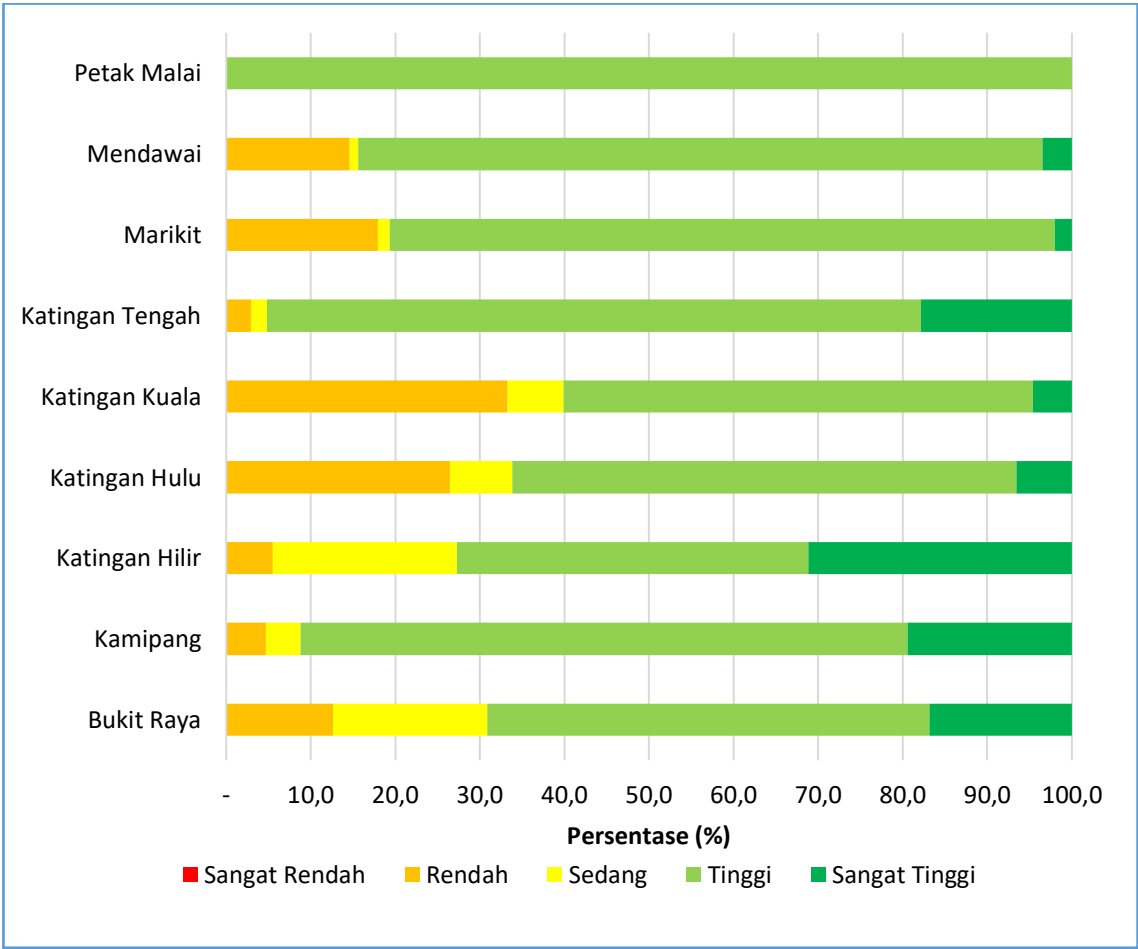
No.	Kecamatan	Sangat Rendah (ha)	Rendah (ha)	Sedang (ha)	Tinggi (ha)	Sangat Tinggi (ha)	Luas (ha)
1	Bukit Raya	-	12.709,31	18.305,43	52.497,42	16.906,76	100.418,92
2	Kamipang	-	13.415,17	11.621,07	204.699,78	55.372,92	285.108,93
3	Katingan Hilir	-	3.492,61	13.735,11	26.225,31	19.677,77	63.130,80
4	Katingan Hulu	-	38.568,34	10.804,11	86.938,31	9.565,55	145.876,30
5	Katingan Kuala	-	49.347,87	9.832,10	82.369,99	6.843,40	148.393,37
6	Katingan Tengah	-	4.750,16	3.160,99	126.252,55	29.196,57	163.360,26
7	Marikit	-	37.903,16	2.952,48	166.304,64	4.209,54	211.369,82
8	Mendawai	-	34.930,59	2.414,98	193.267,51	8.357,21	238.970,29
9	Petak Malai	-	-	37,97	165.900,18	-	165.938,15
10	Pulau Malan	-	5.105,32	4.190,22	33.790,61	21.652,87	64.739,02

No.	Kecamatan	Sangat Rendah (ha)	Rendah (ha)	Sedang (ha)	Tinggi (ha)	Sangat Tinggi (ha)	Luas (ha)
11	Sanaman Mantikei	-	-	3.730,75	74.333,22	199.101,35	277.165,32
12	Tasik Payawan	-	4.402,22	1.545,43	52.752,18	22.013,89	80.713,71
13	Tewang Sanggalang Garing	-	-	12.054,75	36.991,15	44.517,38	93.563,28
Luas Total		-	204.624,73	94.385,39	1.302.322,84	437.415,21	2.038.748,17
Persentase (%)		-	10,04	4,63	63,88	21,6	100,00

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

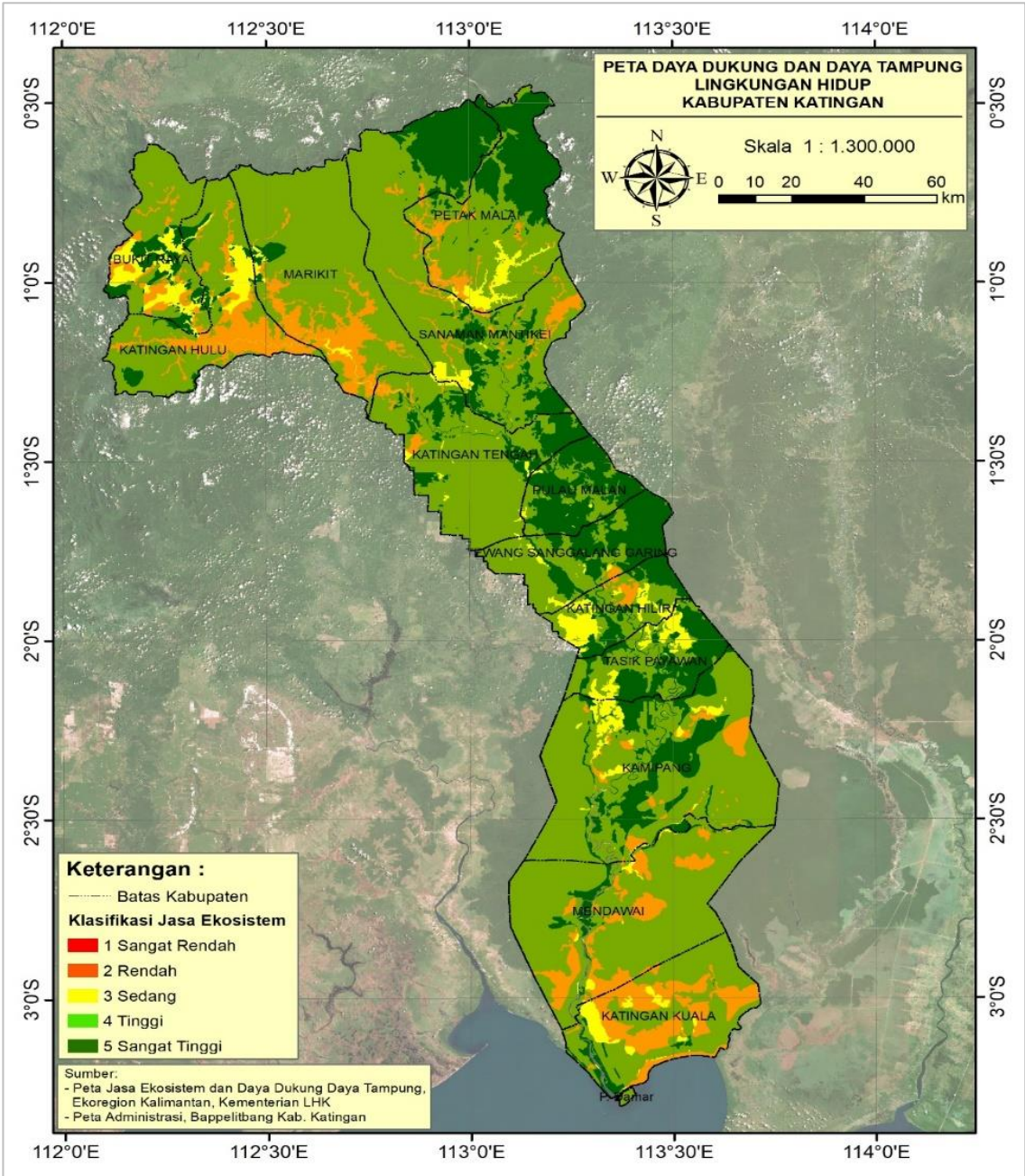
Daya dukung dan daya tampung masing-masing kecamatan di Kabupaten Katingan disajikan dalam bentuk grafik memperlihatkan bahwa pada umumnya berada pada kriteris tinggi yang ditandai dengan warna hijau muda.

Gambar 2.2 Persentase Daya Dukung dan Daya Daya Tampung



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi Hidrologi Kabupaten Katingan memiliki banyak sungai, secara umum pola sungainya adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS) maka puncak banjirnya akan demikian tinggi sehingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah–daerah yang ada disekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai.

Kawasan rawan bencana alam yang dimaksud dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 adalah kawasan rawan banjir dan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan. Analisis lanjut mengenai daerah rawan bencana diperoleh dari hasil KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023. Hal tersebut diuraikan berikut ini.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Katingan ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis. Potensi banjir di wilayah Kabupaten Katingan ditentukan oleh tiga hal, yaitu dikarenakan kondisi topografi, daya tampung debit air sungai oleh badan sungai dan curah hujan.

Berdasarkan kondisi topografis, wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi rendah yakni sebesar 74,77% dan kategori tinggi sebesar 25,23%. Wilayah Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Petak Malai dan Sanaman Mantikei merupakan daerah dengan potensi banjir rendah karena wilayah ini merupakan daerah hulu dan memiliki topografi yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan potensi banjir tinggi adalah Kecamatan Mendawai (78%), Katingan Kuala (70,1%) dan Kecamatan Kamipang (51,9%) yang merupakan daerah rawa dengan topografi rendah. Untuk potensi banjir lainnya disebabkan karena berkurangnya kemampuan badan sungai menampung debit air yang besar dikarenakan pendangkalan pada badan sungai akibat aktifitas PETI yang salah satunya banyak ditemukan pada segmen Sanamang-Marikit. Pendangkalan badan sungai ini ditandai dengan terbentuknya delta di tengah sungai yang merupakan tumpukan material akibat aktifitas PETI pada bagian *upstream* delta sehingga terjadi erosi pada bagian kiri dan kanan delta. Curah hujan yang tinggi (> 300 mm per bulan) juga berpotensi mengakibatkan banjir di DAS (Daerah Aliran Sungai), kondisi ini diperparah karena minimnya daerah tangkapan air yang antara lain disebabkan karena pembukaan lahan di sekitar areal DAS.

Tabel 2.8
Potensi Banjir Setiap Kecamatan

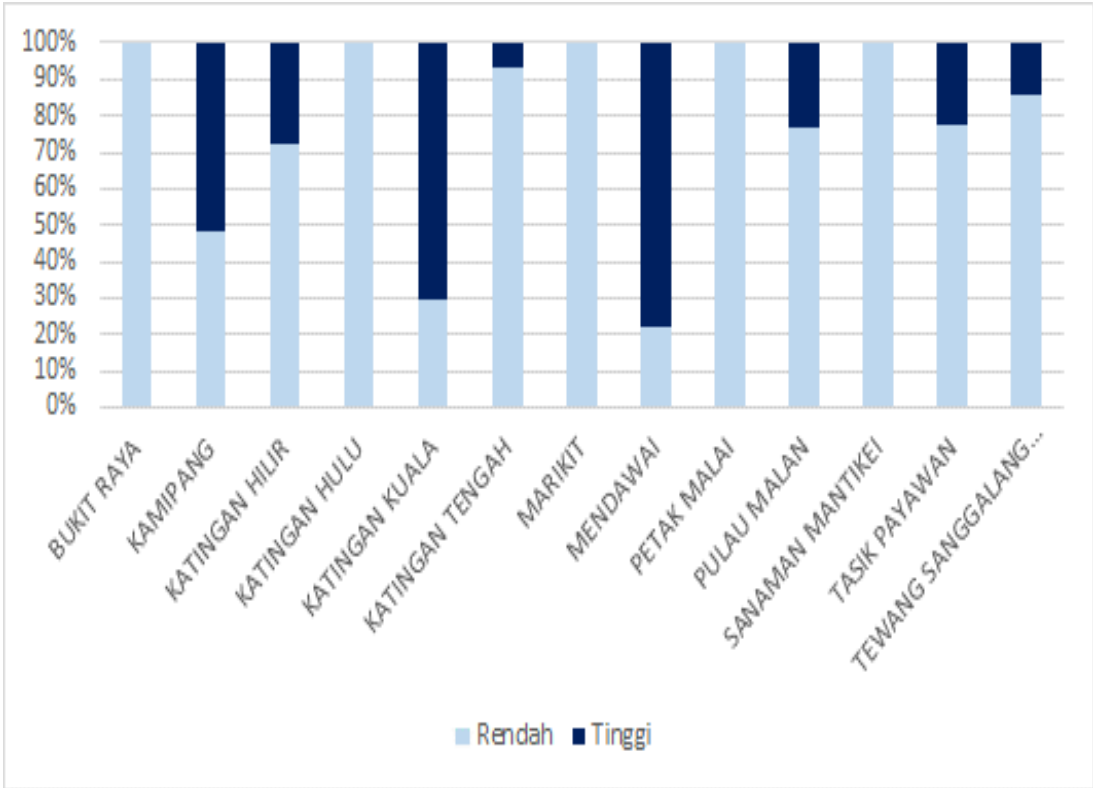
Kecamatan	Potensi Banjir		
	Rendah	Tinggi	Total
Bukit Raya	100419		100419
Kamipang	137199	147909	285109
Katingan Hilir	45397	17734	63131
Katingan Hulu	145876		145876
Katingan Kuala	44339	104033	148372
Katingan Tengah	151746	11614	163360
Marikit	211370		211370
Mendawai	52500	186471	238971
Petak Malai	165938		165938
Pulau Malan	49610	15129	64739

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Rendah	Tinggi	Total
Sanaman Mantikei	277165		277165
Tasik Payawan	62808	17906	80714
Tewang Sanggalang Garing	79983	13581	93563
Total	1524351	514377	2038727
Persentase	74,77	25,23	100,00

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

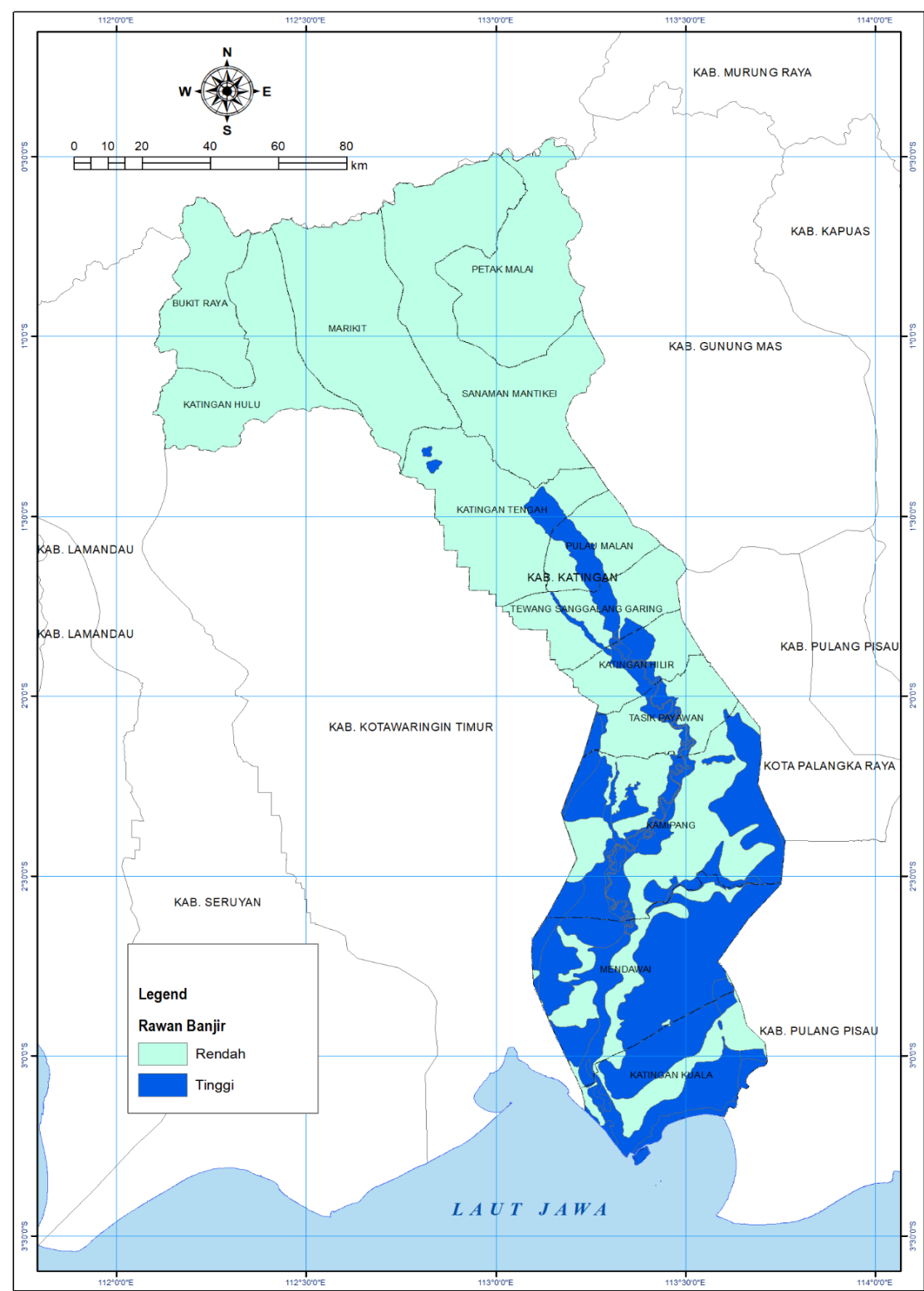
Pada umumnya, kecamatan di Katingan memiliki potensi banjir yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.4 Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Banjir



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.5 Peta Potensi Banjir



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Potensi kebakaran di Kabupaten Katingan dengan kategori rendah yakni sebesar 72,45%, sedang 19,5% dan kategori tinggi hanya sebesar 8%. Wilayah Kecamatan dengan kategori tinggi terdapat di Kecamatan Katingan Hilir (26,48%), Tewang Sanggalang Garing (26,37%) dan Tasik Payawan (25,09%) yang memiliki lahan semak belukar yang mudah terbakar. Tingkat kesulitan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan jenis lahan, tertinggi berada di wilayah lahan gambut di kecamatan Katingan Hilir, Tasik

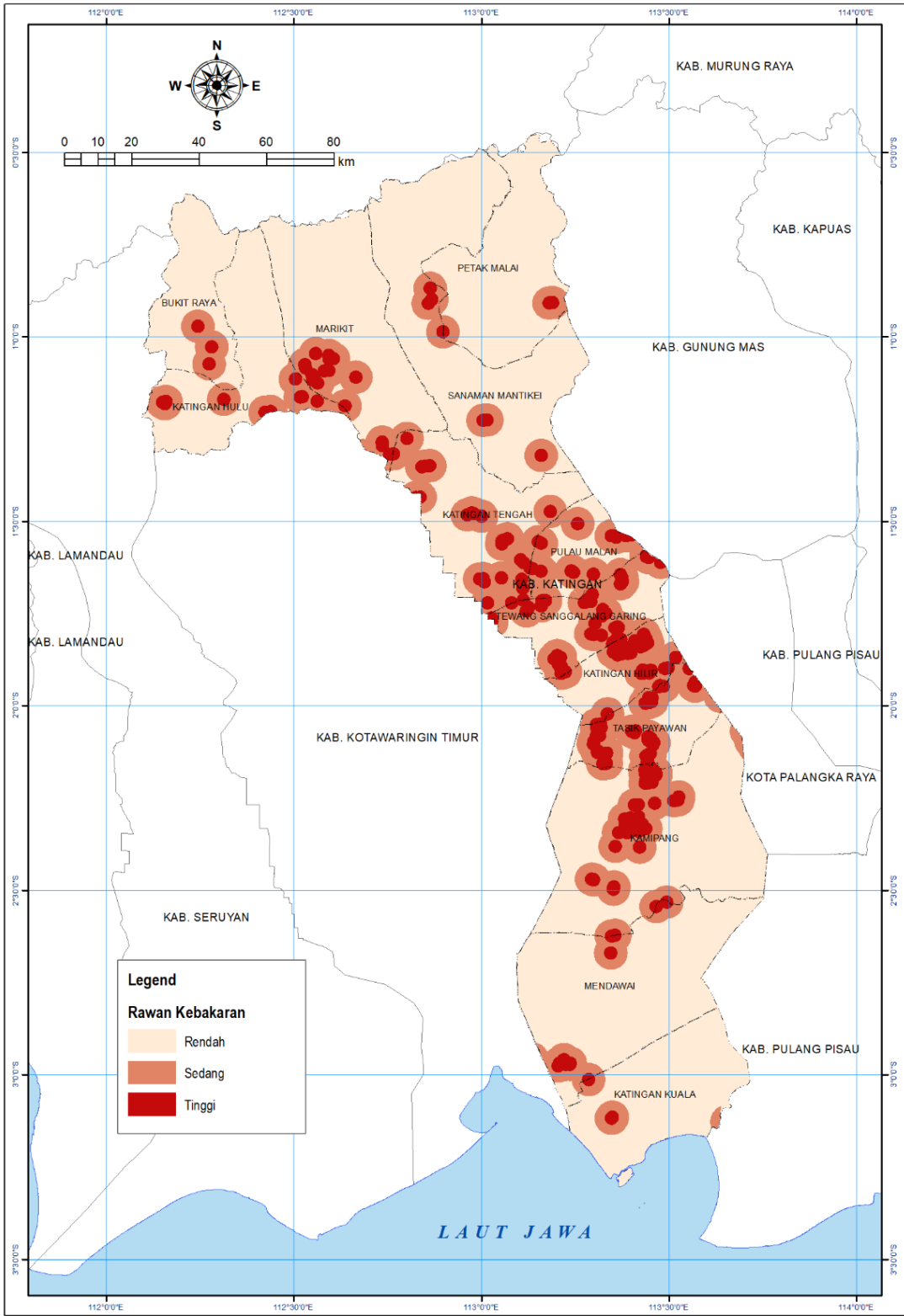
Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sedangkan terendah berada di lahan non gambut, yaitu pada Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing.

Tabel 2.9
Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan

Kecamatan	Potensi Kebakaran			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Bukit Raya	80622	16031	3766	100419
Kamipang	202109	58060	24940	285109
Katingan Hilir	21740	24673	16717	63131
Katingan Hulu	110071	27209	8596	145876
Katingan Kuala	134901	11305	2167	148372
Katingan Tengah	82879	58764	21717	163360
Marikit	168149	29474	13747	211370
Mendawai	210034	21727	7210	238970
Petak Malai	151556	12169	2213	165938
Pulau Malan	16251	37968	10519	64739
Sanaman Mantikei	245927	24556	6682	277165
Tasik Payawan	24347	36113	20254	80714
Tewang Sangalang Garing	28411	40483	24669	93563
Total	1476997	398532	163199	2038727
Persentase	72,45	19,55	8,00	100,00

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.6 Peta Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kebakaran



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

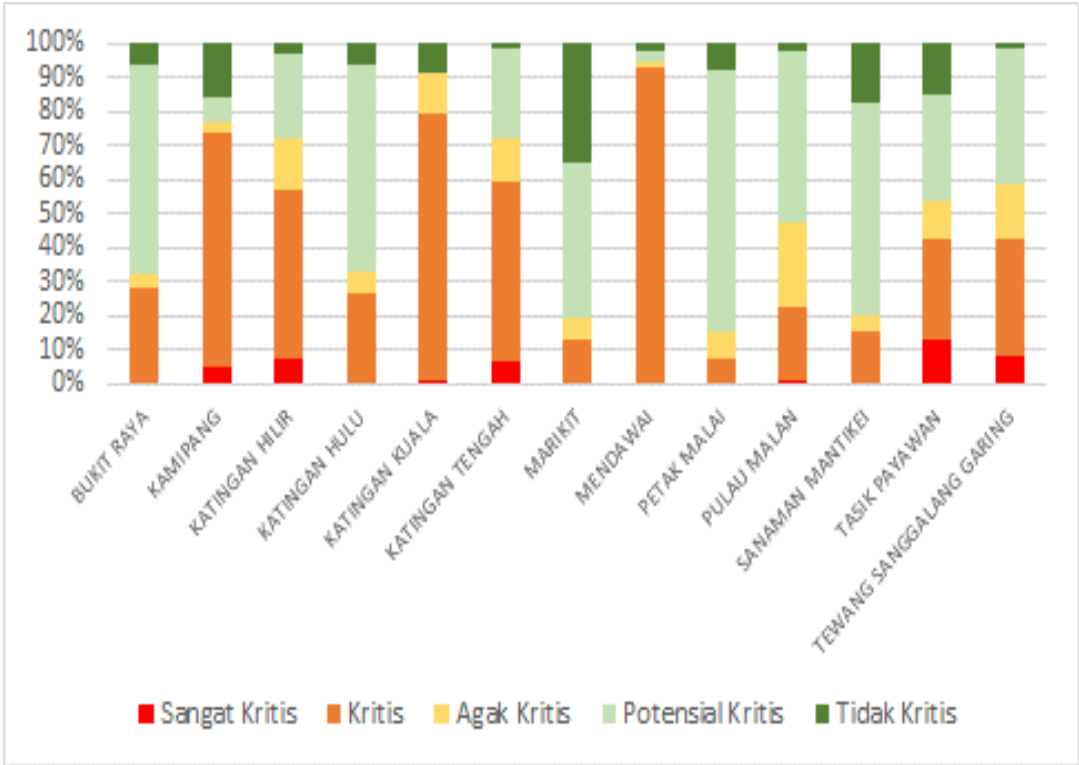
Potensi lahan kritis di Kabupaten Katingan yang merupakan daerah kritis yakni sebesar 42,69% dan kategori potensial kritis sebesar 35,82%. Wilayah Kecamatan dengan kategori potensi sangat kritis terdapat di Kecamatan Tasik Payawan (13,42) dan potensi kritis ada di Kecamatan Mendawai (92,86%), Katingan Kuala (78,68%) dan Kecamatan Kamipang (68,85%), sedangkan potensial kritis ada di Kecamatan Petak Melai (77,3%).

Tabel 2.10
Potensi Lahan Kritis Setiap Kecamatan

Kecamatan	Potensi					
	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Total
BUKIT RAYA	422	27983	4239	61383	6392	100419
KAMIPANG	14871	196298	8126	20750	45063	285109
KATINGAN HILIR	4492	31415	9805	15829	1590	63131
KATINGAN HULU	208	38301	10164	88115	9088	145876
KATINGAN KUALA	1125	116733	17928	403	12184	148372
KATINGAN TENGAH	11419	85234	21917	42275	2515	163360
MARIKIT	35	27788	12710	96659	74179	211371
MENDAWAI	1349	221918	2821	8095	4787	238970
PETAK MALAI	28	12039	13344	128278	12249	165938
PULAU MALAN	633	14070	15834	32700	1502	64739
SANAMAN MANTIKEI	188	42648	12765	173414	48150	277165
TASIK PAYAWAN	10835	23593	8892	25270	12124	80714
TEWANG SANGGALANG GARING	7664	32228	15371	37083	1217	93563
Total	53269	870247	153919	730254	231039	2038728
Persentase	2,61	42,69	7,55	35,82	11,33	100,00

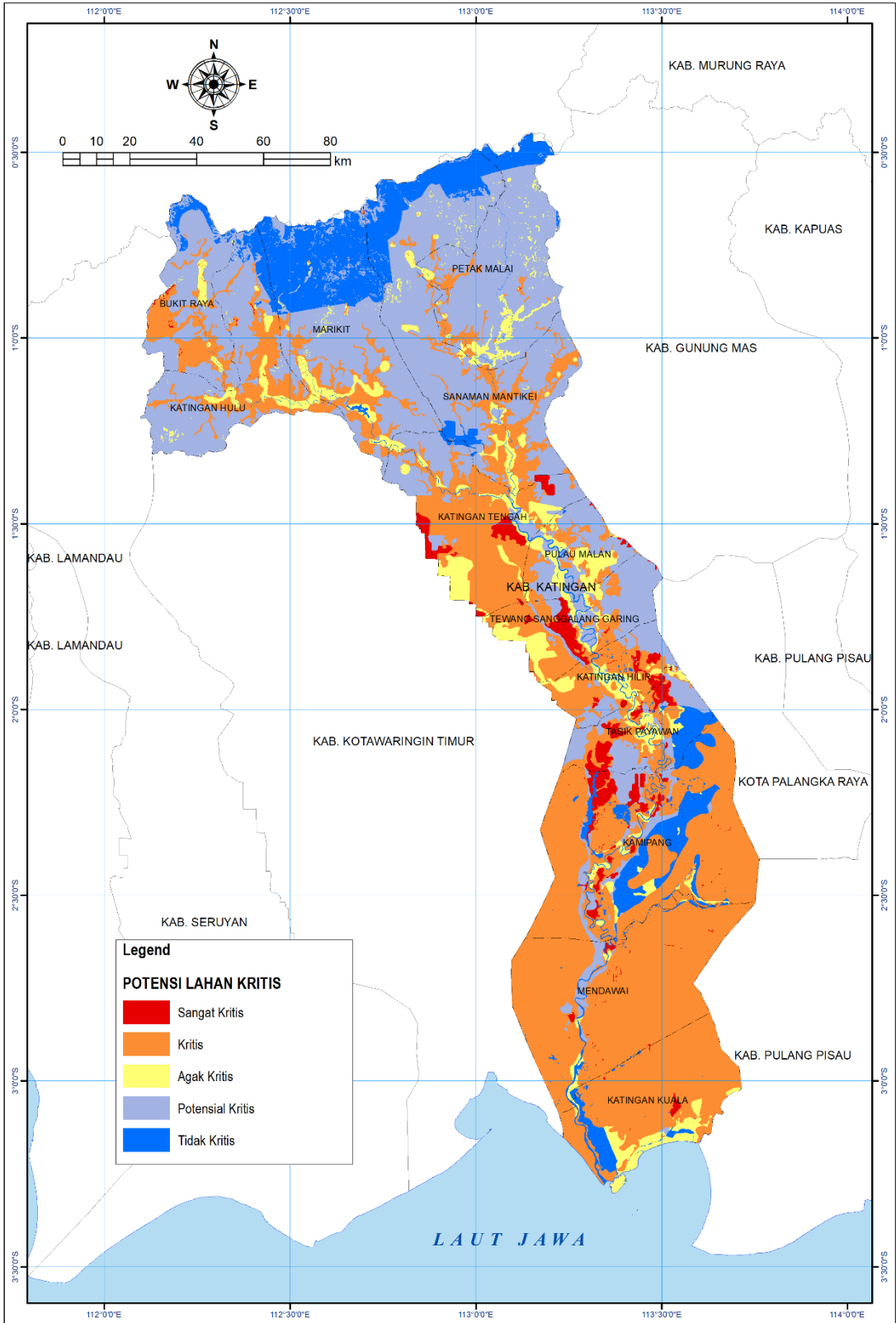
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.7 Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kritis



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.8 Potensi Lahan Kritis



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2.1.1.3. Demografi

Pada Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Katingan mencapai 165.306 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk penduduk pada periode 2012-2017 adalah 12,88 persen, sedangkan pada periode 2016-2017 adalah 1,52 persen. Jumlah penduduk tahun 2017 yang berjumlah 165.306 jiwa terdiri dari 86.648 penduduk laki-laki dan 78.658 penduduk perempuan. Angka ini

mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 berjumlah 152.724 jiwa (79.923 laki-laki dan 72.801 perempuan).

Sementara itu, ratio jenis kelamin pada Tahun 2017 sebesar 110, dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Katingan, setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 110 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2010-2017

KECAMATAN	PENDUDUK (jiwa)								LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010-2017	2016-2017
Katingan Kuala	19.488	19.997	19.948	20.085	20.291	20.461	20.610	20.745	6,45	0,66
Mendawai	3.810	3.909	3.899	3.926	3.967	4.006	4.036	4.064	6,67	0,69
Kamipang	6.269	6.433	6.416	6.460	6.528	6.592	6.642	6.687	6,67	0,68
Tasik Payawan	6.124	6.668	7.930	8.049	8.308	8.387	8.464	8.538	39,42	0,87
Katingan Hilir	30.688	31.489	31.923	32.745	33.297	34.184	35.083	35.979	17,24	2,55
Tewang Sangalang Garing	11.513	11.812	11.839	11.975	12.114	12.268	12.393	12.511	8,67	0,95
Pulau Malan	8.544	8.769	8.788	8.848	8.969	9.055	9.138	9.215	7,85	0,84
Katingan Tengah	28.281	29.012	29.399	30.229	31.014	31.874	32.714	33.554	18,65	2,57
Sanaman Mantikei	9.578	9.828	9.851	9.919	10.060	10.166	10.262	10.351	8,07	0,87
Petak Malai	3.751	3.848	3.861	3.887	3.942	3.981	4.019	4.054	8,08	0,87
Marikit	6.619	6.790	6.783	6.830	6.897	6.960	7.013	7.061	6,68	0,68
Katingan Hulu	8.050	8.261	8.261	8.297	8.382	8.456	8.518	8.575	6,52	0,67
Bukit Raya	3.724	3.826	3.826	3.852	3.885	3.915	3.945	3.972	6,66	0,68
Total	146.439	150.642	152.724	155.100	157.654	160.305	162.837	165.306	12,88	1,52

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2011 – 2018

Tabel 2.12

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Kecamatan	Penduduk (jiwa)												Rasio Jenis
	Laki-laki						Perempuan						Kelamin
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Katingan Kuala	10.351	10.428	10.539	10 706	10.706	10.779	9.597	9.657	9.752	9.904	9.904	9.966	108
Mendawai	2.013	2.029	2.050	2 087	2 087	2.101	1.886	1.897	1.917	1.949	1.949	1.963	107
Kamipang	3.302	3.325	3.362	3 421	3 421	3.445	3.114	3.135	3.166	3.221	3.221	3.242	106
Tasik Payawan	4.071	4.152	4.287	4 369	4 369	4.409	3.859	3.897	4.021	4.095	4.095	4.129	107
Katingan Hilir	16.616	17.050	17.345	18 293	18 293	18.766	15.307	15.695	15.952	16.790	16.790	17.213	109
Tewang Sangalang Garing	6.172	6.245	6.320	6.466	6.466	6.530	5.667	5.730	5.794	5.927	5.927	5.981	109
Pulau Malan	4.487	4.523	4.587	4 673	4 673	4.715	4.301	4.325	4.382	4.465	4.465	4.500	105
Katingan Tengah	15.653	16.088	16.514	17 423	17 423	17.876	13.746	14.139	14.500	15.291	15.291	15.678	114
Sanaman Mantikei	5.183	5.219	5.296	5 403	5 403	5.452	4.668	4.700	4.764	4.859	4.859	4.899	111
Petak Malai	2.089	2.104	2.135	2.177	2.177	2.196	1.772	1.783	1.807	1.842	1.842	1.858	118
Marikit	3.546	3.576	3.613	3.674	3.674	3.700	3.237	3.254	3.284	3.339	3.339	3.361	110
Katingan Hulu	4.332	4.342	4.388	4.460	4.460	4.492	3.929	3.955	3.994	4.058	4.058	4.083	110
Bukit Raya	2.108	2.119	2.139	2.173	2.173	2.187	1.718	1.733	1.746	1.772	1.772	1.785	23
Kabupaten Katingan	79.923	81.200	82.575	85.325	85.325	86.648	72.801	73.900	75.079	77.512	77 512	78.658	110

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2013 – 2018

Penduduk terbanyak pada 2017 berada di Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 35.979 jiwa (18.766 laki-laki dan 17.213 perempuan), diikuti dengan Kecamatan Katingan Tengah dan Katingan Kuala masing-masing sebesar 33.554 jiwa dan 20.745 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Mendawai yaitu 4.064 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Katingan pada Tahun 2016 berkisar 8,10 Jiwa/Km². Tingkat kepadatan terbesar terdapat di Kecamatan Katingan Hilir, yaitu sebesar 54 Jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Katingan Tengah sebesar 21 jiwa/Km². Sedangkan yang rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Mendawai, Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Petak Malai yaitu 2 jiwa/Km².

Tabel 2.13
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2017

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km	%	Jumlah	%	
Katingan Kuala	1.484,81	7,27	20.745	12,55	14
Mendawai	2.391,5801	11,72	4.064	2,46	2
Kamipang	2.854,27	13,98	6.687	4,05	2
Tasik Payawan	808,12201	3,96	8.538	5,16	11
Katingan Hilir	665,21802	3,26	35.979	21,77	54
Tewang Sangalang Garing	903,39301	4,43	12.511	7,57	14
Pulau Malan	647,47601	3,17	9.215	5,57	14
Katingan Tengah	1.635,65	8,01	33.554	20,30	21
Sanaman Mantikei	2.772,3799	13,58	10.351	6,26	4
Petak Malai	1.661,65	8,14	4.054	2,45	2
Marikit	2.117,3601	10,37	7.061	4,27	3
Katingan Hulu	1.461,27	7,16	8.575	5,19	6
Bukit Raya	1.007,72	4,94	3.972	2,40	4
Kabupaten Katingan	20.410,90	100	165.306	100	8,10

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018

Selain data kependudukan dari BPS sebagaimana telah disajikan diatas, terdapat juga data kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 169.771 jiwa. Ini berarti terdapat pertambahan penduduk dari tahun sebelumnya

yang berjumlah 167.949 jiwa. Dari jumlah penduduk 167.771 tahun 2017, paling banyak berumur 0-4 tahun yaitu 17.218 jiwa. Selanjutnya diikuti dengan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 15.728 jiwa. Sedangkan penduduk dengan kelompok umur paling sedikit yaitu pada umur 75+ tahun keatas yaitu 1.477 jiwa.

Ditinjau berdasarkan kelompok umur, dalam lima tahun terakhir ini kelompok usia antara 0 tahun sampai 34 tahun memiliki jumlah terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek penambahan jumlah penduduk usia produktif. Berikut rincian perkembangan jumlah penduduk Katingan menurut kelompok Usia.

Tabel 2.14
Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan
Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk (orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 4	17,010	17,076	17,231	17,218	17,189
0 - 5	15,677	15,727	15,669	15,728	15,783
10 - 14	15,165	15,233	15,360	15,414	15,492
15 - 19	14,219	14,200	14,203	14,273	14,294
20 - 24	14,026	14,023	13,983	13,955	13,933
25 - 29	14,202	14,276	14,366	14,420	14,461
30 - 34	14,100	14,266	14,398	14,531	14,627
35 - 39	12,897	13,240	13,469	13,641	13,824
40 - 44	10,809	11,240	11,764	12,265	12,706
45 - 49	8,273	8,673	9,086	9,507	9,931
50 - 54	6,089	6,406	6,751	7,086	7,438
55 - 59	4,636	4,936	5,236	5,556	5,870
60 - 64	3,185	3,394	3,630	3,881	4,158
65 - 69	2,023	2,136	2,268	2,391	2,528
70 - 74	1,373	1,401	1,437	1,494	1,563
75+	1,416	1,427	1,454	1,477	1,509
Jumlah	155,100	157,654	160,305	162,837	165,306

Sumber : Katingan Dalam Angka 2014-2018, BPS Kab. Katingan 2018

Informasi mengenai kependudukan lainnya yang dapat disajikan yaitu jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Katingan pada Tahun 2017. Data ini memberikan informasi mengenai pekerjaan utama penduduk Katingan. Selain itu dapat diketahui juga jenis kelamin penduduk yang bekerja untuk masing-masing lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2017 penduduk Katingan pada umumnya bekerja di lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Sebanyak 29.318 jiwa atau 39,51 persen penduduk Katingan yang bekerja di lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Penduduk yang

bekerja di lapangan kerja tersebut didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 20.236 jiwa.

Setelah lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, maka lapangan kerja lain yang diminati oleh penduduk Katingan adalah Sektor Perdagangan, Rumah Tangga dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 19,37 persen dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebanyak 16,61 persen. Sedangkan lapangan usaha yang paling sedikit diminati yaitu Listrik, Air dan Gas yang hanya 0,19 persen.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2017

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	20.236	9.082	29.318	39,51
Pertambangan dan Penggalian	7.100	261	7.361	9,92
Industri Pengolahan	1.854	1.338	3.192	4,30
Listrik, Air dan Gas	144	0	144	0,19
Konstruksi	4.095	100	4.195	5,65
Perdagangan, Rumah Tangga dan Jasa Akomodasi	5.869	8.508	14377	19,38
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.504	122	2.626	3,54
Lembaga Keuangan, Real Estate, Jasa persewaan, dan Jasa Perusahaan	294	370	664	0,89
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	6.567	5.756	12.323	16,61
Jumlah	48.663	25.537	74.200	100%

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus, BPS, 2018

2.1.4. Potensi Sumber Daya

Potensi sumber daya di Kabupaten Katingan diambil dari kajian kinerja layanan atau jasa ekosistem yang dianalisis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya meliputi:

- 1 Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air, dll.

- 2 Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*) : Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll.
- 3 Layanan/fungsi budaya (*cultural services*): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- 4 Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Diasumsikan semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya. Adapun hasil analisis penyediaan jasa ekosistem di Kabupaten Katingan diperlihatkan pada uraian dibawah ini:

1. Layanan/Fungsi Penyedia (*Provisioning Services*)

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia.

Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Ekosistem juga menyediakan serat alami yang dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun proses geologis. Serat yang berasal dari sumber tersebut dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral, seperti logam dan karbon.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif yang berasal dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu, ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi.

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentangalam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Setiap Kecamatan disajikan pada tabel dibawah ini.

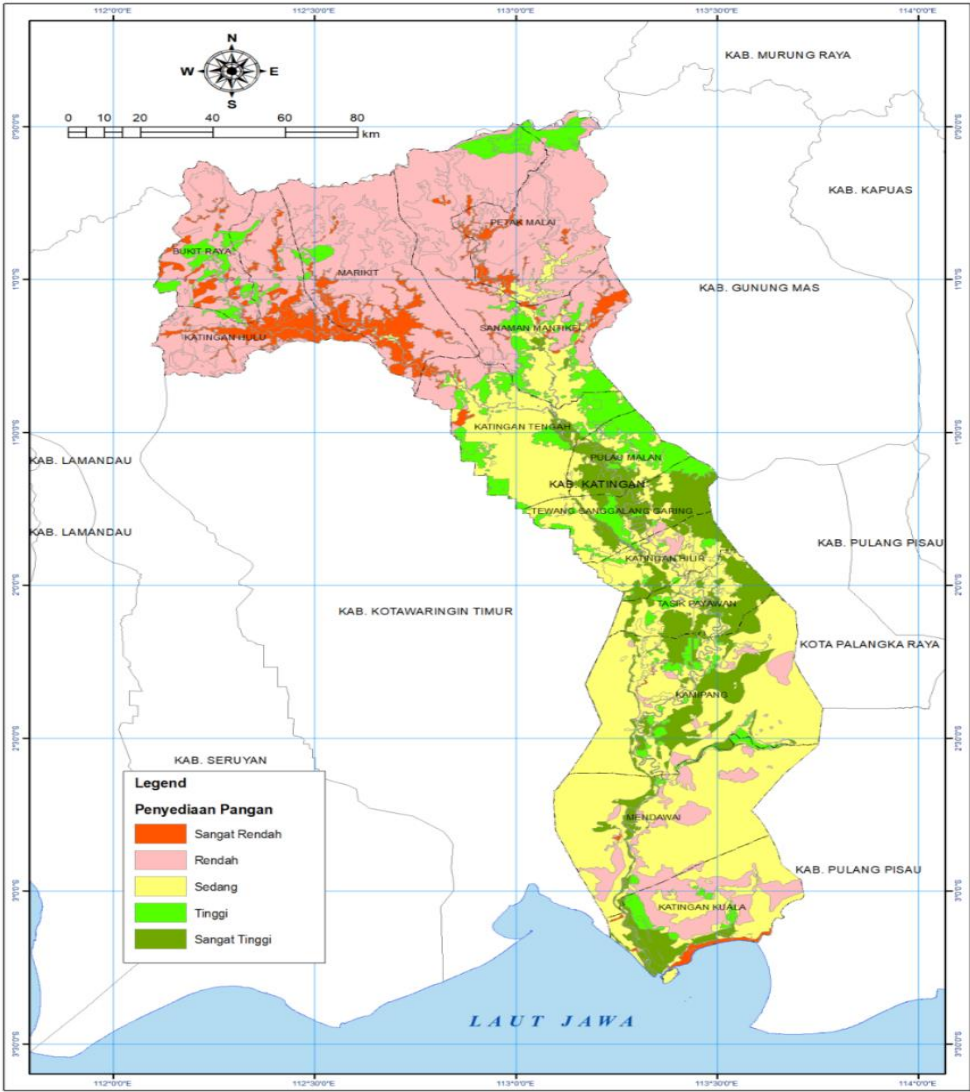
Tabel 2.16
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	12706	9,9	70591	9,2	82	0,0	17041	8,9	0	0,0
2	Kamipang	387	0,3	12966	1,7	202080	27,7	13165	6,9	56511	25,9
3	Katingan Hilir	20	0,0	3473	0,5	36467	5,0	3491	1,8	19680	9,0
4	Katingan Hulu	38564	30,1	100649	13,0	397	0,1	6267	3,3	0	0,0
5	Katingan Kuala	5367	4,2	42832	5,6	69213	9,5	9277	4,8	21684	9,9
6	Katingan Tengah	4747	3,7	21793	2,8	92603	12,7	38372	20,0	5846	2,7
7	Marikit	37907	29,6	167688	21,7	1567	0,2	4207	2,2	0	0,0
8	Mendawai	278	0,2	34288	4,4	189012	25,9	3963	2,1	11430	5,2
9	Petak Malai	13081	10,2	131113	17,0	10969	1,5	10776	5,6	0	0,0
10	Pulau Malan	0	0,0	0	0,0	17288	2,4	25125	13,1	22326	10,2
11	Sanaman Mantikei	15123	11,8	184872	24,0	34554	4,7	40094	20,9	2523	1,2
12	Tasik Payawan	0	0,0	0	0,0	38746	5,3	3559	1,9	38409	17,6

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
13	Tewang Sanggalang Garing	0	0,0	1103	0,1	35722	4,9	16852	8,8	39886	18,3
KATINGAN		128178	100	771367	100	728699	100	192189	100	218293	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.9 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.17

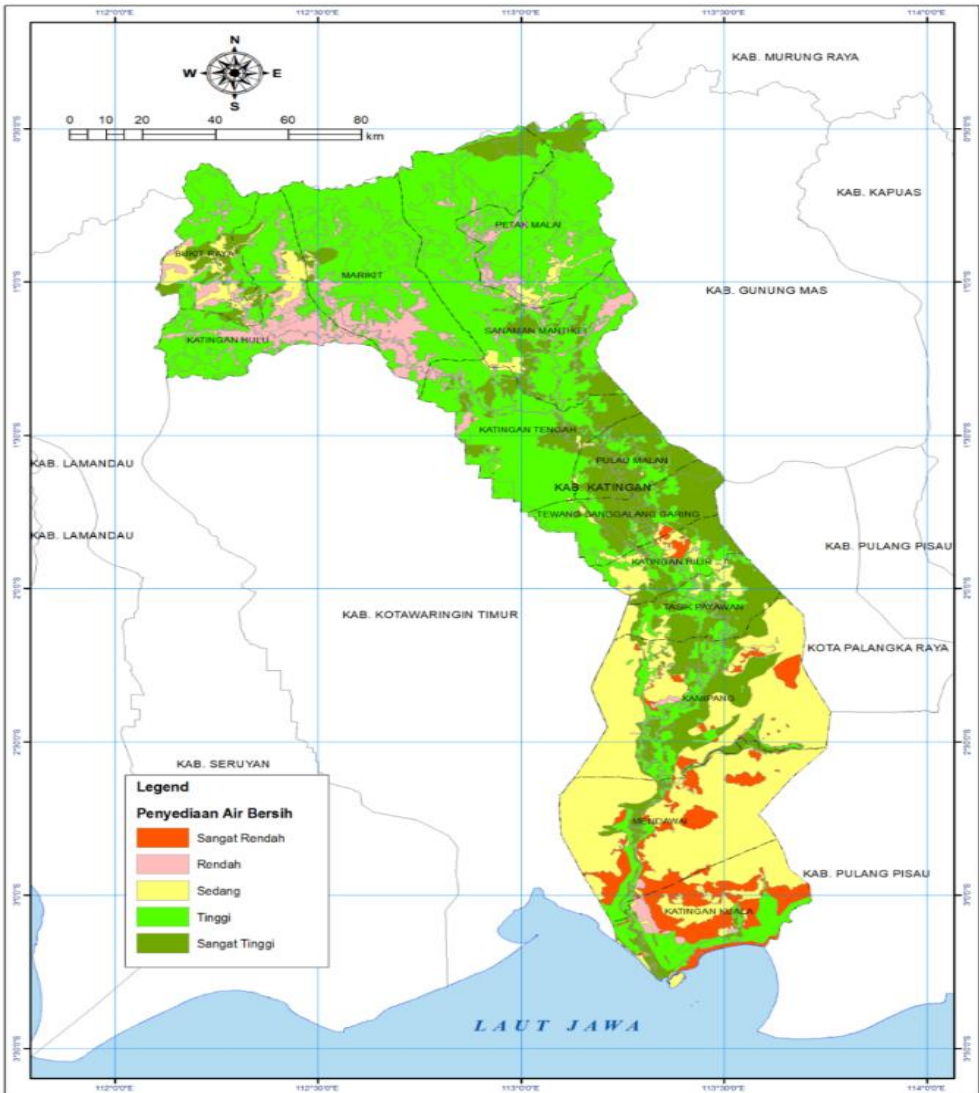
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Bukit Raya	13	0,0	12695	9,7	18304	3,9	52365	5,4	17041	4,6
2	Kamipang	13353	13,2	1244	0,9	167180	35,3	36731	3,8	66601	18,1

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
3	Katingan Hilir	3493	3,4	0	0,0	16630	3,5	20896	2,2	22112	6,0
4	Katingan Hulu	185	0,2	38393	29,3	10439	2,2	90592	9,4	6267	1,7
5	Katingan Kuala	48199	47,6	5989	4,6	48737	10,3	35927	3,7	9519	2,6
6	Katingan Tengah	103	0,1	5188	4,0	2451	0,5	121917	12,6	33701	9,1
7	Marikit	125	0,1	38716	29,5	1411	0,3	166910	17,3	4207	1,1
8	Mendawai	34565	34,1	787	0,6	174391	36,8	15295	1,6	13933	3,8
9	Petak Malai	34	0,0	13046	10,0	10159	2,1	131923	13,7	10776	2,9
10	Pulau Malan	0	0,0	0	0,0	871	0,2	16606	1,7	47262	12,8
11	Sanaman Mantikei	117	0,1	15005	11,4	5279	1,1	214321	22,2	42442	11,5
12	Tasik Payawan	0	0,0	0	0,0	14827	3,1	23919	2,5	41968	11,4
13	Tewang	1103	1,1	0	0,0	3067	0,6	36535	3,8	52858	14,3
	Sanggalang Garing										
KATINGAN		101291	100	131064	100	473747	100	963938	100	368687	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.10 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.18

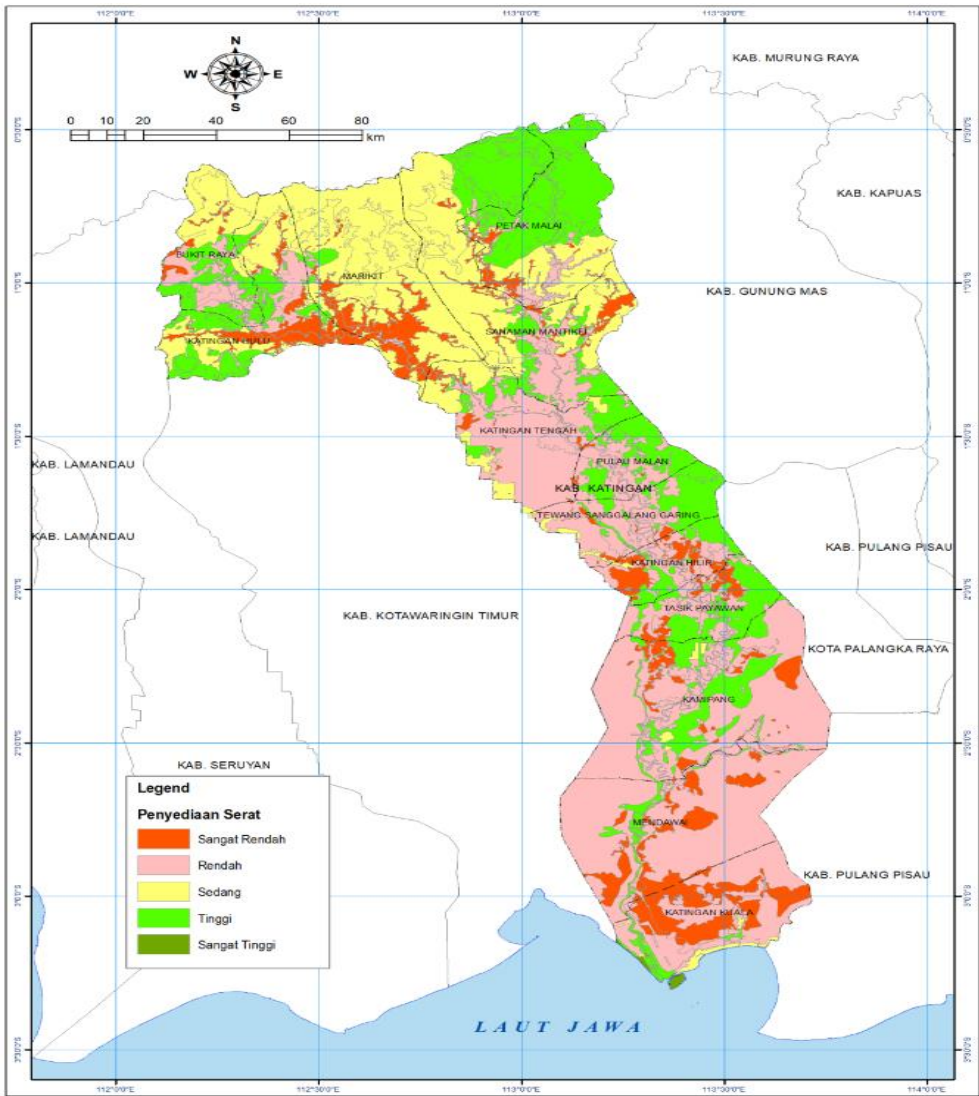
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem

Penyediaan Serat Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyediaan Serat									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat tinggi	
		luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%
1	Bukit Raya	4853	2,0	26373	3,2	40103	8,2	29090	6,1	0	0,0
2	Kamipang	20500	8,5	209638	25,2	3075	0,6	51896	10,9	0	0,0
3	Katingan Hilir	16931	7,0	27653	3,3	764	0,2	17783	3,7	0	0,0
4	Katingan Hulu	30050	12,5	19349	2,3	53654	11,0	42822	9,0	0	0,0
5	Katingan Kuala	48294	20,0	82975	10,0	6418	1,3	7852	1,7	2833	100,0
6	Katingan Tengah	6419	2,7	101774	12,2	31765	6,5	23402	4,9	0	0,0
7	Marikit	38503	16,0	2315	0,3	165829	34,0	4722	1,0	0	0,0
8	Mendawai	35655	14,8	192771	23,2	0	0,0	10544	2,2	0	0,0
9	Petak Malai	10444	4,3	13606	1,6	43872	9,0	98017	20,7	0	0,0
10	Pulau Malan	871	0,4	31192	3,7	135	0,0	32541	6,9	0	0,0
11	Sanaman Mantikei	14741	6,1	37459	4,5	138801	28,4	86165	18,2	0	0,0
12	Tasik Payawan	10396	4,3	33373	4,0	0	0,0	36945	7,8	0	0,0
13	Tewang Sanggalang Garing	3336	1,4	53785	6,5	3666	0,8	32776	6,9	0	0,0
KATINGAN		240993	100	832262	100	488084	100	474555	100	2833	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.11 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

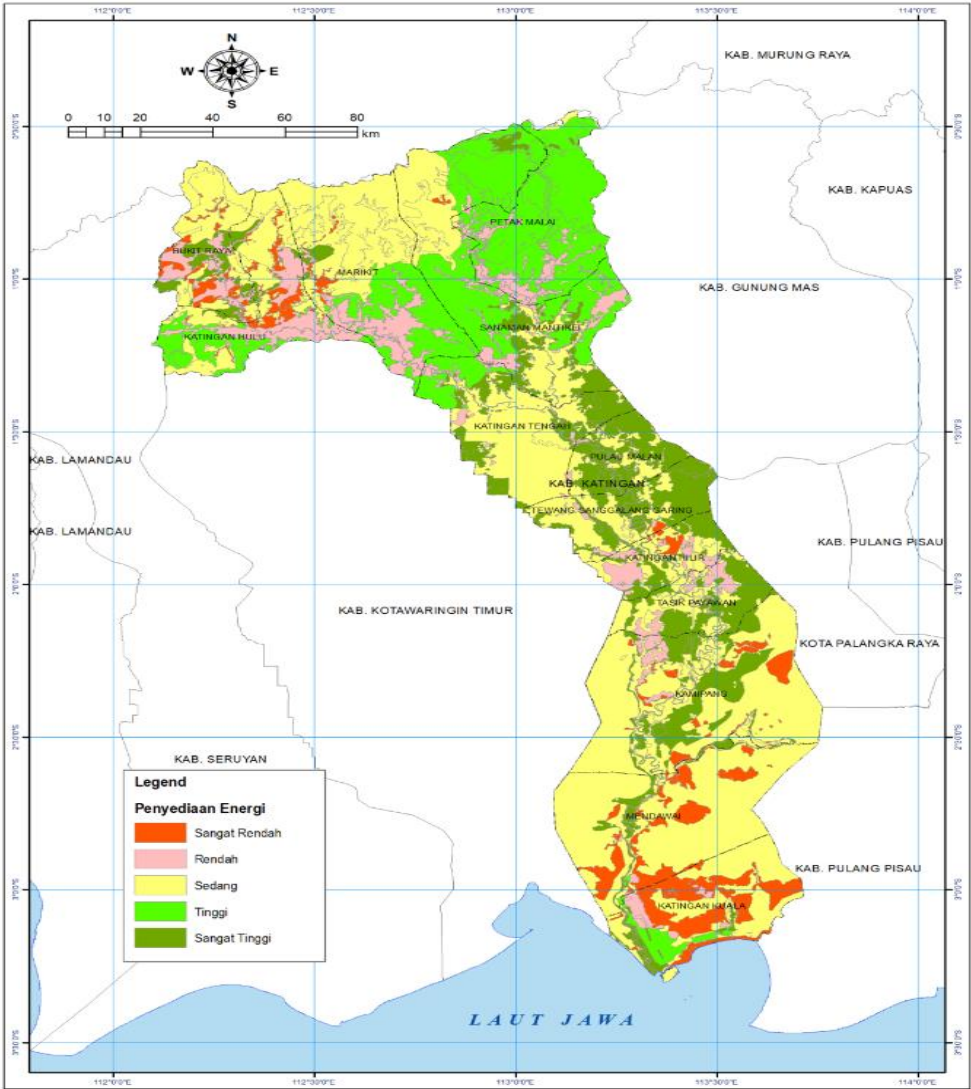
Tabel 2.19
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyediaan Energi									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%
1	Bukit Raya	4853	2,0	26373	3,2	40103	8,2	29090	6,1	0	0,0
2	Kamipang	20500	8,5	209638	25,2	3075	0,6	51896	10,9	0	0,0
3	Katingan Hilir	16931	7,0	27653	3,3	764	0,2	17783	3,7	0	0,0
4	Katingan Hulu	30050	12,5	19349	2,3	53654	11,0	42822	9,0	0	0,0
5	Katingan Kuala	48294	20,0	82975	10,0	6418	1,3	7852	1,7	2833	100,0
6	Katingan Tengah	6419	2,7	101774	12,2	31765	6,5	23402	4,9	0	0,0
7	Marikit	38503	16,0	2315	0,3	165829	34,0	4722	1,0	0	0,0

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyediaan Energi									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%	luas (ha)	%
8	Mendawai	35655	14,8	192771	23,2	0	0,0	10544	2,2	0	0,0
9	Petak Malai	10444	4,3	13606	1,6	43872	9,0	98017	20,7	0	0,0
10	Pulau Malan	871	0,4	31192	3,7	135	0,0	32541	6,9	0	0,0
11	Sanaman Mantikei	14741	6,1	37459	4,5	138801	28,4	86165	18,2	0	0,0
12	Tasik Payawan	10396	4,3	33373	4,0	0	0,0	36945	7,8	0	0,0
13	Tewang Sanggalang Garing	3336	1,4	53785	6,5	3666	0,8	32776	6,9	0	0,0
KATINGAN		240993	100	832262	100	488084	100	474555	100	2833	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.12 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Energi



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.20

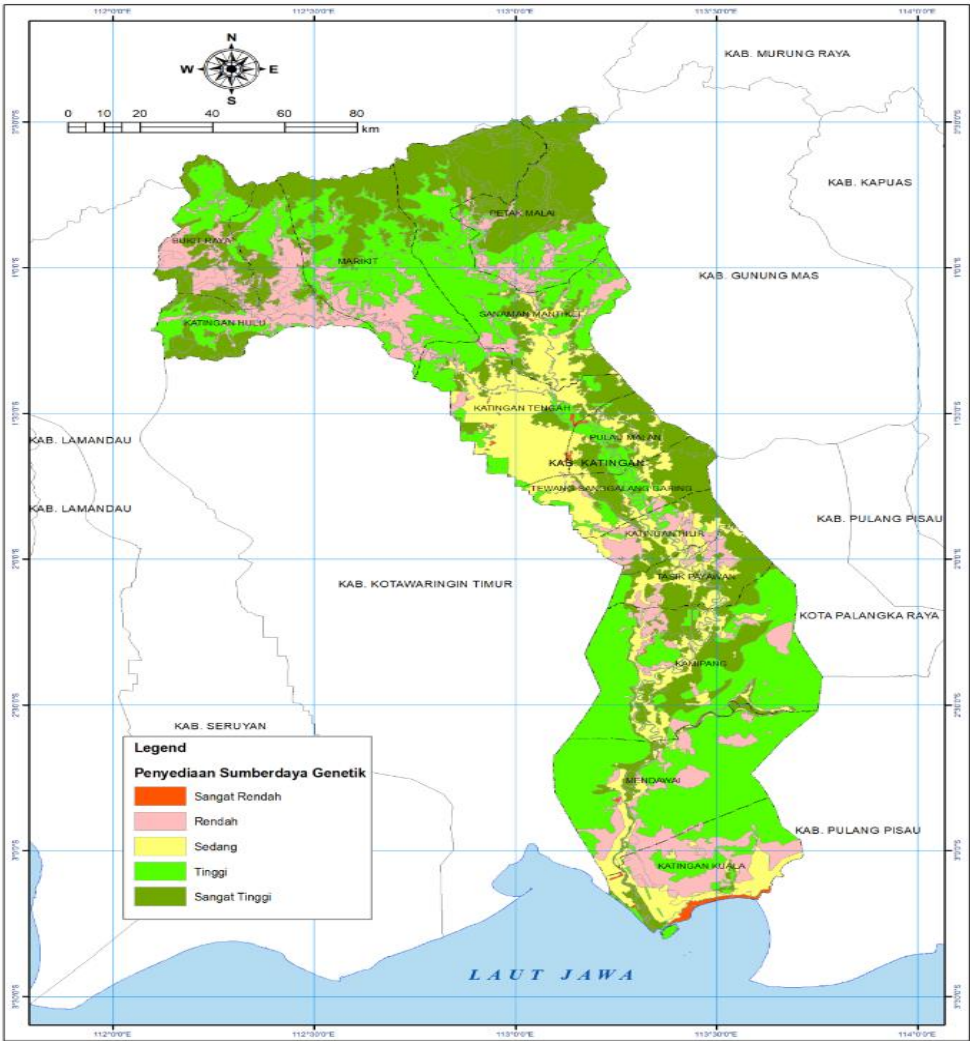
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Penyediaan

Sumberdaya Genetik Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Bukit Raya	17	0,2	30996	10,0	79	0,0	27649	3,5	41678	6,8
2	Kampiang	511	5,2	21233	6,9	36590	11,9	164789	20,7	61986	10,1
3	Katingan Hilir	27	0,3	17198	5,6	20131	6,5	5559	0,7	20215	3,3
4	Katingan Hulu	199	2,0	49186	15,9	14	0,0	44128	5,5	52349	8,5
5	Katingan Kuala	5680	57,7	50426	16,3	36516	11,9	47064	5,9	8687	1,4
6	Katingan Tengah	1502	15,2	6406	2,1	90931	29,6	37069	4,6	27453	4,5
7	Marikit	125	1,3	40734	13,2	0	0,0	109005	13,7	61506	10,0
8	Mendawai	372	3,8	35282	11,4	16551	5,4	173044	21,7	13720	2,2
9	Petak Malai	34	0,3	23771	7,7	15	0,0	43753	5,5	98364	16,0
10	Pulau Malan	769	7,8	102	0,0	16417	5,3	14431	1,8	33020	5,4
11	Sanaman Mantikei	364	3,7	20065	6,5	33638	10,9	108566	13,6	114531	18,6
12	Tasik Payawan	47	0,5	10348	3,3	23922	7,8	5892	0,7	40504	6,6
13	T Sanggalang Garing	201	2,0	3349	1,1	32869	10,7	16596	2,1	40549	6,6
KATINGAN		9850	100	309097	100	307673	100	797545	100	614562	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.13 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2. Layanan/Fungsi Pengatur (Regulating Services)

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

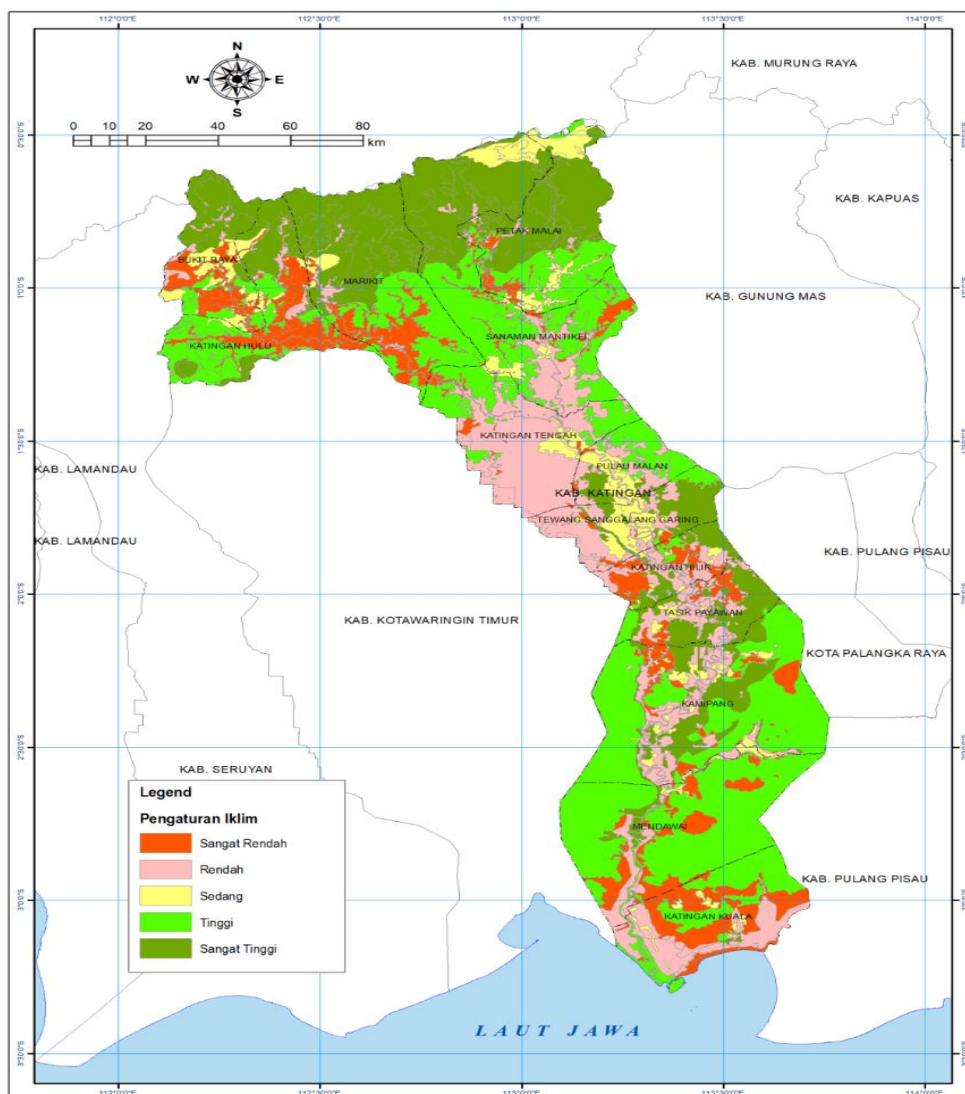
Hasil analisis Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan disajikan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem
Pengaturan Iklim Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN IKLIM									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	26177	9,7	5049	1,4	16907	11,9	12199	1,6	40087	7,7
2	Kamipang	20265	7,5	42590	11,7	13260	9,4	157098	21,2	51896	10,0
3	Katingan Hilir	16930	6,3	22153	6,1	3366	2,4	3199	0,4	17482	3,4
4	Katingan Hulu	43375	16,1	6024	1,7	6267	4,4	52520	7,1	37690	7,2
5	Katingan Kuala	48288	17,9	42140	11,6	5096	3,6	52064	7,0	784	0,2
6	Katingan Tengah	6253	2,3	103526	28,4	9876	7,0	43664	5,9	42	0,0
7	Marikit	35193	13,1	5599	1,5	4275	3,0	58238	7,8	108066	20,8
8	Mendawai	34824	12,9	16278	4,5	4492	3,2	175333	23,6	8043	1,5
9	Petak Malai	9801	3,6	3846	1,1	21178	15,0	44955	6,1	86159	16,5
10	Pulau Malan	871	0,3	18103	5,0	13225	9,3	24234	3,3	8306	1,6
11	Sanaman Mantikei	13841	5,1	35885	9,8	21104	14,9	108772	14,6	97563	18,7
12	Tasik Payawan	10396	3,9	25383	7,0	3562	2,5	4428	0,6	36945	7,1
13	Tewang Sanggalang Garing	3336	1,2	37801	10,4	19030	13,4	5820	0,8	27577	5,3
KATINGAN		269550	100	364377	100	141636	100	742525	100	520640	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.14 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

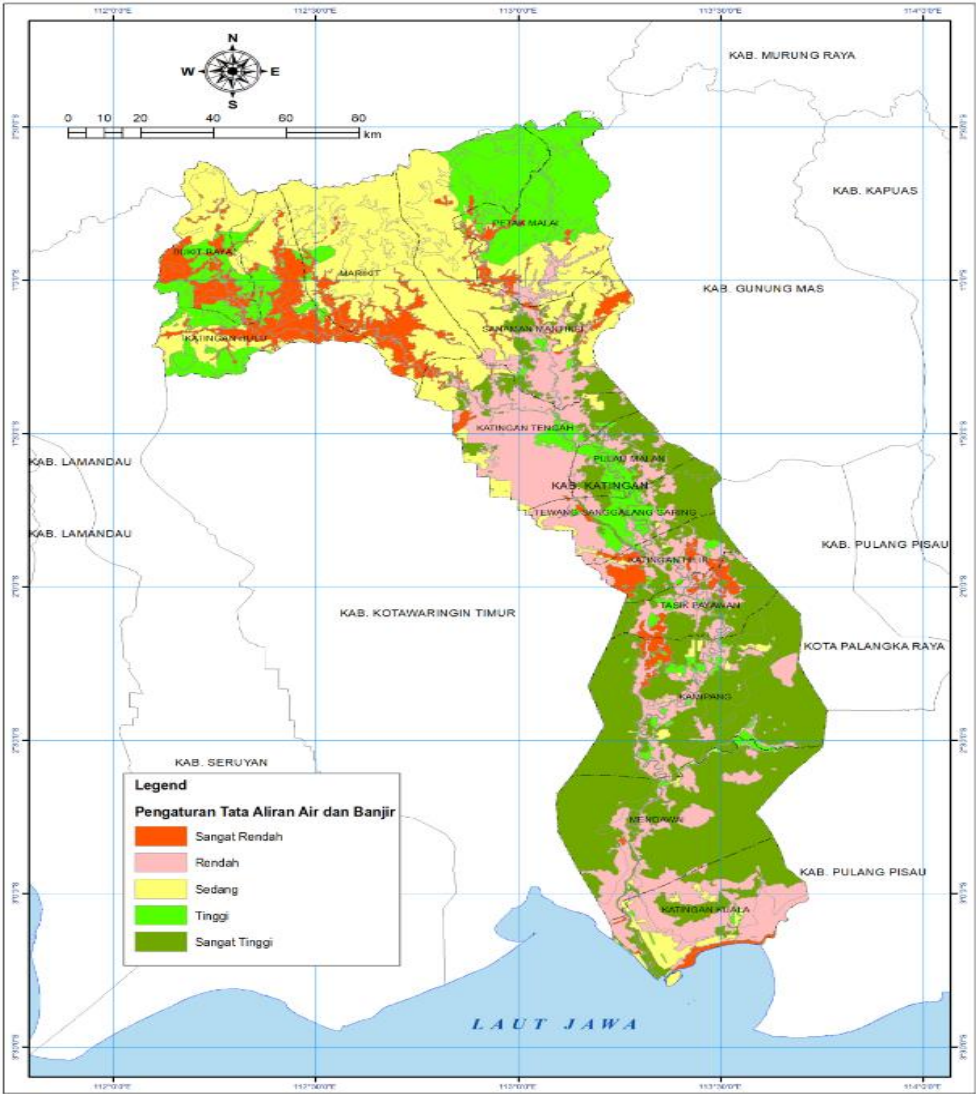
Tabel 2.22
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Tata
Aliran Air dan Banjir Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN TATA ALIRAN AIR DAN BANJIR									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	31013	16,1	0	0,0	40315	8,0	29090	9,7	0	0,0
2	Kamipang	7175	3,7	47754	11,6	6245	1,2	10325	3,4	213609	33,9
3	Katingan Hilir	13450	7,0	23611	5,7	1059	0,2	3072	1,0	21939	3,5
4	Katingan Hulu	49017	25,4	368	0,1	53668	10,7	42822	14,2	0	0,0
5	Katingan Kuala	5395	2,8	71032	17,3	20236	4,0	1547	0,5	50162	8,0
6	Katingan Tengah	5398	2,8	93441	22,7	30820	6,1	9376	3,1	24326	3,9
7	Marikit	40185	20,8	673	0,2	165789	33,0	4722	1,6	0	0,0
8	Mendawai	442	0,2	49746	12,1	1974	0,4	3236	1,1	183572	29,1
9	Petak Malai	13081	6,8	10740	2,6	44101	8,8	98016	32,6	1	0,0
10	Pulau Malan	102	0,1	17186	4,2	189	0,0	13500	4,5	33761	5,4
11	Sanaman Mantikei	15123	7,8	38945	9,5	134410	26,7	62957	20,9	25731	4,1
12	Tasik Payawan	10348	5,4	23966	5,8	3	0,0	3559	1,2	42837	6,8

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN TATA ALIRAN AIR DAN BANJIR									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
13	Tewang Sanggalang Garing	2032	1,1	34173	8,3	3880	0,8	18816	6,3	34662	5,5
KATINGAN		192761	100	411637	100	502689	100	301040	100	630600	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.15 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.23

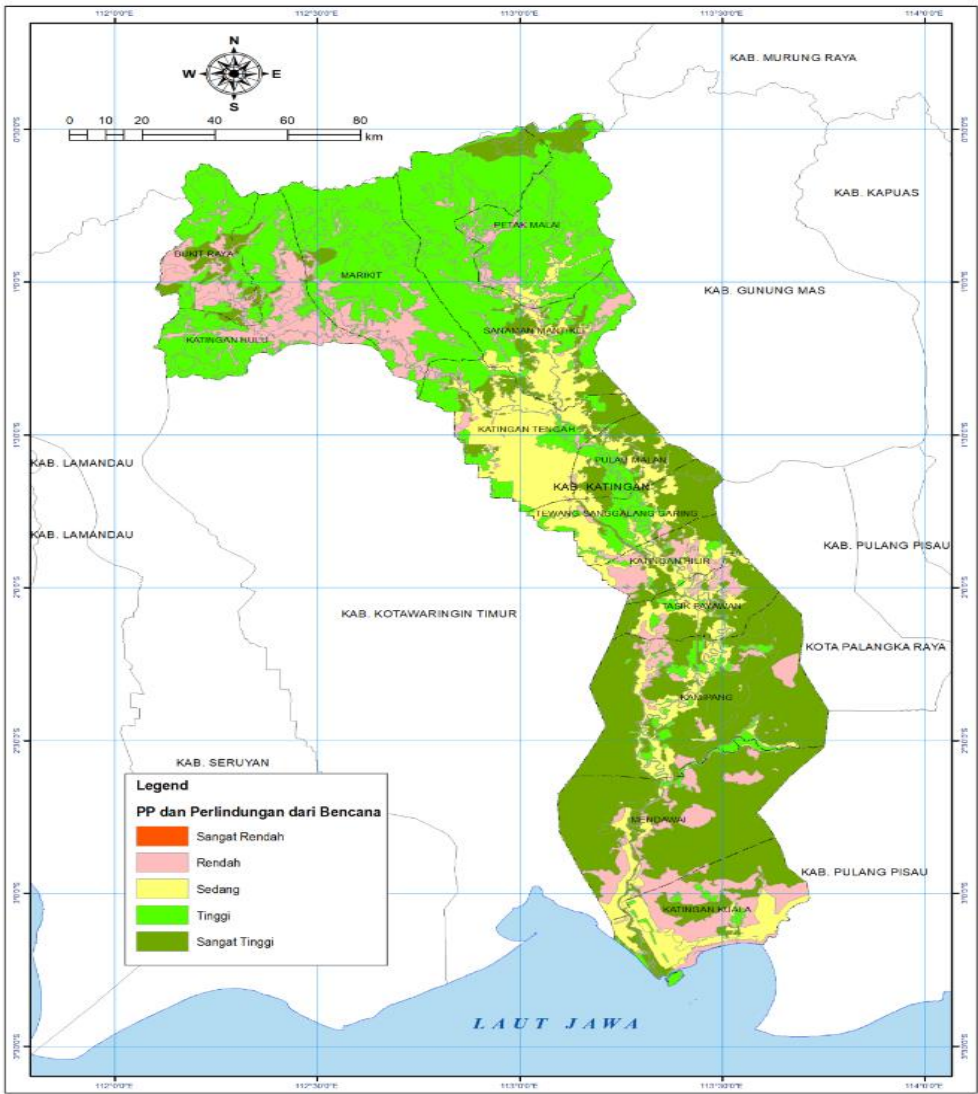
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan dari Bencana Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Bukit Raya	13	2,3	31000	10,7	79	0,0	52420	7,0	16907	2,5
2	Kamipang	0	0,0	20265	7,0	34664	10,6	21186	2,8	208994	31,2
3	Katingan Hilir	0	0,0	16930	5,8	20131	6,1	5388	0,7	20681	3,1

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
4	Katingan Hulu	185	32,0	48832	16,8	382	0,1	90210	12,0	6267	0,9
5	Katingan Kuala	0	0,0	48484	16,7	41073	12,5	8800	1,2	50015	7,5
6	Katingan Tengah	103	17,8	6694	2,3	92042	28,1	41565	5,5	22956	3,4
7	Marikit	125	21,6	40060	13,8	673	0,2	166304	22,2	4207	0,6
8	Mendawai	0	0,0	34824	12,0	16038	4,9	4732	0,6	183376	27,3
9	Petak Malai	34	6,0	13046	4,5	10969	3,3	131113	17,5	10776	1,6
10	Pulau Malan	0	0,0	871	0,3	16471	5,0	15132	2,0	32265	4,8
11	Sanaman Mantikei	117	20,3	15252	5,3	38699	11,8	183819	24,5	39278	5,9
12	Tasik Payawan	0	0,0	10396	3,6	23919	7,3	5026	0,7	41373	6,2
13	T Sanggalang Garing	0	0,0	3336	1,2	32869	10,0	23962	3,2	33397	5,0
KATINGAN		578	100	289990	100	328009	100	749657	100	670493	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.16 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana



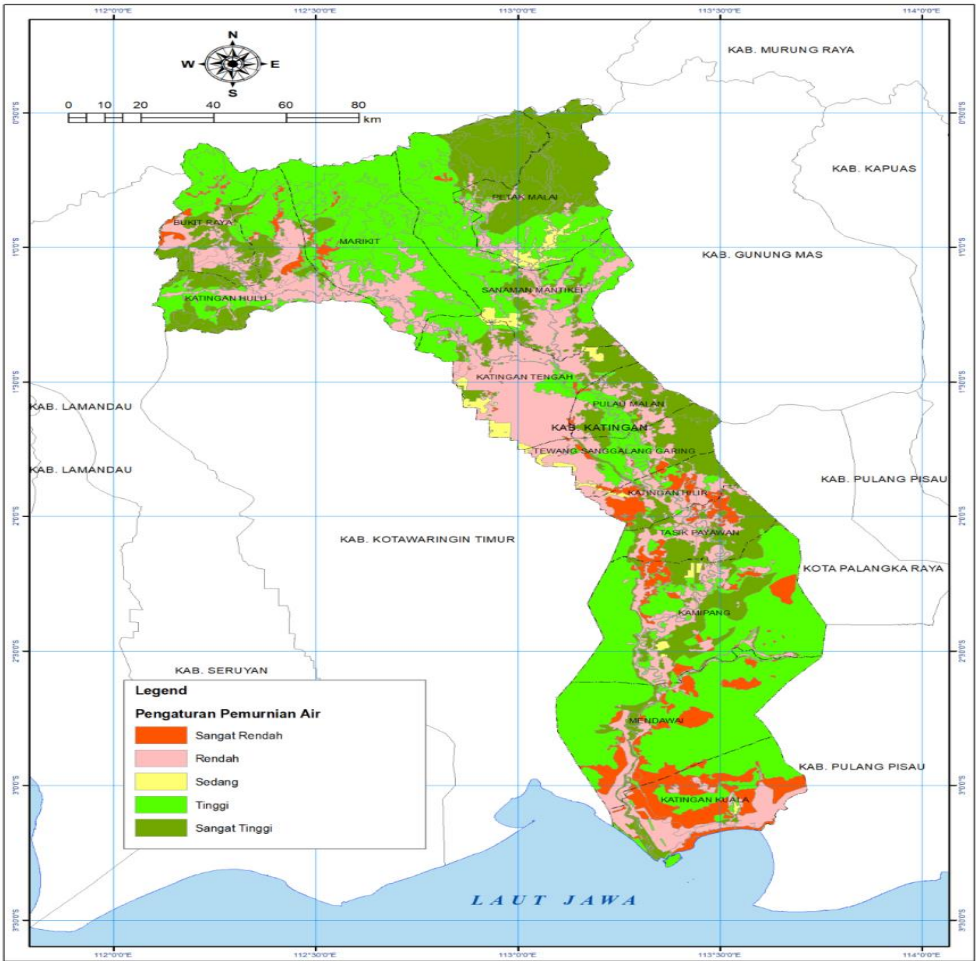
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.24
 Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan
 Pemurnian Air Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN PEMURNIAN AIR									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	4853	3,0	26160	5,8	0	0,0	40315	4,4	29090	6,1
2	Kamipang	20265	12,7	38069	8,5	3075	8,3	171804	18,7	51896	11,0
3	Katingan Hilir	16930	10,6	20426	4,5	764	2,1	7227	0,8	17783	3,8
4	Katingan Hulu	5752	3,6	43265	9,6	368	1,0	53668	5,8	42822	9,1
5	Katingan Kuala	54030	33,9	39047	8,7	751	2,0	46718	5,1	7825	1,7
6	Katingan Tengah	1608	1,0	96119	21,4	11628	31,4	31049	3,4	22956	4,9
7	Marikit	4183	2,6	36002	8,0	673	1,8	165789	18,0	4722	1,0
8	Mendawai	35611	22,4	16595	3,7	0	0,0	176220	19,2	10544	2,2
9	Petak Malai	96	0,1	12985	2,9	10740	29,0	44101	4,8	98017	20,7
10	Pulau Malan	871	0,5	16471	3,7	135	0,4	14997	1,6	32265	6,8
11	Sanaman Mantikei	1237	0,8	47771	10,6	5235	14,1	137399	14,9	85524	18,1
12	Tasik Payawan	10396	6,5	23922	5,3	0	0,0	9451	1,0	36945	7,8
13	Tewang Sanggalang Garing	3336	2,1	33083	7,4	3666	9,9	20702	2,3	32776	6,9
KATINGAN		159168	100	449917	100	37036	100	919440	100	473166	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.17 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

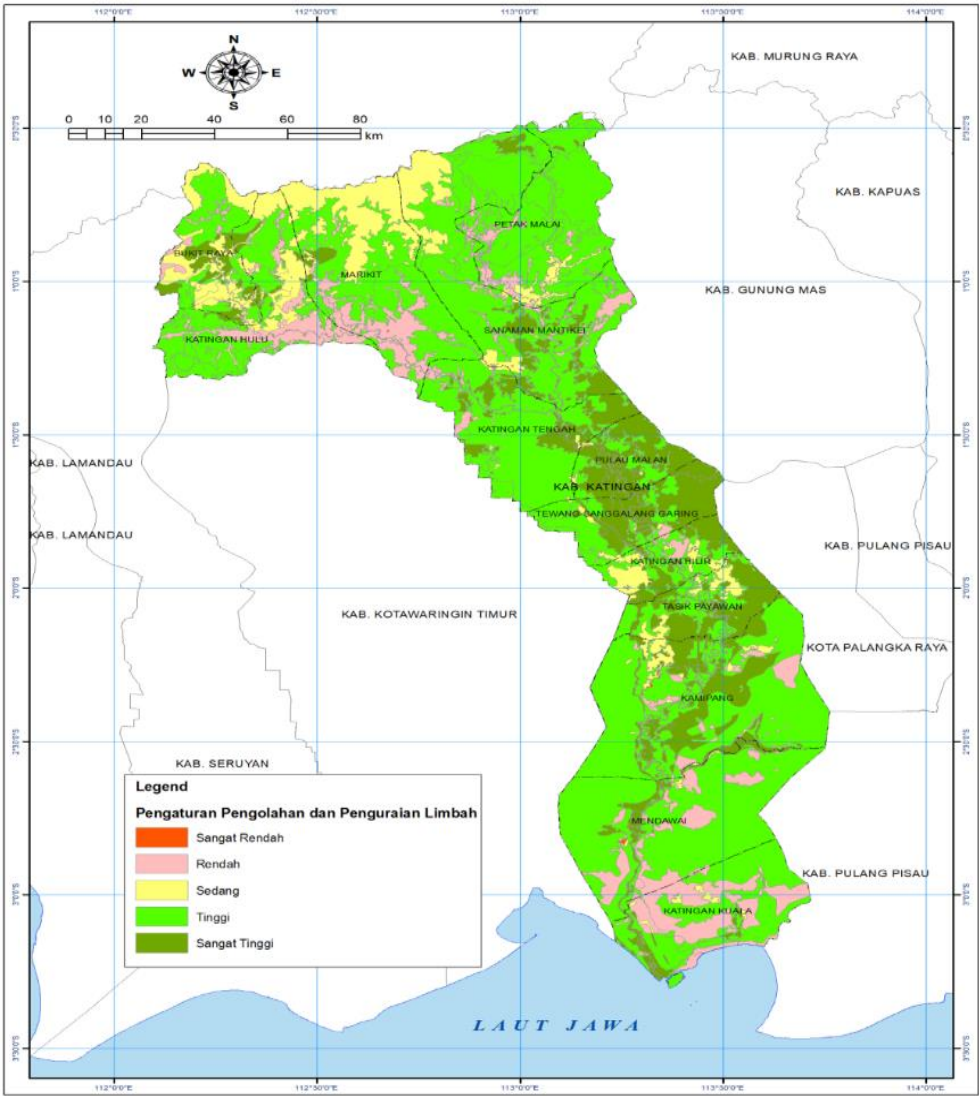
Tabel 2.25

Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan
Pengolahan dan Penguraian Limbah Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN LIMBAH									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	0	0,0	4853	2,3	38826	17,9	39929	3,2	16811	4,8
2	Kamipang	387	30,7	14209	6,6	10317	4,8	193594	15,4	66601	19,2
3	Katingan Hilir	20	1,6	3473	1,6	13733	6,3	23793	1,9	22112	6,4
4	Katingan Hulu	181	14,3	29590	13,8	28898	13,3	80940	6,4	6267	1,8
5	Katingan Kuala	28	2,2	54132	25,2	3741	1,7	80951	6,4	9519	2,7
6	Katingan Tengah	103	8,2	5188	2,4	2617	1,2	122196	9,7	33256	9,6
7	Marikit	112	8,9	38719	18,1	58811	27,1	109520	8,7	4207	1,2
8	Mendawai	278	22,0	35074	16,4	1603	0,7	188083	14,9	13933	4,0
9	Petak Malai	34	2,7	13046	6,1	10969	5,1	141255	11,2	634	0,2
10	Pulau Malan	0	0,0	0	0,0	871	0,4	16882	1,3	46986	13,5
11	Sanaman Mantikei	117	9,3	15005	7,0	33840	15,6	196152	15,6	32051	9,2
12	Tasik Payawan	0	0,0	0	0,0	10399	4,8	28347	2,3	41968	12,1
13	Tewang Sanggalang Garing	0	0,0	1103	0,5	2446	1,1	37156	3,0	52858	15,2
KATINGAN		1260	100	214394	100	217071	100	1258799	100	347202	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.18 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

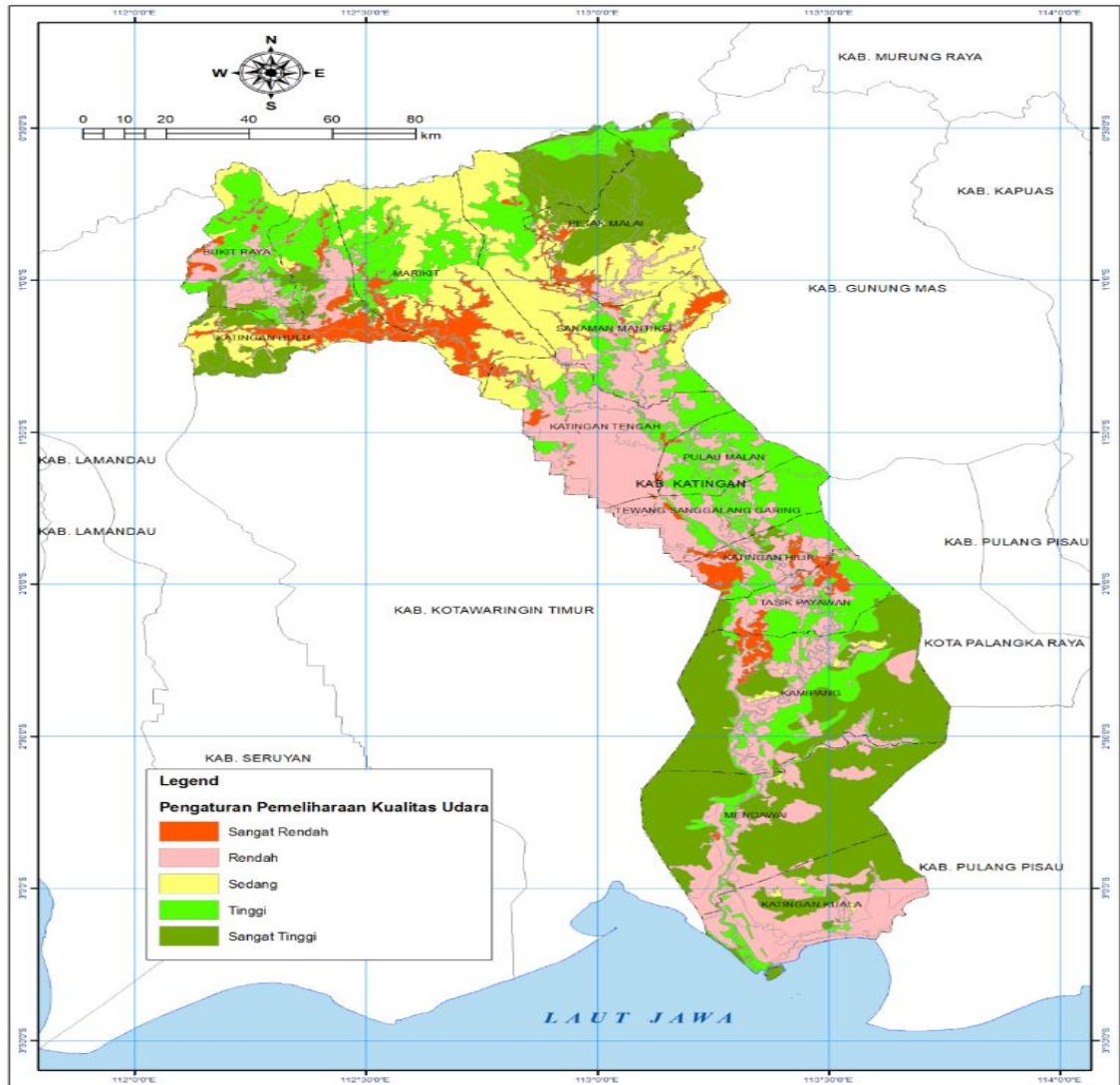
Tabel 2.26
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan
Pemeliharaan Kualitas Udara Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN PEMELIHARAAN KUALITAS UDARA									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	4853	3,4	26373	4,9	12603	3,6	44406	9,9	12184	2,2
2	Kamipang	7299	5,2	64402	12,0	4413	1,3	51896	11,6	157098	27,8
3	Katingan Hilir	13457	9,6	28058	5,2	0	0,0	18718	4,2	2898	0,5
4	Katingan Hulu	30050	21,3	19260	3,6	33330	9,6	26680	6,0	36555	6,5
5	Katingan Kuala	117	0,1	91150	17,0	1820	0,5	10262	2,3	45024	8,0
6	Katingan Tengah	6419	4,6	108801	20,3	20304	5,9	27836	6,2	0	0,0
7	Marikit	39437	28,0	1421	0,3	114506	33,0	55490	12,4	515	0,1
8	Mendawai	537	0,4	53741	10,0	1300	0,4	10560	2,4	172832	30,6
9	Petak Malai	10444	7,4	10159	1,9	46478	13,4	11616	2,6	87241	15,4
10	Pulau Malan	871	0,6	18858	3,5	0	0,0	45010	10,0	0	0,0
11	Sanaman Mantikei	14741	10,5	39362	7,3	112112	32,3	64705	14,4	46246	8,2
12	Tasik Payawan	10396	7,4	28942	5,4	3	0,0	36945	8,2	4428	0,8

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN PEMELIHARAAN KUALITAS UDARA									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
13	Tewang Sanggalang Garing	2233	1,6	46677	8,7	0	0,0	44033	9,8	621	0,1
KATINGAN		140854	100	537204	100	346871	100	448157	100	565641	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

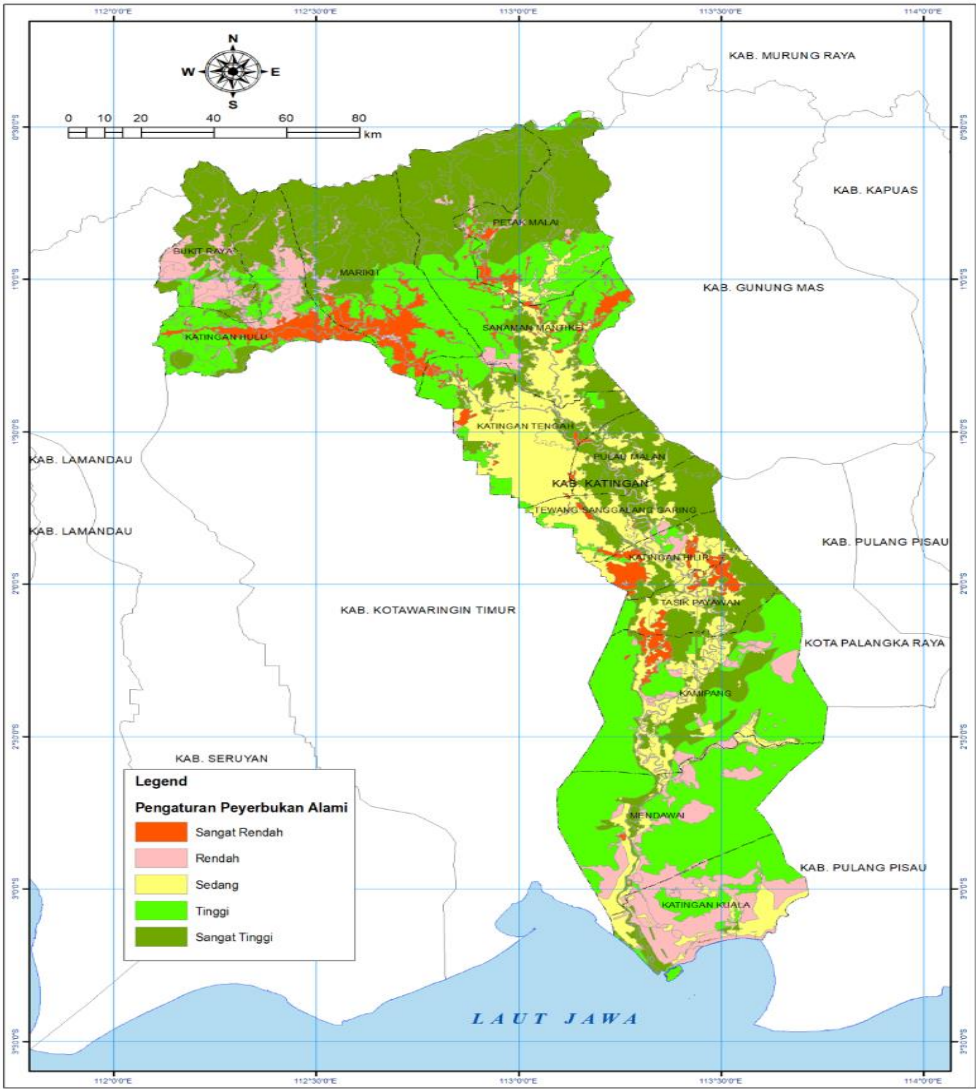
Tabel 2.27
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan Peyerbukan Alami Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN PEYERBUKAN ALAMI									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	96	0,1	31130	14,6	0	0,0	12199	1,8	56994	8,2
2	Kamipang	7535	6,0	21994	10,3	43511	13,0	160174	23,8	51896	7,5

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN PEYERBUKAN ALAMI									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
3	Katingan Hilir	13458	10,7	4730	2,2	22858	6,8	3662	0,5	18423	2,7
4	Katingan Hulu	24511	19,6	24888	11,7	0	0,0	52520	7,8	43957	6,3
5	Katingan Kuala	417	0,3	68450	32,1	25220	7,5	45775	6,8	8510	1,2
6	Katingan Tengah	6419	5,1	2858	1,3	95427	28,5	30820	4,6	27836	4,0
7	Marikit	34445	27,5	6387	3,0	27	0,0	58238	8,7	112273	16,2
8	Mendawai	581	0,5	37244	17,5	17754	5,3	172832	25,7	10560	1,5
9	Petak Malai	10367	8,3	3524	1,7	10159	3,0	44954	6,7	96935	14,0
10	Pulau Malan	871	0,7	1497	0,7	17227	5,1	135	0,0	45010	6,5
11	Sanaman Mantikei	13869	11,1	6438	3,0	34278	10,2	83098	12,3	139482	20,1
12	Tasik Payawan	10396	8,3	1467	0,7	27478	8,2	4428	0,7	36945	5,3
13	Tewang Sanggalang Garing	2233	1,8	2369	1,1	40855	12,2	4287	0,6	43819	6,3
KATINGAN		125196	100	212977	100	334793	100	673122	100	692640	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.20 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.28

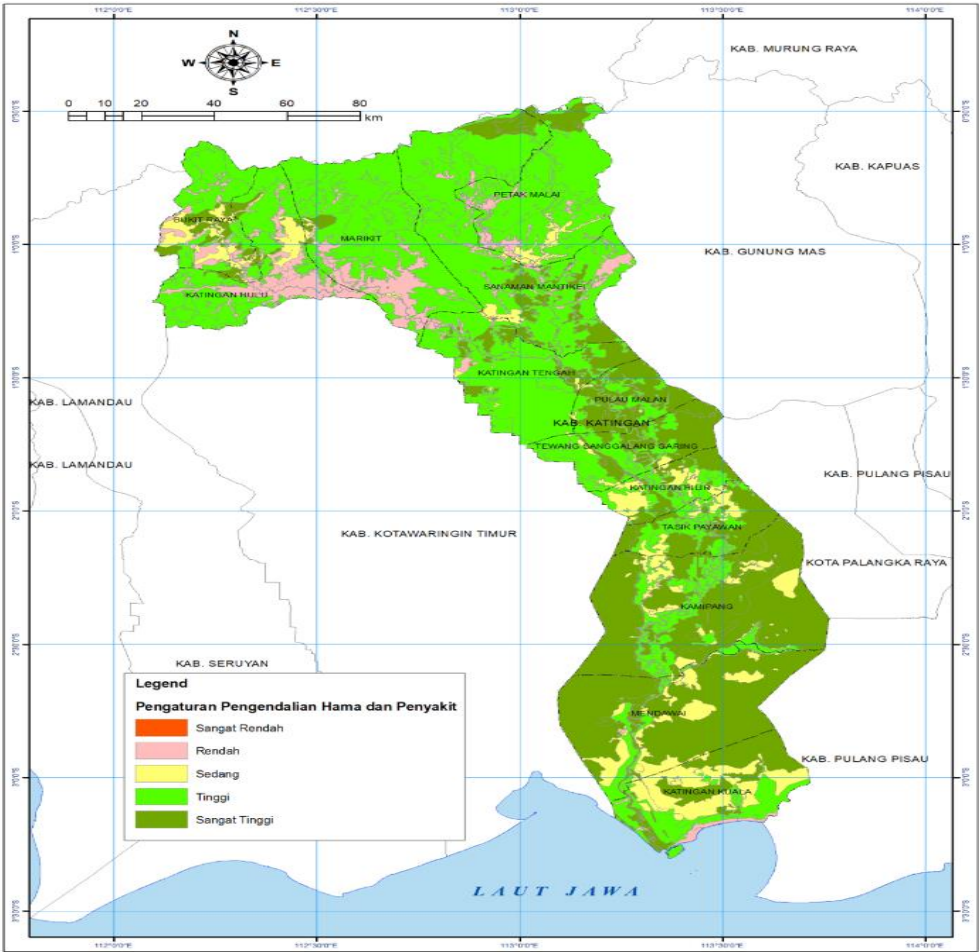
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pengaturan

Pengendalian Hama dan Penyakit Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	0	0,0	12709	9,9	18517	9,5	52286	5,2	16907	2,4
2	Kamipang	0	0,0	387	0,3	24526	12,6	51201	5,1	208994	29,8
3	Katingan Hilir	0	0,0	20	0,0	16911	8,7	24879	2,5	21321	3,0
4	Katingan Hulu	181	33,0	38397	30,0	10821	5,5	90210	8,9	6267	0,9
5	Katingan Kuala	0	0,0	5395	4,2	50782	26,0	41495	4,1	50700	7,2
6	Katingan Tengah	103	18,8	4645	3,6	3161	1,6	128062	12,6	27390	3,9
7	Marikit	112	20,5	37795	29,5	2952	1,5	166304	16,4	4207	0,6
8	Mendawai	0	0,0	278	0,2	36677	18,8	18623	1,8	183392	26,1
9	Petak Malai	34	6,3	13291	10,4	10725	5,5	131113	12,9	10776	1,5
10	Pulau Malan	0	0,0	0	0,0	871	0,4	19134	1,9	44734	6,4
11	Sanaman Mantikei	117	21,4	15006	11,7	5307	2,7	215450	21,3	41285	5,9
12	Tasik Payawan	0	0,0	0	0,0	10399	5,3	28942	2,9	41373	5,9
13	Tewang Sanggalang Garing	0	0,0	0	0,0	3336	1,7	45788	4,5	44440	6,3
KATINGAN		547	100	127922	100	194985	100	1013486	100	701786	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.21 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

3. Layanan/Fungsi Budaya (Cultural Services)

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Jenis ekoregion yang memberikan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang tinggi adalah ekoregion Hutan. Ekoregion tersebut merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis yang datar dan ketersediaan air bersih relatif banyak, sehingga cocok untuk pengembangan permukiman. Selain itu, Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pada ekoregion dataran relatif lebih mudah dan berbiaya rendah karena kondisi geografis yang datar.

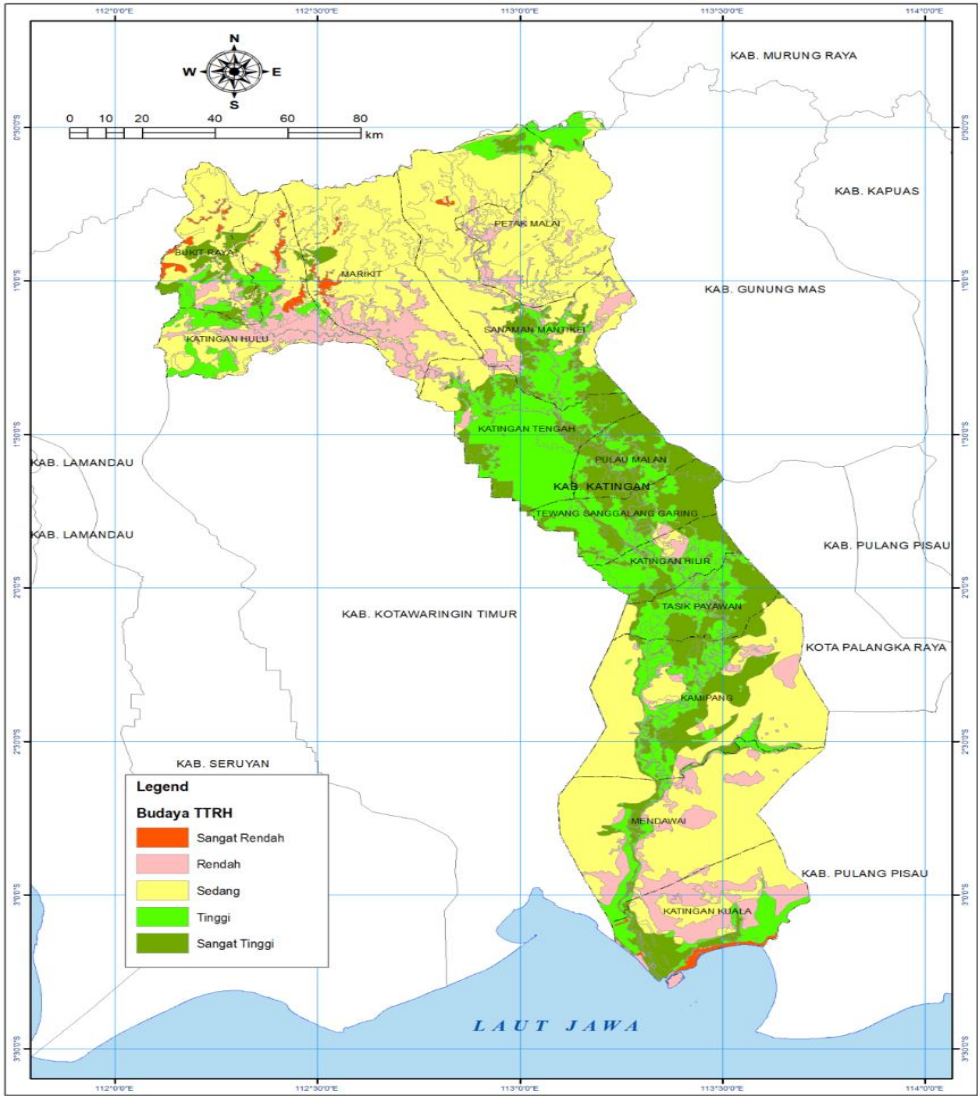
Hasil analisis Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Budaya disajikan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.29
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem
Budaya TTRH Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Budaya Ttrh									
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Bukit Raya	4836	23,3	7856	3,6	58407	5,7	12372	2,9	16948	4,8
2	Kamipang	0	0,0	16523	7,6	158342	15,3	50534	12,0	59711	17,1
3	Katingan Hilir	0	0,0	3493	1,6	3193	0,3	35994	8,6	20452	5,8
4	Katingan Hulu	5553	26,8	32826	15,2	72486	7,0	28730	6,8	6282	1,8
5	Katingan Kuala	5367	25,9	47657	22,0	49813	4,8	23012	5,5	22524	6,4
6	Katingan Tengah	0	0,0	5590	2,6	21014	2,0	96082	22,9	40675	11,6
7	Marikit	4058	19,6	33764	15,6	168700	16,3	640	0,2	4207	1,2
8	Mendawai	0	0,0	35866	16,6	173618	16,8	17962	4,3	11524	3,3
9	Petak Malai	61	0,3	12985	6,0	140159	13,6	12099	2,9	634	0,2
10	Pulau Malan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17550	4,2	47189	13,5
11	Sanaman Mantikei	872	4,2	18525	8,6	181148	17,6	44146	10,5	32473	9,3
12	Tasik Payawan	0	0,0	3	0,0	4428	0,4	37826	9,0	38456	11,0
13	Tewang Sanggalang Garing	0	0,0	1103	0,5	834	0,1	42673	10,2	48953	14,0
KATINGAN		20748	100	216190	100	1032143	100	419620	100	350026	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.22 Peta Jasa Ekosistem Budaya TTRH



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

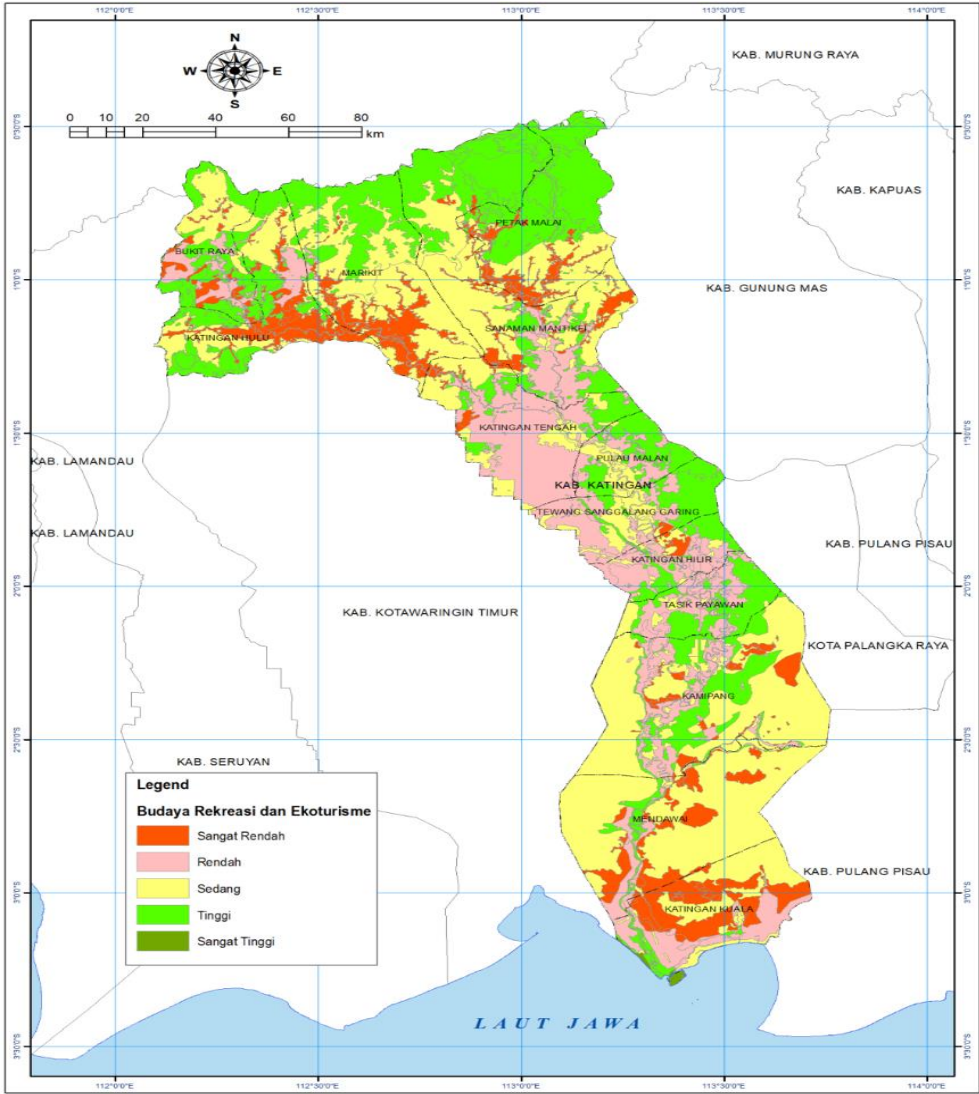
Tabel 2.30
 Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem
 Budaya Rekreasi dan Ekoturisme Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM BUDAYA REKREASI DAN EKOTURISME									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	12706	5,1	18308	4,9	27728	3,3	41678	7,2	0	0,0
2	Kamipang	17766	7,1	40568	11,0	174879	21,0	51896	8,9	0	0,0
3	Katingan Hilir	3787	1,5	33569	9,1	7991	1,0	17783	3,1	0	0,0
4	Katingan Hulu	38564	15,3	10822	2,9	44142	5,3	52349	9,0	0	0,0
5	Katingan Kuala	52091	20,7	35265	9,5	50227	6,0	7956	1,4	2833	99,8
6	Katingan Tengah	6236	2,5	92603	25,0	41565	5,0	22956	3,9	0	0,0
7	Marikit	38908	15,5	1950	0,5	109005	13,1	61506	10,6	0	0,0
8	Mendawai	36652	14,6	15554	4,2	176220	21,2	10544	1,8	0	0,0
9	Petak Malai	23240	9,2	581	0,2	43753	5,3	98364	16,9	0	0,0
10	Pulau Malan	0	0,0	17342	4,7	15132	1,8	32265	5,5	0	0,0
11	Sanaman Mantikei	20155	8,0	33913	9,2	108566	13,0	114524	19,7	7	0,2
12	Tasik Payawan	3	0,0	34315	9,3	9451	1,1	36945	6,4	0	0,0

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM BUDAYA REKREASI DAN EKOTURISME									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
13	Tewang Sanggalang Garing	1317	0,5	35102	9,5	24369	2,9	32776	5,6	0	0,0
KATINGAN		251425	100	369890	100	833028	100	581543	100	2840	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.23 Peta Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturisme



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

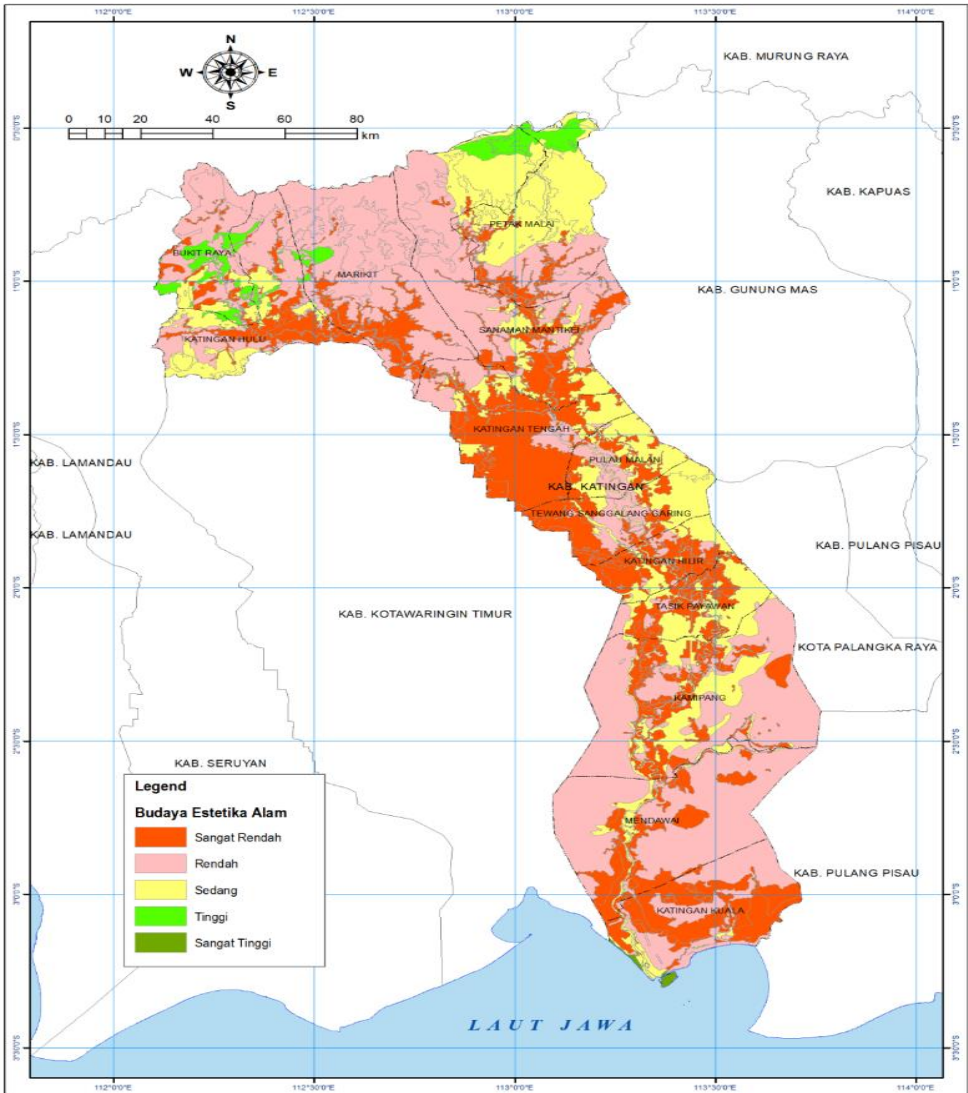
Tabel 2.31
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem
Budaya Estetika Alam Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM BUDAYA ESTETIKA ALAM									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	12706	2,1	58411	6,1	12396	2,9	16907	32,2	0	0,0
2	Kamipang	61174	10,3	167424	17,5	56511	13,0	0	0,0	0	0,0
3	Katingan Hilir	38120	6,4	5970	0,6	19041	4,4	0	0,0	0	0,0

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM BUDAYA ESTETIKA ALAM									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
4	Katingan Hulu	38564	6,5	64476	6,8	36569	8,4	6267	12,0	0	0,0
5	Katingan Kuala	75081	12,6	62159	6,5	7972	1,8	224	0,4	2937	100,0
6	Katingan Tengah	109188	18,4	29847	3,1	24326	5,6	0	0,0	0	0,0
7	Marikit	38908	6,5	167739	17,6	515	0,1	4207	8,0	0	0,0
8	Mendawai	51489	8,7	176741	18,5	10741	2,5	0	0,0	0	0,0
9	Petak Malai	23240	3,9	44453	4,7	87471	20,2	10775	20,5	0	0,0
10	Pulau Malan	17423	2,9	13555	1,4	33761	7,8	0	0,0	0	0,0
11	Sanaman Mantikei	54215	9,1	136909	14,3	71977	16,6	14064	26,8	0	0,0
12	Tasik Payawan	34318	5,8	7987	0,8	38409	8,9	0	0,0	0	0,0
13	Tewang Sanggalang Garing	40085	6,7	19436	2,0	34042	7,8	0	0,0	0	0,0
KATINGAN		594510	100	955107	100	433730	100	52443	100	2937	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.24 Peta Jasa Ekosistem Estetika Alam



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

4. Layanan/Fungsi Pendukung Kehidupan (*Supporting Services*)

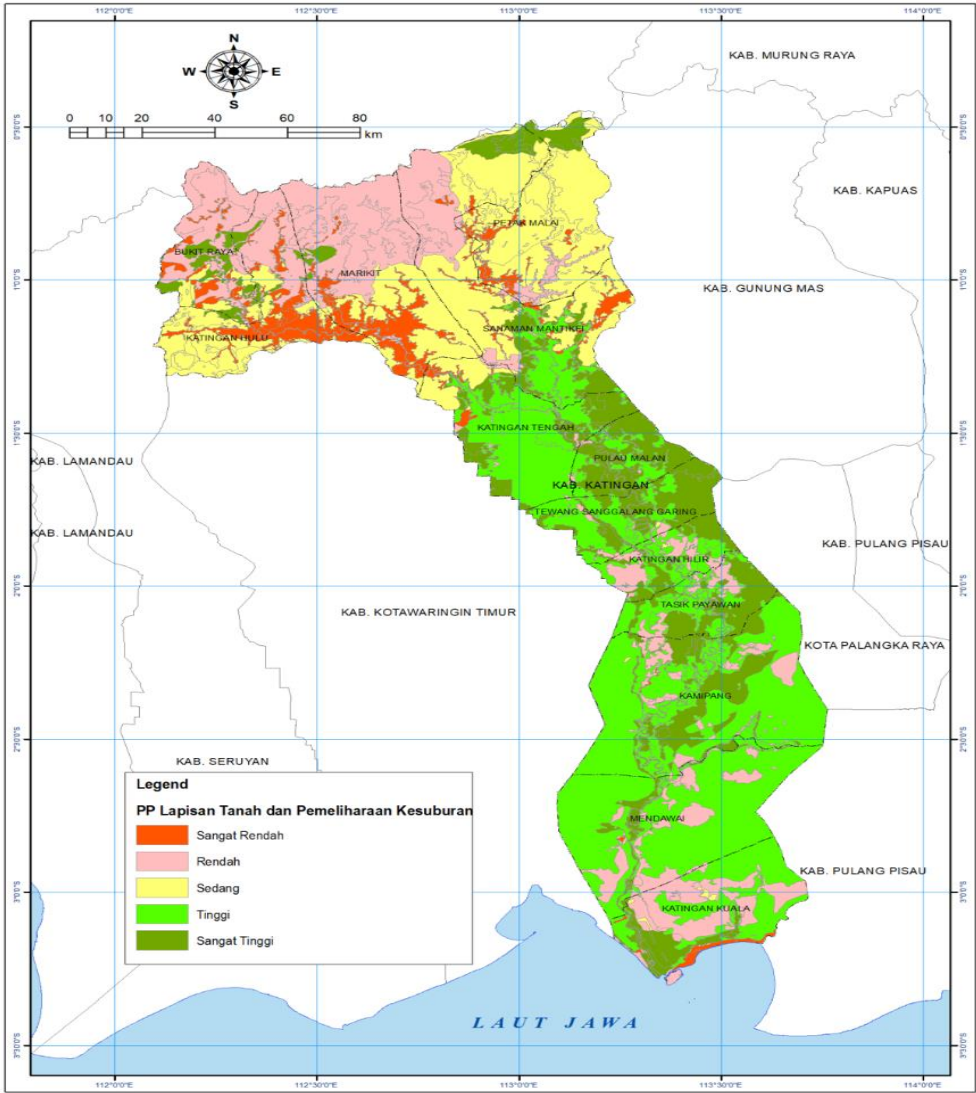
Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi, serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah menyebabkan proses pembentukan tanah semakin cepat. Hasil analisis Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pendukung disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem
Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan
Kesuburan Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENDUKUNG									
		PEMBENTUKAN LAPISAN TANAH DAN PEMELIHARAAN KESUBURAN									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	12709	9,9	58470	13,7	12199	3,0	134	0,0	16907	4,6
2	Kamipang	387	0,3	24291	5,7	235	0,1	200609	28,6	59586	16,2
3	Katingan Hilir	20	0,0	16910	4,0	295	0,1	25461	3,6	20444	5,6
4	Katingan Hulu	38578	30,1	40504	9,5	60527	14,6	0	0,0	6267	1,7
5	Katingan Kuala	5395	4,2	53615	12,5	1725	0,4	65202	9,3	22435	6,1
6	Katingan Tengah	4747	3,7	3161	0,7	20304	4,9	95427	13,6	39721	10,8
7	Marikit	37907	29,6	111017	26,0	58238	14,1	0	0,0	4207	1,1
8	Mendawai	278	0,2	36633	8,6	44	0,0	190585	27,2	11430	3,1
9	Petak Malai	13081	10,2	11810	2,8	130272	31,5	0	0,0	10776	2,9
10	Pulau Malan	0	0,0	871	0,2	0	0,0	17173	2,4	46695	12,7
11	Sanaman Mantikei	15123	11,8	56619	13,2	129169	31,3	33638	4,8	42617	11,6
12	Tasik Payawan	0	0,0	10399	2,4	0	0,0	31906	4,5	38409	10,4
13	Tewang Sanggalang Garing	0	0,0	3336	0,8	214	0,1	41262	5,9	48752	13,2
KATINGAN		128225	100	427636	100	413223	100	701397	100	368247	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.25 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

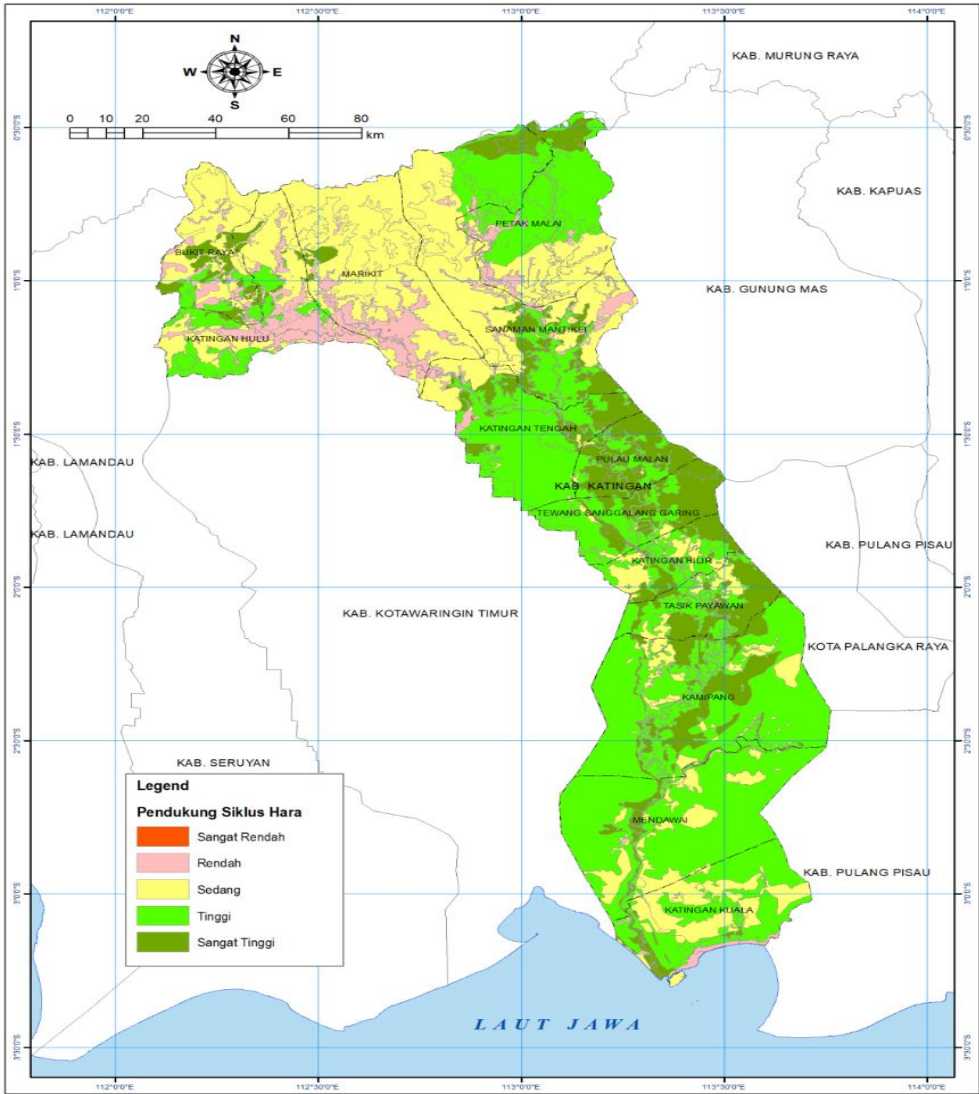
Tabel 2.33
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pendukung
Siklus Hara Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENDUKUNG SIKLUS HARA									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	0	0,0	12709	9,8	58486	8,9	12317	1,3	16907	5,2
2	Kamipang	0	0,0	387	0,3	24526	3,7	208300	22,4	51896	16,1
3	Katingan Hilir	0	0,0	20	0,0	16911	2,6	27777	3,0	18423	5,7
4	Katingan Hulu	181	31,4	38397	29,7	64476	9,9	36555	3,9	6267	1,9
5	Katingan Kuala	28	4,9	5667	4,4	53315	8,2	80852	8,7	8510	2,6
6	Katingan Tengah	103	17,9	5188	4,0	22921	3,5	107312	11,5	27836	8,6
7	Marikit	112	19,5	38729	29,9	167806	25,7	515	0,1	4207	1,3
8	Mendawai	0	0,0	278	0,2	36677	5,6	191455	20,6	10560	3,3
9	Petak Malai	34	6,0	13062	10,1	54825	8,4	87241	9,4	10776	3,3
10	Pulau Malan	0	0,0	0	0,0	871	0,1	18858	2,0	45010	13,9
11	Sanaman Mantikei	117	20,4	15005	11,6	139542	21,3	80575	8,6	41926	13,0

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENDUKUNG SIKLUS HARA									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
12	Tasik Payawan	0	0,0	0	0,0	10399	1,6	33370	3,6	36945	11,4
13	Tewang Sanggalang Garing	0	0,0	0	0,0	3336	0,5	46408	5,0	43819	13,6
KATINGAN		575	100	129442	100	654092	100	931536	100	323082	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.26 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

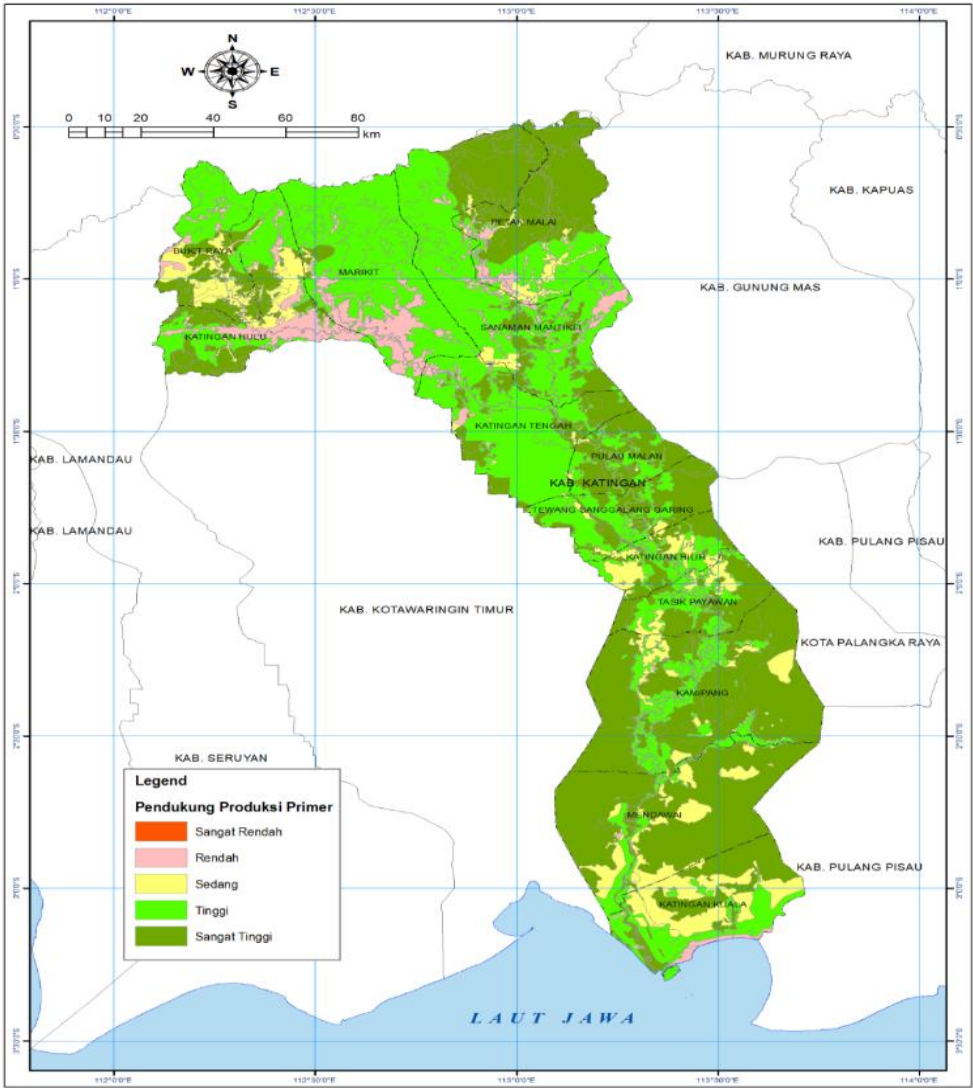
Tabel 2.34
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem
Pendukung Produksi Primer Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENDUKUNG PRODUKSI PRIMER									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	0	0,0	4853	4,5	26373	12,7	40103	4,9	29090	3,2
2	Kamipang	0	0,0	387	0,4	19878	9,6	52775	6,5	212069	23,4

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENDUKUNG PRODUKSI PRIMER									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
3	Katingan Hilir	0	0,0	20	0,0	16910	8,2	24116	2,9	22085	2,4
4	Katingan Hulu	181	31,4	29501	27,3	19718	9,5	53654	6,6	42822	4,7
5	Katingan Kuala	28	4,9	5563	5,1	48766	23,6	42563	5,2	51452	5,7
6	Katingan Tengah	103	17,9	4645	4,3	3161	1,5	117100	14,3	38352	4,2
7	Marikit	112	19,5	38719	35,8	2028	1,0	165789	20,3	4722	0,5
8	Mendawai	0	0,0	278	0,3	35333	17,1	19967	2,4	183392	20,3
9	Petak Malai	34	6,0	9828	9,1	14187	6,9	43872	5,4	98017	10,8
10	Pulau Malan	0	0,0	0	0,0	871	0,4	18723	2,3	45145	5,0
11	Sanaman Mantikei	117	20,4	14349	13,3	5964	2,9	168388	20,6	88346	9,8
12	Tasik Payawan	0	0,0	0	0,0	10396	5,0	28945	3,5	41373	4,6
13	Tewang Sanggalang Garing	0	0,0	0	0,0	3336	1,6	42121	5,1	48106	5,3
KATINGAN		575	100	108143	100	206920	100	818116	100	904972	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.27 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.35

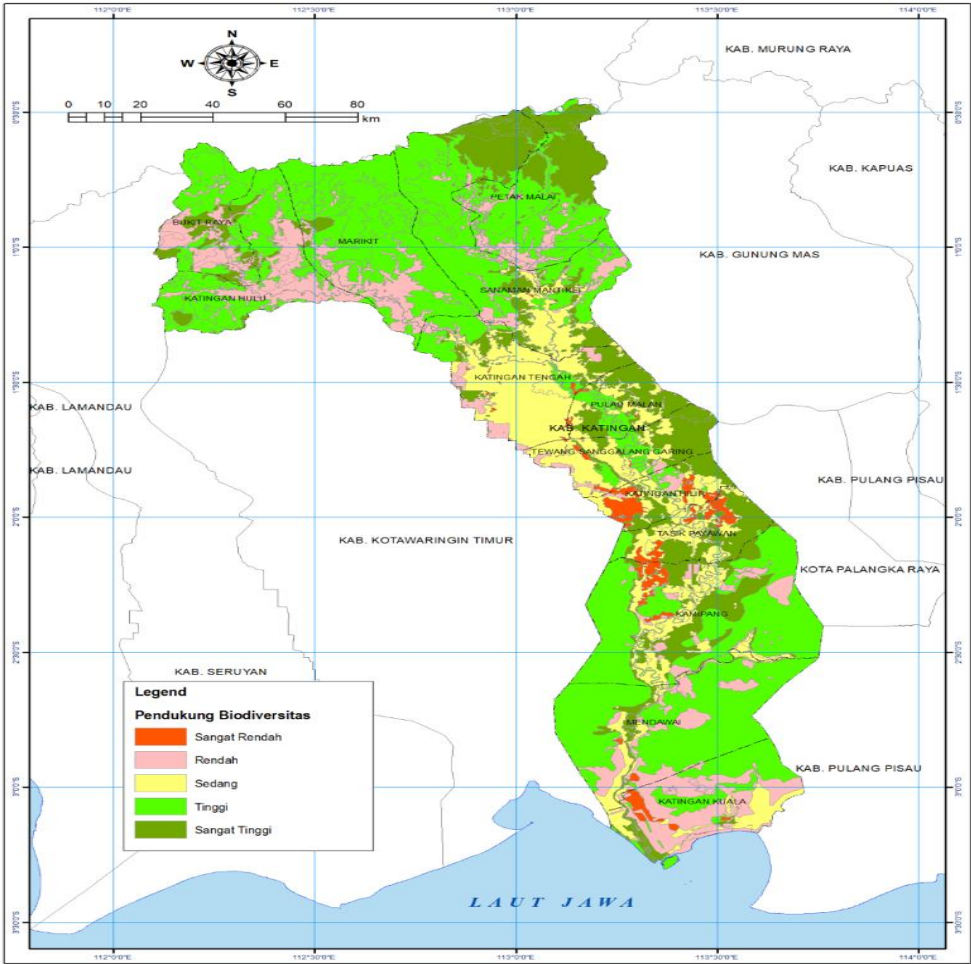
Daya Dukung terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem Pendukung

Biodiversitas Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JASA EKOSISTEM PENDUKUNG BIODIVERSITAS									
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Bukit Raya	17	0,0	30996	9,9	212	0,1	52286	5,3	16907	4,5
2	Kamipang	8543	18,9	19446	6,2	43511	13,5	161714	16,4	51896	14,0
3	Katingan Hilir	13457	29,7	4532	1,4	22563	7,0	4795	0,5	17783	4,8
4	Katingan Hulu	199	0,4	49186	15,7	14	0,0	86913	8,8	9564	2,6
5	Katingan Kuala	6079	13,4	65601	21,0	23012	7,1	45856	4,7	7825	2,1
6	Katingan Tengah	1608	3,6	16816	5,4	95872	29,7	26107	2,6	22956	6,2
7	Marikit	125	0,3	40734	13,0	0	0,0	166304	16,9	4207	1,1
8	Mendawai	1323	2,9	36305	11,6	17754	5,5	173044	17,5	10544	2,8
9	Petak Malai	34	0,1	23771	7,6	244	0,1	86377	8,8	55511	14,9
10	Pulau Malan	871	1,9	189	0,1	17448	5,4	13966	1,4	32265	8,7
11	Sanaman Mantikei	364	0,8	20240	6,5	34280	10,6	149841	15,2	72439	19,5
12	Tasik Payawan	10396	23,0	3	0,0	27478	8,5	5892	0,6	36945	9,9
13	Tewang Sanggalang Garing	2233	4,9	4983	1,6	40642	12,6	12930	1,3	32776	8,8
KATINGAN		45250	100	312803	100	323030	100	986025	100	371619	100

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.28 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dapat dilihat dari nilai PDRB yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah diiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.36

PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	961,4	1.022,3	1.098,8	1.151,0	1.225,4	1.276,6
B	Pertambangan dan Penggalian	298,9	321,4	333,2	353,2	384,8	410,1
C	Industri Pengolahan	469,2	500,8	527,4	565,4	603,6	644,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
F	Konstruksi	364,0	391,1	426,9	467,7	490,5	537,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	226,9	242,1	258,0	275,7	294,9	322,1
H	Transportasi dan Pergudangan	242,8	249,6	259,3	264,7	275,9	296,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59,7	65,0	70,9	77,5	83,1	90,2
J	Informasi dan Komunikasi	32,4	34,3	36,8	39,8	40,6	42,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	48,0	49,8	51,0	52,5	53,2	55,4
L	Real Estate	81,3	86,5	91,4	100,0	109,0	118,5
M,N	Jasa Perusahaan	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	196,0	209,8	226,4	249,0	268,0	281,5
P	Jasa Pendidikan	184,4	191,5	202,3	214,8	229,1	247,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,6	78,8	84,7	92,4	100,4	108,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	65,4	70,2	76,0	83,4	89,7	96,4
PDRB		3.306,7	3.516,2	3.746,3	3.990,9	4.252,0	4.531,1

Sumber : PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 dan PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017, BPS, diolah

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Katingan pada Tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 4,531 triliun dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6,805 triliun. Bila ditelaah lebih jauh ke tahun-tahun sebelumnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan peningkatan selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2017.

Tabel 2.37
PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.121,3	1.293,4	1.452,3	1.566,1	1.712,2	1.822,9
B	Pertambangan dan Penggalian	367,9	402,5	439,4	466,4	532,1	570,9
C	Industri Pengolahan	518,4	565,0	681,3	803,0	918,4	1.018,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,8	0,9	1,0	1,5	1,6	1,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0
F	Konstruksi	421,7	479,7	542,3	631,4	701,4	818,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	262,1	292,7	340,7	386,0	440,5	508,2
H	Transportasi dan Pergudangan	283,6	322,2	354,7	393,9	423,3	482,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70,6	83,5	98,4	116,4	136,7	152,3
J	Informasi dan Komunikasi	33,3	35,6	39,2	43,2	44,3	48,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	54,7	59,1	62,7	67,8	70,0	76,4
L	Real Estate	94,3	104,0	118,7	139,4	162,7	188,7
M,N	Jasa Perusahaan	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	228,6	264,4	300,6	348,1	395,1	446,3
P	Jasa Pendidikan	201,3	219,8	235,8	274,3	308,8	351,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,2	94,1	109,9	127,6	147,2	168,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	73,8	86,0	94,7	112,9	129,7	146,2
PDRB		3.820,7	4.305,2	4.874,3	5.481,0	6.127,5	6.805,6

Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 dan PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017, BPS, diolah

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 sampai dengan 2017 didominasi oleh oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Katingan.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi primadona dalam perekonomian Kabupaten Katingan, walaupun selama periode 2012 sampai dengan 2017 tidak jarang mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Katingan pada tahun 2017 mencapai 26,78 persen.

Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Katingan adalah sektor Industri Pengolahan. Selama kurun waktu 2012–2017 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2016, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 14,99 persen dan turun menjadi 14,97 persen pada tahun berikutnya.

Pada posisi ketiga penyumbang terbesar terhadap PDRB, terdapat lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,03 persen pada Tahun 2017 dan angka ini cenderung naik setiap tahunnya.

Tabel 2.38
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,35	30,04	29,80	28,57	27,94	26,78
B	Pertambangan dan Penggalian	9,63	9,35	9,01	8,51	8,68	8,39
C	Industri Pengolahan	13,57	13,12	13,98	14,65	14,99	14,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	11,04	11,14	11,13	11,52	11,45	12,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,86	6,80	6,99	7,04	7,19	7,47
H	Transportasi dan Pergudangan	7,42	7,48	7,28	7,19	6,91	7,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,85	1,94	2,02	2,12	2,23	2,24
J	Informasi dan Komunikasi	0,87	0,83	0,80	0,79	0,72	0,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,43	1,37	1,29	1,24	1,14	1,12
L	Real Estate	2,47	2,41	2,43	2,54	2,65	2,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,98	6,14	6,17	6,35	6,45	6,56
P	Jasa Pendidikan	5,27	5,11	4,84	5,01	5,04	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,19	2,25	2,33	2,40	2,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,93	2,00	1,94	2,06	2,12	2,15
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 dan PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017, BPS, diolah

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

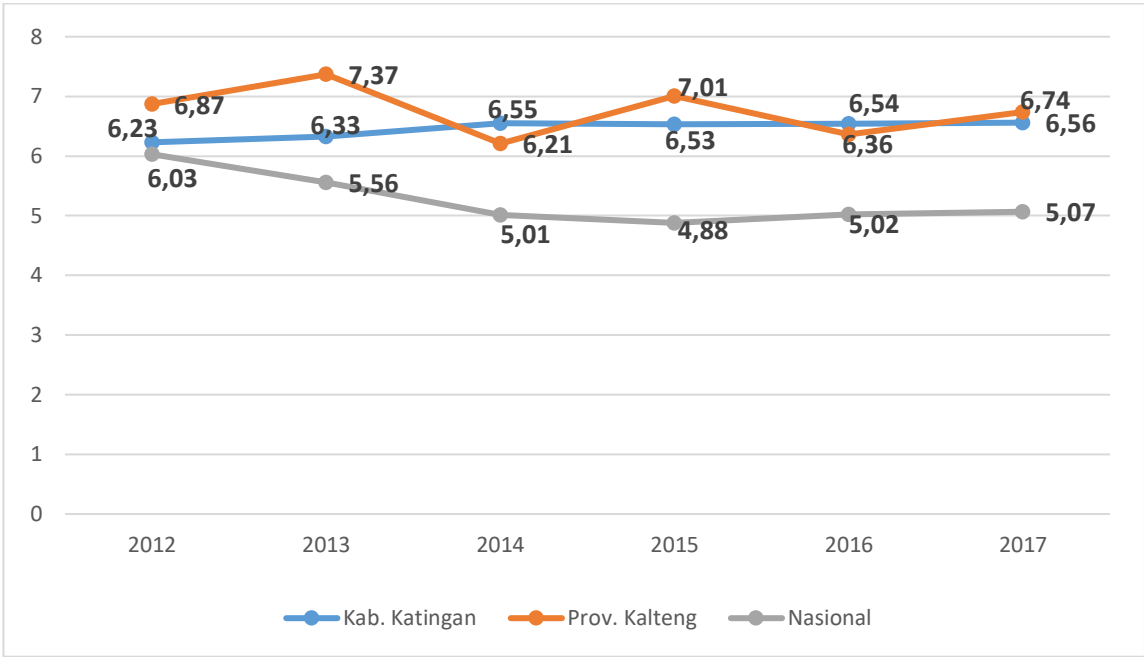
Pertumbuhan ekonomi Katingan Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Katingan 6,54 persen di Tahun 2016, dan di Tahun 2017 mampu tumbuh sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Konstruksi sebesar 9,49 persen, disusul kategori Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 9,21 persen dan kategori Real Estat yang tumbuh sebesar 8,69 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar mengalami peningkatan 4,18 persen. Sedangkan, kategori Industri Pengolahan sebagai penyumbang terbesar kedua mampu meningkat 6,72 persen.

Tabel 2.39
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (Persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,39	6,33	7,48	4,75	6,46	6,46
B	Pertambangan dan Penggalian	5,34	7,55	3,67	6,00	8,93	8,93
C	Industri Pengolahan	5,06	6,72	5,32	7,21	7,21	7,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,00	7,52	12,91	18,91	18,91	18,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,43	8,25	7,35	8,35	8,35	8,35
F	Konstruksi	8,95	7,45	9,16	9,55	9,55	9,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	6,73	6,58	6,84	6,84	6,84
H	Transportasi dan Pergudangan	3,19	2,78	3,88	2,08	2,08	2,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,31	8,91	9,11	9,34	9,34	9,34
J	Informasi dan Komunikasi	7,75	6,00	7,15	8,15	8,15	8,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	35,19	3,90	2,47	2,97	2,97	2,97
L	Real Estate	6,79	6,39	5,63	9,46	9,46	9,46
M,N	Jasa Perusahaan	6,35	6,88	9,73	8,74	8,74	8,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,76	7,03	7,88	10,03	10,03	10,03
P	Jasa Pendidikan	5,94	3,84	5,62	6,21	6,21	6,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	7,02	7,55	8,98	8,98	8,98
R,S,T, U	Jasa lainnya	7,05	7,24	8,27	9,82	9,82	9,82
	PDRB	6,23	6,33	6,55	6,53	6,54	6,56

Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun, BPS Katingan, 2018 diolah

Gambar 2.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber: BPS Kabupaten Katingan-BPS Provinsi Kalteng-BPS, 2018, diolah

Data laju pertumbuhan ekonomi Katingan pada Tahun 2017 berada sedikit dibawah Provinsi Kalimantan Tengah dan diatas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Katingan pada tahun 2017 sebesar 6,56 persen yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,54 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 sebesar 6,74 persen dan Nasional sebesar 5,07 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah maupun nasional mengalami peningkatan bila dibandingkan sebelumnya.

2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Katingan, khususnya di Kota Kasongan dipengaruhi oleh harga produk konsumsi dan komoditas di Kota Palangka Raya dan Sampit. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dan Sampit dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi, akan tetapi dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami kecenderungan penurunan.

Tabel 2.40
Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2013-2017

Uraian	Indeks dan IHK				
	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Palangka Raya	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11
Inflasi Kota Sampit	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29
Inflasi Prov. Kalteng	6,79	7,07	4,47	2,11	3,18

Sumber : Perkembangan IHK Prov. Kalteng, BPS Prov. Kalteng 2018, diolah

2.2.3. PDRB Per kapita

PDRB Perkapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun waktu 2012-2016 PDRB perkapita Kabupaten Katingan, baik dengan ADHB atau ADHK mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 25,07 juta dan 21,70 juta, tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 27,76 juta dan 22,67 juta, hingga di tahun 2016 meningkat kembali menjadi 37,63 juta dan 26,11 juta. Jika diamati lebih jauh, pertumbuhan PDRB perkapita Katingan selalu positif setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus bertambah setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.41
PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

No	PDRB Perkapita	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	ADHB (juta Rp.)	25,07	27,76	30,89	34,19	37,63	41,17
2	ADHK (juta Rp.)	21,70	22,67	23,76	24,89	26,11	27,41

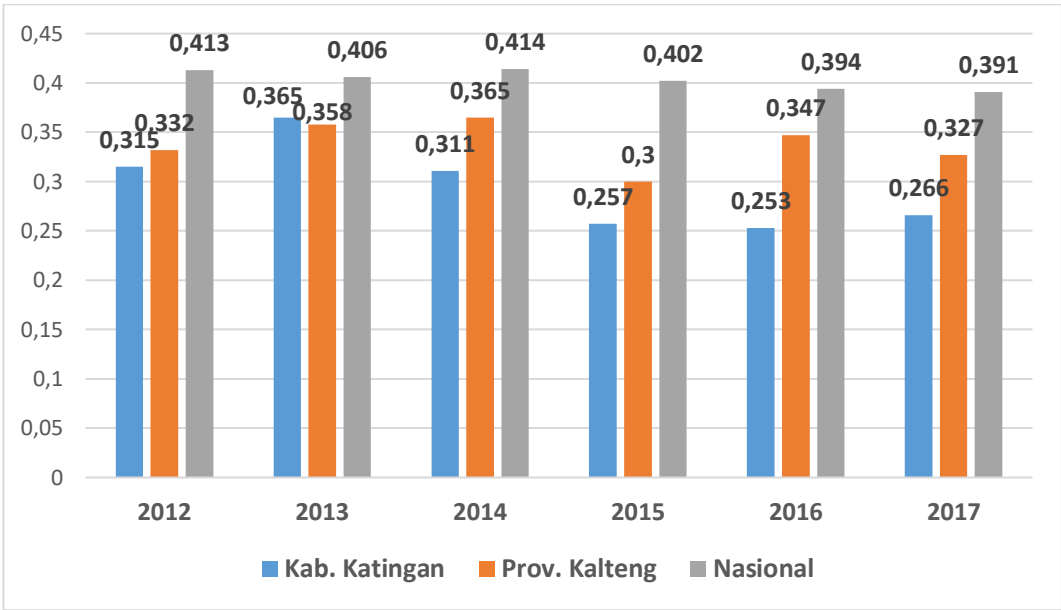
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, BPS Katingan, 2018, diolah

2.2.4. Indeks Gini

Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Indeks Gini Kabupaten Katingan mulai tahun 2012-2017 masuk kategori ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,4. Perkembangan Indeks Gini Katingan pada periode 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Posisi indeks gini Kabupaten Katingan selalu berada di bawah provinsi dan nasional. Bahkan di Tahun 2016 angka gini ratio Katingan sebesar 0,253 adalah

yang terendah se-Kalimantan Tengah. Kemudian di tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,266. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Katingan semakin merata (ketimpangan rendah) karena setiap golongan penduduknya menerima bagian pendapatan yang hampir sama.

Gambar 2.30 Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Dalam Angka 2013-2017, BPS Katingan 2018

2.2.5. Persentase Penduduk Miskin

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 mencapai 9.340 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,10%. Selama beberapa tahun (2012-2107), baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Katingan mengalami penurunan, kecuali pada Tahun 2015 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2015 meningkat dari 10.160 jiwa pada tahun 2014 menjadi 10.410 jiwa. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin meningkat dari 6,42% menjadi 6,53%. Namun setelah Tahun 2015, jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami trend penurunan sampai mencapai 5,78% pada Tahun 2017.

Selain jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, indicator kemiskinan lain yang penting tetap dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.42
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

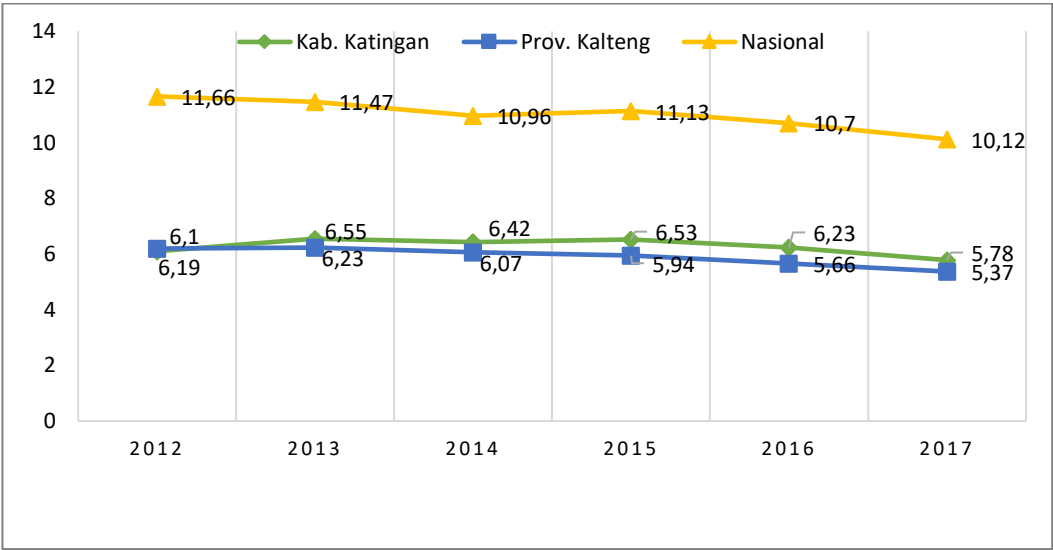
No.	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	9.340	10.200	10.160	10.410	10.100	9.510
2	Garis Kemiskinan (Rp)	299.427	325.773	341.896	356.695	387.848	412.113
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,10	6,55	6,42	6,53	6,23	5,78
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,21	0,85	1,03	0,97	0,85	0,92
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,32	0,19	0,27	0,22	0,19	0,27

Sumber : Potret Kemiskinan Prov. Kalteng, BPS Provinsi Kalteng, 2018, diolah

Data menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Katingan selama periode 2012 sampai 2017 mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2107 berada pada 0,92 yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,85. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan, selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2017 indeks keparahan kemiskinan juga mengalami fluktuasi. Data Tahun 2017 menunjukkan angka 0,27 yang meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,19. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat mengalami penurunan, sebab semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan selama periode 2012 sampai dengan 2017 mengalami kecenderungan penurunan. Kecenderungan penurunan ini juga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Katingan berada diatas. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang berada di angka 10,12% pada tahun 2017, maka persentase penduduk miskin Katingan jauh lebih rendah (5,78%).

Gambar 2.31 **Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017**



Sumber: Potret Kemiskinan Prov. Kalteng, BPS Provinsi Kalteng, 2018, diolah

2.2.6. **Indeks Pembangunan Manusia**

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.43

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

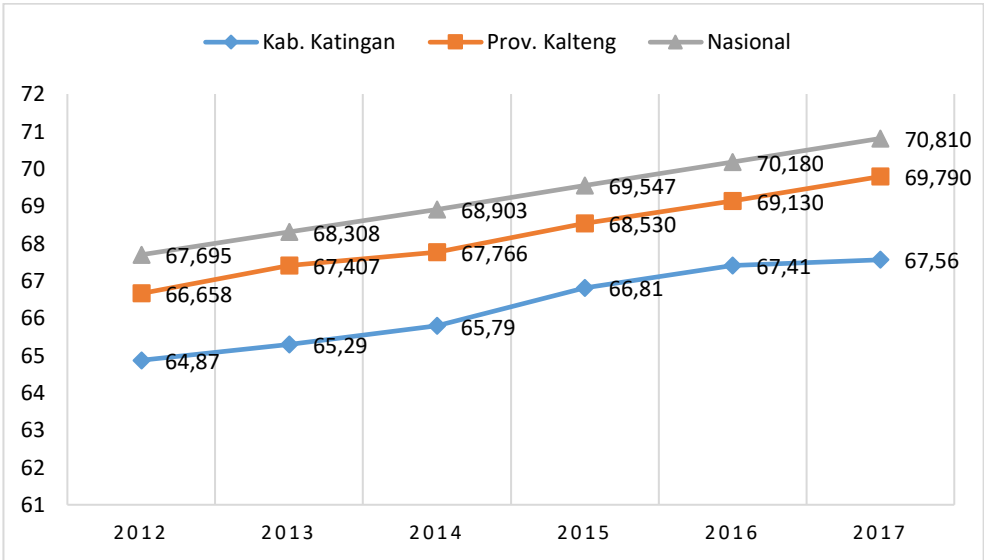
Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IPM (%)	64,87	65,29	65,79	66,81	67,41	67,56
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,15	8,17	8,23	8,62	8,63	8,64
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,14	11,40	11,69	12,03	12,19	12,20

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,82	64,89	64,98	65,28	65,40	65,53
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	9.357	9.452	9.542	9.599	9.960	10.276

Sumber : IPM Prov Kalteng 2017, BPS Prov. Kalteng, 2018, diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Katingan selama periode 2012-2017 masih berada dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$) atau sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$). Di tingkat Provinsi periode 2016-2017, Kabupaten Katingan termasuk 3 kabupaten yang pertumbuhan pembangunan manusianya paling rendah (0,22 persen), kondisi menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Meski trend IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun posisinya masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2017, IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 69,79 dan IPM Nasional sebesar 70,81. Walau demikian, berdasarkan gambar dibawah terlihat bahwa Kabupaten Katingan mengikuti trend peningkatan IPM dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber : IPM Prov Kalteng 2017, BPS Prov. Kalteng, 2018, diolah

2.2.7. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat

perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan.

Pada tahun 2012 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Katingan adalah 98,77 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 99,50 persen dan pada tahun 2014 sebesar 99,84 persen. Namun pada tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017 terus mengalami penurunan menjadi 99,61 persen, 99,50 persen dan 99,41 persen.

Tabel 2.44
Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2012-2017

Tahun	Angka Melek Huruf
2012	98,77
2013	99,50
2014	99,84
2015	99,61
2016	99,50
2017	99,41

Sumber : Katingan Dalam Angka Tahun 2014-2018, BPS Katingan, 2018

2.2.8. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 mencapai 8,63 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (8,62 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Berikut data rata-rata lama sekolah tahun 2012-2017.

Tabel 2.45
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
HLS (tahun)	11,14	11,40	11,69	12,03	12,19	12,20
RLS (tahun)	8,15	8,17	8,23	8,62	8,63	8,64

Sumber : IPM Prov Kalteng 2017, BPS Prov. Kalteng, 2018, diolah

2.2.9. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2012 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 64,82 terus meningkat sampai tahun 2017 yaitu 65,53. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup, mencapai usia 65-66 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

INDIKATOR	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	64,82	64,89	64,98	65,28	65,40	65,53

Sumber : IPM Prov Kalteng 2017, BPS Prov. Kalteng, 2018, diolah

2.2.10. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan status gizi dilihat berdasarkan indeks berat badan menurut umur. Pada Tahun 2012 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 2 kasus (jiwa), pada tahun 2013 tidak ditemukan kasus gizi buruk, pada tahun 2014 ditemukan 9 kasus gizi buruk, pada tahun 2015 ditemukan 2 kasus gizi buruk dan pada tahun 2017 ditemukan 3 kasus. Keseluruhan temuan Balita dalam kondisi gizi buruk telah ditangani dan mendapat perawatan sedini mungkin

di Puskesmas maupun RSUD Mas Amsyar Kasongan. Adapun perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.47
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

INDIKATOR	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	n/a	n/a	n/a	1,81	3,15	2,54

Sumber : Hasil Survei Pemantauan Status Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2018

2.2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara penghitungan, IPG merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Dengan menggunakan angka IPG, dapat diketahui perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 2.48
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,61	83,86	83,88	84,78
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,71	69,48	62,33	60,79

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan data sepanjang Tahun 2012 sampai dengan 2015, diketahui bahwa IPG di Kabupaten Katingan mengalami kecenderungan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender semakin lama semakin

kecil. Sementara IDG pada periode yang sama menunjukkan kecenderungan menurun pada Tahun 2014 dan 2015. Penurunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2.2.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	69,04	70,83	72,20	n/a	65,97

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018, BPS Katingan, 2018

* data tahun 2016 tidak tersedia sampai level kabupaten karena sampel tidak mencukupi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebesar 69,04 persen dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 meningkat menjadi 70,83 persen, 72,20 persen. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 65,97 persen.

2.2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan persentase rasio jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja (15-64) tahun. Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dilihat dari tahun 2017 penduduk Kabupaten Katingan yang tercatat sebagai pengangguran terbuka berjumlah 2.942 orang atau 3,81 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 4.849 orang atau 5,97% dari total jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Katingan. Selengkapnya angka pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupten Katingan sebagai berikut :

Tabel 2.50
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

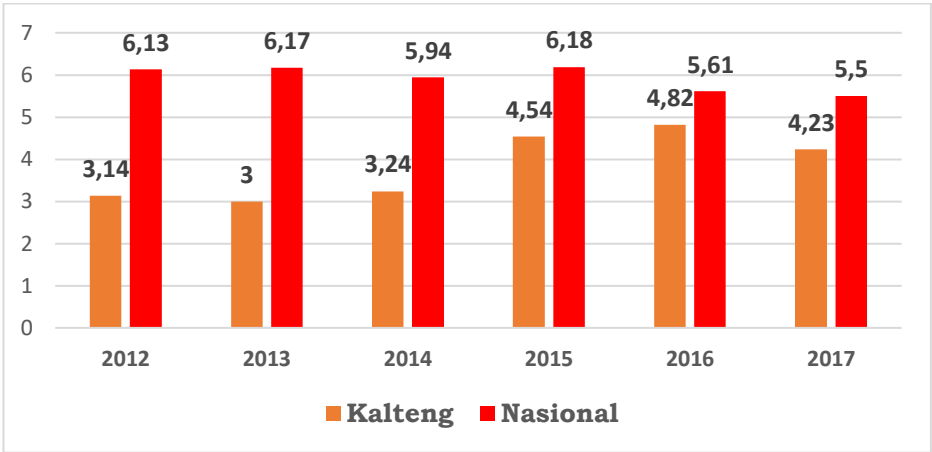
No.	Jenis Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Angkatan Kerja	70.445	77.849	81.174	n/a	77.142
1	Bekerja	66.348	73.778	76.325	n/a	74.200
2	Pengangguran Terbuka	4.097	4.071	4.849	n/a	2.942
B.	Bukan Angkatan Kerja	31.590	32.060	31.250	n/a	39.801
1	Sekolah	6.878	9.031	8.988	n/a	10.660
2	Mengurus rumah tangga	22.291	19.466	19.839	n/a	25.156
3	Lainnya	2.421	3.563	2.423	n/a	3.985
Jumlah		102.035	109.909	112.424	n/a	116.943
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5,82	5,23	5,97	n/a	3,81

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018, BPS Katingan, 2018

* data tahun 2016 tidak tersedia sampai level kabupaten karena sampel tidak mencukupi

Perkembangan indikator tingkat pengangguran terbuka Katingan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan posisi masih di atas, apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan mengalami penurunan yang menggembirakan hingga menjadi 3,81 persen dan berada dibawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional masing-masing sebesar 4,23 persen dan 5,5 persen.

Gambar 2.33. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber : BPS RI, 2018

2.2.14. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama menyukseskan program dimaksud, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga, yaitu : Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah Keluarga Prasejahtera, I, II, III dan III Plus tahun 2012 sebanyak 40.190 keluarga dan pada tahun 2016 menurun menjadi 33.554 keluarga. Pada data terlihat perubahan drastis terjadi pada kelompok Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang terus meningkat hingga tahun 2016. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya Keluarga Prasejahtera telah beralih menjadi Keluarga Sejahtera I. Namun yang perlu diwaspadai adalah kondisi bertambahnya jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I ini tidak baik bila berlangsung cukup lama. Perlu diupayakan berbagai cara untuk menggeser ke arah kategori Keluarga Sejahtera II bahkan hingga ke kategori Keluarga Sejahtera III Plus.

Tabel 2.51
Keluarga Prasejahtera I, II, III dan III Plus
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Keluarga Prasejahtera	1.994	1.449	1.284	2.108	2.108
Keluarga Sejahtera I	9.467	8.775	7.902	14.261	14.261
Keluarga Sejahtera II	21.476	25.010	24.836	17.185	17.185

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Keluarga Sejahtera III	6.491	6.876	8.663	-	-
Keluarga Sejahtera III Plus	762	1.051	1.008	-	-
Jumlah Keluarga	40.190	43.211	43.693	33.554	33.554
Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29	24	21	49	49

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2013-2018, diolah

2.2.15. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propenas), perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selama ini Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan ini, terdapat 9 unsur IKM yang dijadikan pengukur tingkat kepuasan masyarakat, yakni (1) persyaratan; (2) prosedur; (3) waktu pelayanan;

(4) biaya/taruf; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) maklumat pelaksana; dan (9) penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama ini pelaksanaan survey IKM di Kabupaten Katingan hanya pada dua instansi saja, yaitu RSUD Mas Amsyar Kasongan dan Dinas Dukcapil sedang di perangkat daerah lain yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat belum terlaksana seperti pada Dinas Penanaman Modal PTSP, Puskemas dan Kecamatan/Keluarahan. Salah satu kendalanya adalah jumlah responden yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 sebanyak minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan tidak terpenuhi.

Tabel 2.52
Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Kabupaten Katingan Tahun 2015 dan Tahun 2016

UNIT PELAYANAN	Tahun 2015		Tahun 2016	
	Nilai IKM	Kategori	Nilai IKM	Kategori
RSUD Mas Amsyar Kasongan	74,87	B (Baik)	72,87	B (Baik)
Dinas Dukcapil Kab. Katingan	79,01	B (Baik)	76,17	B (Baik)
Rata-rata	76,94	B (Baik)	74,52	B (Baik)

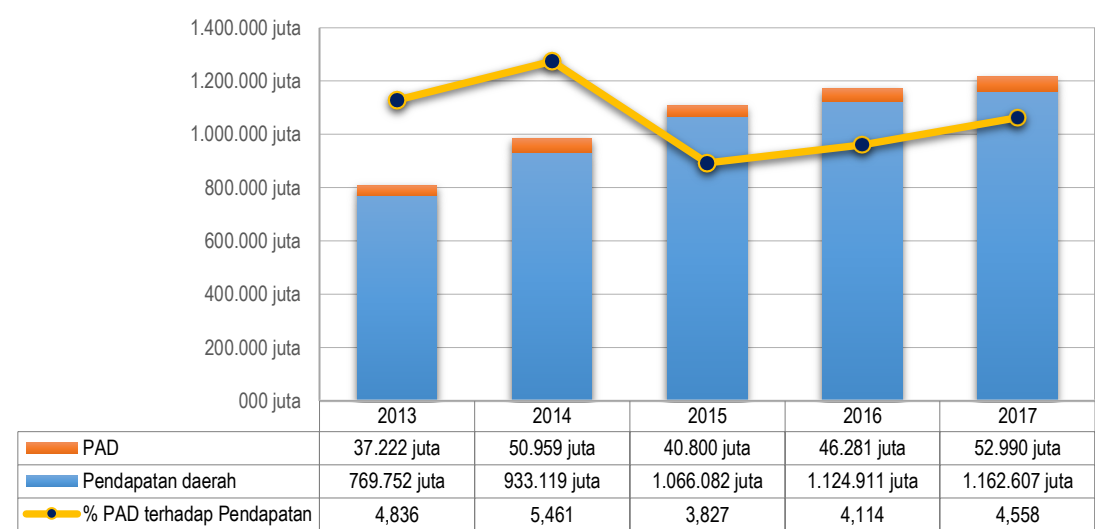
Sumber : Bagian Ortal, Setda 2017, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat mutu pelayanan umum di RSUD Mas Amsyar Kasongan maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan mendapat Kategori B dan kinerja pada unit pelayanan tersebut sudah baik, meski trennya mengalami penurunan di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.

2.2.16. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan kontribusi PAD periode tahun 2013-2017.

Gambar 2.34 **Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 - 2017**



Sumber : DPKAD Kabupaten Katingan, 2018, diolah

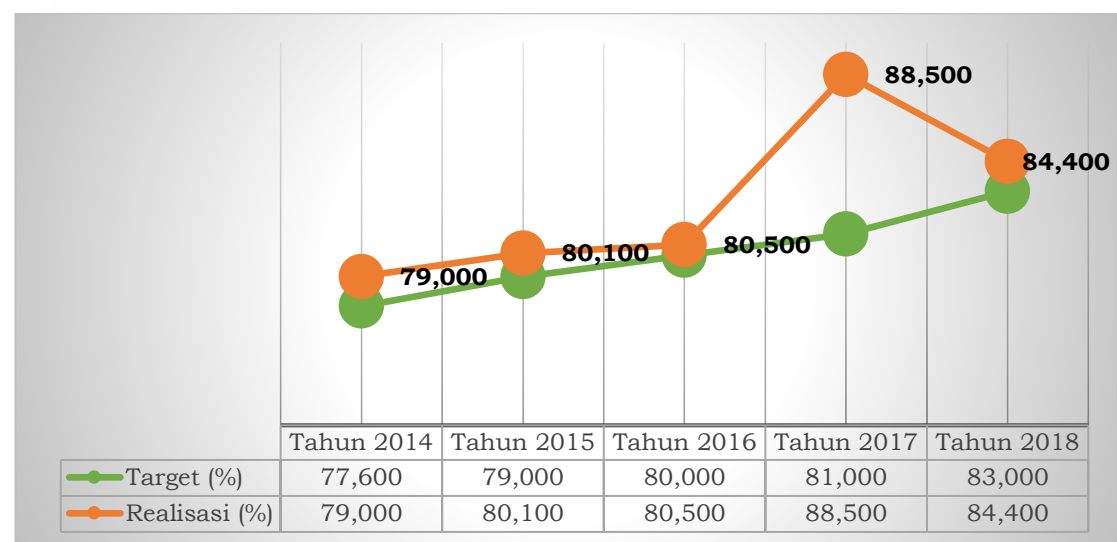
Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan masih sangat kecil. Presentase PAD tertinggi ada di tahun anggaran 2014 yang mencapai 5,46%, walaupun di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dan kenaikan.

2.2.17. **Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Kesimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, dengan demikian PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan dan keanekaragaman pangan. Dengan terpenuhi kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi. Oleh karena itu, skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan dan seimbang. Penetapan PPH bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi berdasarkan cita rasa, daya cerna, daya terima, masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli.

Adapun yang dimaksud dengan nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

Gambar 2.35 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan



Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2018 diolah

2.2.18. Opini BPK

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : BPKAD Kabupaten Katingan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan prestasi yang baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2.2.19. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB adalah sektor yang paling besar kontribusinya terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Katingan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kelima sub sektor ini membuka lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Katingan.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 30,04 persen, namun sejak tahun 2014 mengalami pelambatan dan terus menurun sampai 26,78 pada tahun 2017.

Tabel 2.54
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	30,04	29,80	28,57	27,94	26,78
Laju Pertumbuhan (%)	6,33	7,48	4,75	6,46	4,18

Sumber : 1. Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018
2. PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

2.2.20. Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha terdiri atas 5 (lima) subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan masih berusaha di sektor pertanian dalam arti luas, selebihnya terdistribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Selain didukung oleh ketersediaan lahan yang luas, potensi pada sektor pertanian di Kabupaten Katingan masih memiliki peluang besar untuk lebih dikembangkan guna menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Peningkatan pengelolaan potensi di sektor pertanian tentunya sangat penting untuk diupayakan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa produktivitas tanaman pangan utama berupa padi di Kabupaten Katingan dalam beberapa tahun terakhir (2012-2017) rata-rata menghasilkan produksi 3,2 ton per hektarnya. Khusus untuk produktivitas pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelum dari 3,34 ton menjadi 3,06 ton, dimana angka ini jauh dari target daerah sebesar 3,35 ton per hektarnya. Menurunnya produksi di sektor pertanian ini, hendaknya menjadi perhatian bagi berbagai pihak mengingat potensi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan berupa ketersediaan lahan dan tenaga kerja sangatlah besar. Salah satu solusi

yang dapat digunakan adalah dengan pengayaan bibit unggul dan penggunaan teknologi pertanian baik untuk pengolahan lahan maupun pemupukan.

Tabel 2.55
Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Katingan

Uraian / Jenis Komoditi	Tahun Produksi					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Produksi Sektor Pertanian						
1. Produksi Tanaman Pangan						
a. Padi (ton)	56.791	56.229	63.895	68.875	65.634	64.216
1) Padi Sawah (Ton)		42.294	55.003	53.231	47.880	52.011
2) Padi Ladang (Ton)		13.935	8.892	15.644	16.476	12.205
b. Jagung (ton)	124	268	161	72	119	133
c. Kedelai (ton)	39	32	6	6	2	2
d. Kacang Tanah (Ton)		7	18	17	12	2
e. Kacang Hijau (Ton)		1	4	3	2	1
f. Ubi kayu (ton)	-	1.055	1.886	2.053	1.844	1.774
g. Ubi jalar (ton)	-	221	363	437	292	143
2. Produksi Tanaman Holtikultura						
a. Bawang merah (kw)	-	-	36	-	-	
b. Cabe (kw)	468	365	488	461	726	
c. Durian (buah)	8.749	3.648	5.891	3.342	2.688	
d. Mangga (kw)	1.009	811	1.048	1.085	797	
e. Pisang (ton)	7.205	8.544	12.630	11.837	9.053	
f. Sayur-sayuran (kw)	3.566	3.057	218	335	340	5.331,0
g. Buah-buah lainnya (kw)	27.130	19.456	2.896	2.683	2.763	21.396
Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	18.771	19.728	19.171	20.802	21.199	20.673
Produktivitas tanaman padi (ton/ha)	3,03	3,27	3,38	3,34	3,06	3,13
B. Produksi Sektor Perkebunan						
1.Sawit (ton)	-	-	203.321,62	1.702	11.307,75	11.307,8
2.Karet (ton)	-	-	5.552,53	5.632	2.299,05	2.647,3
3.Kelapa (ton)	-	-	327,17	1.712	166,32	166,3
4.Kopi (ton)	-	-	9,72	9,72	0,30	0,30
Luas Areal Tanaman Perkebunan (ha)						
1.Sawit (ha)	-	-	73.049,60	3.359,00	16.380,50	16.968,00
2.Karet (ha)	-	-	17.880,77	18.385,70	19.193,11	19.193,10
3.Kelapa (ha)		2.076,05	494,77	3.557,05	491,12	491,10
4.Kopi (ha)		134	33	33	16	15,9
Produktivitas sawit (ton/ha)		-	2,78	2.35	2.79	3.17
Produktivitas karet (ton/ha)		-	0,31	0,30	0,12	0,14

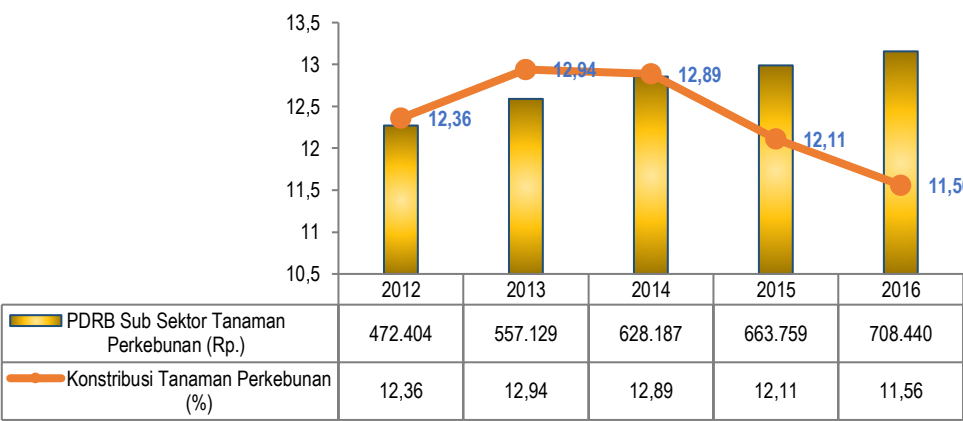
Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, 2018

Untuk sektor perkebunan kondisinya juga tidak berbeda jauh. Data di tahun 2017 menunjukkan produktivitas karet di tingkat petani mengalami penurunan dari 0,31 ton/ha di tahun 2014 menjadi 0,14 ton/ha. Untuk produktivitas komoditas sawit justru mengalami peningkatan dari 2,78 ton/ha (tahun 2014) menjadi 3,17 ton/ha.

2.2.21. Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Tanaman Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Sub sektor pertanian perkebunan merupakan bagian dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori lapangan usaha ini menjadi salah satu tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Namun dalam 5 (lima) tahun terakhir, sub sektor ini pertumbuhannya mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Meski sumbangan bagi PDRB Kabupaten katingan mengalami peningkatan pertahunnya, namun sumbangannya terhadap pertumbuhan daerah justru mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 12,94%, selanjutnya terus menurun sampai pada tahun 2016 menjadi 11,56%. Adapun PDRB dari sub sektor tanaman pertanian perkebunan di tahun 2016 sebesar Rp.708.440 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp.663.759. Berikut grafis perkembangan kontribusi sub sektor pertanian tanaman perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2012–2016 :

Gambar 2.36 Peranan Sub Sektor Pertanian Tanaman Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016



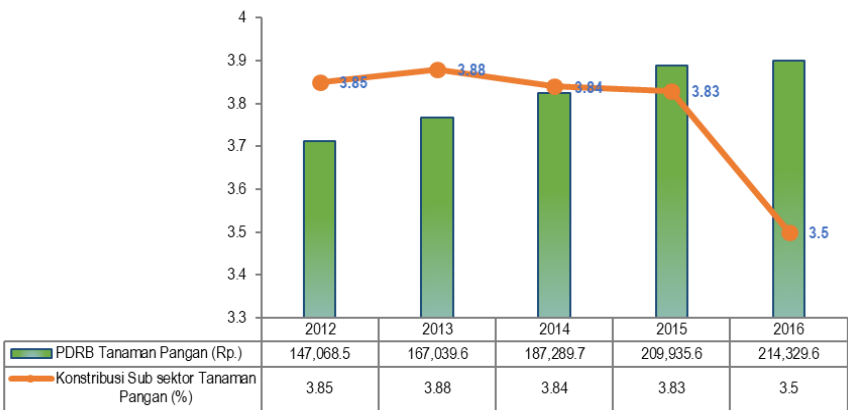
Sumber : BPS Kab. Katingan, diolah.

2.2.22. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan (Palawija) terhadap PDRB

Trend penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB juga terjadi pada sub sektor pertanian pangan, khususnya palawija. Tahun 2012-2015 cenderung staknan, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 3,83

menjadi 3,50%. Adapun PDRB dari sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp.209.936 menjadi Rp.214.330 di tahun 2016. Berikut grafis perkembangan PDRB subsektor pertanian tanaman pangan (palawija) dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah:

Gambar 2.37 Peranan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

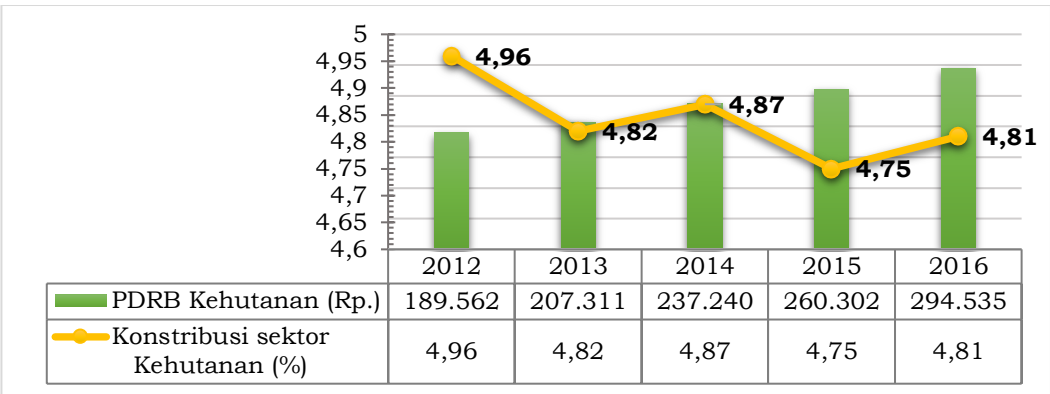


Sumber : BPS Kab. Katingan, diolah

2.2.23. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Potensi pada sektor kehutanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga tahun 2016, penerimaan daerah dari sektor kehutanan terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Dana Hibah, dan IIUPH sebesar Rp.91.930.689.763. Namun, dengan adanya perubahan kewenangan daerah dalam mengelola sektor kehutanan ini, dimana sejak tahun 2017 urusan kehutanan akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diprediksi sumbangan sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Katingan akan berkurang. Berikut gambaran kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2012–2016:

Gambar 2.38 Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016



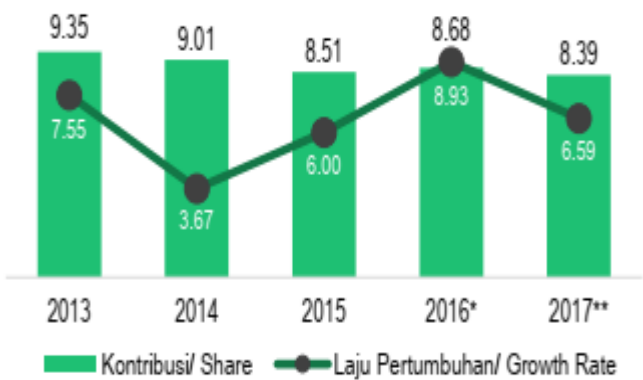
Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan PDRB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari Rp.260.302 di tahun 2015 menjadi Rp.294.534 di tahun 2016. Tetapi secara umum besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir ini justru mengalami perlambatan dari angka 4,96% di tahun 2012 menjadi 4,82% di tahun 2016. Artinya peran sub sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi juga semakin menurun berbanding lurus dengan hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perijinan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Katingan karena sejak tahun 2017 diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

2.2.24. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Terkait dengan adanya Undang–Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan kabupaten dalam bidang pertambangan semakin berkurang dan hanya sebatas pengelolaan panas bumi, selebihnya di serahkan ke pemerintah pusat dan provinsi. Demikian pula dengan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Katingan, juga semakin berkurang dari 9,35% di tahun 2013 menjadi sebesar 8,39% di tahun 2017.

Gambar 2.39 Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017



Sumber : PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kab. Katingan

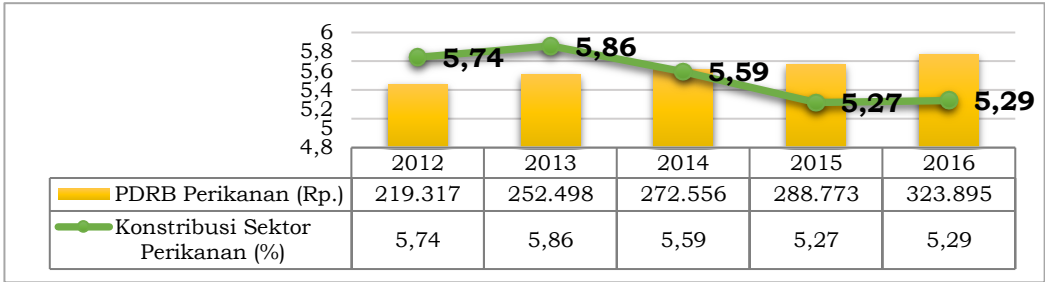
Potensi pertambangan di Kabupaten Katingan yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ada di sub sektor pertambangan bijih logam dengan rata sumbangannya sebesar 8,04 – 8,47% dalam periode 2012-2016.

2.2.25. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komponen dari sektor pertanian dalam arti luas yang memberikan yang mempunyai potensi sangat

besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di miiki oleh Kabupaten Katingan yang memberikan banyak peluang usaha bagi masyarakat di hampir semua wilayah di Kabupaten Katingan. Selain itu, disektor perikanan ada pula potensi besar yang sudah berkembang yaitu budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besarnya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum pada lima tahun terakhir ini justru mengalami penurunan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,74% di tahun 2012 menjadi 2,29% di tahun 2016. Namun demikian, ada peningkatan nilai PDRB sektor perikanan sepanjang lima tahun terakhir, yakni dari Rp.219.316 menjadi Rp.323.895 di tahun 2016. Berikut grafis peran sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2012-2016 :

Gambar 2.40 Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2012 - 2016



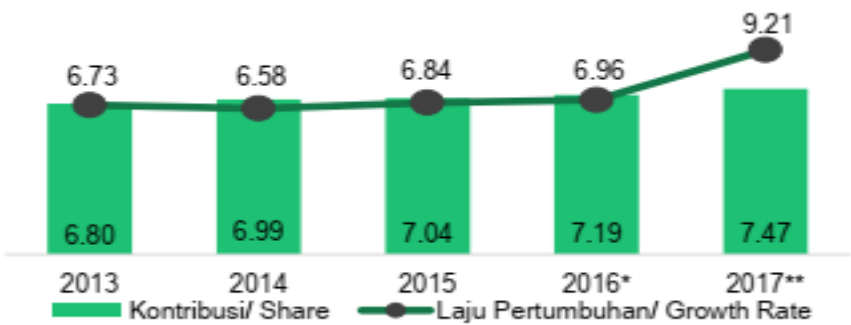
Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

2.2.26. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

Peningkatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan berbanding lurus dengan kenaikan sumbangan sektor perdagangan dalam periode lima tahun terakhir ini. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat dan lapangan usaha yang dihasilkan oleh sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dengan munculnya banyak pusat-pusat perdagangan besar maupun eceran di beberapa kecamatan sebagai dampak dari semakin membaiknya iklim investasi di Kabupaten Katingan. Selain itu, semakin membaiknya infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh Pemkab Katingan sehingga mampu membuka jalur perhubungan antar kecamatan di Kabupaten Katingan menjadi salah satu faktor meningkatkan peran sektor perdagangan besar dan eceran, resparasi mobil dan sepeda motor bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam lima tahun terakhir ini. Peningkatan ini terlihat dari nilai kontribusi maupun laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor. Berikut grafis pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan kontribusinya terhadap lapangan usaha di Kabupaten Katingan.

Gambar 2.41 Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2013 - 2017

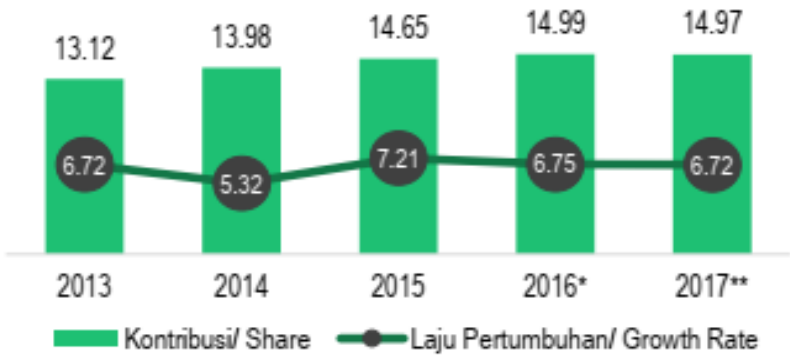


Sumber : PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kab. Katingan

2.2.27. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam lima tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan dan memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan. Kontribusi PDRB sektor industri tahun 2013 adalah 13,12 % dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya menjadi 14,97% di tahun 2017. Jenis industri yang meningkat di Kabupaten Katingan salah satunya adalah industri pengolahan kelapa sawit atau CPO. Peningkatan peran industri pengolahan sawit ini menunjukkan bahwa lapangan usaha yang muncul dari dampak semakin perkembangan usaha perkebunan kepala sawit di Kabupaten Katingan mampu memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut gambaran perkembangan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan periode 2013-2017 :

Gambar 2.42 Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017



Sumber : PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kab. Katingan

2.2.28. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB

Pariwisata dipandang secara luas mampu memberikan keuntungan terhadap pendapatan masyarakat, pajak dan retribusi daerah, serta lapangan kerja apabila sektor ini dikelola dengan baik. Di Kabupaten Katingan, potensi dari sektor pariwisata belum dikelola secara baik dan optimal, sehingga penerimaan PDRB dari sektor ini masih kecil. BPS Kabupaten Katingan hingga tahun 2017 belum pernah merilis data penerimaan PDRB dari sektor ini. Namun kedepan, melihat dari perkembangan potensi kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ukuran berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah dilihat melalui peningkatan jumlah pengunjung, pajak maupun retribusi daerah, maupun penggunaan jasa transportasi.

Pendekatan dalam menentukan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, untuk sementara digantikan/dilihat melalui jumlah realisasi PAD dari kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Katingan yang tercatat hanya pada obyek tertentu, seperti obyek wisata Bukit Batu-Kasongan yang dihitung dari jumlah tiket masuk yang terjual. Untuk wisawatan mancanegara sampai saat ini belum ada data terkait jumlah pengeluaran wisatawan, lama tinggal, dan sumbangan bagi PAD.

Tabel 2.56
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD dan Jumlah Kunjungan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah devisa sektor pariwisata (ribuan Rp.)	76.444	78.234	94.817	80.055	89.148	n/a
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	40.142	33.177	34.788	32.906	40.633	32.405
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	48	13	42	58	113	165

Sumber : Disbudparpora, 2018

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Katingan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.57
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI	114,6	113,9	118,7	109,5	108,0
APK SMP/MTS	98,13	98,11	98,13	98,17	98,65
APK SMA/MA/SMK	67,02	71,46	71,48	73,91	85,43

Sumber : diakses dari <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Kabupaten Katingan angka partisipasi kasar yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI, yaitu 7-12 tahun dengan APK di atas 100 persen pada tahun 2017 dan diikuti APK SMP/MTS di atas 98 persen.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan

standar tersebut. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun tertentu terjadi peningkatan dan penurunan.

Tabel 2.58
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
APM SD/MI	91,89	92,7	92,66	94,2	93,24
APM SMP/MTS	70,5	72,85	72,89	69,89	71,18
APM SMA/MA/SMK	51,57	47,45	54,84	52,84	55,95

Sumber : diakses dari <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>, 2018

Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa APM SD/MI pada periode 2013 sampai dengan 2017 pada umumnya mengalami berkisar pada angka 91-94 persen. Selanjutnya untuk APM SMP/MTs pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami fluktuasi, dimana APM SMP/MTS masih dibawah angka 73 persen. Begitu pula perkembangan APM SMA dan sederajat yang masih menunjukkan angka masih dibawah 60 persen.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR (%)	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	99,54	100	100	100	100
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	86,31	96,36	93,92	96,38	97,64
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	58,13	70,60	72,36	72,89	74,04
4	Perguruan Tinggi	n/a	16,25	14,60	16,04	13,01

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2013-2017

Berdasarkan data BPS sebagaimana disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD, usia SLTP, dan usia SLTA. Di Kabupaten Katingan angka partisipasi sekolah pada tahun 2017 yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun dengan APS 100 persen, artinya semua

penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sudah mengenyam atau mengakses pendidikan di SD, Namun untuk kelompok umur diatasnya, Angka Partisipasi Sekolah cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi semakin sulit.

d. **Angka Kelulusan**

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka kelulusan yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

NO	INDIKATOR	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	104,75	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,79	99,6	120,51	98,4
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,79	99.53	103,5	-

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2014 – 2017,diolah

Berdasarkan tabel diatas Angka Kelulusan di Kabupaten Katingan dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Katingan angka kelulusan pada setiap penjenjangan usia sekolah selalu dengan rasio mendekati maupun diatas 100 persen.

e. **Angka Melanjutkan (AM)**

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi dengan jumlah luluan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya dikalikan 100, sedangkan Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah luluan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dikalikan 100. Angka Melanjutkan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

NO	INDIKATOR	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	79,43	79,59	101,51	87
2	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	98,83	98,96	86,12	-

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2014-2017, diolah

Berdasarkan tabel diatas, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Katingan tahun 2014 sebesar 79,43 persen, di tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat menjadi 79,59 persen dan 101,51 persen akan tetapi menuju tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 87 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 98,93 persen, di tahun 2015 meningkat menjadi 98,96 persen dan di tahun 2016 menurun menjadi 86,12 persen.

f. Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, selain untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	Tahun Ajaran	Jenjang Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2013/2014	14 : 1	10 : 1	9 :1	9 :1
2	2014/2015	14 : 1	11 : 1	11 : 1	11 : 1
3	2015/2016	14 : 1	11 : 1	11 : 1	11 : 1
4	2016/2017	12 : 1	10 : 1	11 : 1	
5	2017/2018	14 : 1	12 : 1	12 : 1	

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2016-2017

Dengan membandingkan data pada tabel di atas terhadap standar nasional rasio murid guru menurut Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 sebesar 20:1, ketersediaan guru di Kabupaten Katingan sudah sangat mencukupi secara umum. Pada tahun ajaran 2016/2017, rata-rata setiap guru SD/ sederajat bertanggung

jawab untuk mengajar sekitar 12 siswa, pada jenjang SMP/ sederajat rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 10 orang siswa dan SMA/MA rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 11 orang siswa. Informasi tersebut menunjukkan bahwa beban pengajar pendidik begitu ringan sehingga menimbulkan espektasi akan capaian output kualitas pendidikan yang tinggi padahal beberapa aspek seperti kualifikasi tenaga pendidik, variasi kondisi kelas, dan pengalaman tenaga pendidik belum tercakup pada indikator tersebut.

g. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah jumlah guru berijazah kualifikasi D1/D-IV dibagi dengan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dikalikan 100. Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016

NO	INDIKATOR	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,81	76,41	81,34	79,87

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan, 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka guru yang meemnuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2014 sebesar 99,81 persen, dan terus menurun ke 79,87 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pengalihan jumlah guru SMA dan SLB ke Pemerintah Provinsi.

2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Katingan, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

a. Angka Kematian bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari satu tahun di suatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayan perinatal.

Adapun perkembangan kematian bayi di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.64
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kelahiran Hidup	2.479	2.875	2.892	3.452	3.094
2.	Jumlah Kematian Bayi	8	5	6	31	9
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	3,23	1,74	2,07	8,90	2,91

Sumber : Profile Kesehatan Kabupaten Katingan 2017

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2013 sebesar 3,23 dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2014 yaitu menjadi 1,74. Namun pada tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi kenaikan kembali masing-masing 2,07 dan 8,90. Kondisi kembali dapat dikendalikan pada tahun berikutnya, dengan ditunjukkan menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 2,91.

b. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berumur dibawah 5 (lima) tahun disuatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan, selain itu indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dalam tingkat kemiskinan penduduk. Berikut disajikan tabel Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.65
Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	0,00	10,09	3,11	12,75	8,73

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Katingan 2017

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Balita Kabupaten Katingan pada tahun 2014 sebesar 10,09 , menurun pada tahun 2015 menjadi 3,11. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2016 dimana AKABA meningkat menjadi 12,75 akan tetapi pada tahun 2017 terjadi perbaikan menjadi 8,73.

c. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Adapun angka kematian ibu di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.66
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	322,71	556,52	449,52	144,84	96,96

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Katingan 2017

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Ibu Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebesar 322,71 meningkat pada tahun 2014 menjadi 556,52. Namun dengan upaya berbagai pihak, maka mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, AKI dapat ditekan turun hingga menjadi 96,96.

d. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Adapun jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2013 sebanyak 179 posyandu, meningkat di tahun 2014 dan 2015 menjadi 200 posyandu dan 199 posyandu, meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 214 posyandu dan menurun menjadi 203 pada tahun 2017.

Tabel 2.67
Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Katingan
Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu (unit)	179	200	199	214	203
2	Jumlah Balita (anak)	12.537	15.272	16.774	13.660	13.640
3	Rasio Posyandu	1,428	1,310	1,186	1,567	1,488

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2018

e. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Adapun jumlah puskesmas dan puskesmas yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas (unit)	16	16	16	16	16
2	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,105	0,103	0,101	0,100	0,098
3	Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	104	111	109	110	111
4	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,68	0,72	0,69	0,69	0,68
5	Jumlah Penduduk (jiwa)	152.724	155.100	157.654	160.305	162.837

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Katingan 2016-2017,diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah puskesmas di Kabupaten Katingan berjumlah 16 Puskesmas hingga tahun 2017. Sementara jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2013 berjumlah 104 puskesmas pembantu, meningkat setiap tahun dan terakhir sebanyak 111 di tahun 2017. Namun data pada tabel diatas menunjukkan terjadinya penurunan jumlah puskesmas

pembantu pada tahun 2015 disebabkan 1 Puskesmas pembantu di desa Rantau Puka Terbakar dan 1 Puskesmas Pembantu di Desa Samba Katung, Pustu yang dihibahkan diambil alih kembali oleh masyarakat.

f. Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Adapun Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.69
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006
2	Jumlah Rumah Sakit (unit)	1	1	1	1	1
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	152.724	155.100	157.654	160.305	162.837

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Diketahui bahwa jumlah fasilitas Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 hanya berjumlah 1 (satu) Rumah Sakit, hal ini tentunya menjadi kekurangan apabila melihat rasio ketersediaanya.

g. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000. Adapun Rasio dokter per satuan penduduk yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter (orang)	39	45	43	43	43

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	152.724	155.100	157.654	160.305	162.837
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0,26	0,29	0,27	0,27	0,26

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Katingan, 2015-2018, diolah dan Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2018

h. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikalikan 100. Adapun cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

N O	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	43,09	41,30	27,72	19,50	28,05
2	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	240	261	224	157	225
3	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan (jiwa)	557	632	808	805	802

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebesar 43,09 persen, menurun berurutan di tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 menjadi 41,30 persen, 27,72 persen dan 19,50 persen.

i. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab

itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa. Adapun Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2013-2017 di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.72
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Nakes (jiwa)	2.507	2.909	2.789	3.236	2.955
Jumlah seluruh ibu bersalin (jiwa)	2.656	3.015	3.858	3.843	3.828
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (persen)	94,39	96,48	72,29	84,21	77,19

Sumber : Profile Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan,2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013, indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 94,39 persen dan meningkat pada tahun 2014 masing-masing 96,48 persen. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 72,29 persen dan tahun 2016 meningkat kembali menjadi 84,21 persen. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali hingga menjadi 77,19 persen.

j. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* (UCI) adalah jumlah desa atau kelurahan UCI dibagi dengan jumlah seluruh desa atau kelurahan dikali 100. Adapun Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* yang ada di Kabupten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (%)	73,42	70,81	70,18	67,08	60,25

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah desa/kelurahan Universal Child Immunization (desa)	115	114	113	108	97
3	Jumlah Seluruh Desa (desa)	161	161	161	161	161

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan,2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa indikator cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu mengalami penurunan, kondisi ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah, sebab akan berdampak negatif bagi kondisi kesehatan masyarakat.

k. **Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan**

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali 100. Adapun Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan (anak)	3	9	2	2	3
3	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan (anak)	3	9	2	2	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan,2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 persen atau dengan kata lain seluruh pasien balita gizi buruk yang ditemukan selalu diberikan perawatan yang maksimal.

l. **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah

kerja pada selama satu tahun berbagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.75
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	15,09	15,45	20,12	54,90	14,53
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja	99	72	97	56	110
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan di satu wilayah kerja (suspek)	656	466	482	102	757

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Katingan 2013-2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) di tahun 2013 sebesar 99 kasus dan cenderung meningkat selama kurun waktu sampai dengan tahun 2017. Namun dalam kurun waktu 5 (enam) tahun tersebut terdapat penurunan jumlah kasus sampai 56 kasus pada tahun 2016. Peningkatan kasus penderita baru TBC BTS (+) ini meningkat cukup drastis pada tahun 2017 menjadi 110 kasus. Situasi ini perlu diwaspadai dan ditangani agar tidak menjadi semakin berkembang dan menular. Upaya pengobatan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Ini terlihat dari statistis indicator perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang terus meningkat, bahkan jauh melampaui jumlah penderita baru.

m. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah Jumlah penderita DBD yang ditanani sesuai SOP di suatu wilayah selama satu tahun berbagi dengan penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Adapun Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.76
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP (orang)	33	27	46	62	23
3	Jumlah penderita DBD yang ditemukan (orang)	33	27	46	62	23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan,2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP setiap tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu tuntas sebanyak jumlah penderita DBD yang ditemukan.

n. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100.

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana tahun-tahun tertentu memiliki cakupan yang luas dan sempat mencapai 98,18 pada tahun 2013. Namun tak dipungkiri pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan cakupan layanan menjadi 54,62 persen akan tetapi pada tahun 2016 dan tahun 2017 mulai meningkat kembali ke atas angka 90 persen. Adapun rincian Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Cakupan Kunjungan Bayi
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,18	99,27	54,62	99,41	92,34
2	Jumlah Kunjungan Bayi (anak)	2.483	2.851	3.868	3.538	3.279
3	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup (anak)	2.529	2.872	7.082	3.559	3.551

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Katingan 2013-2017

o. **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dapat dilihat bahwa indikator cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 97,02 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 95,03 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 82,38 persen. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 83,70 persen.

Adapun rincian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan pada periode 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	97,02	95,03	82,38	82,41	83,70

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Katingan 2017

p. **Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2013 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 93,23 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017. Adapun rincian Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 2.79
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (%)	91,08	93,23	76,88	88,84	77,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

q. **Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani**

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir

mengalami fluktuasi. Dimana Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani pada tahun 2013 sebesar 25,26 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 22,52 persen dan 15,68 persen, namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 36,11 persen dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 23,06 persen.

Tabel 2.80
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani (%)	25,26	22,52	15,68	36,11	23,06

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Katingan 2013-2017

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Panjang Jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 adalah 784,37 Km, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 794,37 Km. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2016 hanya 125,56 Km dalam kondisi baik atau 16,01 persen. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini sedikit mengalami peningkatan. Adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2012 – 2017 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Kondisi Jalan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	48,68	128,55	131,16	123,54	125,56	146,83
Panjang Jalan Kondisi Mantap (km)	92,66	201,06	197,88	211,66	237,876	250,79
Panjang Jalan Keseluruhan (km)	435,25	442,24	475,58	740,38	784,37	794,37
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	11,18	29,07	27,58	16,69	16,01	18,48
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap (%)	21,29	45,46	41,61	28,59	30,33	31,57

Sumber : Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2018 dan Katingan Dalam Angka Tahun 2018, diolah

b. Panjang Jalan dilalui Roda Empat

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2017 yang berupa permukaan aspal sepanjang 256,11 km dan permukaan tanah sepanjang 482,37 km. Terlihat panjang jalan yang permukaannya telah diaspal masih lebih sedikit dibandingkan dengan jalan yang permukaannya tanah.

Tabel 2.82
Panjang Jalan Yang Dapat Dilalui Roda Empat di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Permukaan Aspal (km)	95,93	191,74	218,17	223,14	234,66	256,11
2	Permukaan Tanah (km)	336,91	248,13	252,39	344,23	437,04	482,37
3	Permukaan Kerikil (km)	2,42	2,37	5,02	6,98	8,33	10,21
4	Permukaan Lainnya (km)	-	-	-	166,02	104,34	45,67

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018

c. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran di Kabupaten Katingan tahun 2014 sepanjang 311,14 km, tahun 2016 menjadi 470,32 km. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase /saluran (Km)	0,56	0,56	1,36	1,42	1,42
Panjang Jalan yang memiliki drainase /saluran (Km)	279,26	311,14	395,94	470,32	536,57

Sumber : Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2018

d. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnnya. Luar Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 adalah 6.141 Ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga menjadi 13.159 Ha. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Adapun Luas Jaringan Irigasi yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.84
Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	6.141	7.544	9.123	10.176	13.159
Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	35,00	43,00	52,00	58,00	75,00

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPRHUB Kab. Katingan,2018

e. **Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Berdasarkan data dari BPS sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah masyarakat Katingan yang memiliki akses terhadap air minum bersih maupun air minum layak masih berkisar dibawah 70% dari total rumah tangga di Kabupaten Katingan, cakupan pelayanan ini dapat dikatakan masih rendah. Adapun rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum bersih dan air minum layak di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih (%)	57,28	57,88	63,34	59,65
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak (%)	46,09	39,61	43,83	36,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2015-2018,diolah

Pelanggan PDAM menurut jenis konsumen selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Data tahun 2013 menunjukkan 3.689 pelanggan, dan meningkat menjadi 4.473 pelanggan.

Tabel 2.86
Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen
di Kabupaten Katingan, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Sosial (pelanggan)	77	58	82	58	89
Non Niaga (pelanggan)	3.637	3.970	4.085	4.388	4.447

Sumber : Kabupaten Katingan dalam Angka Tahun 2018

f. Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal sampai akhir tahun 2017 telah terbangun sebanyak 2.200 unit. Keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat juga semakin meningkat, terlihat dari jumlah desa di Katingan yang semakin bertambah dalam 5 (lima) tahun terakhir ini melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 114 desa.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selama kurun waktu 2013 sampai denagn 2017 menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2013, Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar 31,68 persen naik mencapai 70,81 persen pada Tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang tertata sanitasinya.

Tabel 2.87
Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	51	73	77	75	114
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	31,68	45,34	47,82	46,58	70,81
Jumlah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal (unit)	115	513	113	431	315

Sumber : Capaian Indikator SDGs Kabupaten Katingan, Bappedalitbang, 2018

g. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Sampai saat ini Kabupaten Katingan belum memiliki aturan tertulis tentang penataan kawasan dan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hanya masih berbentuk draf Raperda RTRWK Kabupaten Katingan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan amanat UU tersebut pada pasal 26-31 diatur kewajiban daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Wilayah kota Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan telah ditetapkan mencakup 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing. Dengan bertambahnya luas wilayah perkotaan ini, maka RTH publik di Kabupaten Katingan yang harus tersedia adalah 8.425,4 ha.

Tabel 2.88

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Luas ruang terbuka hijau (Ha)	-	8.802	8.802	8.802	9.028
Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	-	35.600	35.600	35.600	35.600
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	-	24,72	24,72	24,72	25,35

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2014-2017

h. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Ketersediaan SPM semakin meningkat dari tahun 2013 mengingat keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan perkotaan terdiri atas 3 kecamatan.

Terjadi peningkatan luas RTH publik dari 2013 s/d 2017 mengingat bertambah luas kawasan perkotaan Kasongan. Berikut tabel Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017.

Tabel 2.89
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Luasan RTH Publik yang tersedia akhir tahun SPM	274,39(Ha)	274,39(Ha)	274,39(Ha)	421,27(Ha)	421,27(Ha)
Luasan RTH Publik yang harusnya tersedia di Wilayah Kota Kawasan Perkotaan	5487 (Ha)	5487 (Ha)	5487 (Ha)	8425,4(Ha)	8425,4(Ha)
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	4,99%	4,99%	4,99%	5%	5%

Sumber : Bidang Tata Ruang Bina Konstruksi DPUPRHUB Kab. Katingan

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio Permukiman Layak Huni adalah pebandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang dihuni terhadap keseluruhan luas permukiman.

Dari data dapat dilihat bahwa rasio permukiman layak huni di kabupaten Katingan terus meningkat, dimana di tahun 2014 sebesar 8,39 persen, meningkat di tahun 2016 menjadi 9,9 persen, dan di tahun 2016 meningkat menjadi 15,66 persen. Data rasio permukiman layak huni yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.90
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan
Tahun 2014-2017

INDIKATOR	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Rasio Permukiman Layak Huni	8,39	9,9	15,66	-

Sumber : LKIP Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016

b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu

rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

Tabel 2.91
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)	-	21.837	21.837	36.210	-
Jumlah rumah di suatu wilayah (unit)	-	43.562	43.562	43.693	43.693
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	-	50,01	50,01	82,87	-

Sumber: LPPD 2014-2017

c. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangan utamanya.

Berdasarkan data statistik, dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 2.92
Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan
Menurut Penerangan Utama Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Listrik PLN	72,37	80,89	74,50	83,49
Listrik Non PLN	16,64	10,83	17,18	13,41
Bukan Listrik	11,09	8,28	8,32	3,10

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, 2015-2017

2.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Cakupan petugas linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara

ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar cakupan petugas linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun data Cakupan Linmas di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	-	10,45	71,46	59,53	59,53

Sumber : Bidang Linmas Satpol Kab. Katingan

Berdasarkan tabel di diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2014 sebesar 10,45 meningkat di tahun 2015 menjadi 71,46 menurun kembali di tahun 2016 menjadi 59,53 dan di tahun 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 59,53 Persen.

b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten adalah jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100. Adapun data tersebut disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.94
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kab. Katingan, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa seluruh pelanggaran K3 diselesaikan.

c. **Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jumlah mobil pemadaman kebakaran dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100. Adapun Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebesar 30,77 persen dan di tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 4,96 persen.

Tabel 2.95
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	30,77	30,77	30,77	4,96

Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2018

d. **Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK**

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK merupakan salah satu indicator untuk mengukur kinerja pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi/data dari Bidang Linmas, Satpol PP Kab. Katingan, capaian indikator Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Katingan tahun 2017 adalah 77,78 persen.

e. **Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar

rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan tahun 2017 sebesar 5/10.000. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.96
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	8/10.000	8/10.000	8/10.000	8/10.000	5/10.000

Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2018

f. Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan adalah jumlah pos siskamling dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Adapun Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2016

INDIKATOR	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	98,17	98,17	98,17	98,17

Sumber : Satpol PP Kabupaten Katingan, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 98,17 persen.

2.3.1.6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan

gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pada urusan sosial ini ditunjukan oleh masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dimana permasalahannya a). Masih rendahnya pendidikan dan tingkat kompetensi angkatan kerja (b) belum optimalnya penanganan bencana sosial; (c) masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *trafficking*; (d) belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial; (e) masih rentan terhadap konflik sosial.

Kabupaten Katingan tidak terlepas dari masalah PMKS. Masalah kesejahteraan sosial sendiri bisa diartikan sebagai kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Katingan yaitu fakir miskin, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar.

a. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam PMKS dan mendapatkan bantuan social. Berikut adalah tabel Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan selama Tahun 2014 sampai dengan 2017.

Tabel 2.98
Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Kelompok)	4 (APBD) 18 (APBN)	8 (APBD) 65 (APBN)	14 (APBD) 65 (APBN)	15 (APBD) 146 (APBN)
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang seharusnya diberi bantuan (Kelompok)	1.124	1.124	1.124	1.124
Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Persen)	2	6,4	7	14,3

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilatih (KK)	40	40	40	32

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan

b. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan penyandang masalah sosial adalah jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada dikalikan 100. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat disajikan hanya data Tahun 2017 yaitu sebesar 21 persen.

c. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi adalah menunjukkan jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di satu wilayah.

Berdasarkan data, diketahui bahwa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Katingan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak mengalami perubahan, yaitu 3 buah.

Tabel 2.99

Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan

d. Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, diketahui bahwa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 sebesar 80 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 85 persen. Angka tersebut bertahan sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.100
Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Persentase Korban Bencana Alam/ Sosial Yang Ditangani (%)	80	85	85	85

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan, 2018

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan yang dapat disajikan untuk mewakili kondisi pelayanan tenaga kerja disajikan pada tabel di bawah.

Berdasarkan data pada tabel dibawah, jumlah perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja mengalami penurunan dari 27 perusahaan menjadi 26 perusahaan pada Tahun 2017. Selanjutnya, indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar sebagai Anggota BPJS menunjukkan kondisi yang baik yaitu bertambah dari 3.017 orang menjadu 4.472 orang pada Tahun 2017. Berikutnya, indikator lain di bidang tenaga kerja yang cukup penting yaitu Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan menunjukkan angka yang meningkat dari 2 kasus pada Tahun 2016 menjadi 6 kasus pada tahun berikutnya.

Tabel 2.101
Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Katingan Tahun 2016 dan 2017

No	Indikator	Satuan	2016	2017
1	Jumlah Perusahaan yang Wajib Menyelenggarakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan	27	26
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar sebagai Anggota BPJS	Orang	3.071	4.472
3	Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan	Kasus	2	6

Sumber: LAKIP Tahun 2017 Kabupaten Katingan, diolah

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan

pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan beberapa indikator lainnya.

a. **Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan dikalikan 100. Adapun Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	81,48	80,70	77,52	86,16	44,22

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, dimana Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2013 sebesar 81,48 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 77,52 persen. Meskipun pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 86,16 persen, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menjadi 44,22 persen.

b. **Rasio KDRT**

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per rumah tangga dikalikan 100. Adapun Rasio KRT di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Rasio KDRT Di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio KDRT	0,030	0,022	0,031	0,009	0,004

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio KDRT di Kabupaten Katingan Tahun 2013 sebesar 0,030 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,022 persen, meskipun pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,031 persen. Dari posisi 0,031 pada Tahun 2015, terus mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 hingga menjadi 0,004 persen.

c. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah Suatu pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Capaian Kabupaten Layak Anak
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (poin)	0	0	32	513

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa poin capaian Kabupaten Layak Anak terus meningkat, hal ini memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Katingan.

d. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu di Kabupaten Katingan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 persen.

Tabel 2.105
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di
dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan

2.3.1.9. Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkara, dsb, sedangkan Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebanyak 35.778 ton beras dan 17.238 ton daging, meningkat di tahun 2014 menjadi 37.925 ton beras dan 18.100 ton daging dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017. Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Katingan
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Beras (ton)	35.778	37.925	40.201	42.613	45.170
Daging (ton)	17.238	18.100	19.005	19.955	20.953

Sumber : Tinjauan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Katingan, 2018

2.3.1.10. Pertanian

Permasalahan pertanian erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Katingan selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah

terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

a. **Persentase Luas Lahan Bersertifikat**

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Berdasarkan data pada Kantor Badan Pertanahan Kasongan, Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.107
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	0,03	0,15	0,58	0,71	6,21
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (km ²)	0,51	2,42	9,57	11,69	102,21
Jumlah Luas Wilayah Yang Harusnya Bersertifikat (km ²)	1646,03	1646,03	1646,03	1646,03	1646,03

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2015-2018, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Katingan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mencapai 8 persen dari keseluruhan luas wilayah.

b. **Penyelesaian Kasus Tanah Negara**

Penyelesaian Kasus Tanah Negara yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mencapai 0 persen, hal ini dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 0 kasus dan jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 0 kasus. Kecuali pada tahun 2017 terdapat penyelesaian 50 persen, yaitu penyelesaian1 kasus dari 2 kasus yang didaftarkan

c. **Penyelesaian Izin Lokasi**

Penyelesaian Izin Lokasi yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mencapai 0 persen, hal ini dilihat dari jumlah izin lokasi sebanyak 0 izin dan jumlah permohonan izin lokasi sebanyak 0 izin. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 penyelesaian izin lokasi mencapai 100 persen, dilihat dari jumlah ijin lokasi 2 ijin dengan permohonan 2 izin lokasi.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

a. Persentase Penanganan Sampah

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan didapat dari volume sampah yang ditangani dalam satuan m3 dibagi dengan volume produksi sampah dalam satuan m3 dikalikan 100. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Persentase Penanganan Sampah
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Volume sampah yang ditangani (m³)/hari	56,43	81	18.500	20.000
Volume produksi sampah (m³)/hari	86,83	135,73	46.240	47.457
Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	64,98	59,66	40,00	42,14

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Katingan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan persentasenya.

b. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah Jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan pemda berbagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.109
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah (kasus)	6	1	2	1
Jumlah kasus lingkungan yang ada	8	1	2	1

Uraian	2014	2015	2016	2017
(kasus)				
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (persen)	75	100	100	100

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2014-2017

c. Tutupan Lahan

Analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 wilayah Kabupaten Katingan masih sesuai tutupan lahan alami. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Katingan masih cukup efisien. Berikut ini disajikan data tutupan lahan di Kabupaten Katingan.

Tabel 2.110
Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering primer	187.729,38	9,19
2	Hutan lahan kering sekunder	550.006,12	26,93
3	Hutan tanaman	7.217,58	0,35
4	Semak belukar	127.009,19	6,22
5	Perkebunan	68.077,45	3,33
6	Pemukiman	3.450,58	0,17
7	Tanah terbuka	40.467,89	1,98
8	Tubuh air	17.027,00	0,83
9	Hutan mangrove sekunder	5.337,10	0,26
10	Hutan rawa sekunder	475.023,29	23,26
11	Semak belukar rawa	251.234,79	12,30
12	Pertanian lahan kering	26.756,89	1,31
13	Pertanian lahan kering campur semak	190.869,11	9,35
14	Sawah	20.042,55	0,98
15	Transmigrasi	1.239,34	0,06
16	Tambang	26.222,84	1,28
17	Rawa	44.288,90	2,17
	Total	2.042.000,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.111
Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan

TUTUPAN LAHAN	KECAMATAN									TOTAL	%
	BUKIT RAYA	KAMIPANG	KATINGAN HULU	KATINGAN KUALA	MARIKIT	MENDAWAI	PETAK MALAI	SANAMAN MANTIKEI	TASIK PAYAWAN		
Hutan lahan kering primer	3549,22		10056,84		78961,29		11011,44	37044,02		140622,80	25,38
Hutan lahan kering sekunder	4769,76		1064,07		421,86		750,19	9824,88		16830,76	3,04
Hutan mangrove sekunder				2810,97						2810,97	0,51
Hutan rawa sekunder		143805,10		18877,22		139719,95			5172,45	307574,71	55,52
Pemukiman				30,57						30,57	0,01
Pertanian lahan kering				432,05		310,37				742,42	0,13
Pertanian lahan kering campur semak			2045,00	21,66	167,85					2234,50	0,40
Rawa		7976,96		306,68		4775,64				13059,29	2,36
Sawah				505,74						505,74	0,09
Semak belukar		201,02	68,58		1316,11			5,14		1590,84	0,29
Semak belukar rawa		14119,32		17284,00		18894,38			2165,14	52462,85	9,47
Tambang									285,26	285,26	0,05
Tanah terbuka		3617,37		641,50		10978,31				15237,18	2,75
Tubuh air		0,34		35,50		0,45				36,28	0,01
Total	8318,97	169720,11	13234,48	40945,88	80867,10	174679,10	11761,63	46874,05	7622,85	554024,16	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Untuk mendukung data mengenai tutupan lahan yang telah disajikan pada tabel diatas, berikut ini disajikan data *overlay* tutupan lahan dengan pola ruang Kabupaten Katingan.

Tabel 2.112
Hasil Analisis Overlay Tutupan Lahan dan Pola Ruang

Tutupan Lahan	Alokasi ruang				
	Kawasan Budidaya		Kawasan Lindung		Total
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
Hutan lahan kering primer	45686,73	2,29	140622,80	7,05	186309,53
Hutan lahan kering sekunder	530218,74	26,59	16830,76	0,84	547049,50
Hutan mangrove sekunder	2464,67	0,12	2810,97	0,14	5275,64
Hutan rawa sekunder	155373,59	7,79	307574,71	15,42	462948,30
Hutan tanaman	7190,87	0,36		0,00	7190,87
Pemukiman	3400,43	0,17	30,57	0,00	3431,01
Perkebunan	67552,03	3,39		0,00	67552,03
Pertanian lahan kering	25926,48	1,30	742,42	0,04	26668,90
Pertanian lahan kering campur semak	187797,48	9,42	2234,50	0,11	190031,98
Rawa	27864,49	1,40	13059,29	0,65	40923,78
Sawah	19487,61	0,98	505,74	0,03	19993,35
Semak belukar	124764,13	6,26	1590,84	0,08	126354,97
Semak belukar rawa	191142,78	9,58	52462,85	2,63	243605,63
Tambang	25831,22	1,30	285,26	0,01	26116,48
Tanah terbuka	24318,79	1,22	15237,18	0,76	39555,97
Transmigrasi	1244,73	0,06		0,00	1244,73
Tubuh air	119,49	0,01	36,28	0,00	155,77
Total	1440384,28	72,22	554024,16	27,78	1994408,45

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

d. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko.

Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer adalah memelihara dan mengembangkan kemampuan hutan dan lautan untuk menyerap dan menyimpan karbon. Pemanfaatan hutan dalam upaya mitigasi tersebut sudah banyak diimplementasikan, sedangkan penerapan peran lautan belum terlihat secara signifikan (Nellemann et al., 2009).

Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan sebesar 162 ton/ha untuk hutan mangrove primer dan 116 ton/ha untuk hutan mangrove sekunder, sedangkan untuk hutan dengan kerapatan sedang sebesar 64,39 ton/ha. Dengan luas hutan 1.219.699,79 ha atau maka total stok karbon di Kabupaten Katingan adalah sebesar 183.478.370,59 ton, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.29 – 5.30.

Berdasarkan data pada tabel dibawah, diketahui bahwa daerah yang memiliki stok karbon tertinggi yakni Kecamatan Masanaman Mantikei dan (22,17%) dan Kecamatan Marikit (17,86%).

Tabel 2.113
Total Stok Karbon untuk Hutan di Setiap Kecamatan

No	Hutan	Luas (Ha)	Stok Karbon		
			Rerata (ton/Ha)	Total (ton)	%
1	BUKIT RAYA	64440,77377	400	11681689,4	6,37
	Hutan lahan kering primer	4800,719641	222	1065759,76	
	Hutan lahan kering sekunder	59640,05413	178	10615929,64	
2	KAMPANG	194604,6798	92,32	17965904,04	9,79
	Hutan rawa sekunder	194604,6798	92,32	17965904,04	
3	KATINGAN HILIR	17394,77499	208,32	1615546,169	0,88
	Hutan mangrove sekunder	407,96207	116	47323,60012	
	Hutan rawa sekunder	16986,81292	92,32	1568222,569	
4	KATINGAN HULU	93185,79315	400	17080596,63	9,31
	Hutan lahan kering primer	11216,48755	222	2490060,235	
	Hutan lahan kering sekunder	81969,30561	178	14590536,4	
5	KATINGAN KUALA	41318,53699	208,32	3896812,883	2,12
	Hutan mangrove sekunder	3474,89646	116	403087,9894	
	Hutan rawa sekunder	37843,64053	92,32	3493724,894	
6	KATINGAN TENGAH	38674,14825	231,14	6664681,375	3,63
	Hutan lahan kering sekunder	36917,64486	178	6571340,785	
	Hutan tanaman	1756,503387	53,14	93340,59001	
7	MARIKIT	162064,7797	453,14	32763123,7	17,86
	Hutan lahan kering primer	89105,56043	222	19781434,42	
	Hutan lahan kering sekunder	72918,76	178	12979539,28	
	Hutan tanaman	40,45931078	53,14	2150,007775	
8	MENDAWAI	156498,3213	208,32	14448246,74	7,87
	Hutan mangrove sekunder	13,58621085	116	1576,000458	
	Hutan rawa sekunder	156484,7351	92,32	14446670,74	
9	PETAK MALAI	136807,5222	400	25625728,08	13,97
	Hutan lahan kering primer	28954,29836	222	6427854,237	
	Hutan lahan kering sekunder	107853,2238	178	19197873,84	
10	PULAU MALAN	28553,37091	323,46	4456266,962	2,43
	Hutan lahan kering sekunder	21360,08883	178	3802095,811	
	Hutan rawa sekunder	6940,279251	92,32	640726,5805	
	Hutan tanaman	253,0028334	53,14	13444,57057	

No	Hutan	Luas (Ha)	Stok Karbon		
			Rerata (ton/Ha)	Total (ton)	%
11	SANAMAN MANTIKEI	219179,447	453,14	40670287,55	22,17
	Hutan lahan kering primer	52232,71677	222	11595663,12	
	Hutan lahan kering sekunder	161805,824	178	28801436,67	
	Hutan tanaman	5140,906189	53,14	273187,7549	
12	TASIK PAYAWAN	37260,98192	92,32	3439933,851	1,87
	Hutan rawa sekunder	37260,98192	92,32	3439933,851	
13	TEWANG SANGGALANG GARING	29716,65527	386,32	3169553,199	1,73
	Hutan lahan kering sekunder	4585,25806	178	816175,9347	
	Hutan mangrove sekunder	1403,998077	116	162863,777	
	Hutan rawa sekunder	23727,39913	92,32	2190513,488	
Total		1.219.699,79	3.856,80	183.478.370,59	100,00

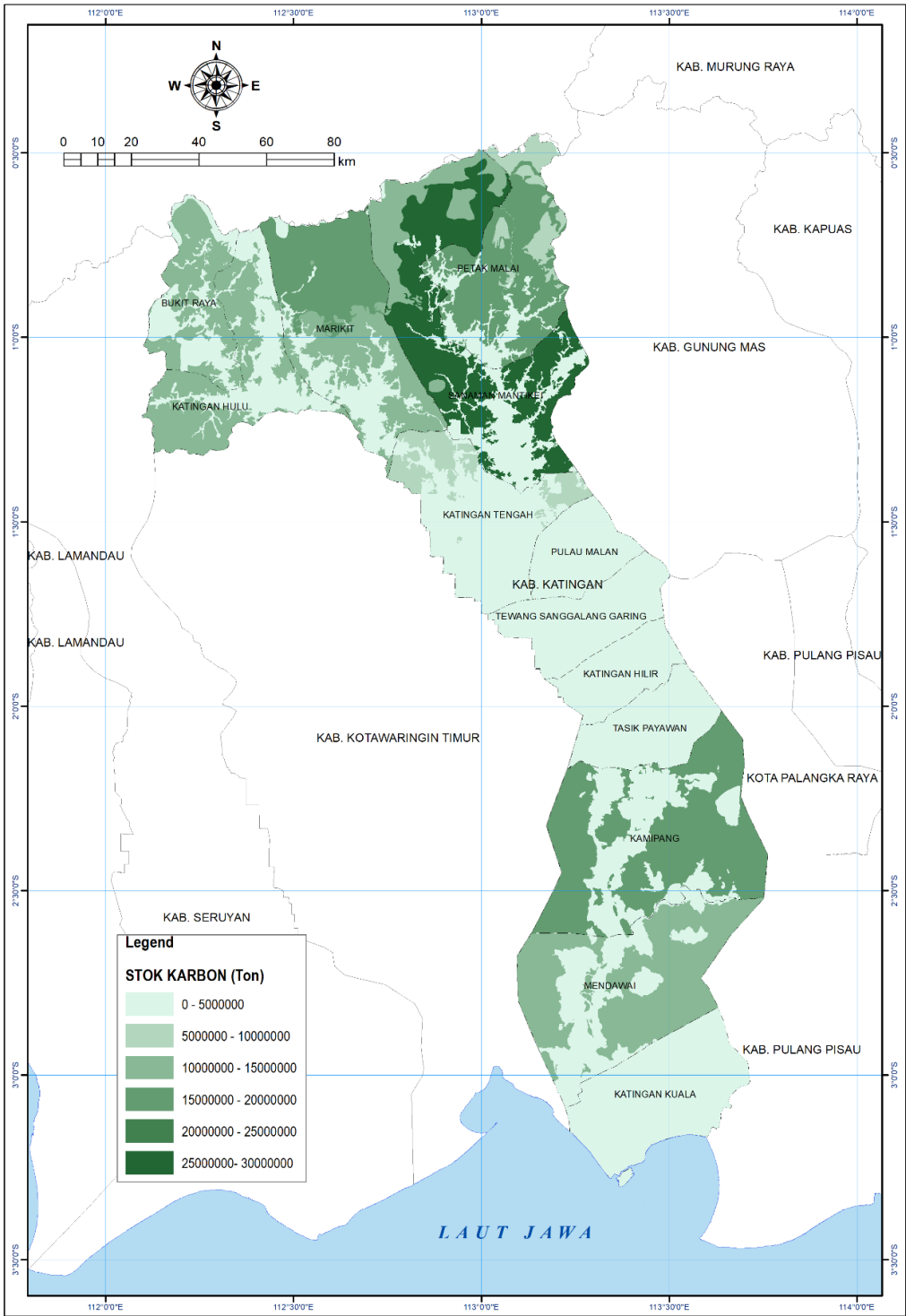
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 2.114
Total Stok Karbon untuk Hutan di Kabupaten Katingan

No	Hutan	Luas (Ha)	Stok Karbon		
			Rerata (ton/Ha)	Total (ton)	%
1	Hutan lahan kering primer	186309,7827	222	41360771,77	22,54
2	Hutan lahan kering sekunder	547050,1593	178	97374928,36	53,07
3	Hutan mangrove sekunder	5300,442818	116	614851,3669	0,34
4	Hutan rawa sekunder	473848,5286	92,32	43745696,16	23,84
5	Hutan tanaman	7190,87172	53,14	382122,9232	0,21
Total		1.219.699,79	661,46	183.478.370,59	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Gambar 2.43 Peta Stok Karbon



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2.3.1.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

a. Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia >17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus formula jumlah penduduk usia>17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah. Status kepemilikan KTP di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio penduduk ber KTP satuan penduduk (%)	56,32	68,98	77,34	97,46	90,58

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio penduduk ber KTP satuan penduduk di Kabupaten Katingan tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Angka ini terus meningkat sampai mencapai 97,46 persen pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 rasio penduduk ber KTP satuan penduduk mengalami penurunan hingga menjadi 90,58 persen.

b. Persentase bayi berakte kelahiran

Persentase bayi berakte kelahiran adalah jumlah bayi berakte kelahiran dibagi dengan jumlah bayi dikalikan 100. Adapun Persentase bayi berakte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Persentase Bayi Berakte Kelahiran
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase bayi berakte kelahiran (%)	100	100	76	75	83

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase bayi berakte kelahiran di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan, dimana pada tahun 2013 kepemilikan akte kelahiran sebesar

100 persen dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2016 menjadi 75 persen. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 82,70 persen.

c. Pasangan Berakte Nikah

Pasangan berakte nikah yang ada di Kabupaten Katingan dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.117
Pasangan Akte Nikah
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio pasangan berakte nikah (%)	2,79	3,13	8,83	10,73	12,62

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebesar 2,79 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 3,13 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan kembali hingga menjadi 8,83 persen dan 10,73 persen. Angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2017.

d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang ada di Kabupaten Katingan dalam periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 berstatus “Sudah”.

e. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten adalah Ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala kabupaten. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten di Kabupaten Katingan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 “Ada”.

Tabel 2.118
Persentase Ketersediaan Database Kependudukan
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2017

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Jumlah LSM/Ormas Aktif

Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa Jumlah LSM/Ormas Aktif di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebesar 21 lembaga, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 19 lembaga, di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 25 lembaga, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 28 lembaga.

Tabel 2.119
Jumlah LSM/Ormas Aktif
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LSM/Ormas Aktif (Lembaga)	21	21	19	25	28

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Katingan, 2017

b. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif berbagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.120
Persentase PKK Aktif
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK Aktif (kelompok)	174	174	174	174
Jumlah PKK (kelompok)	174	174	174	174
Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase PKK aktif yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar 100 persen.

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan.

Disamping itu program keluarga bertujuan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik. Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena realisasi capaian belum mencapai target.

a. **Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR**

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi/CPR. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi Jumlah Aseptor KB di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100. Berikut Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR keluarga di Kabupaten Katingan:

Tabel 2.121
Angka Pemakaian Kontrasepsi
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	75,50	77,40	78,09	78,33	78,51

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan Tahun 2017

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah pemakaian kontrasepsi dari tahun ke tahun hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah PUS yang menjadi Aseptor KB.

b. **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP**

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP adalah cara yang efektif dalam menjaga jarak kelahiran, perhitungan indicator ini yaitu Jumlah Aseptor MKJP dibagi Aseptor KB dikali 100. Adapun Persentase MKJP yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.122
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang/ MKJP (%)	12,71	12,35	19,53	18,91	27,44

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase MKJP cenderung naik turun, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan banyak aseptor yang masih belum konsisten menggunakan MKJP.

- c. **Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga**
- Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga adalah kelompok ketahanan keluarga yang tergabung dalam TRIBINA yaitu: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam menjalankan fungsi pokok ketahanan keluarga. Diharapkan kelompok ketahanan keluarga dapat dibentuk di setiap desa/kelurahan.

Tabel 2.123
Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (%)	27,95	39,13	40,99	73,91	75,16

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan Tahun 2017

- d. **Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja**
- Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja adalah upaya peningkatan peranan PIK Remaja dalam mendapatkan informasi mengenai program KKBPK. PIK Remaja sebagai sarana fasilitasi kreatifitas remaja diharapkan dapat dibentuk di seluruh sekolah di setiap desa/kelurahan.

Tabel 2.124
Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling (%)	17,39	18,01	18,63	45,34	45,34

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2017

- e. **Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*)**
- Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*) di Kabupaten Katingan tahun 2013 persentasenya sebesar 19,48 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 hingga menjadi 13,4 persen.

Tabel 2.125
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need) (%)	19,48	17,42	15,22	14,86	13,4

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2017

f. Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) adalah jumlah kolompok UPPKS yang dibentuk di tingkat desa/ kelurahan.

Tabel 2.126
Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	55,9	47,83	47,83	97,52	70,19

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan berjalan secara fluktuatif hal ini dikarenakan setiap tahun evaluasi dan pelaporan terhadap kelompok UPPKS yang ada dan aktfi masih belum berjalan hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah yang sulit dijangkau.

g. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kabupaten Katingan tahun 2013 sebesar 70 persen, dan di tahun 2014 dan 2015 menurun menjadi 27,27 persen. Namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi 73,25 persen, dan terus meningkat sampai mencapai 88,5 persen pada Tahun 2017.

Tabel 2.127
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	70	27,27	27,27	73,25	88,5

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2017

h. Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan tahun 2013 persentasenya sebesar 17,39 persen, meningkat pada tahun 2014 menjadi 18,01 persen, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 hingga menjadi 45,34 persen.

Tabel 2.128
Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja (%)	17,39	18,01	18,63	45,34	45,34

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2017

2.3.1.15. Perhubungan

a. Jumlah Terminal Angkutan Jalan

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada

umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya. Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Jenis dan Jumlah Terminal
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Jenis Terminal	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kelas C (unit)	3	2	2	1	1	1

Sumber:

- 1. *Profile Kabupaten Katingan Tahun 2015*
- 2. *Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2017*

b. Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan

Pengujian kelayakan kendaraan bermotor angkutan jalan bertujuan untuk menjamin keselamatan moda transportasi yang dioperasikan mengangkut orang dan barang hingga dapat mencegah kecelakaan dalam berlalu lintas. Pelaksanakan pengujian kelayakan angkutan jalan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.130
Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kendaraan bermotor angkutan jalan (KIR) (unit)	1.096	1.213	1.224	1.245	1.125

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2018 dan Lapkin Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan Tahun 2016

c. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 1.235 unit rambu lalu lintas jalan maupun sungai, Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Pemasangan Rambu-rambu
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rambu Lalu Lintas Jalan Terpasang (unit)	699	1.015	1.015	1.015	-
Jumlah Rambu Sungai Terpasang (unit)	192	220	220	220	-
Rambu-rambu yang Terpasang (unit)	891	1.235	1.235	1.235	-

Sumber : Lapkin Dishubkominfo Kabupaten Katingan Tahun 2016

d. Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut penumpang umum dan barang pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Banyaknya izin trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.132
Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
Izin Trayek Angkutan Jalan	50	25	25	-	-
Izin Trayek Angkutan Sungai	68	57	55	-	-

Sumber : Profile Kabupaten Katingan Tahun 2013-2015 dan Lapkin Dishubkominfo Kabupaten Katingan Tahun 2016, diolah

e. Dermaga Sungai

Sungai Katingan yang berada di Kabupaten Katingan memiliki panjang 650 km, lebar 250 m, kedalaman berkisar 3-7 m, dan alur sungai yang bisa dilayari 520 km. Transportasi sungai sejauh ini masih menjadi andalan bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Katingan, untuk mengangkut orang dan barang maupun kendaraan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Katingan membangun dermaga sungai guna mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah. Adapun dermaga yang tersedia di Kabupaten Katingan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.133

Dermaga sungai yang tersedia di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Jenis Dermaga Sungai	2013	2014	2015	2016	2017
Dermaga Bongkar Muat/ Tambatan (unit)	21	23	24	25	-
Dermaga Penyeberangan (unit)	4	6	10	15	-
Total (unit)	25	29	34	40	-

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Katingan Tahun 2016, diolah

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan. Formulasi untuk Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan adalah Jumlah KIM dibagi Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota dikalikan 100%. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan sampai dengan saat ini belum tersedia.

b. Cakupan Layanan Komunikasi

Indikator cakupan layanan komunikasi memberikan informasi mengenai jangkauan pelayanan komunikasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Formulasi untuk Cakupan Layanan komunikasi adalah Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km²) dibagi Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km²). Adapun Cakupan Layanan komunikasi yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134

Cakupan Layanan Komunikasi
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km ²)	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.979
Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km ²)	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	20.396,7 8
Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	33	33	33	33	33	29

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2018

Ada beberapa kriteria untuk menentukan cakupan layanan komunikasi yaitu jangkauan sinyal komunikasi Kuat, Lemah dan tidak ada (*blank spot*). Dalam hal ini untuk penentuan formulasi dari Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km²) adalah wilayah yang tergolong jangkauan sinyalnya Kuat. Dari tahun 2012 – 2016 luas wilayah yang tergolong jangkauan sinyal telekomunikasi kriteria “kuat” adalah 5.808 km², kriteria “lemah” adalah 4.994 km², kriteria “tidak ada sinyal/blank spot” adalah 6.998 km² dengan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.800 km². Sedangkan di Tahun 2017 ada peningkatan penerimaan sinyal HP kategori “kuat” di desa Tumbang Lahang dan Dahian Tunggal, namun di tahun 2017 juga terjadi penambahan luas wilayah Kabupaten Katingan menjadi 20.396,78 km², sehingga mempengaruhi persentase cakupan layanan telekomunikasi menjadi turun sebanyak 4 %. Sampai dengan tahun 2017 jumlah tower yang ada di Kabupaten Katingan berdasarkan hasil pendataan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah sebanyak 56 unit.

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

a. Persentase Koperasi Aktif

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tabel 2.135
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	106	73	101	111	116
Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	195	215	228	233	202
Persentase Koperasi Aktif (%)	54,77	37,08	43,67	47,64	57,42

Sumber :

1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan
2. LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016
3. Lakip Kabupaten Katingan 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 persentase koperasi aktif sebanyak 77,46 persen dan sampai Tahun 2014 mengalami penurunan sampai pada angka 37,08 persen. Namun persentase koperasi aktif kembali meningkat setelah tahun 2014 dan terakhir mencapai 57,42 persen pada tahun 2017.

b. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah usaha mikro dan kecil berbagi dengan jumlah seluruh UKM. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 mengalami lonjakan yang tinggi yaitu 44.831 unit dari tahun 2015 yang berjumlah 1.1630 unit. Hal ini disebabkan Kelompok Usaha Tani dimasukkan kedalam usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.136
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	1.190	1.314	1.630	44.831	44.831
Jumlah Seluruh UKM (unit)	1.564	1.630	1.630	44.831	44.831
Persentase UKM (%)	95,20	100	100	100	100

Sumber :

1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan
2. LPPD Kabupaten Katingan 2013-2017
3. Lakip Kabupaten Katingan 2017

c. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM adalah jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM. Berdasarkan data di bawah, dapat dilihat bahwa Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM di Kabupaten Katingan tahun 2014 dan 2015 berjumlah 1.630 unit dan di tahun 2016 meningkat menjadi 44.831 unit. Adapun Jumlah UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Jumlah UKM non BPR/LKM
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	1630	1630	44831	n/a

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan

d. Jumlah BPR/LKM

Jumlah BPR/LKM adalah Jumlah BPR/LKM aktif. Adapun Jumlah BPR/LKM yang ada di Kabupaten Katingan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Jumlah BPR/LKM
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah BPR/LKM (unit)	24	28	30	n/a

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Katingan tahun 2014 berjumlah 24 buah, meningkat di tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 28 buah dan 30 buah.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Katingan. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

a. Jumlah Investor

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jumlah

investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Adapun jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor PMDN (unit)	76	76	76	86	73	99
Jumlah Investor PMA (unit)	8	8	16	16	16	10

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan,2018

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah investor PMDN tahun 2012 sampai dengan 2014 sama yaitu sebanyak 76 unit, dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 86 unit, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 73 unit. Namun jumlah investor PMDN mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 99 unit pada tahun 2017. Sedangkan jumlah investor PMA tahun 2012 dan 2013 sebanyak 8 unit, dan meningkat pada tahun 2014 sampai dengan 2016 menjadi 16 unit, akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan hingga menjadi 10 unit.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Katingan tahun 2012 sebesar Rp 454.590.405.928, menurun di tahun 2013 menjadi Rp 288.163.020.000. Kondisi di 2014 kembali membaik, ditandai dengan meningkatnya nilai investasi menjadi Rp 386.977.631.909. Namun di tahun 2015 kembali turun menjadi Rp 13.992.373.000 dan meningkat lagi di tahun 2016 menjadi Rp 220.974.433.951 dan terus meningkat pada tahun 2017 hingga menjadi Rp. 1.124.980.148.645. berikut disajikan tabel Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017.

Tabel 2.140
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah nilai Investasi PMDN (Rupiah)	454.590.405.928	288.163.020.000	386.977.631.909	13.992.373.000	220.974.433.951	1.124.980.148.645
Jumlah nilai investasi PMA (US Dollar)	.	450.572.430,00	450.572.430,00	42.959.000,00	19.235.004,00	1.219.881.974.652,41

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, 2018

c. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu berbandi dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100. Adapun Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.141
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017 (jutaan)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi Tahun berkenaan (Rp.)	625.390,146	738.735,00	68.871.630,00	-	237.497,7	5.740.829.335.660,97
2	Realisasi Tahun Yang Lalu (Rp.)	93.601,072	625.390,145	738.735,00	-	139.923,73	237.496.700.000,00
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (persen)	223,03	18,12	1,40	-	0,69	23,17

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2012-2017

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Organisasi olahraga

adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan.

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam satu periode tahun. Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam satu periode tahun.

a. **Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif**

Jumlah organisasi pemuda selama tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2014 sampai 2017 mencapai 18 organisasi pemuda. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Katingan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 2.142

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda	18	18	18	18

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Katingan, 2017

2.3.1.20. **Statistik**

a. **Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi**

Untuk indikator ini sampai dengan tahun 2017 masih belum dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

b. **Buku Kabupaten Dalam Angka**

Buku Kabupaten Dalam Angka disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat didownload di website BPS Kabupaten Katingan. Data didalam buku Buku Kabupaten Dalam Angka dapat digunakan oleh berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan maupun mengevaluasi capaian pembangunan.

Tabel 2.143
Buku Kabupaten Dalam Angka
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Indikator	Formulasi	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan

c. Buku PDRB Kabupaten

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan Buku “PDRB Kabupaten”.

Dokumen tersebut ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. Penyusunan buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.144
Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

No	Indikator	Formulasi	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan

2.3.1.21. Kebudayaan

a. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan adalah jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan berbagi dengan total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah dikalikan 100. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 100 persen. Adapun persentase Benda, Situs dan Kawasan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.145
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (situs)	-	14	14	14	14
Total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah (situs)	-	14	14	14	14
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)	-	100	100	100	100

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Katingan, 2018

b. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada. Adapun jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.146
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kegiatan)	3	5	4	2	2	2

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2012-2016 dan Disbudparpora Kab. Katingan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2012 sebanyak 3 kali, di tahun 2013 meningkat menjadi 5 kali dan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menurun menjadi 4 kali, 2 kali dan 2 kali.

c. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya adalah jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada. Adapun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.147
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2018

2.3.1.22. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Katingan. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.148
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.233	1.322	3.743	4.461	9.829	9.953
Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani	1.420	1.342	3.743	4.690	12.568	n/a
Persentase Pengunjung Perpustakaan	92,45	78,22	100	95,11	78,21	n/a

Sumber : Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2012 sebesar 92,45 persen, menurun di tahun 2014 menjadi 78,22 persen, di tahun 2015 meningkat kembali menjadi 100 persen dan di tahun 2015 dan 2016 menurun kembali menjadi 95,11 persen dan 78,21 persen.

b. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.149
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan
di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	776	363	1024	986	n/a
Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	2018	1127	3072	2946	n/a
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	38,45	32,29	33,33	33,46	n/a

Sumber : Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2013 sebesar 38,45persen, menurun di tahun 2014 menjadi 32,29 persen, di tahun 2015 meningkat kembali menjadi 33,33 persen dan di tahun 2015 dan 2016 menurun kembali menjadi 33,46 persen.

2.3.1.23. Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengeloan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;

4. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kearsipan, dilaksanakan berbagai upaya melalui:

1. Penerbitan buku petunjuk teknis kearsipan yang ditinjau ulang secara berkala;
2. Bimbingan teknis kearsipan bagi Sumber Daya Manusia kearsipan (Arsiparis, Petugas Arsip Dinas/Instansi/Kecamatan/Desa);
3. Penambahan personil untuk mendukung kinerja kantor;
4. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) pengelolaan kearsipan yang meliputi:
 - a. Diklat kearsipan
 - b. Diklat penyataraan
 - c. Diklat preservasi arsip
 - d. Diklat JIKN
 - e. Diklat Arsip media Baru

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku adalah jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku berbagi dengan jumlah SKPD dikalikan 100. Adapun Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.150
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	-	-	0	0	0	0
Jumlah SKPD	-	-	41	41	41	37

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	-	-	0	0	0	0

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016 dan Setda Kab. Katingan, 2018

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 sebanyak 1 kegiatan, di tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 2 kegiatan.

Tabel 2.151
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	-	-	1	2	2	n/a

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Katingan. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

a. Produksi Perikanan

Indikator Produksi Perikanan menunjukkan jumlah produksi perikanan yang dihasilkan suatu daerah. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.152
Produksi Perikanan
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan (Ton)	18.614,59	3.342,53	7.802,19	n/a
Target Daerah (Ton)	24.622,73	4.225	9.423,87	n/a
Tingkat Capaian Produksi Perikanan (%)	75,59	79,12	82,79	n/a

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan mengalami penurunan bila dibandingkan capaian Tahun 2014 yaitu 18.614,59 ton sedangkan Tahun 2016 hanya 7.802,19 ton. Walau demikian, bila dilihat pada tabel diatas, produksi perikanan Tahun 2016 sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3.342,53 ton. Bila dibandingkan antara target daerah, maka sampai dengan Tahun 2016 belum dapat mencapai 100 persen, sebab kondisi terakhir tahun 2016 baru mencapai 82,79 persen.

b. Konsumsi Ikan

Indikator Konsumsi Ikan adalah salah satu indikator penting dalam menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan. Adapun data konsumsi ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan adanya fluktuasi. Sempat turun pada Tahun 2015 menjadi 39,55 kg, namun konsumsi ikan meningkat lagi pada tahun berikutnya menjadi 40,98 kg. Lebih lanjut, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.153
Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Konsumsi Ikan (Kg)	43,8	39,55	40,98	n/a
Target Daerah (Kg)	40	44,2	44,2	n/a
Tingkat Capaian Konsumsi Ikan (%)	107,5	89,47	92,71	n/a

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2014-2016

2.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Kabupaten Katingan sebagai bagian dari

keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan suluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Katingan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik turis datang, baik dari dalam negeri (turis domestik) maupun dari luar negeri (turis asing).

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan Wisata menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun yang ke Kabupaten Katingan. Kunjungan wisatawan (wisman) yang datang ke Kabupaten Katingan merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Katingan terutama ketertarikan turis asing untuk berkunjung. Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.154
Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Wisatawan (orang)	39.534	32.405	34.351	32.405	40.290

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016 dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2018, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Katingan selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi.

2.3.2.3. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan.

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar

Produktivitas padi atau pangan utama lokal lainnya perhektar adalah produksi tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya dalam satuan ton berbagi

dengan luas areal tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya (jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalan) dalam satuan ha dikalikan 100. Adapun Produktivitas padi atau pangan utama lainnya di Kabupaten Katingan kurun waktu 2014 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.155
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	66.311	71.443	66.224	66.268	59.610
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	19.,152	20.783	21.221	20.671	21.224
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (ton/ha)	34,62	34,38	31,21	32,06	28,09

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, 2018, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2014 sebesar 34,62 ton/ha, menurun di tahun 2015 menjadi 34,38 ton/ha, dan sampai tahun 2018 (data sementara) menurun kembali menjadi 28,09 ton/ha.

2.3.2.4. Kehutanan

Sumberdaya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat

pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi berbagi dengan luas total hutan dan lahan kritis dikalikan 100 persen. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Tahun 2014 sebesar 6% mengalami peningkatan menjadi 6,88% pada Tahun 2015. Namun pada Tahun 2016 mengalami penurunan cukup besar menjadi 0,43%. Hal ini disebabkan semakin luasnya luas total hutan dan lahan kritis. Adapun Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.156
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Luas Hutan dan Lahan Kritis Yang direhabilitasi (Ha)	36.052,38	37.581,68	8.509,92	0
Luas Total Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	546.351,16	546.351,16	1.991.696,14	1.991.696,14
Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	6,00	6,88	0,43	0

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan Kawasan Hutan adalah Luas kerusakan kawasan hutan berbagi dengan luas kawasan hutan dikalikan 100 persen. Adapun Rehabilitasi kerusakan kawaan hutan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.157
Kawasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	510.411,57	508.882,27	500.372,35	n/a
Luas Kawasan Hutan	1.840.141,00	1.838.196,00	1.838.196,00	1.838.196,00
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%)	28,33	27,68	27,22	0

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kerusakan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2014 sebesar 28,33 persen, menurun di tahun 2015 dan di tahun 2016 menjadi 27,68 persen dan 27,22 persen.

2.3.2.5. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Berikut ini disajikan beberapa data dan informasi mengenai pertambangan.

a. Persentase Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin adalah jumlah penambangan liar yang ditertibkan berbagi dengan luas area penambangan yang liar dikalikan 100 persen. Adapun persentase pertambangan tanpa izin di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.158
Persentase Pertambangan Tanpa Izin
di Kabupaten Katingan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Penambangan Liar Yang Ditertibkan	0	0	0	0
Luas Area Penambangan Liar (Ha)	40	1.700	1.700	1.700
Persentase Pertambangan Tanpa Izin (%)	0	0	0	0

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2013-2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase pertambangan tanpa izin yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0 persen. Ini berarti pengawasan di bidang pertambangan belum dilakukan dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius mengingat semakin luasnya area penambangan liar di Kabupaten Katingan. PETI di wilayah Kabupaten Katingan apabila dilakukan secara terus menerus berdampak pada peningkatan TSS (kekeruhan) yang merupakan parameter kunci pencemaran air di DAS Katingan. Peningkatan TSS dan parameter lainnya (COD, BOD, DO) ini menurunkan kapasitas penyediaan air minum layak dan kegiatan domestik masyarakat di sekitar lokasi pencemaran. Selain berdampak pada pencemaran lingkungan (air sungai), PETI juga akan mengakibatkan longsor pada tanah di tepi sungai dan pendangkalan sungai sehingga berpotensi banjir.

2.3.2.6. Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

a. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n dibagi dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal. Adapun Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 berjumlah 4. Sedangkan data tahun-tahun berikutnya tidak tersedia.

b. Pasar Tradisional

Pasar beserta aktivitasnya merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukan mulai berkembangnya suatu daerah maupun ekonomi masyarakatnya, khususnya di wilayah yang mencakup beberapa desa yang berdekatan. Adapun jumlah pasar tradisional di Kabupaten Katingan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah hingga tahun 2018 berjumlah 19 pasar.

Tabel 2.159
Pasar Tradisional di Kabupaten Katingan

No	Nama Pasar	Lokasi		Bentuk Bangunan
		Desa/Kel.	Kecamatan	
1.	Pasar Pagatan	Pagatan Hilir	Katingan Kuala	Toko, Los
2.	Pasar Subur Indah	Subur Indah	Katingan Kuala	Kios
3.	Pasar Jaya Makmur	Jaya Makmur	Katingan Kuala	Kios
4.	Pasar Mendawai	Mendawai	Mendawai	Toko, Los
5.	Pasar Mekar Tani	Mekar Tani	Mendawai	Los
6.	Pasar Perigi	Perigi	Mendawai	Kios
7.	Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) Ujung Hurung	Kasongan Baru	Katingan Hilir	Los
8.	Pasar Bajenta	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Kios
9.	Pasar Kasongan	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Kios,Toko
10.	Pasar Basah Kasongan	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Los
11.	Pasar Kereng Pangi	Hampalit	Katingan Hilir	Kios,Los
12.	Pasar Pendahara	Pendahara	Twg. Sanggalang Garing	Kios,Los

No	Nama Pasar	Lokasi		Bentuk Bangunan
		Desa/Kel.	Kecamatan	
13.	Pasar Buntut Bali	Buntut Bali	Pulau Malan	Los
14.	Pasar Tura	Tura	Pulau Malan	Los
15.	Pasar Tumbang Samba	Tumbang Samba	Katingan Tengah	Kios
16.	Pasar Tumbang Kaman	Tumbang Kaman	Sanaman Mantikei	Kios
17.	Pasar Tumbang Hiran	Tumbang Hiran	Marikit	Kios
18.	Pasar Tumbang Sanamang	Tumbang Sanamang	Katingan Hulu	Kios
19.	Pasar Dahian Tunggal	Dahian Tunggal	Pulau Malan	Los

Sumber : Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan, 2018

c. Pergudangan

Pergudangan memegang peran yang sangat penting bagi pelaku usaha. Barang yang disimpan di gudang bisa dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang maupun produk jadi. Peningkatan produktivitas dan pelayanan pergudangan akan sangat berpengaruh pada performansi suatu unit usaha secara keseluruhan. Adapun data Gudang di Kabupaten Katingan hingga tahun 2018 ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 2.160
Sarana Gudang di Kabupaten Katingan

NO	NAMA GUDANG/PEMILIK	LUAS (M ²)	ISI GUDANG	KONDISI GUDANG	TAHUN BERDIRI	STATUS KEPEMILIKAN
1	Toko Andika/Egian Pranata	12 M ²	Minuman Beralkohol	Baik	2014	PO
2	Dwi Gian Jaya Makmur/Rusmini, S.Pd	20 M ²	BBM	Baik	2014	PO
3	UD. Sawit Makmur/Purnadi	42 M ²	PUPUK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI	Baik	2014	PO
4	CV. Cahaya Cipta Perkasa/Misran H.U	24 M ²	Minyak Tanah	Baik	2014	CV
5	UD. Karunia Ilahi II/Riyadi	12 M ²	Papan Les, Reng, Balok, Kasau DII	Baik	2014	PO
6	Tiga Saudara/Rusiati	24 M ²	BBM	Baik	2014	PO
7	Pangkalan BBM Pangl Manis/Saliter, S.Pd	12 M ²	BBM	Baik	2014	PO
8	UD. Bintang Ringgong/Mastur Daman	200 M ²	Minuman Beralkohol	Baik	2014	PO
9	Toko Bintang Jaya/Egun.L	40 M ²	Bahan Bangunan	Baik	2014	PO
10	Pangkalan BBM Sederhan 01/Eriyanto	24 M ²	BBM	Baik	2014	PO

NO	NAMA GUDANG/PEMILIK	LUAS (M ²)	ISI GUDANG	KONDISI GUDANG	TAHUN BERDIRI	STATUS KEPEMILIKAN
11	UD. Usaha Langgeng Bersama/Biadi Rahman	200 M ²	Balok, Kasau, Papan Lis, Papan Reng Dan Aneka Jenis Kayu	Baik	2014	PO
12	UD. Karya Keluarga/M. Hasan Atthariq	200 M ²	Balok, Kasau, Papan Lis, Papan Reng Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian	Baik	2014	PO
13	PT. Inti Bumi Katingan/Agus Dwi Hartanto	1400 M ²	Pasir Zircon (Gudang Transit)	Baik	2014	PT
14	UD. Anugrah/Sungih	48 M ²	Rotan	Baik	2014	PO
15	UD. Al-Amin/Gatin Rangkai	320 M ²	Papan, Balok, Kasau, Reng, Aneka Jenis Kayu Lainnya	Baik	2014	PO
16	CV. Karya Ilham/Kiki Rahatinor	96 M ²	Papan, Les, Reng, Balok, Kasau, Aneka Jenis Kayu Gergajian, Moulding, dll	Baik	2014	CV
17	PT. Kasongan Zircon Industry/Junaidi	750 M ²	Zircon	Baik	2014	PT
18	PT. Fadhila Usaha Bersama/Muhammad Farid Payawan Putra	36 M ²	BBM	Baik	2014	PT
19	CV. Mitra Usaha Sejati/H.Berkat Setiawan	24 M ²	Minyak Tanah	Baik	2014	CV
20	CV. Dendy Jaya Mandiri/Hadiyanto, G.S	24 M ²	BBM	Baik	2014	CV
21	UD. Hampangen Jaya/Yuda Anugraha Rangkai, SP	48 M ²	Kasau, Balok, Papan Les, Reng, Aneka Jenis kayu serta Meubelair	Baik	2014	PO
22	UD. Al-Zahra/Mahyudin	18 M ²	BBM	Baik	2014	PO
23	CV. Satu Putri Dua Putra/Jumiati	40 M ²	BBM	Baik	2014	PO
24	UD. Bahagia / Yemini. LG	24 M ²	BBM	Baik	2014	PO
25	CV. Sangalang Makmur/Ruspida	80 M ²	Rotan	Baik	2014	CV
26	UD. Lancar / Trimo	35 M ²	BBM	Baik	2014	PO
27	CV. Metro Megah Jaya Cemerlang/Mardianto L. Hanyi	35 M ²	Meubelair/Moulding	Baik	2014	CV
28	UD. Wahyu Bersama/Yuli Patria, ST	24 M ²	BB Dan Gas	Baik	2014	PO
29	UD. Mira Bella / Wiji Santoso	12 M ²	BBM	Baik	2014	PO
30	Toko Novi / Elsy Aulia Mamahit	24 M ²	Minuman Beralkohol	Baik	2012	PO

NO	NAMA GUDANG/PEMILIK	LUAS (M ²)	ISI GUDANG	KONDISI GUDANG	TAHUN BERDIRI	STATUS KEPEMILIKAN
31	CV. Bumi Katingan Makmur/Syaiwa, SE	258,39 M ²	Aneka Jenis Rotan, Karet Dan Damar	Baik	2014	CV
32	Koperasi Indo Frima Hutan Lestari/Mardianto	500 M ²	Papan, Balok, Kasau, Reng, Aneka Jenis Kayu Gergajian dan Lainnya	Baik	2014	Koperasi
33	Pangkalan BBM Aya/Yahya	20 M ²	BBM	Baik	2014	PO
34	Pangkalan BBM Sanah Lefi/Pitriansyah	16 M ²	BBM	Baik	2014	PO
35	Pangkalan BBM AUSIS II/Siswanto, Amd.Kep	24 M ²	BBM	Baik	2014	PO
36	Pangkalan BBM Abel/Dere Y.Engkak	40 M ²	BBM	Baik	2014	PO
37	PT. Trio Karya Mandiri/Saharuddin	18 M ²	BBM Dan Gas	Baik	2014	PT
38	Kios BBM Aulia/Muhammad Hermansyah	6 M ²	BBM	Baik	2014	PO
39	CV. Maju Bersama / Nasrudin	35 M ²	Gas Elpiji	Baik	2015	PO
40	Kios Tani Rasyid/H.Syamsul Rasid	24 M ²	Pupuk Dan Pemberantas Hama	Baik	2015	PO
41	KUD. Mitra Cahaya Mandiri/H.M.Zairin	30 M ²	Bahan Makan Ternak, Obat Pertanian Dan Pupuk	Baik	2015	PO
42	UD. Lisna / Sarwani	40 M ²	BBM Dan Gas	Baik	2015	PO
43	PT. Kurnia Alam Sejati/Tri Joko	1500 M ²	Pasir Zircon	Baik	2012	PT
44	UD. Raja Jabon Furniture/Mahdianor	48 M ²	Kayu Akasia Dan Kayu Hasil Kebun Lainnya	Baik	2015	PO
45	PT. Papa Syamsu/Sinta Sulistya Ningrum	48 M ²	Sembako	Baik	2015	PO
46	PT. Kalimantan Mineral Sands/Peter John Curran	100 M ²	Pasir Zircon	Baik	2010	PT
47	J.M Mandiri / Jaini	40 M ²	Rotan	Baik	2015	PO
48	Toko Anugrah/M.Katmo	20 M ²	Gas Elpiji	Baik	2015	PO
49	UD. Cindy Fastika/Syahladin.I	24 M ²	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
50	CV. Harapan Bersama/Fauji	20 M ²	BBM	Baik	2015	CV
51	CV. Yusan Agatis/Harry Himawan	1.200 M ²	Kotak Makanan, Sendok, Sumpit Berbahan Kayu	Baik	2015	CV
52	Pangkalan BBM Widia/Jaya Akbar	100 M ²	BBM	Baik	2015	PO

NO	NAMA GUDANG/PEMILIK	LUAS (M ²)	ISI GUDANG	KONDISI GUDANG	TAHUN BERDIRI	STATUS KEPEMILIKAN
53	Pangkalan BBM Budiana/Budi Makmur	30 M ²	BBM	Baik	2015	PO
54	PT. Sumber Harapan Tumbang Samba/H.Edy Syuhada, H.M, SE	400 M ²	BBM	Baik	2015	PT
55	UD. Jaya Mandiri/Nina Elisa, A.Md Keb	96 M ²	Moulding Dan Maubel	Baik	2015	PO
56	Koperasi Pertambangan Aurat/Nyagin S	48 M ²	Pasir Zircon	Baik	2015	Koperasi
57	UD. Umbar/Paryono	30 M ²	BBM	Baik	2014	PO
58	CV. Sindo Makmur/H.Ripansyah	300 M ²	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2012	PO
59	Happy Family/Akhmad Husaini	20 M ²	Minuman Beralkohol	Baik	2015	PO
60	CV. Gunadarma Jaya/Darmawan	98 M ²	Pupuk Dan Bahan Makanan Ternak	Baik	2015	CV
61	PT. Anugerah Borneo Lestari/Ir. Nobelson Anggen	128 M ²	Pasir Zircon	Baik	2012	PT
62	Kios Nuryani/Nuryani	24 M ²	Minuman Beralkohol	Baik	2015	PO
63	Koperasi Produksi Indo Frima Huta/Mardianto	500 M ²	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2014	Koperasi
64	UD. Usaha Bersama/H.Budi Anto	100 M ²	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
65	Koperasi Serba Usaha Bersama Nelayan Keramba Apung Kasongan/Riskani Ahmad Efendi	120 M ²	Bahan Pakan Ikan	Baik	2015	Koperasi
66	CV. Kurnia Alam Sejati/Tri Joko	144 M ²	Pasir Zircon	Baik	2015	CV
67	UD. Mitra Usaha Tani/Weldisen	49 M ²	Balok, Papan, Reng, Kasau, Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
68	Pangkalan BBM Piatigorski/Piatigorski	25 M ²	BBM	Baik	2015	PO
69	Pangkalan BBM Fauzy/Sugeng Prayetno	20 M ²	BBM	Baik	2015	PO
70	Sumber Hidup / Ikbal Khair	30 M ²	BBM	Baik	2015	PO

NO	NAMA GUDANG/PEMILIK	LUAS (M ²)	ISI GUDANG	KONDISI GUDANG	TAHUN BERDIRI	STATUS KEPEMILIKAN
71	UD. Armando Jaya Utama/Ramba	30 M ²	BBM	Baik	2015	PO
72	CV. Patriatama Katingan/Abirani	60 M ²	Pasir Zircon	Baik	2015	CV
73	Koperasi Hapakat Bulat/Taswandhie	18 M ²	Pupuk, Saprodi, Buah Sawit	Baik	2015	Koperasi
74	PT. Nazwa Liza Griya/Rajak Al Amindara	200 M ²	Air Mineral Kemasan	Baik	2015	PT
75	Pangkalan BBM Rafi Karya/Wawan Irawan	25 M ²	BBM	Baik	2015	PO
76	UD. Runen Jaya Perkasa/Muhammad Maulana	160 M ²	Balok, Papan, Galar,Reng, Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
77	UD. Wahyu/M.Aini	160 M ²	BBM	Baik	2015	PO
78	CV. Anugerah Pradana/Anton Aswin Lubis	12 M ²	Buah Kelapa Sawit Dan Pupuk	Baik	2015	CV
79	KSU BMT Karya Usaha Bersama/Mariansyah, S.Si	600 M ²	Rotan	Baik	2015	PO
80	Ud. Tani Subur/ Eko Suseno	20 M ²	Pupuk Non Subsidi Dan Pupuk Bersubsidi	Baik	2017	PO
81	CV. Tani Subur/ Eko Suseno	42 M ²	Pupuk, Buah Sawit	Baik	2017	PO
82	CV. Mendawai Mandiri/ Alpian	30 M ²	Gas LPG	Baik	2017	PO
83	Koperasi Harapan Makmur/ Guruh	24 M ²	Balok, Papan Galar, Papan Reng, Papan Lis dan Aneka Jenis Kayu Gergajian	Baik	2017	Koperasi
84	PT. Bintang Sarana Karya Abadi/ Donny Gunadi	200 M ²	Bahan Dan Perlengkapan Bangunan, Bahan Konstriksi Dari Kayu	Baik	2017	PT
85	PT. Hutan Karya Alam Persada/ Ir. Ruzdhan Noor	200 M ²	Hasil Pertanian dan Kehutanan	Baik	2017	PT
86	UD. Sasa/ Dian	15 M ²	BBM	Baik	2017	PO
87	CV. Satu Putri Dua Putra/Jumiati	40 M ²	BBM	Baik	2012	CV
88	CV. Bahtera Sejahtera Bersama/ Muhammad Dawid Az Tundan	40 M ²	BBM	Baik	2017	CV
89	Toko Itah/ Yanito	36 M ²	Minuman Beralkohol	Baik	2007	PO
90	UD. Kaspari Permai/ Muliana	20 M ²	BBM	Baik	2012	PO
91	UD. Ausis/ Hamid. N	24 M ²	BBM	Baik	2012	PO
92	UD. Bapak Ida/ Muhamad Ishak	30 M ²	BBM	Baik	2012	PO

NO	NAMA GUDANG/PEMILIK	LUAS (M ²)	ISI GUDANG	KONDISI GUDANG	TAHUN BERDIRI	STATUS KEPEMILIKAN
93	UD. Karya Mustika/ Yasen A	20 M ²	BBM	Baik	2012	PO
94	PT. Alfa Prima Lestari/ Evi Liana	60 M ²	Pupuk Dan Pemberantas Hama	Baik	2017	PT

Sumber : Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan, 2018

2.3.2.7. Perindustrian

a. Persentase Pertumbuhan Industri

Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Katingan tahun Tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2012 berada di posisi 6,01 persen, mengalami peningkatan pada Tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 3,44 persen dan 5,09 persen. Namun angka ini mengalami penurunan pada berikutnya menjadi -1,86 persen. Selanjutnya mengalami peningkatan pada Tahun 2016 menjadi 10,44 persen.

Tabel 2.161
Persentase Pertumbuhan Industri
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	28	17	26	-10	55	n/a
Persentase Pertumbuhan Industri (%)	6,01	3,44	5,09	-1,86	10,44	0

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2013-2016 dan RKPD Kab. KatinganTahun 2018

b. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan menunjukkan jumlah kelompok pengrajin dari tahun ketahun selalu bertambah. Hal ini dapat dilihta pada tabel dibawah, dimana pada tahun 2012 terdapat 33 kelompok pengrajin dan bertambah terus jumlahnya mencapai 63 kelompok pengrajin pada tahun 2016. Sementara itu selama periode yang sama, terdapat bantuan kepada kelompok pengrajin yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan. Namun bantuan tersebut hanya diberikan pada Tahun 2014 dan 2015 pada 6 kelompok.

Tabel 2.162
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok Pengrajin yang	0	0	6	6	0	0

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mendapat bantuan (kelompok)						
Jumlah Kelompok Pengrajin (kelompok)	33	48	50	62	63	63
Persentase bina kelompok pengrajin yang mendapat bantuan (%)	0	0	12	9,7	0	0

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, 2017

2.3.2.8. Transmigrasi

Jumlah transmigran umum di Kabupaten Katingan nampaknya mengalami stagnansi. Hal ini ditunjukkan oleh dengan jumlah transmigran umum sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 jumlahnya sama yaitu 3.681 orang. Angka ini masih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 3.667 orang. Sementara itu transmigran swakarsa selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada.

Tabel 2.163
Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah transmigran (orang)	3.667	3.667	3.681	3.681	3.681	3.681

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2013-2017

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Katingan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Sebagai wujud untuk memaknai fungsi tersebut maka perhatian terhadap visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD menjadi sangat penting. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025.

Tabel 2.164

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappelitbang Kab. Katingan, 2018

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/ selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah dan seklaigus

menjadi pedoman penyusunan RKPD. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018.

Tabel 2.165

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2018

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perda dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

Tabel 2.166
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

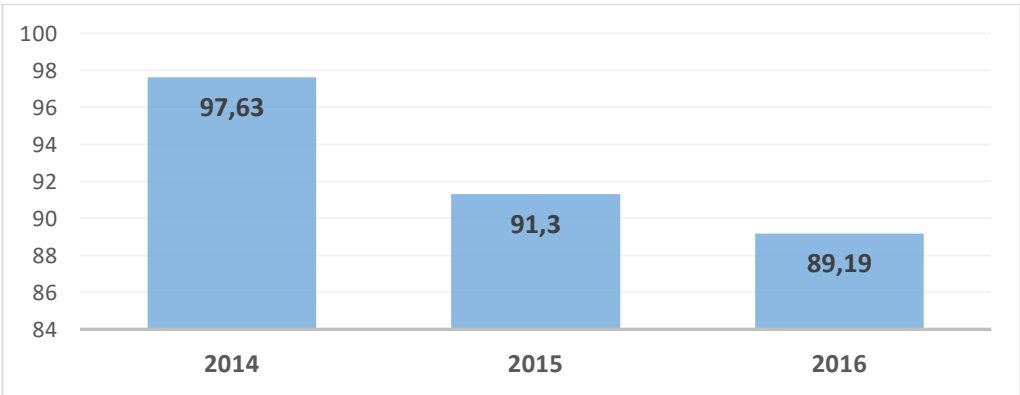
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2018

d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berpedoman pada RPJMD, dengan kata lain RKPD merupakan penjabaran RPJMD di tahunan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan yang sama atau berpedoman pada RPJMD dibagi dengan jumlah program RKPD tahun tersebut dikali 100%.

Gambar 2.44 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2014-2016



Sumber : Bappelitbang Kab. Katingan, 2017

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2014 sebesar 97,63 persen, menurun di tahun 2015 dan 2016 masing-masing menjadi 91,3 persen dan 89,19 persen. Kondisi ini mengindikasikan penurunan konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke RKPD. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus pada tahun-tahun berikutnya dalam penyusunan RKPD, sehingga konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke RKPD selalu tetap dijaga.

2.3.3.2. Keuangan

a. Penetapan Perda APBD

Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Hal ini berarti, paling lambat tanggal 31 November, rancangan Perda APBD harus sudah disepakati/disetujui. Selanjutnya, perda ini akan dievaluasi oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Perda.

Penetapan Perda APBD Kabupaten Katingan selama periode 2012 sampai dengan 2017 selalu tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kondisi ini mendorong terciptanya tertib administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Katingan.

2.3.3.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah.

a. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.167

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Diklat PIM (orang)	60	60	1	30	39	22
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS (orang)	258	-	208	111	105	72
Diklat Teknis (orang)	82	523	835	381	334	105
Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural (orang)	60	60	1	30	39	22

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pejabat di Kabupaten Katingan yang mengikuti Diklat PIM selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sebanyak 60 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 1 orang. Namun pada tahun 2015 dan 2016

mengalami kenaikan kembali menjadi 30 orang dan 39 orang. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga menjadi 22 orang.

b. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, dapat diketahui bahwa jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu 33 orang. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 30 Orang. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel diatas, maka diketahui persentase jabatan terisi sebanyak 97 persen pada Tahun 2017.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.168
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (formasi)	33	33	33	33	30	30
Pemangku Jabatan (orang)	30	30	30	29	29	29
Persentase Jabatan pimpinan tinggi Terisi (%)	91	91	91	88	97	97

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

c. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.169
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (formasi)	615	615	615	615	638	638
Pemangku Jabatan (orang)	476	481	468	508	474	551
Persentase Jabatan administiras Terisi (%)	77	78	76	83	74	86

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2012

sampai dengan 2015 yaitu 615 orang, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 638 Orang.

d. **Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah**

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.170
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (formasi)	310	310	310	895	895	895
Pemangku Jabatan (orang)	275	285	296	623	630	656
Persentase Jabatan fungsional tertentu Terisi (%)	89	92	95	70	70	73

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2012 sampai dengan 2014 yaitu 310 orang, sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 meningkat menjadi 895 Orang.

2.3.3.4. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

a. **Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK**

Data dari Inspektorat menunjukkan bahwa jumlah total temuan BPK di Kabupaten Katingan pada tahun 2012 adalah 77 buah. Situasi ini mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 37 buah dan 21 buah. Namun kondisi tersebut berubah pada tahun 2015 dan 2016, yaitu mengalami peningkatan menjadi 41 buah dan 42 buah. Kondisi ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemda dan membutuhkan perbaikan penataan administasi dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Lebih lanjut,berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Katingan, dapat diketahui bahwa Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan dan peningkatan, dimana Persentase tindak lanjut temuan BPK tahun 2012 sebesar 75,32%, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 45,94% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali menjadi 66,16%. Meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi 43,90%, namun pada tahun 2016 meningkat hingga menjadi 76,19%.

Detail mengenai Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.171
Persentase Tindak Lanjut BPK
Kabupaten Katingan Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase tindak lanjut temuan BPK (%)	75,32	45,94	66,16	43,90	76,19	-
Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti	58	17	14	18	32	n/a
Jumlah total temuan BPK	77	37	21	41	42	n/a

Sumber : Inspektorat Kabupaten Katingan

2.3.3.5. Sekretariat Daerah

a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan. Selain itu, laporna ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan SAKIP atau LKjIP Pemerintah Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.172

Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai SAKIP	52,71 (CC)	48,66 (C)	47,37 (C)	48,66 (C)	50,33 (CC)

Sumber : Lakip Kabupaten Katingan Tahun 2017 dan Setda Kab. Katingan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengalami kecenderungan meningkat pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Bila ditinjau pencapaian selama 5 tahun terakhir, maka diketahui bahwa pada Tahun 2013 nilai SAKIP Katingan berada pada CC namun mengalami penurunan ke C selama 3 tahun. Selanjutnya terjadi perbaikan kinerja, sehingga meningkat menjadi CC pada tahun 2017. Namun angka ini masih berada di bawah nilai Provinsi Kalimantan Tengah yaitu B.

b. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yaitu nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.173

Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai LPPD	2,4329 (Tinggi)	2,7255 (Tinggi)	2,9196 (Tinggi)	2,9860 (Tinggi)	2,5778 (Tinggi)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2018

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai LPPD Kabupaten Katingan pada tahun 2013 (2,4329) mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 2,9860 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 2,5778. Walaupun mengalami penurunan, namun predikatnya masih tetap Tinggi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

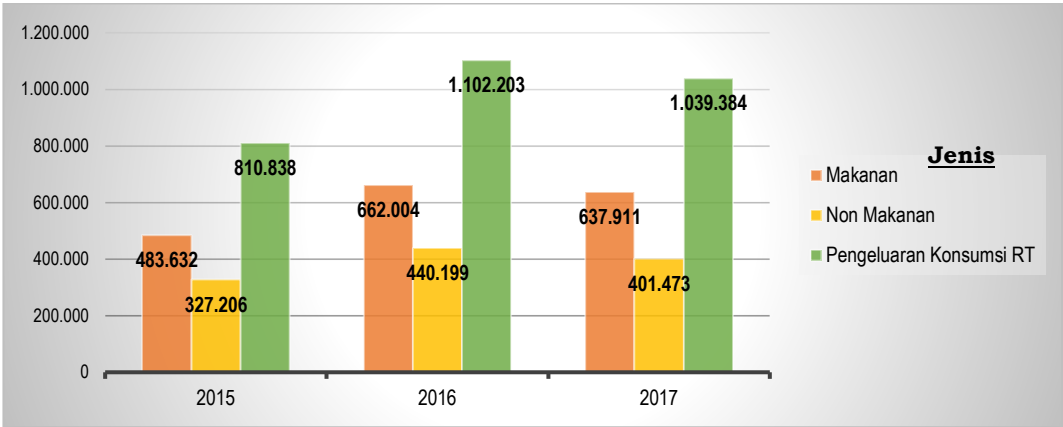
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita atau Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pada dua tahun terakhir ini rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Katingan tidak ada yang berada di bawah Rp.200.000,-, bahkan untuk semua jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun total pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan dari Rp.810.838,- ditahun 2015 menjadi Rp.1.139.384,- di tahun 2017.

Gambar 2.45 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2015-2017



Sumber: BPS Kabupaten Katingan, 2018, diolah

Adapun dominasi pengeluaran rata-rata di tahun 2017 masih pada golongan antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.499.999,- yaitu sebesar 27,41%. Bila dibandingkan dengan pengeluaran tahun sebelumnya, justru yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah jenis pengeluaran antara Rp.750.000,- s/d Rp.999.999,- dari 18,37% di tahun 2016 menjadi 26,22% di tahun 2017.

Tabel 2.174
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan, 2016-2017

Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase Penduduk (%) Tahun 2016	Persentase Penduduk (%) Tahun 2017
< 150 000 0,00	0,00	0,00
150 000 – 199 999	0,00	0,00
200 000 – 299 999	0,62	0,93
300 000 – 499 999	10,72	6,07
500 000 – 749 999	16,99	25,59
750 000 – 999 999	18,37	26,22
1 000 000 – 1 499 999	33,72	27,41
1 500 000+	19,57	13,79
Jumlah	100,00	100,00

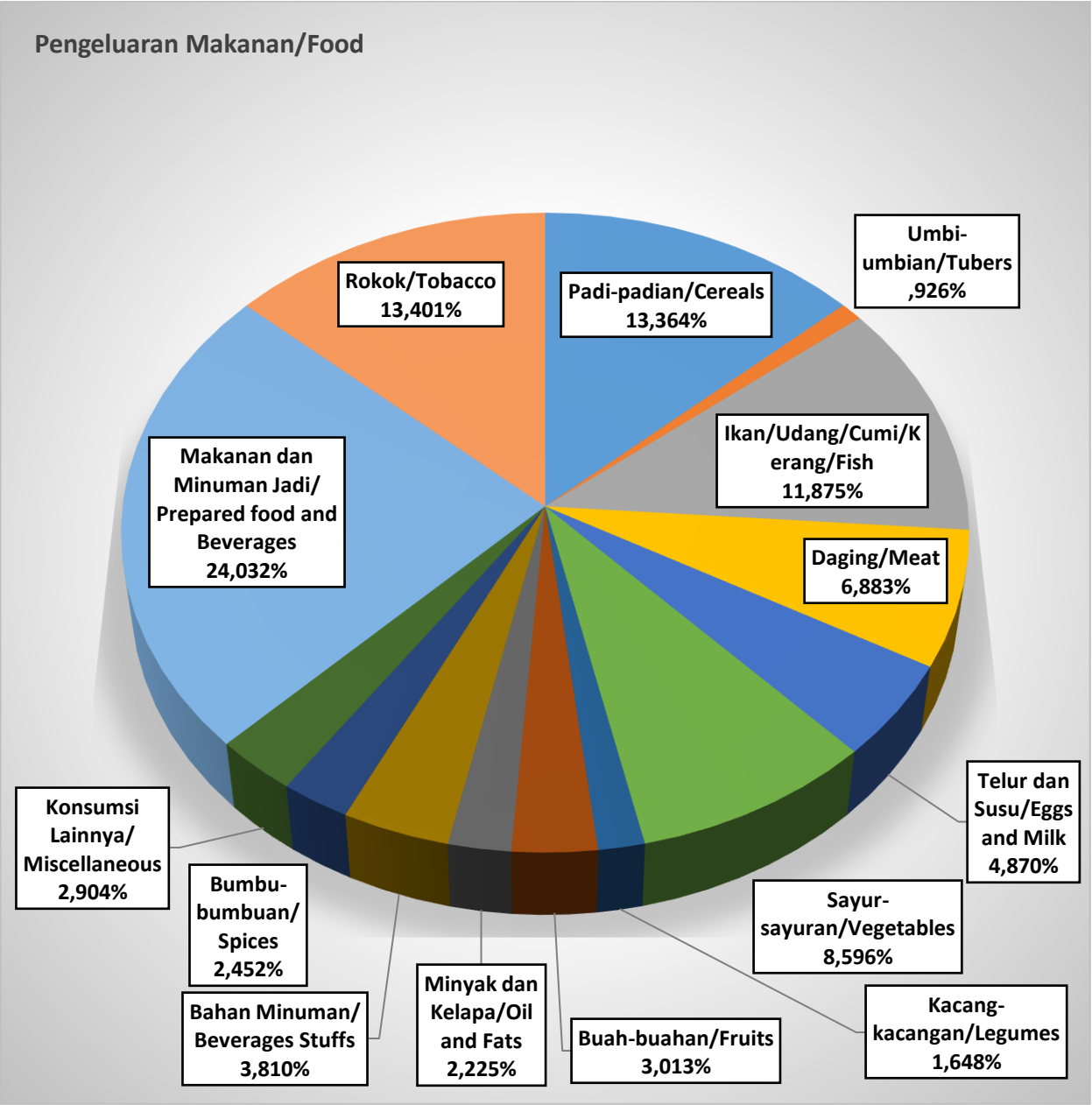
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kab. Katingan, 2018

2.4.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita

Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita sebulan di Kabupaten Katingan masih didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas makanan. Sebesar 61,37% dari total pengeluaran penduduk per kapita selama sebulan dibelanjakan untuk komoditas makanan sebesar Rp.637.911,- turut

dibanding tahun 2016. Untuk jenis pangannya, terbanyak masih jenis makanan dan minuman jadi sebesar 24,03%, diikuti oleh pengeluaran untuk beli rokok (13,40%) dan belanja padi-padian (13,36%).

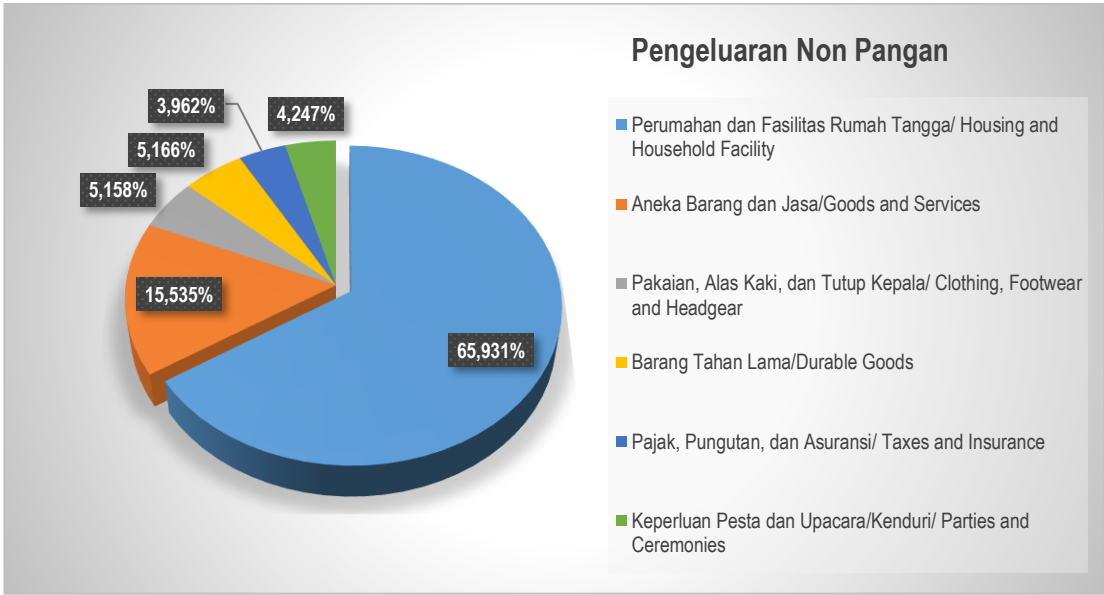
Gambar 2.46 Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kab. Katingan Tahun 2017



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

Untuk pengeluaran non pangan di tahun 2017, masyarakat Katingan paling banyak membelanjakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 65,93% dan belanja aneka barang dan jasa sebesar 15,54% dari total pengeluaran per kapita selama sebulan sebesar Rp.401.473,-. Berikut data selengkapnya terkait jumlah pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan masyarakat Katingan di tahun 2017.

Gambar 2.47 Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

2.4.3. Produktivitas Total Daerah

Secara teori, produktivitas diartikan sebagai output produk berupa barang atau jasa untuk setiap input atau faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi (Syverson, 2011). Produktivitas ditujukan untuk melihat efisiensi produksi dengan membandingkan input yang digunakan untuk memproduksi output. Faktor input merupakan ukuran unit-unit sumber daya, yang dapat berupa sumber material atau bahan baku, tenaga kerja, mesin-mesin, serta sumber daya pikiran otak manusia. Sedangkan pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas.

Dengan demikian, pengukuran produktivitas dapat dikembangkan berdasarkan masing-masing komponen input secara terpisah atau menurut seluruh input secara bersama-sama. Pengukuran produktivitas masing-masing komponen input sering disebut dengan produktivitas parsial yang biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap salah satu input secara langsung. Sedangkan produktivitas total, mengukur seluruh input secara simultan. Karena keterbatasan data yang tersedia, maka Pengukuran Produktivitas Total Daerah hanya mengukur produktivitas tenaga kerja saja, sebagaimana data yang diperoleh dari BPS (2016).

Dalam perhitungan produktivitas total daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (dalam laporan ini dibagi atas 9 sektor) yang merupakan jumlah

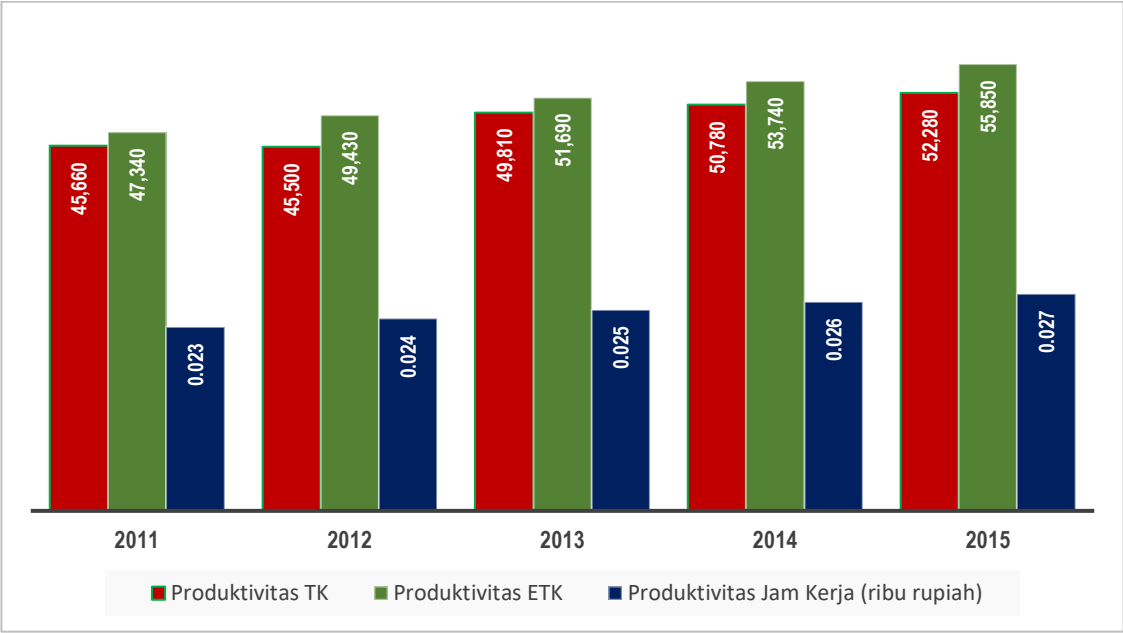
PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peningkatan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja khususnya di Kabupaten Katingan merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghadapi persaingan pasar dalam tingkat global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. MEA merupakan pasar tunggal antar negara ASEAN, yaitu pasar bebas yang meliputi arus barang, jasa, modal, dan investasi. Bentuk dari pasar bebas tersebut adalah penghapusan bea masuk barang dan jasa. Dampak dari MEA adalah arus barang maupun jasa antar negara ASEAN akan lebih mudah, termasuk didalamnya adalah arus tenaga kerja. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 40 persen dari total penduduk ASEAN akan menjadi pasar utama arus barang, jasa maupun investasi. Dengan diberlakukannya MEA, tenaga kerja Indonesia harus berkompetisi untuk memperebutkan lapangan kerja yang tersedia. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mendapat keuntungan ekonomi dan demikian pula sebaliknya.

Terkait dengan prospek tenaga kerja dalam era MEA, Indonesia khususnya masyarakat Katingan harus siap untuk menghadapi tenaga terampil dari negara-negara ASEAN yang memasuki pasar tenaga kerja dalam negeri. Hal ini akan menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi pemerintah maupun rakyat Katingan untuk bisa bersaing di tingkat nasional dan global. Sebagai evaluasi sekaligus bagaimana kesiapan tenaga kerja Katingan dalam menghadapi kondisi ini, maka analisis produktivitas tenaga kerja perlu dilakukan. Angka ini menggambarkan output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi angka yang dihasilkan, menandakan bahwa tenaga kerja di Katingan semakin produktif.

Selama periode 2011-2015, produktivitas tenaga kerja di Katingan terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah. Hal ini mengindikasikan kualitas tenaga kerja di Katingan semakin baik. Pada tahun 2015, produktivitas tenaga kerja di Katingan mencapai 52,28 juta rupiah per tenaga kerja/tahun. Dilihat dari pertumbuhannya, capaian tersebut meningkat sebesar 2,95 persen dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.48 Produktivitas Tenaga Kerja, Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja dan Produktivitas Jam Kerja di Kabupaten Katingan, 2011 – 2015



Sumber: BPS & Kemenaker RI, Pengukuran Produktivitas Nasional, Regional Sektoral 2016

Selain produktivitas tenaga kerja, dilakukan pula analisis terhadap produktivitas ekuivalen tenaga kerja penuh (ETK). Analisis ini dilakukan sebagai pembanding perhitungan produktivitas tenaga kerja konvensional sekaligus untuk melihat efisiensi tenaga kerja di Katingan. Jika nilai produktivitas ETK lebih tinggi dibandingkan produktivitas tenaga kerja, maka terjadi efisiensi tenaga kerja karena dapat menghasilkan output yang sama dengan jam kerja yang lebih sedikit. Berdasarkan data pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa produktivitas ETK dalam lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh jumlah ETK dibandingkan tenaga kerja keseluruhan jumlahnya lebih sedikit. Artinya kebanyakan tenaga kerja di Katingan bekerja sesuai jam kerja normal atau terjadi efisiensi pekerjaan.

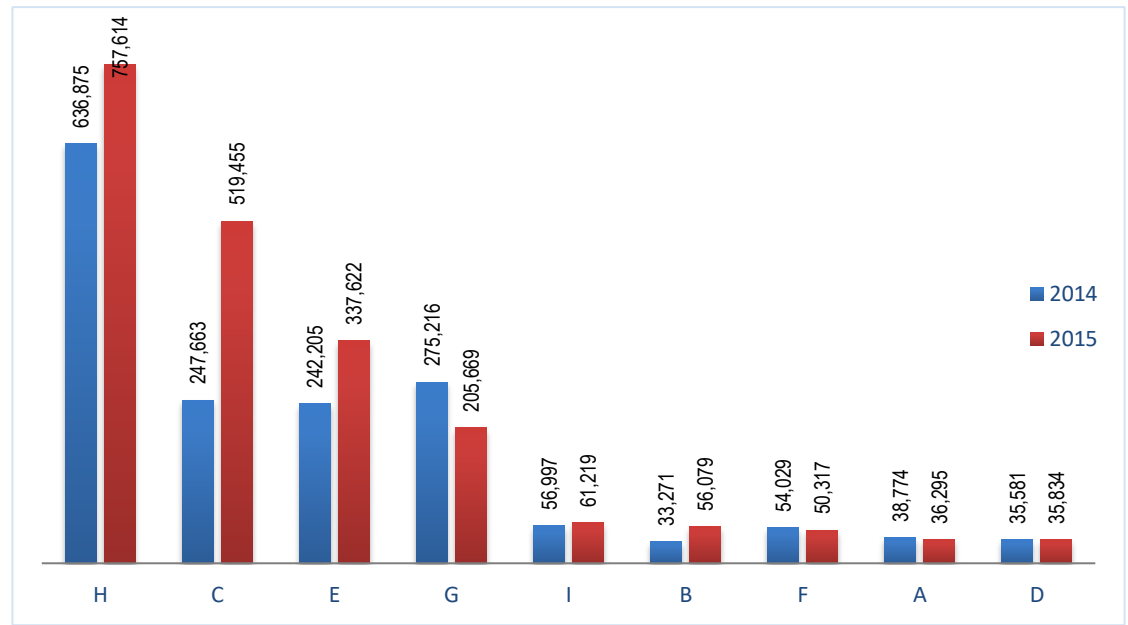
Adapun analisis produktivitas jam kerja menunjukkan hubungan antara jam kerja dengan output yang dihasilkan nonlinier. Pada saat jam kerja berada di bawah batas normal, penambahan output akan proporsional dengan penambahan jam kerja. Namun pada saat jam kerja di atas normal, output akan menurun seiring bertambahnya jam kerja. Bahkan jam kerja yang melebihi batas normal dapat berakibat pada kesalahan dan kecelakaan kerja (Pencavel, 2014).

Produktivitas jam kerja selama periode 2011-2015 di Kabupaten Katingan secara umum mengalami peningkatan. Produktivitas jam kerja meningkat dari Rp.23.012 per jam di tahun 2011 menjadi Rp.27.149 di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan efisiensi penggunaan jam kerja. Jika dilihat dari pertumbuhannya,

pada tahun 2015 terjadi peningkatan produktivitas jam kerja sebesar 3,92 persen dari tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan output yang cukup tinggi. Dengan durasi jam kerja yang tak jauh berbeda, tenaga kerja masih mampu menghasilkan output yang lebih tinggi. Sebagai catatan, di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan data Sakernas, rata-rata jam kerja tenaga kerja keseluruhan tercatat sebesar 41 jam perminggu. Penggunaan jam kerja lebih dari 41 jam menunjukkan terjadinya in-efisiensi waktu yang dipakai tenaga kerja. Untuk tenaga kerja di Katingan pemakaian jam kerja masih normal atau kurang dari 41 jam dalam periode 2011-2015.

Selanjutnya, analisis terhadap produktivitas tenaga kerja di masing-masing lapangan usaha ekonomi menjadi penting untuk melihat sampai sejauh mana kesiapan masyarakat Katingan dalam menghadapi pasar global. Gambar 2.20 menunjukkan produktivitas tenaga kerja kategori lapangan usaha di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 dan 2015. Produktivitas tenaga kerja tertinggi pada tahun 2015 terjadi di lapangan usaha sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan (kategori H) sebesar 757,61 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sedangkan kontribusi PDRB dari kategori lapangan usaha ini hanyalah 10,09 persen atau sebesar 553.058,5 juta rupiah. Produktivitas terendah tahun 2015 ada pada lapangan usaha Listrik, Gas dan Air (kategori D), yaitu sekitar 35,83 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

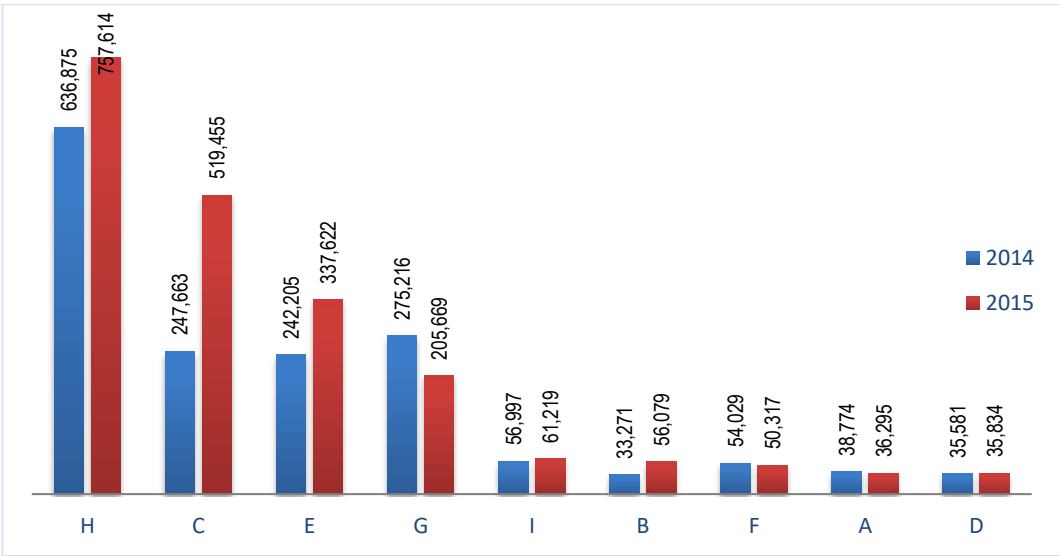
Gambar 2.49 Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Katingan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2014 dan 2015 (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)



Sumber: BPS Katingan, diolah

Berdasarkan gambar di atas, kontributor terbesar PDRB Katingan tahun 2015 adalah kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (kategori A) diikuti kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (kategori C) dan kategori lapangan usaha Konstruksi (kategori E). Sekitar 27,64 persen PDRB Kabupaten Katingan tahun 2015 dihasilkan dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Besarnya kontribusi kategori lapangan usaha ini ternyata belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerjanya dan berada di peringkat 8 terendah sebesar 35,85 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

Gambar 2.50 Kontribusi PDRB dan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Tenaga Menurut Kategori di Kabupaten Katingan Tahun 2015 (Persen)



- Keterangan Kategori :**
- | | |
|--|--|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | F. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi |
| B. Pertambangan dan Penggalian | G. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi |
| C. Industri Pengolahan | H. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan |
| D. Listrik, Gas, dan Air | I. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan |
| E. Konstruksi | |

Sumber: BPS Katingan, diolah

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Katingan, terutama pada beberapa kategori lapangan usaha yang berada pada kategori terendah seperti kategori D, A, F, B dan I adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dipicu oleh pekerja di wilayah Kabupaten Katingan pada tahun 2015 yang berpendidikan SD kebawah masih tinggi yaitu mencapai 36.418 orang atau 47,71 persen, sedangkan SMTP sebesar 22.025 atau 28,86 persen. Melihat tingkat pendidikan seperti ini artinya masih cenderung bersifat tenaga kerja fisik yang mengandalkan kekuatan fisik dalam melakukan kegiatan bekerja.

Faktor lainnya adalah adanya ketimpangan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Katingan, dimana banyak desa dan kecamatan di Kabupaten Katingan

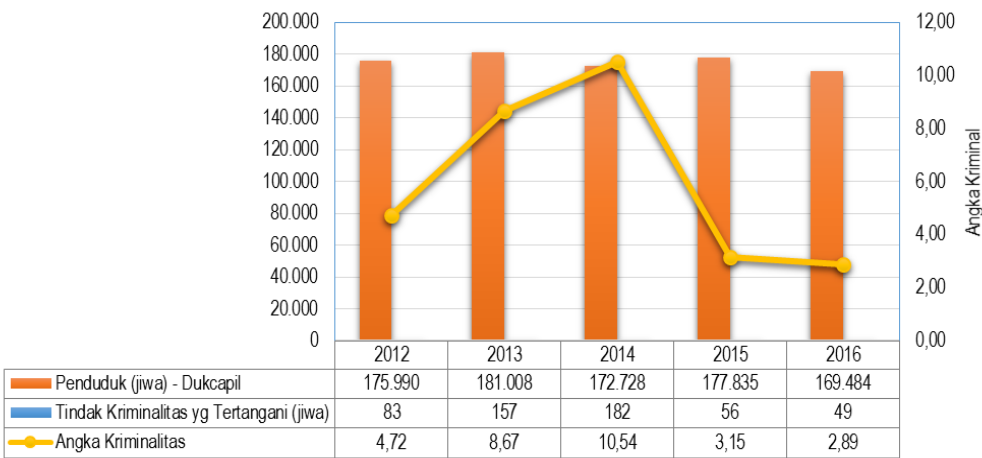
belum terjangkau jalan darat, keterbatasan jangkauan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan permasalahan penting yang ikut mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja. Untuk itu, usaha peningkatan produktivitas tenaga kerja pada kategori lapangan usaha ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM serta pemerataan pembangunan infrastruktur akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan.

2.4.4. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Gambar 2.51 Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Katingan Tahun 2012 – 2016



Sumber: Kepolisian Resor Katingan – BPS – Disdukcapil Kab. Katingan, diolah

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di atas, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2012–2016 paling banyak di tahun 2014 sebesar 10,54 dan selanjutnya terus turun sampai angka 2,89 di tahun 2016.

2.4.5. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator

yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio Ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

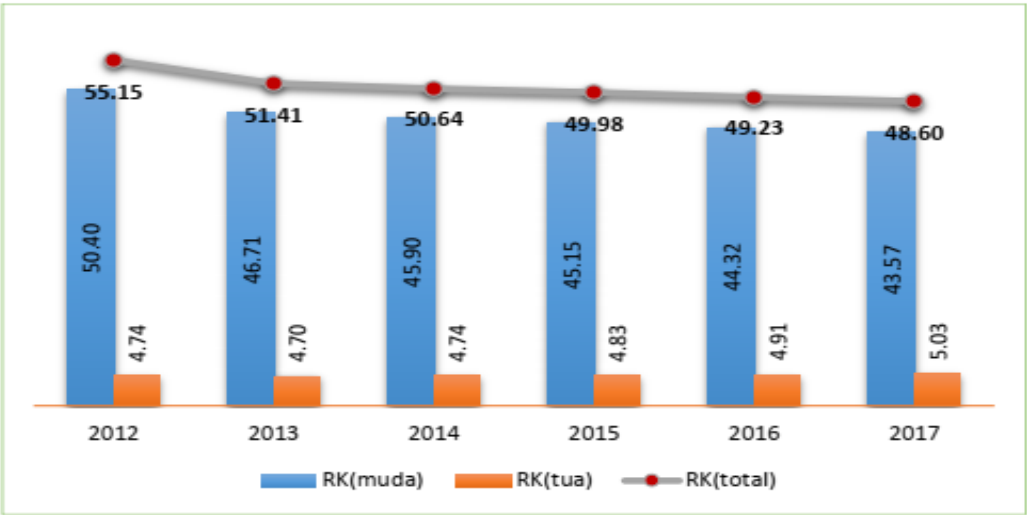
Tabel 2.175
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua di Kabupaten Katingan, 2012-2017

Kelompok Umur	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-14	48.939	49.541	48.036	48.260	48.360	48.464
15-64	97.097	98.488	104.654	106.886	109.115	111.242
>64	4.606	4.695	4.964	5.159	5.362	5.600

Sumber : BPS Kab. Katingan, diolah

Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Katingan periode 2012-2017 trennya terus menurun. Berdasarkan data pada Gambar 3.7, rasio ketergantungan total penduduk Katingan menurun dari 55,15 persen di tahun 2012 menjadi 48,60 persen di tahun 2017. Angka 48,60 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49-50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 48,60 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 43,57 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,03 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk usia kerja di Katingan masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

Gambar 2.52 Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan, 2012 – 2017



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

Dengan semakin menurunnya angka ketergantungan ini menunjukkan bahwa Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek penambahan jumlah penduduk usia produktif. Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, Indonesia sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012, dan puncaknya akan terjadi di tahun 2028-2030 (Ritonga, 2014). Namun, sebetulnya bonus demografi antarwilayah berbeda-beda. DKI Jakarta misalnya, sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 1980an. Faktornya karena migrasi, usia produktif dari luar masuk ke Jakarta. Kabupaten Katingan pun dimungkinkan mengalami percepatan bonus demografi ini, bisa dikarenakan masukkan pendatang usia produktif dari luar daerah melalui program transmigrasi atau mencari lapangan pekerjaan di Katingan.

2.4.6. Jumlah Desa Tertinggal

Status desa tertinggal di Kabupaten Katingan menunjukan jumlah yang cukup besar, yaitu 65 desa pada tahun 2017.

Tabel 2.176

Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2017

Uraian	2016	2017
Desa Maju	1	1
Desa Berkembang	2	12
Desa Tertinggal	49	65
Desa Sangat Tertinggal	102	76
Keseluruhan Desa	154	154

Sumber : IDM Kabupaten Katingan Tahun 2016 dan 2017, Dinas PMDes Kab. Katingan, 2018

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Katingan sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.177
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	6,23	6,33	6,55	6,53	6,54	6,56	7,14	<
2.	Laju inflasi (Palangka Raya)	Persen	6,73	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11	-	-
	Laju inflasi (Sampit)	Persen	6,49	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29	-	-
3.	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	25,07	27,76	30,89	34,19	37,63	41,17	31,50	>
4.	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	21,70	22,67	23,76	24,89	26,11	27,41	-	-
5.	Indeks Gini	Indeks	0,315	0,365	0,311	0,257	0,253	0,266		
6.	Persentase penduduk miskin	Persen	6,10	6,55	6,42	6,53	6,23	5,78	2,00	<
7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,21	0,85	1,03	0,97	0,85	0,92	-	-
8.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,32	0,19	0,27	0,22	0,19	0,27	-	-
9.	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	64,87	65,29	65,79	66,81	67,41	67,56	75,47	<
10.	Angka Melek Huruf	Persen	98,77	99,50	98,67	98,60	97,47	99,47	99,17	>
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,14	11,40	11,69	12,03	12,19	12,20	-	-
12.	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15	8,17	8,23	8,62	8,63	8,64	9,10	<
13.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,82	64,89	64,98	65,28	65,40	65,53	71,56	<
14.	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	-	-	-	-	0,01	0,02	0,5	>
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	83,61	83,86	83,88	84,78	n/a	n/a	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	Poin	64,71	69,48	62,33	60,79	n/a	n/a	-	-
17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	jiwa	71,61	69,04	70,83	72,20	n/a	65,97	78,00	<
18.	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,61	94,18	94,77	94,03	n/a	96,19	-	-
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,35	5,56	5,23	5,97	5,42	3,81	3,63	<
20.	Keluarga Prasejahtera	KK	1.994	1.449	1.284	1.284	2.108	n/a	-	-
21.	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Indeks	n/a	n/a	n/a	72,40	73,37	n/a	-	-
22.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	4,52	4,84	5,46	3,83	4,11	4,56	-	-
23.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	n/a	n/a	79,00	80,10	88,50	84,50	-	-
24.	Opini BPK	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	<
25.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	29,35	30,04	29,8	28,57	27,94	26,78	-	-
26.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Perkebunan terhadap PDRB	Persen	12,36	12,94	12,89	12,11	11,56	n/a	-	-
27.	Peranan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB	Persen	3,85	3,88	3,84	3,83	3,5	n/a	-	-
28.	Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	4,96	4,82	4,87	4,75	4,81	n/a	-	-
29.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Persen	9,63	9,35	9,01	8,53	8,85	n/a	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	5,74	5,86	5,59	5,27	5,29	n/a	-	-
31.	Peranan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,86	6,8	6,99	7,04	7,19	7,47	-	-
32.	Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	13,57	13,12	13,98	14,65	14,91	14,97	-	-
33.	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
II.1	Fokus Layanan Urusan Wajib									
A	Pendidikan									
1	Pendidikan Dasar									
1.1	APK SD	Persen	103,38	105,46	105,48	105,5	118,72	119	105,51	>
1.2	APM SD/SDLB/MI	Persen	91,82	99,56	99,82	99,57	99,79	100	99,62	>
1.3	Angka partisipasi sekolah SD	Persen	100	99,54	100	100	100	100	100,05	<
1.4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	n/a	n/a	100	100	104,75	n/a		
1.5	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	n/a	n/a	79,43	79,59	101,51	n/a		
1.6	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio	13,52	13,61	13,14	13,07	13,04	n/a		
2	Pendidikan Menengah									
2.1	APK SMP/MTs	Persen	92,77	106,03	106,06	106,1	87,64	114,95	106,13	>
2.2	APK SMA/SMK/MA	Persen	n/a	70,14	72,99	72,15	98,22	n/a	75,14	>
2.3	Angka partisipasi sekolah SMP	Persen	86,78	86,31	86,8	91,12	95,02	82,82	86,83	>
2.4	APM SMP/MTs	Persen	71,86	91,1	77,62	78,34	74,45	76,28	92,15	<
2.5	APM SMA/MA/SMK	Persen	62,73	56,11	60,67	59,44	63,05	64,62	56,16	>

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	86,78	86,31	96,36	93,92	96,38	100		
2.7	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	63,01	58,13	70,60	72,36	72,89	74,04	63,07	>
2.8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	n/a	n/a	99,79	99,60	120,51	n/a		
2.9	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	n/a	n/a	97,79	99,53	103,50	n/a		
2.10	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	n/a	n/a	98,93	98,96	86,12	n/a		
2.11	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	Persen	9,33	10,00	10,18	10,53	10,51	n/a		
2.12	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Persen	10,73	8,80	10,25	10,25	10,20	n/a		
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	n/a	n/a	55,41	76,41	81,34	n/a		
B	Kesehatan									
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jiwa	7,67	3,23	1,74	2,07	8,90	2,91		
2.	Angka Kelahiran Hidup	Jiwa	2.346	2.479	2.875	2.892	3.452	3.094		
3.	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	18	8	5	6	3	9	8	<
4.	Angka Kematian Balita	Persen	n/a	0,00	10,09	3,11	12,75	8,73		
5.	Angka Kematian Ibu	Persen	n/a	322,10	556,52	449,52	144,84	96,96	102	>
6.	Rasio Posyandu per satuan balita	Rasio	18,51	15,71	13,10	11,86	14,64	14,88		
7.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	Rasio/jumlah	15/104	16/108	16/111	16/109	16/110	16/111		
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	n/a	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,26	0,26	0,29	0,27	0,27	0,26		
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	3,99	4,01	4,46	4,66	5,25	4,72		
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	24,49	43,09	41,30	27,72	19,50	28,05		
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	91,30	94,39	96,48	72,29	84,21	77,19		
13.	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	Persen	83,83	73,29	70,81	46,58	41,61	60,25		
14.	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100		
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	31,07	15,09	15,45	20,12	50,98	13,61		
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100		
17.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99,59	99,96	99,17	54,35	99,38	45,93		
18.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	n/a	86,68	95,00	76,29	82,47	n/a		
19.	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Persen	n/a	91,08	93,23	76,88	88,84	n/a		
20.	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	n/a	25,26	18,33	12,69	20,95	n/a		
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Panjang Jalan	km	435,25	442,24	475,58	740,38	784,37	794,37	558,26	>
2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	11,18	29,07	27,58	16,79	16,01	18,48	53	<
3.	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	21,29	45,46	41,61	28,59	30,33	31,57		
4.	Panjang Jalan dilalui roda empat (permukaan aspal/km)	Km	95,93	191,74	218,16	223,15	234,66	256,11	200,55	>
5.	Panjang Jalan dilalui roda empat (permukaan tanah/km)	Km	339,32	250,49	257,41	517,23	538,25	n/a	357,71	>
6.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	km	n/a	n/a	0,56	1,36	1,42	n/a	10	
7.	Luas Irigasi Kabupaten	HA	n/a	17.545	17.545	17.545	17.545	17.545		
8.	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	n/a	35,00	43,00	52,00	58,00	75,00		
9.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persen	n/a	n/a	n/a	37,71	32,09	44,7		
10.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	desa	n/a	51	73	77	75	114		
11.	Luasan RTH Publik Sebesar sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	n/a	10,97	10,97	10,97	10,68	10,68		
D	Perumahan dan Kawasan Pemukiman									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	n/a	n/a	8,39	9,9	15,66	89,88	52	<
2.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	n/a	n/a	52,61	n/a	56,62	n/a	63,84	<
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	persen	n/a	n/a	10,45	71,46	59,53	59,53		
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100		
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	n/a	n/a	30,77	30,77	30,77	4,96	50	<
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77,78		
5.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	rasio	8/10.000	8/10.000	8/10.000	8/10.000	8/10.000	5/10.000	12 : 10.000	<
6.	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	n/a		
F	Sosial									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan	Kelompok	n/a	n/a	4 (APBD) 18 (APBN)	8 (APBD) 65 (APBN)	14 (APBD) 65 (APBN)	15 (APBD) 146 (APBN)	28	-
2.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21		
3.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	3	3	3	3	3	n/a		
4.	Persentase Korban Bencana Alam/ Sosial Yang Ditangani	persen	n/a	n/a	80	85	85	85		
G	Tenaga Kerja									
1	Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan	Kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	2	6	85	-
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	n/a	81,48	80,70	77,52	86,16	44,22		
2.	Rasio KDRT	persen	n/a	0,030	0,022	0,031	0,009	0,004		
3.	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	32	513		
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	persen	n/a	100	100	100	100	100		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu									
I	Pangan									
1.	Ketersedian Pangan:									
	• Beras	ton	n/a	40.382	43.529	41.481	n/a	n/a	48.766	<
	• Daging	ton	n/a	843.068	957.175	780.703	n/a	n/a	22.001	>
J	Pertanahan									
1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	n/a	3,08	3,08	3,08	3,08	n/a		
K	Lingkungan Hidup									
1.	Volume sampah yang ditangani	(m3)/hari	n/a	n/a	n/a	56,43	81	18.500		
2.	Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	Persen	n/a	n/a	64,98	59,66	40,00	n/a		
3.	Penegakan hukum lingkungan	Persen	n/a	n/a	75	100	100	n/a		
L	Kependudukan dan Catatan Sipil									
1.	Rasio penduduk ber KTP satuan penduduk	persen	24	56,32	68,98	77,34	97,46	90,58	90	>
2.	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	n/a	n/a	100	76	75	n/a		
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	persen	100	100	100	76	75	n/a	90	<

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Rasio pasangan berakte nikah	persen	2	2,79	3,13	8,83	10,73	10,73	90	<
5.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah/belum	sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah	n/a		
6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n/a		
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1.	Jumlah LSM/Ormas Aktif	Lembaga	-	21	21	19	25	28		
2.	Persentase PKK aktif	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a		
N	Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana									
1.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	Persen	n/a	75,50	77,40	78,09	78,33	78,51		
2.	Cakupan Keluarga dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Persen	n/a	27,95	39,13	40,99	73,91	75,16		
3.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	n/a	12,71	12,35	19,53	18,91	27,44		
4.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet need</i>)	Persen	n/a	19,48	17,42	15,22	14,86	13,4		
5.	Rasio jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Persen	n/a	55,9	47,83	47,83	97,52	70,19		
6.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan	Persen	n/a	70	27,27	27,27	73,25	88,5		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB									
7.	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja	Persen	n/a	17,39	18,01	18,63	45,34	45,34		
O	Perhubungan									
1.	Jumlah Terminal Angkutan Umum Kelas C	Jumlah	3	2	2	1	1	n/a		
2.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	n/a	n/a	1	1	1	n/a	1	=
3.	Pemasangan rambu-rambu	Unit	n/a	1.294	1.294	1.294	1.294	n/a	1.007	>
4.	Izin Trayek							n/a		
	Izin Trayek Perkotaan	Jumlah	73	50	25	n/a	n/a	n/a		
	Izin Trayek Perdesaan	Jumlah	n/a	68	57	57	n/a	n/a		
P	Komunikasi dan Informatika									
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	-	-	-	-	-	-		
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	33	33	33	33	33	29		
Q	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
1.	Persentase koperasi aktif	persen	77,46	54,77	37,08	43,67	47,64	57,42	79	<

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Persentase Usaha Mikro dan kecil	persen	95,20	95,20	100	100	99,83	n/a		
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah	n/a	n/a	1.630	1.630	44.831	n/a	1.467	>
4.	Jumlah BPR/LKM	jumlah	n/a	n/a	24	28	30	n/a		
R	Penanaman Modal									
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah	76+8	76+8	76+16	86+16	73+16	99+10	86+12	> (PMDN), < (PMA)
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	454.590.405.928	288.163.020.000	386.977.631.909	139.923,73	220.974.433.951	1.124.980.148.645		
3.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	223,03	18,12	1,40	1,40	0,69	n/a		
S	Kepemudaan dan Olahraga									
1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	n/a	n/a	18	18	18	n/a	5	>
T	Statistik									
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak		
2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
3.	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
U	Kebudayaan									
1.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	5	4	2	2	n/a		
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	n/a		
P	Perpustakaan									
1.	Pengunjung Perpustakaan per tahun	Persen	92,45	78,22	100	95,11	78,21	n/a		
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	22,43	21,66	35,38	33	33	n/a		
W	Kearsipan									
1.	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	Persen	n/a	n/a	0	0	0	n/a		
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	n/a	n/a	1	2	2	n/a		
II.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
A	Kelautan dan Perikanan									
1.	Produksi Perikanan	ton/tahun	n/a	n/a	18.614,59	3.342,53	7.802,19	n/a		
2.	Tingkat Capaian Produksi Perikanan	Persen	n/a	n/a	75,59	79,12	82,79	n/a		
3.	Konsumsi ikan	Persen	n/a	n/a	107,5	89,47	92,71	n/a		
B	Pariwisata									
1.	Kunjungan wisata	Persen	25.650	39.534	32.407	34.351	32.405	n/a		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	Pertanian									
1.	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	n/a	n/a	29,51	38,09	31,25	n/a		
D	Kehutanan									
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	n/a	n/a	6,00	6,88	0,43	n/a		
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	n/a	n/a	28,33	27,68	27,22	n/a		
E	Energi dan Sumberdaya Mineral									
1.	Persentase pertambangan tanpa izin	Persen	n/a	n/a	0	0	0	n/a		
F	Perdagangan									
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,85	6,8	6,99	7,04	7,19	n/a	12,50	<
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	n/a	n/a	4	n/a	n/a	n/a		
G	Perindustrian									
1.	Persentase pertumbuhan industri	Persen	6,01	3,44	5,09	-1,86	10,44	n/a		
2.	Persentase bina kelompok pengrajin yang mendapat bantuan	Persen	0	0	12	9,7	0	n/a		
H	Transmigrasi									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah transmigran	Orang	3.667	3.667	3.681	3.681	3.681	n/a		
II.3	Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah									
A	Perencanaan									
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	n/a	n/a	97,63	91,3	89,19	n/a		
B	Keuangan									
1.	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	=
C	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan									
1	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural	Orang	60	60	1	30	39	22		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi : belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Jabatan pimpinan tinggi Terisi	Persen	91	91	91	88	97	97		
3	Persentase Jabatan administrasi Terisi	Persen	77	78	76	83	74	86		
4	Persentase jabatan fungsional tertentu terisi	Persen	89	92	95	70	70	73		
D	Pengawasan									
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	Persen	75,32	45,94	66,16	43,90	76,19	n/a		
E	Sekretariat Daerah									
1.	Nilai SAKIP	Predikat	n/a	CC	C	C	C	CC	B/68	<
2.	Nilai LPPD	Nilai/Predikat	n/a	2,4329 (Tinggi)	2,7255 (Tinggi)	2,9196 (Tinggi)	2,9860 (Tinggi)	2,5778 (Tinggi)	Tinggi	=
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan	rupiah	n/a	n/a	834.278	810.838	1.102.203	1.039.384		
2.	Produktivitas Tenaga Kerja	juta rupiah/ tenaga kerja	45,50	49,81	50,78	52,28	n/a	n/a		
3.	Tindak Kriminalitas Yang Tertangani	kasus	83	157	182	56	49	120		
4.	Rasio ketergantungan	Persen	55,15	55,41	50,64	49,98	49,23	48,60		

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan

daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013-2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN	769.751.502.255	933.118.983.049	1.066.081.723.749	1.124.910.926.689	1.162.607.295.128	11,1%
Pendapatan Asli Daerah	37.222.343.026	50.959.197.566	40.799.553.099	46.280.722.192	52.990.318.457	1,2%
Hasil Pajak Daerah	9.541.325.039	17.559.351.060	10.250.508.758	11.754.994.414	24.244.009.315	40,8%
Hasil Retribusi Daerah	6.912.153.158	5.349.917.003	2.306.260.956	3.228.625.060	2.981.559.360	-11,8%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.242.648.622	2.963.093.030	3.619.254.975	4.143.123.625	5.749.484.182	16,7%
Lain-lain PAD yang Sah	17.526.216.206	25.086.836.473	24.623.528.410	27.153.979.093	20.015.265.600	6,3%
Dana Perimbangan	665.057.341.487	793.804.635.391	852.822.612.439	918.845.149.320	920.151.106.522	8,7%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83.792.384.485	96.529.830.546	114.701.364.439	90.677.884.616	65.591.540.839	-3,6%
Dana Alokasi Umum	579.301.377.000	645.888.942.000	668.100.108.000	708.751.031.000	696.300.554.000	4,8%
Dana Alokasi Khusus	1.960.720.000	51.378.640.000	70.021.140.000	119.416.233.704	158.259.011.683	664,9%
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.860.002	7.222.845	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.471.817.742	88.355.150.092	172.459.558.211	159.785.055.178	189.465.870.149	34,3%
Pendapatan Hibah	4.141.616.107	1.946.786.070	1.886.934.059	1.743.887.175	27.300.051.390	350,5%
Pendapatan Dana Darurat						
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.659.601.535	25.765.093.022	21.826.141.940	23.470.974.223	32.782.877.559	14,2%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.970.842.000	32.970.761.000	104.134.566.000	100.726.104.000	129.232.941.200	60,2%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.699.758.100	7.320.000.000	7.800.000.000	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	20.352.510.000	36.811.916.212	33.844.089.780	150.000.000	-

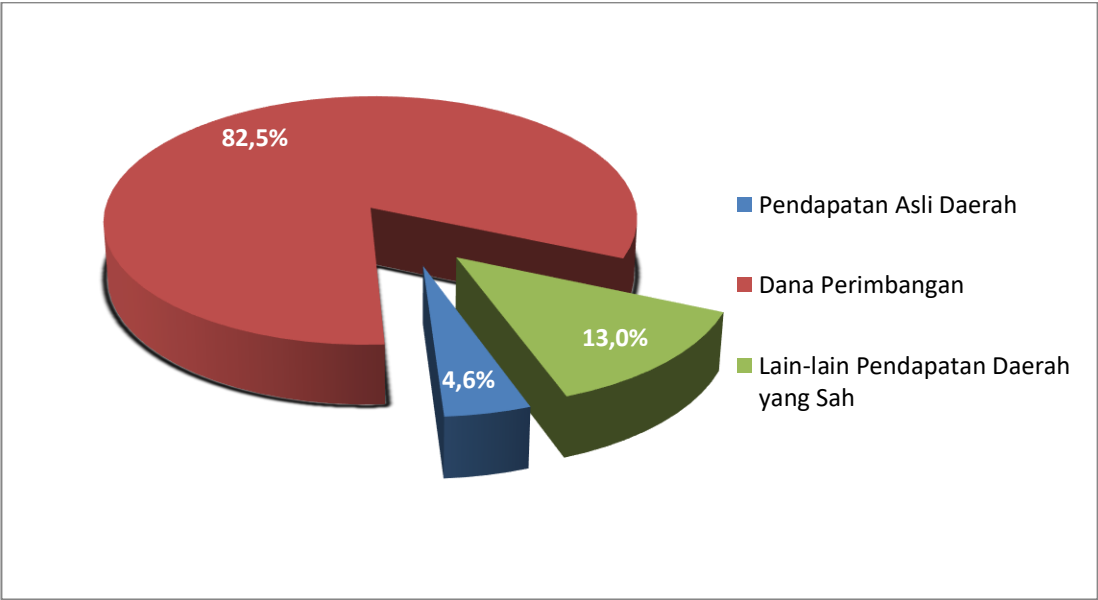
Sumber: diolah dari LRA Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Katingan cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, total pendapatan daerah Kabupaten Katingan adalah sebesar Rp 769.751.502.255,-. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi Rp 1.162.607.295.128,- dengan peningkatan pendapatan rata-rata pertahun sebesar 11,1 %.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2013-2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,2%, yang secara persentase pertumbuhan masing–masing komponen PAD berbeda–beda. Sementara itu, sumber pendapatan Kabupaten Katingan berasal dari pendapatan Dana Perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Katingan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2013-2017 terakhir sebesar 8,7%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 664,9% Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terjadi kenaikan rata- rata sebesar 24,9%.

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Gambar 3.1 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Tahun 2013-2017



Sumber : Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017,diolah

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata–rata proporsi komponen Pendapatan Daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terbesar berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 82,5%, Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah yaitu sebesar 13,0% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,6 % dari seluruh total pendapatan.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA	803.522.577.073	955.517.558.529	1.072.561.321.565	1.154.558.813.417	1.179.826.276.420	10,2%
Belanja Tidak langsung	320.418.150.109	403.067.780.761	469.737.944.811	508.821.351.173	574.257.219.908	15,9%
Belanja Pegawai	271.224.450.550	305.548.645.568	345.078.227.268	362.910.191.147	336.760.299.686	5,9%
Belanja Subsidi	-	-	1.800.000.000	1.449.919.197	1.194.609.400	-
Belanja Hibah	25.428.509.804	62.065.566.212	50.687.476.197	20.651.787.554	26.453.800.000	23,6%
Belanja Bantuan Sosial	453.500.000	1.556.578.900	544.000.000	793.000.000	6.334.936.460	230,7%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.371.733.000	1.348.081.000	1.399.397.005	1.154.195.000	1.486.917.506	3,3%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	21.851.296.655	31.586.289.081	69.832.234.935	121.862.258.275	201.733.261.063	76,4%
Belanja Tidak Terduga	88.660.100	962.620.000	396.609.406	-	293.395.793	-
Belanja Langsung	483.104.426.964	552.449.777.768	602.823.376.754	645.737.462.244	605.569.056.512	6,1%
Belanja Pegawai	23.721.580.576	40.530.032.814	35.322.705.882	36.538.215.610	45.640.578.674	21,6%
Belanja Barang dan Jasa	163.219.548.588	188.996.502.185	229.400.862.760	299.759.287.490	196.972.717.942	8,4%
Belanja Modal	296.163.297.800	322.923.242.768	338.099.808.113	309.439.959.144	362.955.759.896	5,6%

Sumber: LRA Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2013-2017 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,2%. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,9%. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya paling besar adalah Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 230,7%. Belanja Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,1%. Komponen Belanja Langsung terbesar pertumbuhannya paling besar adalah Belanja Pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,6%.

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
A	Pendapatan Umum Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah	46.280.722.192	52.990.318.457
2	Dana Bagi Hasil	90.677.884.616	65.591.540.839
3	Dana Alokasi Umum	708.751.031.000	696.300.554.000
	Jumlah A	845.709.637.808	814.882.413.296
B	Belanja Pegawai		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	308.808.115.357	298.560.903.383
2	Tambahan penghasilan PNS	40.137.450.000	35.619.837.500
	Jumlah B	348.945.565.357	334.180.740.883
	Kemampuan Keuangan Daerah	496.764.072.451	480.701.672.413

Sumber : Diolah dari LRA Kab.Katingan 2016-2017

Berdasarkan data tabel diatas dapat ditentukan kelompok kemampun keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Kabupaten Katingan pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 496.764.072.451 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang”, Sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp 480.701.672.413, yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang”.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4. Pada Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu melebihi dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun

lalu perkembangannya cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 15,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Katingan semakin Baik, sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dengan rata-rata sebesar 42,1%.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	230.928.510.248	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	-15,8%
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	230.928.510.248	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	-15,8%
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	42,1%
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	42,1%
2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		228.428.510.248	190.157.435.429	160.758.859.949	144.601.395.828	105.888.433.865	-17,3%

Sumber : LRA Tahun 2013 -2017, diolah

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Katingan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

a) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2013-2017 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,85%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Katingan mengalami tren penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,74%. Kas mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rata-rata penurunan sebesar 17,56%. Investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Katingan mengalami tren pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 32,18%.

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2013 tidak terdapat kewajiban, pada periode tahun 2017 terdapat kewajiban sebesar Rp. 4.280.222.513.-

Tabel 3.5
Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan
ASET	2.990.532.983.283	3.302.534.832.956	2.341.569.008.551	2.504.104.815.128	2.712.976.146.534	-0,85
ASET LANCAR	208.903.822.959	183.117.090.308	176.975.377.465	136.240.110.768	114.087.042.020	-13,74
Kas	194.664.225.929	167.758.859.949	154.280.255.133	114.954.109.101	88.645.774.506	-17,56
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Piutang	7.974.208.526	66.942.438.430	15.482.947.624	12.593.790.753	10.943.481.237	157,71
Penyisihan Piutang	-	-	-	(1.246.807.627)	(1.276.958.722)	-
Persediaan	6.265.388.504	5.026.281.522	7.119.164.548	8.692.210.913	15.774.744.999	31,36
INVESTASI JANGKA PANJANG	14.597.796.679	18.340.472.337	25.340.472.337	35.340.472.337	44.340.472.337	32,18
Investasi Non Permanen	402.109.620	402.109.620	402.109.620	402.109.620	402.109.620	0,00
Investasi Permanen	14.195.687.059	17.938.362.717	24.938.362.717	34.938.362.717	43.938.362.717	32,81
ASET TETAP	2.594.822.444.457	2.920.421.734.668	3.250.986.617.888	3.563.248.838.099	2.300.696.089.703	-0,49
Tanah	582.839.770.010	583.750.863.010	584.145.623.610	586.917.445.092	578.176.000.092	-0,20
Peralatan dan Mesin	176.188.608.634	209.941.541.635	245.565.192.476	288.276.670.818	295.920.337.373	14,04
Gedung dan Bangunan	540.179.742.256	618.253.771.079	693.437.805.247	789.621.319.674	772.462.547.937	9,58
Jalan Jaringan dan Instalasi	1.269.947.318.383	1.477.683.983.828	1.588.055.553.415	1.680.164.819.813	1.793.474.338.228	9,09
Aset Tetap Lainnya	16.875.346.010	17.889.915.910	24.646.439.668	32.343.646.213	29.575.770.131	16,61
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.791.659.165	12.901.659.207	115.136.003.472	185.924.936.490	349.930.156.354	247,21
Akumulasi Penyusutan	-	-	(1.290.277.086.640)	(1.408.664.013.883)	(1.518.843.060.411)	-
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan
	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	171.284.653.702	180.655.535.644	178.543.627.500	177.939.407.806	253.852.542.473	11,66
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	285.479.579	127.257.500	777.228.181	762.149.437	754.949.437	113,11
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	762.644.071	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	9.915.806.650	18.588.214.175	1.601.884.075	1.822.579.983	2.079.533.567	5,99
Aset Lain-lain	161.083.367.473	161.177.419.898	176.164.515.244	175.354.678.386	251.018.059.469	13,01
JUMLAH ASET	2.990.532.983.283	3.302.534.832.956	2.341.569.008.551	2.504.104.815.128	2.712.976.146.534	-0,85
KEWAJIBAN	-	5.399.000	625.873.986	13.790.209.850	8.560.445.026	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	5.399.000	625.873.986	13.790.209.850	4.280.222.513	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	5.399.000	625.873.986	-	109.620.273	-
Utang Beban	-	-	-	5.226.324.150	-	-
Pendapatan Diterima dimuka	-	-	-	-	16.333.333	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	8.563.885.700	-	-
Utang Beban					4.154.268.907	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
						-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	5.399.000	625.873.986	13.790.209.850	4.280.222.513	3381,70
JUMLAH EKUITAS DANA	2.990.532.983.283	3.302.529.433.956	2.340.943.134.565	2.490.314.605.277	2.708.695.924.021	-0,88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.990.532.983.283	3.302.534.832.956	2.341.569.008.551	2.504.104.815.128	2.712.976.146.534	-0,85

Sumber : Neraca Kab.Katingan 2013-2017

c) **Ekuitas Dana**

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Katingan selama tahun 2013-2017 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,8%. Serta perkembangan ekuitas dana dan kewajiban selama periode tahun 2013-2017 terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,85%.

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Katingan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	0,00%	0,00%	0,35%	10,12%	3,75%
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	0,0%	0,0%	0,4%	10,8%	4,4%
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0000%	0,0002%	0,0267%	0,5507%	0,3155%
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0000%	0,0002%	0,0267%	0,5538%	0,3160%

Sumber: Hasil perhitungan

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Katingan, yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2017 sebesar 3,75%. Hal ini

berarti menunjukkan dari tahun 2017 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Katingan sebesar 3 kali lebih.

2. Quick Rasio

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan quick rasio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun periode tahun 2017 quick rasio sebesar 4,4% hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Katingan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 0,3. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. periode tahun 2016 sebesar 0,3. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Katingan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah

pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- c. Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan

peraturan daerah.

- e. Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2. Dana Perimbangan

- a. Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Katingan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
- b. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Katingan, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Belanja Modal
 Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:
 - 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) merupakan objek pemeliharaan;
 - 3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.
- f. Belanja DPRD
 - 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 - 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;

- 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan
- 4) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

g. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
- 4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- h. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
- i. Belanja Subsidi
- 1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- j. Bantuan Sosial
- 1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
 - 2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa

penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;

- 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

m. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Katingan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Katingan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Katingan, yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

Kode	Uraian	2013			2014			2015		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	1.011.503.361.035	803.522.577.073	79,4	1.103.568.306.244	955.517.558.529	86,6	1.227.354.080.995	1.072.561.321.565	87,4
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	358.808.216.566	320.418.150.109	89,3	419.842.602.144	403.067.780.761	96,0	494.618.052.083	469.737.944.811	95,0
5.1.1	Belanja Pegawai	306.471.253.175	271.224.450.550	88,5	360.074.864.892	305.548.645.568	84,9	395.788.465.366	345.078.227.268	87,2
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	0,0	-	-	0,0	1.800.000.000	1.800.000.000	100,0
5.1.4	Belanja Hibah	27.322.282.391	25.428.509.804	93,1	25.490.800.000	62.065.566.211	243,5	21.257.000.000	50.687.476.197	238,5
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000	453.500.000	90,7	105.370.000	1.556.578.900	1.477,3	1.030.370.000	544.000.000	52,8
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.427.681.000	1.371.733.000	96,1	1.400.000.000	1.348.081.000	96,3	1.400.000.000	1.399.397.005	100,0
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	22.087.000.000	21.851.296.655	98,9	31.771.567.252	31.586.289.081	99,4	71.342.216.717	69.832.234.935	97,9
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	88.660.100	8,9	1.000.000.000	962.620.000	96,3	2.000.000.000	396.609.406	19,8
5.2	BELANJA LANGSUNG	652.695.144.469	483.104.426.964	74,0	683.725.704.099	552.449.777.768	80,8	732.736.028.911	602.823.376.754	82,3
5.2.1	Belanja Pegawai	28.323.159.748	23.721.580.576	83,8	38.810.042.248	40.530.032.814	104,4	40.855.341.946	35.322.705.882	86,5
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	283.793.923.094	163.219.548.588	57,5	306.857.368.738	188.996.502.185	61,6	281.391.335.545	229.400.862.760	81,5
5.2.3	Belanja Modal	340.578.061.627	296.163.297.800	87,0	338.058.293.113	322.923.242.768	95,5	410.489.351.421	338.099.808.113	82,4

.... Lanjutan

Kode	Uraian	2016			2017			Rata-Rata Pertumbuhan
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	%
5	BELANJA	1.236.955.112.612	1.154.558.813.417	93,3	1.302.276.358.149,0	1.159.392.700.366	89,0	87,16
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	525.533.918.933	508.821.351.173	96,8	581.997.086.135,0	574.257.219.908	98,7	95,15
5.1.1	Belanja Pegawai	377.660.187.342	362.910.191.147	96,1	340.958.552.590,0	336.760.299.686	98,8	91,08
5.1.3	Belanja Subsidi	1.450.000.000	1.449.919.197	100,0	1.350.000.000,0	1.194.609.400	88,5	57,70
5.1.4	Belanja Hibah	21.998.369.700	20.651.787.554	93,9	28.865.508.084,0	26.453.800.000	91,6	152,11
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	858.000.000	793.000.000	92,4	6.682.000.000,0	6.334.936.460	94,8	361,60
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.200.500.300	1.154.195.000	96,1	1.500.000.000,0	1.486.917.506	99,1	97,52
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	121.866.861.591	121.862.258.275	100,0	202.141.025.461,0	201.733.261.063	99,8	99,21
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0	0,0	500.000.000,0	293.395.793	58,7	36,73
5.2	BELANJA LANGSUNG	711.421.193.679	645.737.462.244	90,8	720.279.272.014,4	585.135.480.458	81,2	81,82
5.2.1	Belanja Pegawai	39.997.551.955	36.538.215.610	91,4	50.420.612.545,0	45.640.578.674	90,5	91,30
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	347.944.908.632	299.759.287.490	86,2	291.003.556.418,8	176.539.141.888	60,7	69,49
5.2.3	Belanja Modal	347.944.908.632	299.759.287.490	86,2	378.855.103.050,6	362.955.759.896	95,8	89,36

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Katingan Tahun 2013-2017

Berdasarkan Tabel 3.7 dari data realisasi rata–rata pertumbuhan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2013-2017 sebesar 86,95%. Belanja Tidak Langsung periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki rata–rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 95,15%, sedangkan Belanja Langsung pada periode yang sama, memiliki rata–rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 81,45%.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Katingan ditampilkan pada Tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
BELANJA	310.543.989.286	368.142.324.168	396.583.580.418	459.102.125.041	429.634.709.325
BELANJA TIDAK LANGSUNG	242.218.296.831	267.322.750.759	292.027.923.340	351.116.665.357	336.620.740.883
Gaji Dan Tunjangan	209.339.308.442	228.169.342.789	250.293.038.726	308.808.115.357	298.560.903.383
Tambahan Penghasilan PNS	30.701.588.389	36.963.407.970	39.544.884.614	40.137.450.000	35.619.837.500
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.177.400.000	2.190.000.000	2.190.000.000	2.171.100.000	2.440.000.000
BELANJA LANGSUNG	68.325.692.455	100.819.573.409	104.555.657.078	107.985.459.684	93.013.968.442
Honorarium PNS	2.419.514.400	4.842.013.347	3.420.440.000	4.391.119.500	5.018.159.000
Honorarium Non PNS	20.234.476.176	29.304.812.131	27.256.818.672	27.393.912.900	29.107.531.600
Uang Lembur	1.044.340.000	1.594.065.000	1.824.070.000	1.707.386.000	1.208.093.000
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	4.765.394.836	993.392.210	995.387.210	830.658.800
Belanja Makanan Dan Minuman	6.722.993.400	6.882.687.608	16.510.458.194	15.387.388.825	10.389.610.900
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	780.186.850	927.233.355	1.003.671.000	1.258.576.600	824.799.500
Belanja Pakaian Kerja	270.442.500	425.449.000	1.121.993.500	738.248.050	333.288.000
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1.370.978.000	4.788.310.050	2.445.661.250	2.307.440.600	3.714.868.200
Belanja Perjalanan Dinas	30.747.962.769	38.201.491.315	38.543.717.452	47.294.359.345	38.961.132.229
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000	2.965.000.000	3.053.800.000	150.000.000	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.884.798.360	6.032.305.267	8.381.634.800	6.361.640.654	2.625.827.213
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	19.450.000	90.811.500	-	-	-
Belanja Pemulangan Pegawai	800.550.000	-	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-Tahun 2017,diolah

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2013	310.543.989.286	806.022.577.073	38,53%
2	2014	368.142.324.168	808.022.577.073	45,56%
3	2015	396.583.580.418	1.079.561.321.565	36,74%
4	2016	459.102.125.041	1.164.558.813.417	39,42%
5	2017	429.634.709.325	1.188.826.276.420	36,14%

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017, diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif naik dari periode tahun 2013-2014 dengan kenaikan sebesar 7,03%. Pada periode tahun 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 8,83% dan terjadi kenaikan lagi periode 2015-2016 sebesar 2,6% serta pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 3,28%.

c. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	243.425.306.605	268.739.374.359	294.243.913.235	352.469.084.781	337.557.198.812	38,6%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	209.339.308.442	228.169.342.789	250.293.038.726	308.808.115.357	298.560.903.383	41,2%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	30.701.588.389	36.963.407.970	39.544.884.614	40.137.450.000	35.619.837.500	26,1%
3	Biaya Pemungutan Pajak	40.612.000	38.505.000	-	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak	309.558.498	430.377.793	1.428.281.506	440.403.091	139.558.803	184,7%
5	Insentif Pemungutan Retribusi	296.862.621	323.181.726	55.211.122	115.117.498	-	9,5%
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	2.177.400.000	2.190.000.000	2.190.000.000	2.171.100.000	2.440.000.000	2,8%
7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	559.976.655	624.559.081	732.497.267	796.898.834	796.899.126	37,6%
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000.000	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	175,9%
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	175,9%
	TOTAL A+B	245.925.306.605	273.239.374.359	301.243.913.235	362.469.084.781	346.557.198.812	40,6%

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Katingan 2013-2017,diolah

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

a. Sumber Penutup Defisit Riil

Dalam Sumber Penutup Defisit Riil pemerintah Kabupaten Katingan harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN DAERAH	769.751.502.255	933.118.983.049	1.066.081.723.749	1.124.910.926.689	1.126.725.415.437
2	BELANJA DAERAH	803.522.577.073	955.517.558.529	1.072.561.321.565	1.154.558.813.417	1.145.998.264.701
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000.000	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000
A.	Defisit Riil	-36.271.074.818	-26.898.575.480	-13.479.597.816	-39.647.886.727	-28.272.849.264
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	230.928.510.248	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan atas Investasi	-	-	-	-	-
	Total Realisasi Penerimaan	230.928.510.248	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	194.657.435.429	167.758.859.949	154.279.262.133	114.953.509.101	86.615.584.601

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017, diolah

Kemudian analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yatu melalui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Nilai SiLPA kurun waktu 5 (liam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12

SiLPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata pertumbuhan
1	Jumlah SiLPA	230.928.510.248	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	-15,8%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	5.399.000	625.873.986	-	109.620.273	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
SILPA RIIL (1-2-3)		230.928.510.248	194.652.036.429	167.132.985.963	154.601.395.828	114.778.813.591	-15,8%

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan tabel di atas, anggaran periode tahun 2013-2017, untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil maka di susun tabel komposisi defisit riil pada Tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Defisit Riil	-33.771.074.818	-22.398.575.480	-6.479.597.816	-29.647.886.727	(19.272.849.264)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	230.928.510.248	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan	194.657.435.429	167.758.859.949	154.279.262.133	114.953.509.101	88.669.452.573

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017, diolah

b. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran defisit riil anggaran periode dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	194.657.435.429		167.758.859.949		154.279.262.133		114.953.509.101		88.669.452.573	
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	194.657.435.429	100	167.758.859.949	100	154.279.262.133	100	114.953.509.101	100	88.669.452.573	100
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dana Terikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017, diolah

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan guna memberikan gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Katingan yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan di sajikan pada Tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Saldo Kas Neraca Daerah	194.664.225.929	167.758.859.949	154.280.255.133	114.954.109.101	88.645.774.506
	Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga samapi dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	5.399.000	625.873.986	-	109.620.273
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	194.664.225.929	167.753.460.949	153.654.381.147	114.954.109.101	88.536.154.232

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017, diolah

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan belanja daerah tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Katingan terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proyeksi pendapatan pada periode tahun 2019-2023 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,65%, yang terdiri dari komponen pendapatan asli daerah diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar

5,23%, serta Dana Perimbangan sebesar 1,72%. Proyeksi Belanja daerah pada periode 2019-2023, diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08%, yang terdiri dari komponen belanja tidak langsung diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,25%, dan belanja langsung sebesar 0,49%.

Pada periode tahun 2017 dan tahun 2018 pendapatan hibah meningkat karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, penerimaan Dana BOS tersebut dialihkan ke dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah pada pendapatan Hibah.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2014, mengamanatkan adanya penyertaan modal Pemda Kabupaten Katingan. Penyertaan modal ini ditujukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan, PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah, dan PT. Katingan Mandiri Persada. Hal ini menjadi komponen dalam pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2023 berdasarkan rata-rata pertumbuhan periode sebelumnya, disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

Uraian	APBD	APBD	Proyeksi				Rata - Rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PENDAPATAN	1.246.842.957.137,00	1.231.240.909.000,00	1.251.995.645.961,61	1.272.762.881.961,78	1.293.542.833.217,95	1.314.335.720.177,07	1,65%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.044.819.137,00	51.000.000.000,00	53.880.722.172,31	56.761.444.344,61	59.642.166.516,92	62.522.888.689,22	5,23%
Pendapatan Pajak Daerah	12.882.020.066,00	15.120.363.084,00	15.958.010.079,50	16.795.657.075,00	17.633.304.070,50	18.470.951.066,00	5,13%
Retribusi Daerah	3.952.661.334,00	4.093.188.166,00	4.427.704.972,59	4.762.221.777,17	5.096.738.581,76	5.431.255.386,34	7,33%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.741.575.472,00	9.076.004.346,00	9.983.016.536,62	10.890.028.725,25	11.797.040.913,87	12.704.053.102,49	8,77%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.468.562.265,00	22.710.444.404,00	23.511.990.583,60	24.313.536.767,20	25.115.082.950,79	25.916.629.134,39	3,36%
DANA PERIMBANGAN	978.751.782.000,00	974.524.759.000,00	991.692.908.751,85	1.008.862.840.585,19	1.026.034.559.896,20	1.043.208.072.097,91	1,72%
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	64.720.031.000,00	79.944.599.000,00	79.891.806.248,29	79.839.048.359,17	79.786.325.309,59	79.733.637.076,56	-0,07%
Dana Alokasi Umum	696.300.554.000,00	712.958.173.000,00	729.615.792.000,00	746.273.411.000,00	762.931.030.000,00	779.588.649.000,00	2,26%
Dana Alokasi Khusus	217.731.197.000,00	181.621.987.000,00	182.185.310.503,56	182.750.381.226,02	183.317.204.586,61	183.885.786.021,35	0,31%
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.046.356.000,00	205.716.150.000,00	206.422.015.037,46	207.138.597.031,98	207.866.106.804,83	208.604.759.389,93	0,35%
Hibah	26.666.400.000,00	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.520.000.000,00	35.520.000.000,00	35.569.336.776,36	35.618.742.080,81	35.668.216.008,52	35.717.758.654,82	0,14%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	140.359.956.000,00	143.868.650.000,00	143.998.628.261,10	144.128.723.951,17	144.258.937.176,31	144.389.268.042,71	0,09%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	1.500.000.000,00	26.327.500.000,00	26.854.050.000,00	27.391.131.000,00	27.938.953.620,00	28.497.732.692,40	2,00%

Uraian	APBD	APBD	Proyeksi				Rata - Rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pemerintah Daerah Lainnya							
BELANJA	1.328.762.409.460,00	1.319.711.596.079,38	1.297.437.777.783,61	1.302.303.917.886,78	1.313.083.869.142,95	1.323.876.756.102,07	0,08%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	679.982.076.425,00	729.173.685.858,45	714.026.628.455,55	716.604.618.745,60	719.211.232.957,96	721.846.700.084,02	-0,25%
Belanja Pegawai	424.218.174.412,00	443.699.192.713,84	447.248.786.255,55	450.826.776.545,60	454.433.390.757,96	458.068.857.884,02	0,80%
Belanja Subsidi	1.332.222.142,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00%
Belanja Hibah	43.512.758.513,00	21.656.400.000,00	10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-21,86%
Belanja Bantuan Sosial	6.282.000.000,00	32.701.395.344,61	25.661.144.400,00	25.661.144.400,00	25.661.144.400,00	25.661.144.400,00	-5,38%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.722.406.858,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	201.814.514.500,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	0,00%
Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%
BELANJA LANGSUNG	648.780.333.035,00	590.537.910.220,93	583.411.149.328,06	585.699.299.141,18	593.872.636.184,99	602.030.056.018,04	0,49%
Belanja Pegawai	51.909.427.766,00	57.735.742.350,00	58.341.114.932,81	61.498.426.409,82	64.732.117.344,16	66.223.306.161,98	3,51%
Belanja Barang dan Jasa	232.329.562.598,00	298.380.729.862,78	204.193.902.264,82	202.066.258.203,71	201.916.696.302,90	198.669.918.485,95	-8,57%
Belanja Modal	364.541.342.671,00	234.421.438.008,15	320.876.132.130,44	322.134.614.527,65	327.223.822.537,93	337.136.831.370,10	10,47%

Sumber : APBD 2018, APBD 2019 dan hasil Analisis

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA sesuai Tabel 3.17 berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, sehingga direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA tahun 2018-2023 sebesar minus 39,8%.

Tabel 3.17
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

Uraian	APBD-P	Proyeksi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	88.669.452.322,00	90.470.687.079,38	47.442.131.822,00	31.541.035.925,00	21.541.035.925,00	11.541.035.925,00

Sumber : APBD 2018, RAPBD 2019 dan hasil Analisis

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2017 sampai dengan 2022 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2013-2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada Tahun 2014-2018 serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018, pada tahun 2018 terdapat penyertaan modal pada Bank, PT. Katingan Mandiri Persada dan PDAM, sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2018 sampai dengan periode Tahun 2023 mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan melalui Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

No.	Uraian	APBD-P	APBD	Proyeksi			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Belanja Tidak Langsung	626.032.688.912,61	668.965.890.513,84	672.515.484.055,55	676.093.474.345,60	679.700.088.557,96	683.335.555.684,02
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	321.915.578.579,13	343.167.618.055,98	346.599.294.236,54	350.065.287.178,91	353.565.940.050,69	357.101.599.451,20
2	Tambahan Penghasilan PNS	98.583.088.761,48	95.841.567.585,86	95.938.484.947,01	96.029.377.294,69	96.114.128.110,27	96.192.619.258,20
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	3.229.500.000,00	4.200.000.000,00	4.221.000.000,00	4.242.105.000,00	4.263.315.525,00	4.284.632.102,63
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	490.007.072,00	285.592.215,00	285.592.215,00	285.592.215,00	285.592.215,00	285.592.215,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	204.414.857,00	204.414.857,00	204.414.857,00	204.414.857,00	204.414.857,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	201.814.514.500,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	6.750.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1	Penyertaan Modal	6.750.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B)	632.782.688.912,61	670.965.890.513,84	674.515.484.055,55	678.093.474.345,60	681.700.088.557,96	685.335.555.684,02

Sumber: APBD 2018, APBD 2019 dan hasil Analisis

c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Pendapatan periode tahun 2019-2023 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,65% dengan Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran diproyeksikan menurun sebesar -39,8%. Total penerimaan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08%. Sementara itu, Belanja Tidak Langsung diproyeksikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,25%. Maka berdasarkan perhitungan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah periode tahun 2019-2023 diproyeksikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,49%.

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Katingan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

Uraian	APBD-P	APBD	Proyeksi			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	1.246.842.957.137	1.231.240.909.000,00	1.251.995.645.961,61	1.272.762.881.961,78	1.293.542.833.217,95	1.314.335.720.177,07
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	88.669.452.322	90.470.687.079,38	47.442.131.822,00	31.541.035.925,00	21.541.035.925,00	11.541.035.925,00
Total penerimaan	1.335.512.409.459	1.321.711.596.079,38	1.299.437.777.783,61	1.304.303.917.886,78	1.315.083.869.142,95	1.325.876.756.102,07
Dikurangi:						
Pengeluaran pembiayaan	6.750.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Tidak Langsung	679.982.076.425	729.173.685.858,45	714.026.628.455,55	716.604.618.745,60	719.211.232.957,96	721.846.700.084,02
Kapasitas riil kemampuan keuangan	648.780.333.034	590.537.910.220,93	583.411.149.328,06	585.699.299.141,18	593.872.636.184,99	602.030.056.018,04

Sumber: hasil Analisis

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*) sangat penting, maka diperlukan ebijakan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan ditentukannya prioritas alokasi anggaran.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai Belanja Langsung Wajib dan Mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, termasuk belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023

No	Uraian	APBD	Proyeksi			
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	590.537.910.220,93	583.411.149.328,06	585.699.299.141,18	593.872.636.184,99	602.030.056.018,04
1	PRIORITAS I	93.999.426.970,69	94.458.721.719,90	94.920.260.649,47	95.384.054.724,76	95.850.114.964,76
2	PRIORITAS II	337.434.561.462,26	379.036.178.704,57	397.428.966.419,58	402.228.682.588,60	408.441.345.069,79
3	PRIORITAS III	159.103.921.787,98	109.916.248.903,59	93.350.072.072,14	96.259.898.871,63	97.738.595.983,49

Sumber: hasil Analisis

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

Pada bab ini dirumuskan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Katingan berdasarkan kondisi riil. Pemetaan permasalahan pembangunan menjadi sangat strategis sebab menjadi agenda pembangunan yang harus dicari penyelesaiannya. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan 5 (lima) tahun kedepan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Bab II. Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan, serta berbagai keinginan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Katingan diuraikan pada bagian ini.

4.1.1. Identifikasi Permasalahan RPJPD Kabupaten Katingan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJPD

Kabupaten Katingan 2005-2025 periode ketiga. Dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan jangka panjang. Berikut hasil identifikasi permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan pada tahap ke-3, sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD
Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-3 (2018-2023)

Tujuan RPJPD Tahapan ke-3	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat	1. Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan	Kualitas SDM yang berdaya saing rendah	SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
	2. Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri	Rendahnya partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
	3. Terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian	Rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah
	4. Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan	Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat	Penegakan hukum secara adil dan transparan

Tujuan RPJPD Tahapan ke-3	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	5. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial.	Belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan masih tingginya angka kemiskinan	Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta penurunan angka kemiskinan
	6. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak;	IPM dan IPG masih dalam kategori cukup;	Peningkatan usia lama sekolah, usia harapan hidup dan daya beli masyarakat
	7. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.	Ketersediaan infrastruktur dasar dan energi masih terbatas	Peningkatan investasi dan jangkauan layanan energi yang merata
	8. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air	Alih fungsi lahan khususnya pada daerah tangkapan air	Pelaksanaan program konservasi hutan, sungai dan danau
	9. Terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.	Cakupan pelayanan penyediaan air minum terbatas	Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	10. Berkembangannya infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.	Ketersediaan infrastruktur pertanian di pedesaan masih rendah	Peningkatan produktivitas pertanian

Tujuan RPJPD Tahapan ke-3	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	11. Terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;	Berubahnya fungsi lahan akibat aktivitas ekonomi	Pelaksanaan program konservasi lingkungan
	12.Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Eksplorasi SDA yang kurang terkendali	Pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak SDA
	13. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.	Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah	Pemantauan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan jangka panjang yang telah ditelaah dan capaian kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir sebagaimana telah disajikan pada Bab II RPJMD ini, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan. Adapun permasalahan pembangunan dimaksud, sebagai berikut :

4.1.2. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam hal ini penduduk atau masyarakat suatu daerah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Penduduk yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang seringkali diwakili dengan indikator pendidikan, kesehatan dan penghasilan, niscaya memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan. Peran aktif penduduk dalam pembangunan tentu sangat berarti bagi penduduk itu sendiri, masyarakat luas, maupun bagi kemajuan daerah tersebut. Masyarakat dapat berperan dalam setiap aspek atau sektor pembangunan, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

Sama seperti daerah lain, Kabupaten Katingan juga sangat membutuhkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bahkan memiliki daya saing menghadapi tantangan dan kompetisi dengan SDM dalam negeri maupun luar negeri. Menilik capaian beberapa indikator terkait kualitas penduduk Katingan beberapa tahun terakhir, diperoleh gambaran bahwa kualitas SDM Kabupaten Katingan belum optimal.

Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM Katingan merupakan masalah pokok pembangunan sumber daya manusia. Untuk melihat sampai

sejauh mana kualitas dan daya saing SDM disuatu tempat, dapat dilihat dari capaian Angka IPM yang menggunakan empat indikator mewakili tiga dimensi, yakni dimensi kesehatan berupa Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), dimensi pengetahuan berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas, serta dimensi penghidupan yang layak berupa rata-rata besarnya pengeluaran per kapita penduduk yang dikenal dengan Angka Pengeluaran per Kapita (PNP per Kapita).

Secara umum nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan selama periode 2010-2017 yang masih berada dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$) atau sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$) (sebagaimana Tabel 2.43). Di tingkat Provinsi periode 2016-2017, Kabupaten Katingan termasuk 3 kabupaten yang pertumbuhan pembangunan manusianya paling rendah (0,22 persen), kondisi menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Meski tren IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun bila dibandingkan dengan daerah tetangga di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya angkanya masih rendah, demikian pula dengan angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Pendidikan

Untuk memahami sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan yang optimal, maka kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Bila dikaitkan dengan kedua indikator tersebut, maka secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Katingan yang dapat mempengaruhinya dapat dilihat dari hal-hal berikut :

- a. Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;
- b. Rasio murid terhadap guru sudah terpenuhi akan tetapi sebaran tenaga pengajar di semua jenjang tidak merata, kebanyakan menumpuk di daerah perkotaan dan tempat-tempat tertentu;
- c. Masih kurangnya ketersediaan fasilitas dan perlengkapan belajar siswa dan sarana pendidikan;
- d. Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan (tabel 2.148)

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Katingan mengalami peningkatan yang lebih baik dalam lima tahun terakhir ini, dari 11,14 ditahun 2012 terus meningkat hingga di tahun 2017 menjadi 12,20 (Tabel 2.45). Sedangkan capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 mencapai 8,63 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (8,62 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Kondisi menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Katingan masih tinggi, terutama mulai jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Peningkatan angka HLS dan RLS ini ternyata tidak diikuti oleh Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan dan Angka Melanjutkan, terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kecenderungan penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
APM SD/MI pada periode 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan hingga menjadi 94,2 persen, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 93,4 persen. Selanjutnya untuk APM SMP/MTs pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami fluktuasi, dimana APM SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 70,50 persen, di tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 72,85 persen, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 72,89 persen, namun pada tahun 2016 menurun hingga menjadi 69,89 persen.
- 2) Menurunnya Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 98,93 persen, di tahun 2015 meningkat menjadi 98,96 persen dan di tahun 2016 menurun menjadi 86,12 persen.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Katingan masih mengalami kendala terutama masalah penyebaran/penempatan guru di semua daerah belum merata walaupun secara rasio murid terhadap guru sudah memenuhi syarat dibawah 20 : 1 untuk SD dan 30 : 1 untuk SMP. Selain itu permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP adalah belum memadainya guru bidang studi tertentu terutama Guru Matematika, Guru IPA, dan Guru Bahasa Inggris.

Dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah diperlukan dukungan pengadaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum. Berdasarkan data pada Tabel 2.148 terlihat bahwa persentase pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2012 sebesar 92,45 persen,

menurun di tahun 2013 menjadi 78,22 persen, di tahun 2014 meningkat kembali menjadi 100 persen dan pada tahun 2015 dan tahun 2016 menurun kembali menjadi 95,11 persen dan 78,21 persen. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan dapat dipicu oleh menurunnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Hal ini mengurangi minat masyarakat ke perpustakaan. Data menunjukkan persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2013 sebesar 38,45 persen, dan terus menurun menjadi 33,46 persen di tahun 2016.

b. Kesehatan

Dimensi berikut untuk mengukur kualitas SDM adalah dimensi kesehatan yang dilihat dari besaran Angka Umur Harapan Hidup (UHH) sebagaimana ada di Tabel 2.43. Untuk permasalahan kesehatan sendiri, dapat diukur dengan tiga indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan derajat kesehatan masyarakat Katingan, yakni :

1) Meningkatnya Angka Kematian Bayi

Berdasarkan data pada Tabel 2.64, angka kematian bayi dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana Angka kematian bayi pada tahun 2014 sebesar 1,74 meningkat sampai angka 8,90 ditahun 2016. Angka ini adalah tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir, meski di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2,91, namun angka ini masih terbilang tinggi bila dibanding tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan khususnya pelayanan perinatal masih rendah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di desa terutama di desa sangat terpencil dan terpencil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kehamilan, kurangnya asupan gizi selama kehamilan, pengetahuan orang tua tentang pola asuh bayi yang masih rendah, cakupan imunisasi yang masih rendah, kesadaran pemberian asi eksklusif yang masih rendah pada bayi 0-24 bulan serta pemenuhan gizi bayi yang belum optimal.

2) Masih tingginya Angka Kematian Balita

Tabel 2.65 menunjukkan bahwa masalah kematian balita di Kabupaten Katingan masih cukup tinggi dimana AKABA tertinggi mencapai angka 12,75 di tahun 2016 dan ada penurunan menjadi 8,73 di tahun 2017. Angka 8,73 menunjukkan bahwa setiap ada kelahiran 1.000 bayi pada tahun 2017, terdapat 8-9 balita yang meninggal. Permasalahan ini harus menjadi perhatian secara mendalam oleh OPD terkait, terutama bagaimana pemerintah daerah dapat mengurangi resiko kematian balita sampai angka 0 atau tidak ada kematian balita.

3) Masih tingginya Angka Kematian Ibu

Selain masih terdapatnya kasus kematian balita, ternyata masalah kematian ibu pasca melahirkan juga masih cukup tinggi di Kabupaten Katingan (Tabel 2.66), meski dalam lima tahun terakhir angkanya terus menurun hingga poin 96,96 di akhir tahun 2017-

Ketiga indikator di atas, bila dianalisis lebih lanjut menggambarkan permasalahan aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Katingan masih rendah. Hal-hal berikut yang disinyalir menjadi akar masalahnya, yakni:

- 1) Menurunnya Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2013 sebesar 94,39 persen, meningkat menjadi 96,48 persen pada tahun 2014. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan hingga menjadi 77,19 persen. Hal ini disebabkan masih adanya masyarakat yang lebih percaya kepada dukun kampung dibanding dengan tenaga bidan, kurangnya minat tenaga bidan untuk mengabdikan diri di daerah terpencil dan sangat terpencil, kurangnya dukungan keluarga untuk mendukung persalinan pada fasilitas kesehatan.

- 2) Adanya kecenderungan kenaikan Persentase Balita Gizi Buruk.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan bergizi dan seimbang pada anak, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melahirkan generasi sehat dan cerdas, terbatasnya pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita, adanya penyakit seperti TBC yang menyebabkan anak menjadi kurus dan menjadi gizi buruk (Data Tabel 2.74).

- 3) Tingginya Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Katingan tergolong masih tinggi, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 37,2%. Kemudian, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Katingan pada tahun 2016 sebesar 26,6%, tahun 2017 sebesar 23,06%, dan berdasarkan hasil Studi Faktor Gizi Terhadap Pertumbuhan Anak di Kabupaten Katingan tahun 2018 sebesar 28,5% hal ini menerangkan bahwa 1 dari 3 sampai dengan 4 anak di Kabupaten Katingan adalah stunting. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya upaya pencegahan stunting yang dilakukan, meliputi intervensi spesifik yaitu intervensi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak ibu hamil sampai bayi usia 2 tahun (baduta) dan intervensi sensitif yaitu dukungan stakeholder di luar kesehatan, masih rendahnya

pemahaman masyarakat akan pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil, rendahnya konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, rendahnya pemberian asi eksklusif, rendahnya pemeriksaan K2 (ante natal care).

Selain faktor gizi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan ketersediaan air bersih sangat menentukan upaya pencegahan stunting.

4) Tingginya penyalahgunaan Napza

Berdasarkan hasil Studi Penyalahgunaan Napza pada masyarakat Kabupaten Katingan (di kalangan pelajar) pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, diperoleh hasil bahwa angka prevalensi atau angka kejadian di kalangan pelajar SMP dan SLTA di Kabupaten Katingan yang pernah pakai napza sekitar 8 % dan atau diperkirakan ada 1 dari 13 orang pelajar yang pernah pakai napza. Sedangkan yang setahun pakai napza sebesar 6,3% atau setara dengan 1 dari 16 orang pelajar pakai napza dalam setahun terakhir. Apakah angka ini tinggi atau rendah? Untuk menjawabnya kita bisa gunakan angka acuan dari studi lain sebagai indikator. Studi yang sama adalah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa di Indonesia tahun 2016, yaitu yang pernah pakai sebesar 1,6% dan setahun pakai sebesar 0,6% (BNN dan PPKUI, 2016). Dengan demikian, angka temuan di Kabupaten Katingan jauh lebih besar dari angka nasional. Sehingga dapat disimpulkan, permasalahan narkoba di Kabupaten Katingan sangat serius untuk segera ditangani dan dicarikan solusi agar angka prevalensi tidak bertambah besar.

5) Rendahnya kualitas sanitasi di Kabupaten Katingan

Sanitasi meliputi 3 hal yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase. Permasalahan air limbah domestik adalah masih ada 33,55% penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) yang terdiri dari 29,91% di wilayah perdesaan dan 3,64% di wilayah perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan di tempat terbuka, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di sembarangan tempat.

Permasalahan persampahan adalah rendahnya tingkat layanan persampahan dan masih banyaknya masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat sebesar 86,98%. Permasalahan drainase adalah masih adanya luas genangan air sebesar 61 Ha pada permukiman di perkotaan.

6) Tidak adanya penambahan jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit

Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana kesehatan, dimana jumlah puskesmas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sama sekali tidak terdapat penambahan dan untuk jumlah Rumah Sakit pun hanya terdapat satu Rumah Sakit untuk melayani seluruh kabupaten. Hal ini menyebabkan sistem rujukan yang jauh dari tempat tinggal masyarakat.

7) Terjadinya penurunan rasio dokter per satuan penduduk

Berdasarkan data yang tersaji pada BAB II dapat dilihat bahwa rasio dokter per satuan penduduk yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebesar 0,20 dan meningkat di tahun 2014 menjadi 0,29 dan 0,31 pada tahun 2015, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,29 hingga menjadi 0,27 di tahun 2017. Hal ini menyebabkan pelayanan medis kepada masyarakat menjadi rendah.

8) Terjadinya penurunan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

Sama halnya dengan penurunan rasio Dokter di Kabupaten Katingan, penurunan juga terjadi pada rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk di Kabupaten Katingan, dimana pada tahun 2013 sebesar 3,28 meningkat menjadi 3,80 di tahun 2014 dan sampai tahun 2016 menjadi 4,00. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali hingga menjadi 3,28. Hal ini disebabkan kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil, dan terjadi moratorium penerimaan CPNS selama 4 (empat) tahun terakhir serta penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.

9) Menurunnya cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* di Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sebesar 73,42 persen dan terus menurun hingga menjadi 60,25 persen di tahun 2017 (Tabel 2.73). Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi pada anak, adanya pemahaman masyarakat yang keliru terhadap vaksin, penyediaan vaksin yang terbatas pada fasilitas kesehatan.

10) Meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja

Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di tahun 2013 menjadi 99, tahun 2014 menurun kembali menjadi 72 kasus, namun meningkat kembali di tahun 2015 menjadi 97 Kasus dan 2016 menjadi menurun menjadi 56 kasus. Namun pada tahun 2017 meningkat kembali hingga menjadi 110 kasus. Hal ini disebabkan karena pola hidup masyarakat yang tidak bersih dan sehat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk

memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, rendahnya kepatuhan penderita TBC untuk mengkonsumsi obat sesuai aturan pakai, belum optimalnya dilakukan pemantauan minum obat bagi penderita TBC dan terbatasnya ketersediaan obat TBC.

11) Penyebaran Penduduk.

Penyebaran penduduk Kabupaten Katingan yang tidak merata dibandingkan luas Kabupaten Katingan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2017 sebesar 8 jiwa/km², berimplikasi pada semakin jauhnya jangkauan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kependudukan dan infrastruktur jalan serta layanan air bersih dan sanitasi layak. Hal ini memerlukan terobosan dalam mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Hubungan masalah antara masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Katingan dengan penyebab masalah tersebut dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya antara kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)	Belum optimalnya cakupan pelayanan pendidikan	
		Menurunnya pengunjung perpustakaan	Menurunnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masalah: – Meningkatnya angka kematian bayi dan balita – Meningkatnya angka kematian ibu – Menurunnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan – Kenaikan persentase balita gizi buruk – Menurunnya Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization – Meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja	– Tidak adanya penambahan jumlah puskesmas dan Rumah Sakit – Terjadinya penurunan rasio dokter per satuan penduduk – Terjadinya penurunan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk – Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat. – Rendahnya pemahaman masyarakat akan asupan makanan bergizi dan seimbang – Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala – Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh bayi, balita dan anak – Rendahnya pemahaman masyarakat akan manfaat imunisasi. – Rendahnya kepatuhan masyarakat untuk mengkonsumsi obat TBC sesuai aturan pakai.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Jangkauan pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan setaraan gender terbatas	Penyebaran penduduk yang tidak merata dan mencakup wilayah yang sangat luas

Sumber : hasil analisis

4.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Katingan. Walaupun data beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Katingan yaitu 5,78% pada Tahun 2017, namun angka ini masih berada sedikit diatas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 5,37%. Penanggulangan masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang paripurna bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Katingan. Hal yang penting untuk penanganan masalah tersebut, yaitu menemukan dan mengenali apa penyebab dari kemiskinan tersebut. Berikut ini beberapa hal masalah dan akar masalah yang memberi kontribusi bagi masalah pokok kemiskinan.

a. Pendidikan

Pendidikan masyarakat Kabupaten Katingan kebanyakan tamat SD dan tidak tamat SMP sehingga peluang masuk pada pasar tenaga kerja menjadi kecil. Bangunan SMP rata – rata berada di ibukota Kecamatan dan Sekolah Satu Atap SD-SMP hanya ada di desa-desa relatif besar. Begitu pula dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK hanya ada di ibukota Kecamatan dan terbanyak di Kota Kasongan.

b. Sosial

- 1) Masih rendahnya penanganan dan pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Data tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baru mencapai 21 persen. Sementara itu, persentase kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan baru mencapai 14,3 persen pada tahun 2017. Tentu angka ini masih sangat jauh dari kondisi ideal bagi penanganan PMKS, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar.
- 2) Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dimana jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sama sekali tidak terdapat penambahan yaitu hanya berjumlah 3 buah panti asuhan.

c. Ketenagakerjaan

1) Meningkatnya Jumlah Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur dalam penilaian kondisi ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini untuk urusan ketenagakerjaan masalah yang terjadi adalah semakin meningkatnya jumlah pengangguran terbuka. Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2013 sebanyak 4.097, tahun 2014 sebanyak 4.071 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.849.

Berdasarkan informasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, beberapa hal penyebab meningkatnya jumlah pengangguran terbuka yaitu rendahnya kesempatan kerja, dan kurangnya keterampilan tenaga kerja sehingga sulit untuk diterima dalam dunia kerja. Hal lain yang juga menjadi pemicu yaitu kurangnya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga swasta untuk melatih angkatan kerja.

Masalah pokok kemiskinan di Kabupaten Katingan dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Pemetaan Permasalahan Kemiskinan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kemiskinan	Pendidikan rata-rata penduduk Katingan hanya tamat SD dan tidak tamat SMP	– Keberadaan SMP dan SMA hanya berada di ibukota Kecamatan dan Kota Kasongan.
		Masih rendahnya penanganan dan pemberian bantuan bagi PMKS	– Terbatasnya pendanaan bagi penanganan PMKS. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan hanya berkisar 15 kelompok pada Tahun 2017, sementara jumlah kelompok yang perlu diberi bantuan sebanyak 1.124. – Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
		Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka	– Rendahnya kesempatan kerja – Kurangnya keterampilan tenaga kerja sehingga sulit untuk diterima dalam dunia kerja – Kurangnya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga swasta

Sumber: hasil analisis

4.1.4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian

Kabupaten Katingan merupakan daerah penyangga atau *hinterland* bagi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai gerbang dari dan menuju ibukota provinsi, Katingan memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan dan memasarkan potensi dan hasil kekayaan alam yang dimilikinya. Pengembangan dan pemasaran potensi ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Katingan. Laju pertumbuhan ekonomi Katingan dalam lima tahun ini apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata (Gambar 2.22). Meski demikian, Gini Ratio Katingan termasuk yang paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah yang menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan relatif baik. Demikian pula dengan pendapatan perkapita penduduk Katingan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan (Tabel 2.41). Semua ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan ke depannya.

Memperhatikan data-data yang ada, berikut potensi kekayaan alam Katingan yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dikelola secara optimal dan lestari, sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Katingan. Beberapa masalah yang melatarbelakangi belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam tersebut dijelaskan berikut ini.

b. Pertanian

Salah satu sumber daya alam yang potensial dikembangkan yaitu pertanian dalam arti luas, termasuk pula pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor ini selain menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak, juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Katingan (Tabel 2.54). Meski kontribusi lapangan usaha sektor ini besar terhadap PDRB, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja (Gambar 2.312). Selain itu, ada kecenderungan sumbangan sektor ini menunjukkan trend yang semakin menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini bukan menggambarkan terjadi penurunan total produksi pertanian melainkan sektor lain seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran cukup pesat peningkatannya dibandingkan sektor pertanian.

Berdasarkan data pada Tabel 2.55, produktivitas tanaman pangan utama berupa padi di Kabupaten Katingan dalam periode 5 tahun terakhir rata-rata menghasilkan produksi 3,2 ton per hektarnya. Meskipun ada peningkatan jumlah produksi dalam lima tahun ini, namun hal itu terjadi karena adanya penambahan

jumlah luas lahan baik yang pembukaan lahan baru maupun tambahan dari lahan yang sudah ada. Masih rendahnya angka produktivitas ini menunjukkan bahwa kemampuan petani Katingan secara umum masih belum mampu mengolah lahan secara optimal untuk meningkatkan produksinya dengan tanpa menambah luasan lahan.

Dari segi infrastruktur pendukung, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian di pedesaan masih rendah. Data pada Tabel 2.84 menunjukkan sudah ada upaya untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah, namun persentasenya belum mencapai seluruh areal sawah yang ada. Selain itu, terbatasnya ketersediaan jalan yang baik pada daerah-daerah sentra pertanian juga menjadi kendala. Permasalahan ini menyebabkan petani kesulitan membawa hasil pertaniannya dan cenderung berbiaya tinggi saat memproduksi hasil panennya. Peluang ini sering dimanfaatkan para tengkulak dan pedagang dari luar daerah untuk mengambil keuntungan dari keterbatasan ini.

Gambaran kondisi ini nampak ada di wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dilihat dari aspek ekonomi, secara umum ada beberapa penyebab produk pertanian tanaman pangan, palawija dan hortikultura mengalami penurunan antara lain :

- Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing.
- Lemahnya kelembagaan pertanian.
- Kurangnya bantuan permodalan untuk usaha tani.
- Masih rendahnya aktivitas penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan baru dalam budidaya pertanian.
- Kurangnya kemampuan mengolah lahan dengan teknologi pertanian yang baik.

Selain pertanian, sektor perikanan merupakan bagian atau sub sektor dari pertanian yang mempunyai potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di Kabupaten Katingan memiliki peluang usaha bagi masyarakat terutama dalam budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besarnya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum dalam lima tahun terakhir justru mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,74% di tahun 2012 menjadi 2,29% tahun 2016.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan umumnya dilaksanakan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Katingan. Hingga akhir tahun 2017 realisasi produksi ikan daerah mencapai 8.269,63 ton, terdiri dari produksi perairan budidaya sebesar 1.568,85 ton dan perikanan tangkap sebesar 6.590,90 ton. Adapun jumlah konsumsi ikan masyarakat Katingan sebanyak 39,55 kg/perkapita/tahun atau terealisasi sebesar 31,38%. Munculnya permasalahan dalam upaya peningkatan sektor perikanan antara lain :

- Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tambak, kolam dan keramba.
- Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- Keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan.
- Kurangnya pengelolaan hasil produksi perikanan.
- Terbatasnya permodalan dan akses perbankan
- Terbatasnya ketersediaan bibit ikan yang dikembangkan oleh UPT. Pembibitan Ikan Hampalit

c. Kehutanan

Katingan masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan berbagai keanekaragamahayatinya. Namun dengan semakin banyaknya aktivitas manusia menyebabkan luas tutupan lahan dan hutan di Katingan semakin tahun semakin berkurang, seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan lahan pertanian, serta bencana kebakaran hutan/lahan. Untuk menyelamatkan potensi hutan di Katingan, perlu diadakan tinjauan terhadap permasalahan yang ada, yakni :

1) Kewenangan pengelolaan hutan

Sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan diserahkan ke pemerintah Provinsi. Selain itu terbitnya PP No.18 Tahun 2016 mempertegas aturan tersebut yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan kehutanan sebab tidak memiliki tanaman hutan rakyat. Akibatnya, pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten.

2) Semakin luasnya lahan kritis di kawasan hutan

Kehutanan saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Katingan, dimana wilayah yang ada hampir sebagian besar merupakan wilayah hutan. Namun permasalahan yang dihadapi adalah semakin meluasnya kawasan hutan dengan lahan kritis, dimana pada tahun 2015 luas total hutan dan lahan kritis mencapai 546.351,16 ha, sementara itu tahun 2016 meningkat

menjadi 1.991.696,14 Ha. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan karena peningkatan lahan kritis tersebut hampir mencapai 50%.

3) Masih tingginya kawasan kerusakan hutan

Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat bahwa persentase kerusakan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2014 sebesar 28,33 persen, menurun di tahun 2015 dan di tahun 2016 menjadi 27,68 persen dan 27,22 persen. Meskipun terjadi penurunan persentase kerusakan kawasan hutan dari tahun 2014 s.d. 2016, Namun jumlah persentase kerusakan kawasan hutan masih terbilang cukup tinggi.

4) Menurunnya kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB

Berdasarkan data pada BAB II dapat dilihat bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2012 sebesar 5,49 persen, menurun di tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi 4,96 persen dan 4,82 persen, meningkat kembali di tahun 2015 menjadi 4,87 persen dan menurun kembali di tahun 2016 menjadi 4,75 persen

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Katingan juga memiliki potensi energi dan kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi, seperti bahan tambang batubara, emas (dan mineral pengikut seperti perak), bijih besi, pasir zircón (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Potensi ini hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan dan dikelola. Adapun permasalahan dalam mengelola potensi energi dan sumber daya mineral Katingan, yakni :

1) Kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral

Sama seperti kehutanan, kewenangan mengenai energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Pemda Katingan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan mengenai energi dan sumber daya mineral sebab tidak memiliki panas bumi. Sehingga pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan.

2) Bertambahnya luas area penambangan tanpa izin (PETI)

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan sekaligus memunculkan permasalahan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan bahan tambang yang tidak terkendali menyebabkan areal pertambangan tanpa izin di Kabupaten Katingan yang semakin bertambah, baik itu disepanjang bantaran sungai maupun di tempat lainnya. Aksi tambang tanpa izin ini menyebabkan sungai dan tanah tercemar limbah merkuri serta banyak hutan dan lahan yang hilang

dan berganti menjadi kawasan tandus. Luas wilayah pertambangan tanpa izin pada tahun 2014 hanya 40 Ha, sementara pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 1.700 Ha.

3) Menurunnya kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB

Jika dilihat dari kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB mengalami penurunan, tahun 2014 kontribusinya mencapai 9,35%, tahun 2015 menurun menjadi 9,01 dan tahun 2016 kembali terjadi penurunan mencapai 8,53. Hal ini dipengaruhi oleh banyak lahan yang sudah mendapatkan izin tambang namun sampai saat ini masih belum beroperasi.

e. Rendahnya upaya pengembangan sektor pariwisata

Secara umum, Kabupaten Katingan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya, terutama bila dikaitkan dengan posisi dan kondisi alamnya. Namun potensi tersebut belum didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana wisata, SDM pengelola pariwisata, perlindungan situs dan pelestarian budaya lokal, serta inventarisasi data potensi wisata yang potensial dikembangkan. Meski jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Katingan dari waktu ke waktu semakin bertambah, namun data jumlah hunian wisawatan di Katingan masih minim. Hanya terdata di lokasi tertentu seperti TN. Sebangau di Punggualas dan objek wisata Danau Bulat, tetapi hunian kamar hotel di Kota Kasongan dan sekitarnya tidak ada. Adapun kawasan pemukiman warga seperti di Desa Keruing sebagai bagian dari atraksi wisata juga belum layak untuk dijadikan tempat inap karena prasarana pendukungnya terbatas, seperti air bersih dan kamar mandi yang terstandar.

f. Masih rendahnya daya saing dan investasi daerah

Salah satu ukuran untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah jumlah dan nilai investasi skala nasional/asing yang masuk di daerah tersebut. Keterbukaan daerah dan pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu kunci bagi pihak swasta untuk berinvestasi di Katingan.

Dalam lima tahun terakhir (Tabel 2.139) tercatat jumlah investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan trend yang positif, walaupun sempat mengalami pelambatan pada tahun 2016 yang hanya berada diangka 73. Akan tetapi pada Tahun 2017 jumlah investor PMDN meningkat hingga menjadi 99. Jumlah investor PMA selama kurun waktu 2014 sampai 2016 tetap pada angka 16 investor. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan hingga menjadi 10 investor. Secara umum, investasi terbesar di Katingan adalah di sektor perkebunan (sawit dan karet) dan pertambangan. Di satu sisi,

meningkatnya investasi di kedua sektor ini akan membuka peluang lapangan kerja baru, akan tetapi disisi lain akan menyebabkan pembukaan lahan yang berdampak pada berkurangnya luasan hutan dan tutupan lahan di Katingan. Selain itu, dengan semakin banyak peluang usaha baru akan mendorong terjadinya persaingan dan kompetisi di segala bidang usaha dan pekerjaan. Akibatnya, setiap orang termasuk masyarakat lokal yang tidak siap dengan perubahan ini lambat laun dapat tersingkir.

Perkembangan pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi seperti koperasi aktif, UMKM dan UKM cukup memprihatinkan. Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi (Tabel 2.135) terlihat dari masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak ada aktivitasnya, demikian juga dengan UKM meski ada peningkatan dari sisi jumlah (Tabel 2.136) tetapi sampai saat ini di Katingan belum ada produk unggulan yang menjadi OVOP (*one village one product*) dengan skala usaha industri dan mandiri. Faktor modal dan keterampilan menjadi hambatan utama sehingga koperasi dan UMKM di Katingan belum berkembang dengan baik.

Adapun produktivitas tenaga kerja di Katingan trendnya terus meningkat (Gambar 2.311), dan capaian tertinggi berada pada lapangan usaha Sektor Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan. Namun sektor ini hanya menyerap tenaga kerja dengan angka di bawah 1% (Gambar.2.313) karena sektor ini memerlukan kapasitas dan keterampilan tertentu. Sebaliknya, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak tetapi dari segi produktivitas berada di urutan ke-8 terkecil dari sembilan sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Katingan.

Keterhubungan antara masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di Katingan dengan masalah dan akar masalahnya, dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4.
Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Perekonomian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian	Masih rendahnya upaya pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing	• Belum berkembangnya usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas dan berkelanjutan • Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian di pedesaan dan kawasan sentra produksi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing. • Lemahnya kelembagaan pertanian, kurangnya akses permodalan, lemahnya kapasitas petani, teknologi pengolahan lahan dan nilai tambah produk pertanian. • Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan tambak, baik segi produksi, kelembagaan, nilai tambah produk, permodalan dan ketersediaan bibit.
		Masih rendahnya daya saing daerah dan kemandirian masyarakat	• Belum optimalnya upaya promosi investasi daerah dan kualitas layanan perijinan • Masih rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal, kelembagaan ekonomi dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM • Masih rendahnya kapasitas tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		Belum terwujudnya penerapan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam	• Hilangnya hak pengelolaan hutan, energi dan sumber daya mineral • Masih rendahnya upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, terutama akibat aktivitas pembukaan hutan dan lahan yang tidak terkendali • Belum maksimalnya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan/lahan dan pencemaran lingkungan akibat limbah berbahaya
		Belum termanfaatkannya keanekaragamannya hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam	Belum berkembangnya potensi pariwisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi

Sumber: hasil analisis

4.1.5. Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan

Berbagai aktivitas pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur. Infrastruktur di suatu daerah diyakini merupakan komponen pendukung pembangunan yang tidak dapat disepelekan. Tak dapat dipungkiri, seringkali keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditandai dengan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang baik dan cakupan yang luas dan merata.

Posisi Kabupaten Katingan yang sangat strategis sebab dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang baik. Namun kondisi yang ada, masih ditemui keterbatasan penyediaan

infrastruktur wilayah. Masalah dan akar masalah yang menyebabkan kondisi ini, antara lain:

a. Pekerjaan Umum

1) Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik.

Permasalahan yang muncul dalam aspek pekerjaan umum adalah 82,27 persen kondisi jalan yang ada pada Kabupaten Katingan masih dalam kondisi tidak baik. Dimana secara jumlah panjang jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 adalah 784,37 Km, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga menjadi 794,37 Km. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2017 hanya 146,834 Km dalam kondisi baik atau 17,73 persen. Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik ini disebabkan oleh minimnya pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan.

2) Masih Tingginya Panjang Jalan dilalui Roda Empat yang berupa Permukaan Tanah

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 yang berupa permukaan aspal sepanjang 218,17 Km dan permukaan tanah sepanjang 252,39 Km. Pada tahun 2015 yang berupa permukaan aspal sepanjang 223,14 Km dan permukaan tanah sepanjang 344,23 Km, sedangkan pada tahun 2016 yang merupakan permukaan aspal sepanjang 234,66 Km dan permukaan tanah 437,04 Km.

Penjelasan mengenai kondisi ini oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, yaitu apabila dana terbatas dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah dapat diabaikan, yang ingin dicapai adalah jalan fungsional. Apabila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun bila kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan, tidak dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas.

b. Perumahan dan Pemukiman

1) Belum meratanya penyediaan jaringan air bersih dan penataan kawasan permukiman dan perumahan

Penyediaan prasarana dan sarana utilitas (air bersih, limbah, sampah dan rumah layak huni) di Katingan masih terbatas. Sampai akhir tahun 2017, tercatat baru 63,34% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan 43,83% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air layak (Tabel 2.85). Permasalahan mendasar dari masih

terbatasnya akses air bersih selain karena faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang juga karena perilaku hidup sebagian masyarakat Katingan yang sangat tergantung dan masih bermukim di sepanjang sungai Katingan. Padahal kondisi sungai ini berdasarkan hasil penelitian sudah tercemar zat berbahaya seperti merkuri dan bahan kimia lainnya hasil pembuangan aktivitas tambang dan pupuk kimia dari kegiatan perkebunan.

Kualitas penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan juga menjadi salah satu permasalahan dalam penataan kawasan permukiman dan perumahan sehat di Katingan. Saat ini, sudah mulai tumbuh keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat bahkan sampai ke pedesaan. Sampai akhir tahun 2017 tercatat dari 154 desa dan 7 kelurahan yang ada, baru 114 desa/kelurahan atau 70,81% yang melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tabel 2.87). Adapun total jumlah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal yang sudah terbangun baru 315 unit. Jumlah ini masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat mengingat dengan semakin banyak tumbuh kawasan permukiman baru atau perluasan kawasan yang ada, akan meningkatkan kebutuhan akan pengolahan limbah dan sanitasi yang layak.

Dengan semakin banyak muncul perumahan dan kawasan baru, tentu produksi sampah sejenis rumah tangga juga semakin banyak. Dengan semakin banyak sampah yang dihasilkan, semestinya kinerja penanganan sampah juga semakin baik. Dari data yang ada (Tabel 2.108) infrastruktur yang tersedia untuk pembuangan sampah ternyata masih sangat kurang. Baru 42,14% tempat pembuangan sampah yang mampu dilayani, dimana dari total volume produksi sampah yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 47.457 m³/hari yang dihasilkan, baru sekitar 20.000 m³/hari yang mampu ditangani. Hal ini pula yang menyebabkan Kabupaten Katingan dalam periode lima tahun ini belum memperoleh penghargaan bidang kebersihan kota atau Kalpataru.

2) Masih rendahnya Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik tahun 2017 hanya sebesar 83,49 persen. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya pelayanan sampai ke seluruh wilayah. Hal yang menyulitkan untuk melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi sejak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

c. Perhubungan

1) Menurunnya Jumlah Terminal Angkutan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan adalah masih belum terdapatnya terminal Kelas A dan B, saat ini di Kabupaten Katingan baru terdapat terminal Kelas C dan jumlahnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari jumlah terminal Kelas C tahun 2012 sebanyak 3 terminal, tahun 2013 menurun menjadi 2 terminal sampai dengan tahun 2014 jumlahnya masih sama yakni 2 terminal, sementara itu pada tahun 2015 dan 2016 kembali terjadi penurunan menjadi 1 terminal.

2) Tidak tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai

Kabupaten Katingan memiliki aliran sungai yang membentang dari ujung wilayah utara dan bermuara langsung ke Laut Jawa di wilayah selatan. Artinya, dengan topografi wilayah seperti ini, Katingan potensial memiliki pelabuhan laut yang dapat digunakan untuk bongkar muat barang dan lalu lintas antar pulau. Kondisi yang ideal dikembangkan berada di sekitar Pulau Damar atau Bajungkal di daerah Sei Kaki. Namun akses jalan darat menuju wilayah ini belum ada, mengakibatkan rencana pengembangan Pelabuhan Pegatan-Mendawai belum bisa dilaksanakan. Selain terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Katingan, juga rencana pembangunan jalan dan pelabuhan ini memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Bila pembangunan pelabuhan ini dapat terlaksanakan, maka diharapkan mampu melayani angkutan barang dan kendaraan dari Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangka Raya menuju Pulau Jawa dan sekitarnya.

d. Layanan Komunikasi dan Jaringan Internet Terpasang

Penyediaan sarana layanan komunikasi dan jaringan internet saat ini dirasakan semakin penting. Namun keterbatasan ketersediaan layanan ini menjadi kendala ketersediaan informasi dan layanan elektronik bagi masyarakat. Kondisi geografi Katingan yang sangat luas dan banyaknya posisi desa/kelurahan yang terpencil menjadi faktor utama terbatasnya layanan komunikasi di Katingan. Untuk layanan sinyal HP yang terjangkau baru mencakup 5.979 km² (Tabel 2.134), padahal luas Katingan mencapai 20.396,78 km².

Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, sampai tahun 2018 baru memasang jaringan internet di 11 desa. Namun untuk areal *blank spot* atau tanpa jaringan, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai walaupun dibeberapa titik

masih memungkinkan adanya layanan sinyal komunikasi telepon (HP) yang tidak konsisten.

Untuk layanan komunikasi umum yang dipusatkan pada fasilitas umum di perkotaan, baru tersedia layanan internet dan CCTV sebagai alat pantau aktivitas di lokasi RTH Taman dalam Kota Kasongan saja. Dengan estimasi jumlah Taman Kota se-Kabupaten Katingan adalah 20 lokasi tersebar di 13 Kecamatan, maka saat ini terealisasi baru sebesar 20%.

Masalah masih terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5.
Pemetaan Permasalahan Infrastruktur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur jalan, yang ditandai dengan: – Rendahnya panjang jalan kondisi baik	Terjadi penurunan sebab minim pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan, sehingga mengalami penurunan kondisi jalan.
		– Masih tingginya panjang jalan dilalui roda empat yang berupa permukaan tanah – Masih ada desa/kecamatan yang tidak terjangkau jalan darat	Bila dana terbatas, dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah tidak masalah yang penting fungsional. Bila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun kalau kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan saja tidak dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas.
		Belum meratanya penyediaan jaringan air bersih dan penataan kawasan permukiman dan perumahan	• Tidak meratanya ketersediaan jaringan air bersih bagi masyarakat di desa dan perkotaan • Masih rendahnya kualitas dan jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan • Masih rendahnya kualitas penanganan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
		Masih rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Belum optimalnya pelayanan sampai ke seluruh wilayah. Hal yang menyulitkan untuk melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi.
		Masih rendahnya pelayanan transportasi	• Menurunnya jumlah terminal angkutan umum • Tidak tersedianya pelabuhan laut

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Terbatasnya layanan komunikasi dan jaringan internet terpasang	• Kondisi geografis Katingan yang luas dan letak desa/ kelurahan yang terpencil • Terbatasnya kemampuan menyediakan layanan internet terpasang (wifi) di Kantor Pemerintah dan Kantor Desa, serta fasilitas umum.

Sumber: hasil analisis

4.1.6. Lambatnya perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Katingan

Secara administratif, Kabupaten Katingan memiliki 154 Desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan. Untuk mendorong pembangunan di desa, Pemerintah telah menyalurkan Dana Desa yang setiap tahun nilainya semakin bertambah. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Katingan, pada tahun anggaran 2017 disediakan total dana desa se-Katingan sebesar Rp.121.733.211.100 dan di tahun 2017 ini menjadi Rp.123.109.956.000. Kisaran dana yang diterima desa di tahun 2018 terendah sebesar Rp.680.912.000 di Desa Tumbang Kataei Kec. Bukit Raya dan tertinggi Rp.1.419.502.000 di Desa Tewang Rangkang Kec. Tewang Sanggalang Garing. Besarnya dana desa yang disalurkan tersebut, ternyata belum mampu dimanfaatkan oleh desa secara optimal sehingga dalam penilai pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, penilaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Katingan masih belum memuaskan.

Data pada Tabel 2.174 menunjukkan bahwa sampai tahun 2017, belum ada satupun desa di Kabupaten Katingan yang berstatus desa mandiri dan hanya satu desa saja yang berstatus desa maju, yakni Desa Hampalit. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Katingan masih mendominasi dengan total berjumlah 141 desa. Secara umum, persoalan pembangunan desa di Katingan adalah terkait keterbatasan SDM desa dan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola tata pemerintahan dan keuangan desanya. Banyak desa-desa di Katingan yang masih terpencil dan belum dapat dilalui jalan darat menjadi kendala utama lambatnya perkembangan desa-desa tersebut. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan dana desa tersebut untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi di desa (BUMDes). Berikut pemetaan masalah pembangunan desa di Kabupaten Katingan

Tabel 4.6.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Katingan	Terbatasnya kemampuan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakatnya	• Rendahnya kapasitas aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa • Rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat desa • Belum berkembangnya produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi desa

Sumber: hasil analisis

4.1.7. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Katingan memperoleh nilai CC (50,33). Penilaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Katingan banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki. Salah satu penyebab masih rendahnya kinerja tersebut adalah belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi terlihat dari indikator-indikator, seperti : (a) Nilai SAKIP yang masuk kategori cukup (CC), (b) hasil penilaian LPPD belum memuaskan dan berada di urutan ke-300an dalam 2 tahun terakhir dari seluruh kabupaten di Indonesia, (c) OPD yang melaksanakan penilaian mandiri untuk Survey Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Publik baru 2 OPD (Rumah Sakit Mas Amsyar dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil) dan hanya berlangsung 2 tahun terakhir saja (Tabel 2.52). Kedua OPD ini nilai IKM-nya mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016, untuk 2017 tidak tersedia data, (c) opini BPK atas kinerja keuangan daerah mengalami penurunan di TA 2017 dari WTP menjadi WDP.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan permasalahan utama rendahnya capaian realisasi anggaran karena terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Untuk mencapai tingkat optimalisasi anggaran dan kinerja, tentunya proses PBJP tidak dapat dihilangkan dari upaya peningkatan pelayanan teknologi informasi, yaitu peningkatan layanan/standarisasi layanan pengadaan elektornik (LPSE).

Untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam memberikan pelayanan pun masih rendah. Hal ini terlihat dari prosentase pencapaian target indikator SPM pada 6 bidang semuanya tidak mencapai target. Berikut capaian pelaksanaan dan penerapan nilai SPM di Kabupaten Katingan :

Tabel 4.7
Capaian Prosentase Pelaksanaan dan Penerapan SPM
di Kabupaten Katingan Tahun 2017

No .	Bidang	Jumlah Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Prosentase Rata-Rata Target Indikator	Prosentase Pencapaian Target Indikator	Keterangan
1	Kesehatan	1	12	100	28,25	0 indikator tercapai, 1 terlampaui, 10 belum tercapai, 1 tidak ada data
2	Pendidikan	2	27	97,80	73,99	1 indikator tercapai, 0 terlampaui, 26 belum tercapai, 0 tidak ada data
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	16	67,50	38,52	2 indikator tercapai, 2 terlampaui, 12 belum tercapai, 0 tidak ada data
4	Perumahan Rakyat	2	3	90	63,33	0 indikator tercapai, 0 terlampaui, 3 belum tercapai, 0 tidak ada data
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2	7	77,86	28,57	1 indikator tercapai, 0 terlampaui,3 belum tercapai, 3 tidak ada data
6	Sosial	4	7	71,43	33,81	0 indikator tercapai, 2 terlampaui,5 belum tercapai, 0 tidak ada data

Sumber : Setda Katingan, 2018

Hal-hal yang menjadi penyebabnya lambatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan percepatan penerapan SPM ada beberapa faktor, yakni :

a. Terbatasnya kapasitas ASN Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jumlah ASN Kabupaten Katingan sampai akhir tahun 2018 tercatat berjumlah 3.784 orang. Bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Katingan, jumlah ini tidaklah berimbang. Belum lagi adanya ketidakseimbangan antara penambahan dengan pengurangan pegawai menjadi penyebab munculnya permasalahan ini. Pengadaan CPNS sebagai jalur utama dalam menambahkan pegawai tidak efektif dikarenakan adanya kebijakan moratorium CPNS. Penambahan pegawai yang dimungkinkan melalui penerimaan mutasi pegawai dari luar daerah dan

pengangkatan pegawai non PNS. Penerimaan mutasi dari luar daerah tidak bisa ditentukan targetnya karena Pemerintah Daerah yang sebatas pasif menerima secara selektif atas permohonan mutasi yang masuk. Sedangkan pengangkatan pegawai non PNS terkendala oleh belum adanya regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai salah satu kategori Aparatur Sipil Negara selain PNS.

Disisi lain masih terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan (lihat Tabel 2.165, 2.166, dan 2.167). Data menunjukkan masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Dengan diambil alihnya kewenangan melaksanakan diklat penjenjangan oleh Provinsi mengakibatkan kesempatan mengikuti diklat kepemimpinan terbatas. Selain itu, terbatasnya pendanaan bagi ASN mengikuti diklat-diklat teknis menyebabkan banyak ASN Katingan yang tidak bisa mencapai minimal 30 jam pelatihan dalam setahun. Hal ini terlihat dari realiasi alokasi untuk belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sejak tahun 2015 terus berkurang dari 8,3 milyar menjadi 2,6 milyar di tahun 2017.

b. Belum optimalnya kualitas perencanaan

Sampai saat ini *e-planning* belum dapat diintegrasikan dengan *e-budgeting*. Permasalahan yang dihadapi karena aplikasi dalam mengintegrasikan kedua sistem ini memerlukan dukungan input data dan informasi seperti dokumen RPJMD, RKPD, dan RENSTRA perangkat daerah. ASN disemua perangkat daerah masih belum semuanya mampu menyusun program dan kegiatan yang signifikan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kelemahan dalam kondisi ini adalah belum tersedianya tenaga ASN yang menjadi fungsional perencanaan.

c. Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan.

Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 3.1) ditunjukkan dari persentase realisasi peningkatan daerah terutama dari pos PAD yang rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun ini mencapai 1,2%. Demikian pula di pos Dana Perimbangan rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,7%, bahkan untuk item DAU justru mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata hingga -3,6%.

Disisi lain, nilai belanja daerah dan ratio peningkatannya terus mengalami kenaikan (sebagaimana Tabel 3.2). Yang paling signifikan terlihat pada belanja tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun

terakhir mencapai 15,9% dan untuk belanja langsung bagi pembangunan mencapai 6,1%. Kondisi ini bila dibiarkan akan menimbulkan limitasi dalam kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan.

Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh WTP berturut-turut mulai tahun 2013-2016, meski ditahun 2017 menurun menjadi WDP. Hal ini perlu ditingkatkan lagi di tahun 2018 melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah.

d. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah juga belum optimal sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.169. Indikasi dari masalah ini adalah masih banyak temuan hasil pemeriksaan BPK sampai 2016 baik yang belum ditindaklanjuti maupun temuan baru. Kondisi ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, terkelola dan terukur. Kedepan pelaksanaan atas praktik pengendalian intern perlu dilakukan dengan baik melibatkan seluruh unit organisasi dan efektivitas pengendalian perlu dievaluasi untuk memetakan penanganan atas kelemahan yang ada.

e. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik

Saat ini tuntutan masyarakat untuk adanya peningkatan layanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari aparat pemerintah sebagai pelayan publik semakin tinggi. Apalagi bila kondisi ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa OPD Kabupaten Katingan masih belum optimal (Tabel 2.52). Kondisi ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2015 dengan nilai 79,54 mengalami penurunan menjadi 74,52 pada tahun 2016. Penurunan IKM ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, serta masih rendahnya kualitas pelayanan yang berkaitan dengan Sistem Pelayanan, Sarana dan Prasarana serta SDM.

Tabel 4.7.

Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dan percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minil (SPM)	– Terbatasnya kapasitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan – Belum optimalnya kualitas perencanaan – Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan – Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan – Masih rendahnya kualitas dan sistem pelayanan publik

Sumber: hasil analisis

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang mendatang. Beberapa isu internasional yang cukup relevan dengan Indonesia dan secara khusus pembangunan Katingan, sebagai berikut :

4.2.1.1. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada awal Januari 2007 para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memutuskan untuk mempercepat tercapainya ASEAN *Community*-bukan saja *Economic Community* tetapi juga ASEAN *Community*-dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No.

23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. *ASEAN Community 2025* merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Political-Security Community* (APSC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC).

Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen.

Negara seperti Indonesia dianggap pelaku usaha dunia sebagai pasar yang diminati dan dilakukan penetrasi. Sebenarnya bila dianggap sebagai pasar tetapi pada saat bersamaan dijadikan tempat memproduksi, Indonesia tetap mendapatkan keuntungan. Namun, bila yang terjadi ialah Indonesia sebagai pasar, sedangkan negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam yang dijadikan tempat memproduksi, maka ini tidak terlu

menguntungkan bagi Indonesia. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

4.2.1.2. Lingkungan Hidup

Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa kebakaran hutan, bencana alam banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan gejala *global warming* dan perubahan iklim dunia, menumbuhkan perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia untuk semakin memperhatikan, menjaga serta memelihara planet bumi.

a. Sampah Plastik

Sehubungan dengan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, pada Tahun 2018 diperingati dengan tema "Kendalikan Sampah Plastik". Tema ini diangkat sebagai perwujudan komitmen bersama seluruh pihak dalam upaya mengatasi bahaya sampah plastik di berbagai belahan dunia, juga di Indonesia. Tema ini mengandung arti motivasi kerja sekuat tenaga untuk atasi sampah, juga kerja yang sistematis dalam mengurangi sampah, mengolah sampah, dan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kegiatan daur ulang, atau dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*); serta yang penting adalah upaya bersama kolaborasi semua pihak, pemerintah/pemda, masyarakat dan dunia usaha.

Seperti negara lain, Indonesia dihadapkan pada permasalahan dampak dari peningkatan aktivitas dan kebutuhan manusia, yaitu berupa penumpukan sampah plastik, yang hingga kini perlu dilakukan tindak lanjut pengelolaan yang cepat, tepat, dan ramah lingkungan. Hal ini sangat penting, mengingat sampah plastik merupakan benda yang tidak dapat terurai dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan laut.

Berdasarkan pidato sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2018 lalu, komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 16% (sipsn.menlh.go.id) dari total timbunan sampah secara nasional. Sementara komposisi sampah plastik di kota-kota besar seperti Jakarta, sekitar 17% (Riset bersama Indonesia Business Link dan Laboratorium Teknik Penyehatan dan Lingkungan UI 2016). Komposisi sampah plastik menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11% di tahun 2005 menjadi 15% di tahun 2015. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (*packaging*) makanan dan minuman, kemasan *consumer goods*, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya.

Dari total timbunan sampah plastik, yang telah dilakukan daur ulang diperkirakan baru 10-15% saja, selain itu 60-70% ditimbun di TPA, dan 15-30%

belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut (Data Program Adipura KLHK 2016). Dengan demikian, guna mengatasi persoalan sampah kemasan plastik, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat, seperti sinergi antara perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

b. Pemanasan Global Atau Perubahan Iklim

Selain isu mengenai sampah, perhatian masyarakat internasional terkait lingkungan hidup juga tertuju pada pemanasan global atau perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh sektor termasuk Program REDD+ di sektor kehutanan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk tahun 2020-2030 Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% sampai 41% dari *Business as usual* dengan baseline 2,87 Gton CO₂e untuk semua sektor. Target tersebut telah disampaikan di dalam NDC yang mana juga menggabungkan antara upaya mitigasi dan adaptasi.

Lebih lanjut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan pada acara *The 22nd Session of the Conference of the Parties (COP 22)* Tahun 2018 di Marakesh, dua sektor utama yang berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi yaitu energi dan lahan. Untuk energi, Indonesia akan menggunakan energi terbarukan sebesar 23% di Tahun 2025 dan setidaknya 31% di Tahun 2050. Pada waktu yang sama penggunaan batubara diminimalisasi sampai 30% di 2025 dan setidaknya 25% di 2050 dengan menggunakan teknologi bersih. Sedangkan pada sector lahan melalui program REDD+ diproyeksikan potensi menurunkan emisi sebesar 0,8 Gton CO₂e per tahun.

4.2.1.3. Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Tujuan dan 169 Target untuk periode pelaksanaan Tahun 2015-2030. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana

tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Komitmen Indonesia telah dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan lebih lanjut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Prinsip dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sesuai dengan amanat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka akan disusun dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematis selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah

selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan RPJMD perlu dilakukan untuk mengetahui isu atau kebijakan nasional apa saja yang perlu ditindaklanjuti atau diselaraskan dengan pemerintahan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan, dilakukan telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Undang-Undang mengenai Desa dan Pemerintahan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 mempedomani RPJMN. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempedomani RPJMN dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap RPJMN Tahun 2015-2019, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan nasional pada periode tersebut, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- b. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- c. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan.
- d. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.
- e. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi.
- f. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
- g. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
- h. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan.

- i. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan.
- j. Peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor.
- k. Pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.
- l. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan.
- m. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan.
- n. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
- o. Pemantapan ketahanan pangan.
- p. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan.
- q. Meningkatkan tata kelola kehutanan (*good forest governance*).
- r. Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan.
- s. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
- t. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang.
- u. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
- v. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik.
- w. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
- x. Mendorong pembangunan *fixed/wireline broadband* termasuk di daerah perbatasan Negara.
- y. Mempercepat implementasi *e-Government* dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective*.
- z. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
- aa. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
- bb. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.
- cc. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang.
- dd. Meningkatkan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik.
- ee. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan Tepat Sasaran.

- ff. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksi-nya.
- gg. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.
- hh. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses public.
- ii. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.
- jj. Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan.
- kk. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
- ll. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem.
- mm. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
- nn. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 memuat visi dan misi pembangunan Indonesia sebagai berikut:

VISI:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Adapun 7 (tujuh) misi dalam rangka mencapai visi yang dimaksud, meliputi:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah Nawa Cita, meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain amanat nawa cita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMN juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).

Masih seputar RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat pula Agenda Pembangunan Wilayah yang dimuat dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, meliputi:

- a. Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan.
- b. Pembangunan Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kecamatan Katingan Hilir.
- c. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru.

4.2.2.2. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Isu strategis pembangunan periode 2020-2024 yang dirumuskan dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024, antara lain:

1. Pembangunan manusia
2. Pembangunan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Pembangunan nasional pada periode 2020-2024 menekankan pada kondisi investasi dan kondisi sumber daya alam (SDA). Pengarusutamaan yang dikedepankan meliputi: kesetaraan gender, tata kelola (*governance*), kerentanan bencana, perubahan iklim dan modal sosial dan budaya.

Tabel 4.8.
Proyeksi Target Indikatif Pembangunan 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	Pengangguran	Ketimpangan
Kondisi Saat Ini (2018)	5,27%*	9,82%	5,13%	0,389
Sasaran dalam RKP 2019	5,2-5,6%	8,5-9,5%	4,8-5,2%	0,38-0,39
Sasaran dalam RPJPN 2005-2025	4,5-5,5%**	≤5%	≤5%	0,36
Proyeksi Baseline SDGs 2024	4,2 %***	8,21%	5,02%	0,387
Sasaran Dalam RPJMN 2020-2024****	5,7%	5,0-5,7%	4,0-4,6%	0,371-0,373

Sumber: Bappenas, 2018

Keterangan:

- *) Kuartal II 2018
- **) Tertulis: setara negara berpendapatan menengah
- ***) Laju pertumbuhan PDB per kapita
- ****) Skenario moderat

Adapun Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1

Kerangka Pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024



4.2.2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas.

4.2.2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Terbitnya undang-undang ini membawa warna baru bagi berbagai aspek terkait dengan

pemerintahan daerah. Salah satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya perubahan urusan pemerintahan daerah yang berdampak pada kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka seluruh pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Konsekuensi logis dari penerapan peraturan pemerintah ini yaitu berubahnya susunan perangkat daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kondisi ini juga diikuti dengan adanya perubahan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini merupakan amanat dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; RPJMD; dan c. RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Perkada.

Undang-Undang ini juga memberikan porsi yang cukup besar bagi pengembangan inovasi. Bahkan mendorong adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis.

4.2.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Dengan demikian, jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan penganggaran pembangunan Daerah (APBD) sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Isu atau Kebijakan Provinsi

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan perlu memerhatikan kebijakan pembangunan yang ada di tingkat provinsi. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinergi pembangunan anatar provinsi dan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Pada kesempatan ini dilakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan kebijakan mengenai *Heart of Borneo*.

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta

prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Beberapa isu strategis yang menjadi isu pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
2. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.
3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah.
4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.
7. Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.
8. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.

Sementara itu, visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah :

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditempuh dengan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Pengelolaan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan tata Kelola Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Masing-masing misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran berikut:

1. Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Tujuan: Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas

Sasaran: Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten

2. Misi 2: Pengelolaan Infrastruktur.

Tujuan: Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas

Sasaran:

- a. Meningkatnya konektivitas antardaerah
- b. Meningkatnya ketercukupan energi

3. Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.

Tujuan: Meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir & pantai

Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan

4. Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.

Tujuan 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

Sasaran:

- a. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatnya daya beli masyarakat

Tujuan 2: Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten

- a. Meningkatnya sektor ekonomi hijau
- b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat

5. Misi 5: Pemantapan tata Kelola Pemerintah Daerah.

Tujuan: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik

Sasaran:

- a. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah
- d. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan

6. Misi 6: Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 2: Meningkatkan peran Sektor Pariwisata

Sasaran: Terpasarkannya industri wisata

7. Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam.

Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran: Menurunkan degradasi lingkungan

8. Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan: Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan

Sasaran: Meningkatnya pendapatan daerah

Jika ditelaah lebih lanjut berkaitan tentang arah kebijakan pengembangan wilayah strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan selaras dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan menjadi kawasan strategis, yaitu:

1. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis.
2. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipadusertakan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak.
3. Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia.
4. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao).
5. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan khususnya pada Kecamatan Katingan Kuala.
6. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan.
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya berupa rumah adat dan kawasan pahewan.
8. Kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat hindu kaharingan.
9. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi dan perikanan di kawasan andalan laut.
10. Kawasan strategis daerah aliran sungai (DAS Katingan)
11. Kawasan strategis *Heart of Borneo (HoB)*.
12. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati yaitu Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang.
13. Lanskap alamiah yang luas (lanskap alamiah dengan kapasitas untuk memelihara proses dan dinamika ekologi alamiah) berada di dua benteng utama yaitu:
 - a. Bagian utara khususnya Kabupaten Murung Raya dan melebar ke bagian barat daerah pegunungan di Kabupaten Katingan
 - b. Bagian tengah dan selatan yang mencakup kawasan gambut dan rawa campuran, termasuk kawasan konservasi (khususnya Kabupaten Katingan, Kapuas dan Pulau Pisau).

14. Ekosistem langka dan terancam pada umumnya di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Katingan yang merupakan kawasan dengan tingkat deforestasi yang cukup besar namun ekosistem masih terjaga.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki prioritas pembangunan kewilayahan kabupaten/kota untuk Kabupaten Katingan, yaitu: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Perfilman Asia Tenggara. Langkah-langkah awal pengembangan KEK pusat perfilman Asia Tenggara di Katingan telah dilaksanakan dan akan menjadi salah satu fokus pembangunan Katingan periode yang akan datang.

4.2.3.2. Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
- e. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- f. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- g. pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama; dan
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Adapun rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan wilayah Katingan, meliputi:

- a. Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi: (1) Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km.
- b. Jaringan angkutan sungai dan danau: Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb. Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai – Pagatan.
- c. Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi: Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).
- d. Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan.
- e. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas.
- f. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
- g. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;

- h. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- i. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas.
- j. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiyang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok.
- k. Rencana sistem sumberdaya air: Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.
- l. Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau.
- m. Embung Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
- n. Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- o. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.
- p. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi: Kabupaten Katingan, yaitu: DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha).

- q. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten: Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha.
- r. Daerah Rawa Kewenangan Pusat: DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi).
- s. Daerah Rawa Kewenangan Provinsi: DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi).
- t. Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi: Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai.
- u. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.

4.2.3.3. *Heart of Borneo*

Heart of Borneo (HoB) adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Jantung Kalimantan adalah bagian kawasan HoB di Indonesia.

Heart of Borneo (HoB) merupakan inisiatif pemerintah sehingga program dan kegiatan HoB diprakarsai oleh pemerintah bekerja sama dengan para mitra. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan HoB dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) di tingkat nasional, Kelompok Kerja Provinsi (Pokjaprov) di tingkat provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten (Pokjakab) di tingkat kabupaten. Pokjanas HoB bekerja untuk memfasilitasi isu-isu yang terjadi di tingkat nasional, demikian juga dengan Pokjaprov dan Pokjakab masing-masing untuk isu-isu di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggota Pokjanas adalah kementerian terkait dan perwakilan Pokjaprov yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk Pokjaprov dan Pokjakab beranggotakan dinas dan instansi terkait yang masing-masing ditetapkan oleh gubernur dan bupati.

Visi yang ingin dicapai melalui inisiatif *Heart of Borneo* adalah terwujudnya pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator. *Heart*

of Borneo yang meliputi 23 juta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi masyarakat dan alam, melalui kerjasama internasional yang dipimpin oleh masing-masing pemerintah negara di Borneo, yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan.

Misi pengelolaan kawasan *Heart of Borneo* adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, 23 juta hektar jejaring kawasan lindung, cadangan lintas batas, dan koridor dikelola secara berkelanjutan dan zona penyangga berfungsi untuk menjamin masa depan semua spesies prioritas dan kawasan HoB endemik didirikan.
2. Pada tahun 2020, tidak ada konversi hutan yang bernilai konservasi tinggi untuk penggunaan lahan lain di kawasan HoB.
3. Pada tahun 2020, mekanisme pembiayaan jangka panjang memberikan manfaat diversifikasi dan adil bagi masyarakat lokal dan pemerintah, dan meningkatkan barang dan jasa ekosistem.

Luas kawasan HoB di tiga negara meliputi areal seluas kurang lebih 23 juta hektar yang secara ekologis saling berhubungan. Wilayah HoB sebagian besar berada di Indonesia yaitu sekitar 72% yang didominasi oleh hutan hujan tropis. Kawasan HoB memiliki 7 fungsi penting yaitu tutupan kawasan hutan, melimpahnya keanekaragaman hayati, menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, sosial-budaya dan ekowisata. Salah satu fungsi penting kawasan HoB adalah sebagai menara air, dimana 14 dari 20 sungai utama di Pulau Borneo berhulu di kawasan HoB, seperti Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas dan lainnya.

Program atau inisiatif *Heart of Borneo* dikembangkan tidak hanya untuk tujuan-tujuan konservasi semata, namun lebih penting lagi bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB. Lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan pilar-pilar program HoB selain sosial ekonomi dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, khusus di wilayah Indonesia, kerjasama lintas sektoral dan peran serta aktif pemerintah provinsi dan kabupaten di kawasan HoB menjadi sangat penting. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat lokal, yaitu masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam di kawasan HoB, harus menjadi bagian pokok dalam pembangunan di kawasan HoB.

4.2.4 Isu atau Kebijakan Kabupaten Katingan

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) harus dilakukan dalam tahap penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai dengan amanat

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

4.2.4.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Ini berarti, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan harus memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahapan berkenaan. Untuk pembangunan jangka menengah Katingan periode 2018-2023 mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahap Ketiga (2018-2023).

Beberapa isu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025, sebagai berikut:

1. Masih dijumpai penduduk dengan tingkat pendapatan rendah.
2. Sulit menciptakan kesempatan kerja yang luas.
3. Minim investasi di berbagai sektor.
4. Masih tertinggal sektor Pertanian dan Perdesaan.
5. Masih terjadi penyusutan SDA dan Degradasi Lingkungan.
6. Sulitnya Aksesibilitas.
7. Masih rendah Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan.
8. Masih lemah Penegakan Hukum.
9. Belum mantapnya otonomi daerah.
10. Belum jelas tapal batas wilayah.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan juga isu strategis diatas, perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan saat ini memasuki tahap ke-3. Tahap ketiga RPJPD Kabupaten Katingan ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas,

penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Bersamaan dengan itu **kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan** berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak;

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.

4.2.4.2. Telaah RTRW Kabupaten Katingan

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pembanguna jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang

berkembang dan sejahtera serta berjati diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dengan berbasis **agrobisnis** serta **berwawasan lingkungan**.

Kemudian untuk tujuan penataan ruang Kabupaten Katingan meliputi:

- a. Pemerataan ekonomi Kabupaten;
- b. Pengembangan pusat-pusat pemukiman;
- c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
- d. Peningkatan produksi pertanian;
- e. Peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan;
- f. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain:

1. Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Membentuk pola ruang dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi;
 - b. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
 - d. Mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan; dan
 - e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.
2. Strategi pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh, meliputi:
 - a. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
 - b. Mengembangkan ruas jalan terusan ruas Pegatan–Kasongan dan Kasongan– Pendahara, sebagai akses menuju ruas jalan trans Kalimantan poros selatan bagian utara dan selatan Kabupaten Katingan;
 - c. Pembangunan sub terminal di semua kecamatan kecuali di pusat kegiatan lokal kasongan, Buntut Bali dan Tumbang Samba sebagai perpindahan moda dari pelabuhan sungai ke daratan dan sebaliknya;
 - d. Membangun sarana perhubungan skala nasional; dan
 - e. Mengembangkan prasarana perhubungan sungai sebagai jalur alternatif.
3. Strategi pengembangan sektor unggulan, meliputi:

- a. Meningkatkan kegiatan pertanian dengan sub sektornya, melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan potensial antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan peternakan; dan
 - e. Memilih sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.
4. Strategi peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a. Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan
 - b. Melakukan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan lindung.
 5. Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi:
 - a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

4.2.4.3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Katingan yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Katingan hanya melaksanakan 16 tujuan yang terbagi dalam 220 indikator, yaitu:
 - a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Katingan dan sudah mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu: pilar sosial 20, ekonomi 9, lingkungan 2, hukum dan tata kelola 0.
 - b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Katingan tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 39, pilar ekonomi 15, pilar lingkungan 24 dan pilar hukum, tata kelola adalah 0.
 - c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Katingan tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 0, pilar ekonomi 1, pilar lingkungan 0 dan pilar hukum, tata kelola adalah 0.
 - d. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Katingan tetapi tidak ada data sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 37, pilar ekonomi 33, pilar lingkungan 3 serta pilar hukum dan tata kelola adalah 37.
2. Dari hasil FGD para pemangku kepentingan diperoleh isu strategis pilar sosial, ekonomi dan pilar lingkungan sejumlah 31 isu strategis dan 6 isu prioritas, sedangkan isu sesuai TPB prioritas sebanyak 6 sebagai berikut:
 - a. Nomor TPB 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
 - b. Nomor TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.
 - c. Nomor TPB 6: Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih serta Sanitasi layak yang Berkelanjutan.
 - d. Nomor TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
 - e. Nomor TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.
 - f. Nomor TPB 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan; termasuk pencemaran lingkungan yang disebabkan karena lahan/hutan gambut dan kebakaran hutan dan lahan.
3. Berdasarkan kategori pencapaian TPB diperoleh sebagai berikut:

- a. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 11 OPD dengan total 30 indikator.
 - b. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 8 OPD dengan total 29 indikator.
 - c. OPD yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 5 OPD dengan total 11 indikator
 - d. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 22 OPD dengan total 150 indikator.
4. Berdasarkan hasil kajian 6 muatan KLHS, diperoleh beberapa isu atau permasalahan yang perlu dipertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 sebagai berikut:
- a. Daya Dukung dan Daya Tampung
Berdasarkan data dari Peta ekoregion Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung di Kabupaten Katingan, termasuk kategori Sangat tinggi sebesar 437.415,21 ha (21,46%), kategori Tinggi sebesar 1.302.322,84 ha (63,88%), kategori Sedang sebesar 94.385,39 (4,63%) dan kategori rendah sebesar 204.624,73 ha (10,04%),
 - b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Katingan ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis. Potensi banjir di wilayah Kabupaten Katingan ditentukan oleh tiga hal, yaitu dikarenakan kondisi topografi, daya tampung debit air sungai oleh badan sungai dan curah hujan. Untuk potensi banjir yang disebabkan karena kondisi topografi, wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi rendah yakni sebesar 74,77% dan kategori tinggi sebesar 25,23%. Wilayah Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Petak Malai dan Sanaman Mantikei merupakan daerah dengan potensi banjir rendah, karena wilayah ini merupakan daerah hulu dan memiliki topografi yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan potensi banjir tinggi adalah Kecamatan Mendawai (78%), Katingan Kuala (70,1%) dan Kecamatan Kamipang (51,9%) yang merupakan daerah rawa dengan topografi rendah.
Untuk potensi banjir lainnya disebabkan karena berkurangnya kemampuan badan sungai menampung debit air yang besar dikarenakan pendangkalan pada badan sungai akibat aktifitas PETI yang salah satunya banyak ditemukan pada segmen Sanamang-Marikit. Pendangkalan badan sungai ini ditandai dengan terbentuknya delta di tengah sungai yang merupakan tumpukan material akibat aktifitas PETI

pada bagian upstream delta sehingga terjadi erosi pada bagian kiri dan kanan delta. Curah hujan yang tinggi (> 300 mm perbulan) juga berpotensi mengakibatkan banjir di DAS (Daerah Aliran Sungai), kondisi ini diperparah karena minimnya daerah tangkapan air yang antara lain disebabkan karena pembukaan lahan di sekitar areal DAS. Permasalahan PETI ini harus menjadi perhatian serius dari aparaturnya pemerintah dikarenakan jumlah unit dan luas areal lokasi PETI yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perlu adanya pengawasan dan pemberian sanksi terkait PETI di Kabupaten Katingan. Kebakaran lahan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Katingan, hal ini dikarenakan Kabupaten Katingan merupakan daerah yang didominasi oleh wilayah gambut dengan luas 712.143,37 ha (34,87%) dari luas Kabupaten Katingan. Tingkat kesulitan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan jenis lahan, tertinggi berada di wilayah lahan gambut di kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sedangkan terendah berada di lahan non gambut, yaitu pada kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing.

c. Kinerja Layanan Atau Jasa Ekosistem

- 1) Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem pangan di Kabupaten Katingan terlihat bahwa dari 13 kecamatan jasa ekosistem yang sangat tinggi hanya 9 kecamatan yaitu : Kecamatan Kamipang, Katingan Hilir, Katingan Kuala, Katingan tengah, Mendawai, Pulau Malan, Sanaman Mantikei, Tasik Payawan, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing, sedangkan 4 kecamatan lainnya pada klasifikasi bervariasi dari sangat rendah sampai tinggi.
- 2) Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Katingan terlihat bahwa 9 kecamatan dari 13 kecamatan pada klasifikasi jasa pengaturan tata air yang sangat tinggi.

d. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Hasil analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 masih sesuai tutupan lahan alami. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Katingan masih cukup efisien.

e. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

- 1) Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
 - 2) Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem.
 - 3) Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan sebesar 162 ton/ha untuk hutan mangrove primer dan 116 ton/ha untuk hutan mangrove sekunder, sedangkan untuk hutan dengan kerapatan sedang sebesar 64,39 ton/ha. Dengan luas hutan 1.219.699,79 ha atau maka total stok karbon di Kabupaten Katingan adalah sebesar 183.478.370,59 ton/ha.
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- 1) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dikaji dengan melakukan *overlay* rencana status kawasan hutan terhadap keanekaragaman hayati sumberdaya *biodiversity* dan rencana pola ruang budidaya di RTRW Kabupaten Katingan.
 - 2) Berdasarkan hasil analisis untuk status kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai penunjukan kawasan hutan lindung dan KSA/KPA menunjukkan bahwa sekitar 30,57 ha atau 0,006% sebagai kawasan terbangun, 3767,91 ha atau 0,68 % dan alami 550.225,68 atau 99,31 ha.
5. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a. Tidak perlu adanya upaya tambahan (BAU) 1 indikator.
 - b. Perlu upaya tambahan 6 indikator.
 6. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a. Perlu upaya tambahan 20 indikator.
 - b. Tidak perlu upaya tambahan 2 indikator.
 7. Berdasarkan hasil perumusan skenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPB dan target berupa Program dan Kegiatan yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023, adapun indikator dan targetnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9.
Indikator TPB yang Rekomendasinya (Program dan Kegiatan) Diintegrasikan
ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
Indikator yang Terkait Langsung DDDT-LH				
1	1.4.1.(d)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkat 100%	Perlu upaya tambahan
2	1.4.1.(e)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Menjadi 100%	Perlu upaya tambahan
3	1.5.1*	Indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	Perlu upaya tambahan
4	1.5.1.(a)	Indikator Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	meningkat	Perlu upaya tambahan
5	1.5.2.(a)	Indikator Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Menurun	Perlu upaya tambahan
6	1a.1*	Indikator proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	Perlu upaya tambahan
7	2.2.2(c)	Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat	Perlu upaya tambahan
8	6.1.1.(a)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	100%	Perlu upaya tambahan
9	6.1.1.(b)	Indikator Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Meningkat	Perlu upaya tambahan
10	6.1.1.(c)	Indikator Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	100%	Perlu upaya tambahan
11	6.2.1.(b)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100 %	Perlu upaya tambahan
12	6.2.1.(c)	Indikator jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	menjadi 45.000	Perlu upaya tambahan
13	6.2.1.(d)	Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	meningkat	Perlu upaya tambahan

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
14	6.2.1.(e)	Indikator Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	meningkat	Perlu upaya tambahan
15	6.2.1.(f)	Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkat	Perlu upaya tambahan
16	6.3.1.(a)	Indikator Jumlah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkat	Perlu upaya tambahan
17	6.3.1.(b)	Indikator proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Meningkat	Perlu upaya tambahan
18	6.3.2.(a)	Indikator Kualitas Air Danau	Meningkat	Perlu upaya tambahan
19	6.3.2.(b)	Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	Meningkat	Perlu upaya tambahan
20	6.4.1.(b)	Indikator Insentif Penghematan Air Pertanian/Perkebunan dan Industri	Target Nasional 2019 = ada	Perlu upaya tambahan
21	6.5.1.(a)	Indikator Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Target Nasional 2019 = ada	Perlu upaya tambahan
22	6.5.1.(f)	Indikator Jumlah Wilayah Sungai yang Memiliki Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	Target Nasional 2019 = ada	Perlu upaya tambahan
23	6.5.1.(g)	Indikator Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air	Target Nasional 2019 = ada	Perlu upaya tambahan
24	11.5.1*	Indikator Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	Menurun	Perlu upaya tambahan
25	11.5.2.(a)	Indikator Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Menurun	Perlu upaya tambahan
26	11.6.1.(a)	Indikator Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	80%	Perlu upaya tambahan
27	11.7.1.(a)	Indikator Jumlah Kota Hijau yg Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Metropolitan Dan Kota Sedang	Meningkat	Perlu upaya tambahan
28	12.4.2.(a)	Indikator Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	Meningkat	Perlu upaya tambahan
29	12.5.1.(a)	Indikator Jumlah Timbunan Sampah yang Didaur Ulang	Target Nasional 2019 = 20 ton per hari	Perlu upaya tambahan
30	12.6.1.(a)	Indikator Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	meningkat	Perlu upaya tambahan
31	13.1.2*	Indikator Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	Menurun	Perlu upaya tambahan

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
32	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Target Nasional 2019 = 5,5 jt ha	Perlu upaya tambahan
33	15.9.1.(a)	Indikator Dokumen rencana pemanfaatan keaneka-ragaman hayati	Meningkat	Perlu upaya tambahan
Indikator yang Tidak Terkait Langsung DDDT-LH				
1	1.3.1.(a)	Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	17,12%	Perlu upaya tambahan
2	1.3.1.(b)	Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat	Perlu upaya tambahan
3	1.3.1.(c)	Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
4	1.3.1.(d)	Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurunkan	Perlu upaya tambahan
5	1.4.1.(a)	Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	meningkat menjadi 70%	Perlu upaya tambahan
6	1.4.1.(b)	Indikator Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkat	Perlu upaya tambahan
7	1.4.1.(g)	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 94,78%	Perlu upaya tambahan
8	1.4.1.(h)	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	meningkat menjadi 82,2%	Perlu upaya tambahan
9	1.4.1.(j)	Indikator Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	meningkat menjadi 77,4%.	Perlu upaya tambahan
10	1.4.1.(k)	Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	meningkat menjadi 100%	Perlu upaya tambahan
11	1.5.1.(b)	Indikator Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkat	Perlu upaya tambahan
12	1.5.1.(c)	Indikator Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial	Meningkat	Perlu upaya tambahan
13	1.5.3*	Indikator Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	ada dokumen	Perlu upaya tambahan
14	1.a.2*	Indikator Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkat	Perlu upaya tambahan
15	2.1.1.(a)	Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada Anak Balita	Menurun	Perlu upaya tambahan
16	2.2.2.(b)	Indikator Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil.	menurun menjadi 28%	Perlu upaya tambahan

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
17	3.1.2.(a)	Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	meningkat menjadi 85%	Perlu upaya tambahan
18	3.2.2.(b)	Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	meningkat menjadi 95%	Perlu upaya tambahan
19	3.3.5*	Indikator Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	Perlu upaya tambahan
20	3.4.1.(b)	Indikator Prevalensi tekanan darah tinggi	Menurun menjadi 24,3%	Perlu upaya tambahan
21	3.4.2.(a)	Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Meningkat	Perlu upaya tambahan
22	3.5.1.(e)	Indikator Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	menurun menjadi 0,02%	Perlu upaya tambahan
23	3.7.1.(b)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Meningkat menjadi 23,5%	Perlu upaya tambahan
24	3.7.2.(a)	Indikator Total Fertility Rate (TFR)	Menurun menjadi 2,28	Perlu upaya tambahan
25	3.8.2.(a)	Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	meningkat menjadi minimal 95%	Perlu upaya tambahan
26	4.1.1.(a)	Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	meningkat menjadi 84,2%	Perlu upaya tambahan
27	4.1.1.(b)	Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	= meningkat menjadi 81%	Perlu upaya tambahan
28	.1.1.(d)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	meningkat menjadi 114,09%	Perlu upaya tambahan
29	: 4.1.1.(e)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	meningkat menjadi 106,94%	Perlu upaya tambahan
30	4.1.1.(g)	Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
31	5.6.1.(a)	Indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	meningkat menjadi 9,9%	Perlu upaya tambahan
32	5.b.1*	Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Perlu upaya tambahan
33	6.2.1.(a)	Indikator Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
34	6.5.1.(c)	Indikator Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Target Nasional 2019 = 8 WS	Perlu upaya tambahan
35	8.1.1*	Indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	Perlu upaya tambahan

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
36	8.3.1.(c)	Indikator Persentase Akses UMKM (Usah Mikro Kecil Dan Menengah) Kelayanan Keuangan	25%	Perlu upaya tambahan
37	8.9.1.(a)	Indikator Jumlah wisatawan mancanegara.	25%	Perlu upaya tambahan
38	8.10.1.(b)	Indikator Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
39	9.1.2.(b)	Indikator Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
40	9.c.1.(a)	Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Perlu upaya tambahan
41	9.c.1.(b)	Indikator Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Perlu upaya tambahan
42	10.1.1.(c)	Indikator Jumlah desa tertinggal.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
43	10.1.1.(d)	Indikator Jumlah Desa Mandiri	Meningkat	Perlu upaya tambahan
44	10.4.1.(b)	Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat	Perlu upaya tambahan
45	11.1.1.(a)	Indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga (skala nasional)	Perlu upaya tambahan

Sumber: Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

4.2.4.4. Telaah RPJMD Daerah Lain

Proses perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan selain memperhatikan berbagai dokumen atau isu yang telah dibahas diatas, juga memperhatikan RPJMD daerah lain di sekitar Kabupaten Katingan. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya.

Identifikasi RPJMD daerah lain dilakukan terhadap kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Katingan, meliputi: Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Telaahan ini disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 4.10.
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
Yang Berdekatan Dengan Kabupaten Katingan

No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Visi: “Kabupaten Melawi Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” Misi: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan 2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.	1. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat 2. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat	▪ Sektor transportasi dan perhubungan Rencana pembangunan jalan lintas Provinsi yang melewati Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan dan Kecamatan Nangan Pingoh Kabupaten Melawi, akan membuka keteisoliran wilayah-wilayah Selayan Katingan. Untuk itu percepatan pembangunan Jembatan di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah akan mendorong dan mendukung perwujudan rencana ini. Selain itu, masyarakat di kedua daerah khususnya masyarakat Katingan bisa memanfaatkan fasilitas angkutan darat dan transportasi udara melalui Kabupaten Melawi sebagai alternatif baru untuk kebutuhan transportasi serta kebutuhan bahan pangan, sandang dan papan. ▪ Secara geografis, Kabupaten Melawi yang berbatasan dengan wilayah Katingan sama-sama memiliki kawasan hutan yang kaya akan potensi flora dan fauna endemik. Kawasan yang saat ini bersama-sama dikelola kedua daerah adalah Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka. Dengan terbuka akses jalan antar Kabupaten, maka secara bersama-sama kedua daerah bisa mengembangkan potensi wisata berbasis alam pada wilayah konservasi. Selain berdampak secara ekonomis bagi masyarakat sekitar, dengan tetap terpeliharanya daerah hutan ini maka kawasan untuk daerah resapan air tetap terjaga dan mencegah bencana alam akibat banjir dan kerusakan lingkungan.

No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
2	Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021 Misi: 1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal. 2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat. 3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. 4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial. 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 2. Mempertahankan kawasan hutan seluas minimal 30% dari luas Kabupaten Sintang sesuai dengan RTRW daerah.	Terkait dengan komitmen untuk melestarikan kawasan strategis untuk pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus mendukung Kalimantan sebagai pusat paru-paru dunia (<i>Heart of Borneo</i>), Kabupaten Sintang dan Kabupaten Katingan bersama-sama pula dengan Kabupaten Melawi memiliki kawasan konservasi di TN.Bukit Baka Bukit Raya. Dengan terjaganya kelestarian hutan di kawasan ini, diharapkan kedua daerah sama-sama dapat menanggulangi permasalahan lingkungan berupa dampak bencana alam banjir dan terpeliharanya kawasan penyangga resapan air dikedua perbatasan kabupaten. Selain itu, desa-desa konservasi di daerah ini dapat dikembangkan sebagai kawasan desa wisata TN Bukit Baka-Bukit Raya yang terletak di Kecamatan Serawak-Sintang dan Kecamatan Bukit Raya-Katingan.
3	Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Periode	Visi: GUNUNG MAS BERSINAR Tahun 2019. Berdaya Saing, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat	1. Meningkatkan infrastruktur jalan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian dan layanan pemerintahan.	▪ Terkait dengan rencana pemindahan Ibukota Negara RI ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas menjadi wilayah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan pemerintahan dan perumahan baru.

No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
	RPJMD Tahun 2014-2019	Misi: 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat. 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional. 4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan. 5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat. 6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah. 7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam secara serasi, seimbang dan lestari.	2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan lingkungan hidup.	▪ Kedua daerah ini memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan tambang batu bara sebagai sumber energi dan areal ijin untuk perkebunan yang cukup luas dengan produksi yang besar. Dengan mengintegrasikan rencana pembangunan infrastruktur jalan untuk pembangunan jalur kereta api, akan dapat mengatasi permasalahan angkutan transportasi hasil alam sekaligus alternatif angkutan transportasi manusia. Dengan terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan tersebut, maka rencana pembangunan pelabuhan laut di Sei Kaki Kabupaten Katingan sebagai pelabuhan antar pulau di Kalimantan. ▪ Selain itu, pengembangan dan pemanfaatan sumber energi listrik untuk mengalir di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses secara bersama akan dapat mengatasi persoalan pelayanan elektrifikasi pada daerah terpencil. Saat ini sudah dibangun jaringan SUTET yang melintasi kedua wilayah, dengan rencana supply energi listriknya dari Kabupaten Gunung Mas dan Katingan sebagai lokasi gardu induk. Dengan demikian akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Kalteng dengan tidak tergantung dari supply listrik dari Provinsi Kalsel. ▪ Percepatan pembangunan wilayah di Katingan juga perlu disinergikan dengan pembangunan infrastruktur wilayah berbatasan. Salah satunya adalah pembangunan jalan lintas wilayah selatan yaitu Jalan Rabambang – Telok – Tb.Samba. Dengan terbukanya akses ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, dengan menjadikan Tumbang Samba sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Wilayah Utara Katingan.

No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
				Rencana pengembangan pusat kawasan Perfilman Asia yang berlokasi di Kecamatan Pulau Malan berada berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas. Berkembangnya kawasan ini akan memberikan dampak positif tidak saja untuk masyarakat Katingan tetapi juga untuk masyarakat di perbatasan kedua wilayah.
4	Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Visi: Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera Misi: - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak. - Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. - Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya	- Pembangunan jalan dan jembatan baru, baik melalui program kegiatan reguler maupun program kegiatan tahun jamak - Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi	Untuk wilayah selatan, terdapat 2 (dua) Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kotim yang tidak dapat dijangkau jalan darat dari ibukota Kasongan. Untuk menjangkau daerah ini, baik dari Sampit maupun Kasongan hanya bisa dilakukan lewat sungai atau laut. Adanya akses jalan darat yang melewati perbatasan kedua daerah yang berada lintasan Hantipan Kampung Melayu-Bapinang akan mempersingkat waktu tempu menuju Sampit atau sebaliknya. - Sampit merupakan 2 kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi barometer inflasi Kalimantan Tengah. Selain sebagai kota dagang, Sampit memegang peranan penting dalam mendistribusikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Katingan. Kelancaran distribusi dan pasokan dari kota Sampit akan sangat mempengaruhi harga dan ketersediaan bahan pangan dari luar daerah (Pulau Jawa). - Disisi lain, Katingan juga menjadi salah satu pemasok beras terbesar di Kalimantan Tengah, yang salah satu jalur distribusinya melalui Sampit. Keterkaitan antara pengembangan pertanian komoditi beras di Kec. Katingan Kuala dan Mendawai sebagai pemasok beras dan Kotawaringin Timur sebagai distributor akan memberikan dampak bagi pasar produk Katingan.

No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
5	Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah	2013-2018 (sedang menyusun RPJMD periode 2018-2023)	-	
6	Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah	2013-2018 (sedang menyusun RPJMD periode 2018-2023)	-	
7	Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah	2013-2018 (sedang menyusun RPJMD periode 2018-2023)	-	

Sumber : website pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota.

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Katingan

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan untuk periode 2018-2023 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal. Aspek-aspek tersebut telah diwakili oleh analisis terhadap permasalahan pembangunan di Katingan, analisis lingkungan hidup strategis, dinamika isu dan/atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Katingan sebagaimana diuraikan diatas. Hasil telaahan tersebut menghasilkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja.
4. Pengembangan desa.
5. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.
7. Pengarusutamaan gender.
8. Pengembangan potensi pertanian untuk penguatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan.
9. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur.
10. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
11. Pengembangan potensi pariwisata berbasis alam
12. Pelestarian dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya serta nilai kebangsaan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi

Pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahap ketiga. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJPD dan sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023, maka disusun visi pembangunan Kabupaten Katingan 2018-2023. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan 2018-2023, adalah :

**KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT
YANG SEJAHTERA**

Pernyataan Katingan BERMARTABAT memiliki makna:

- BERBUDAYA : masyarakat Katingan memiliki akal budi yang luhur sehingga mampu menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.
- MAJU : Katingan mampu meningkatkan dan mewujudkan capaian pembangunan dengan menyeimbangkan pembangunan fisik maupun non fisik, menyambut tantangan dan peluang untuk bersaing bersama daerah lainnya.
- RELIGIUS : masyarakat Katingan taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta penuh toleransi dan hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lain.
- TERINTEGRASI : pembangunan dilakukan dengan melihat seluruh aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama membangun Katingan kedepan.
- BEKESINAMBUNGAN : pembangunan dilaksanakan dengan berpijak pada capaian pembangunan saat ini dan bergerak maju dengan mengerahkan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- AMAN : Kabupaten Katingan selalu dalam kondisi yang kondusif dan aman.
- TERBUKA : Katingan memiliki akses transportasi, komunikasi dan informasi yang baik dan lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Sejahtera adalah : pembangunan dilaksanakan secara inklusif yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing didukung oleh kondisi wilayah yang aman dan tenteram.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Katingan, sebagai berikut:

- | |
|---|
| 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum. |
| 2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan. |
| 3. Memantapkan pembangunan perdesaan. |
| 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender. |
| 5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi. |
| 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. |
| 7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya. |

Makna dari masing-masing misi dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1 : *Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum.*
- Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan dilaksanakan dengan prinsip bersih, berwibawa dan inovatif. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk berkinerja, profesional, menerapkan *good governance* serta meningkatkan pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya sebatas rutinis, namun didorong untuk selalu melakukan terobosan baru atau inovasi yang mengarah ke peningkatan kreatifitas dan semangat kerja, yang pada gilirannya akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Dalam melaksanakan semua itu sinergitas kinerja dan akuntabilitas menjadi hal yang utama, serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, baik dalam pengelolaan pendapatan daerah maupun belanja yang didukung dengan upaya nyata penegakan dan kepatuhan terhadap hukum, baik itu oleh aparaturnya maupun masyarakat Katingan umumnya.

2. Misi 2 : *Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan.*

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memberdayakan potensi unggulan lokal. Sektor pertanian, sebagai penggerak perekonomian utama di Katingan masih menjadi primadona pada periode pembangunan jangka menengah ini. Namun pada periode ini, hasil-hasil atau produk pertanian diarahkan untuk lebih bernilai ekonomi tinggi dan menjadi input bagi sektor industri. Lebih lanjut, pengembangan pertanian diharapkan menunjang ketahanan pangan daerah. Posisi strategis Katingan diharapkan dapat menjadi penopang pangan bagi daerah-daerah sekitarnya.

Upaya peningkatan perekonomian daerah juga ditempuh dengan membuka peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan pihak investor, namun juga melibatkan masyarakat setempat. Berbagai peluang investasi di Katingan ditawarkan ke investor dengan dukungan kebijakan dan pelayanan perijinan yang profesional.

3. Misi 3 : *Memantapkan pembangunan perdesaan.*

Pembangunan desa dan daerah perdesaan menjadi salah satu agenda dalam pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023. Desa yang memiliki berbagai potensi namun seringkali belum terbangun dengan baik, membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan. Pembinaan dan pemberdayaan tidak hanya terhadap aparatur desa, namun juga terhadap masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan ekonomi. Selain itu, desa perlu diberikan pelayanan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Kedepan, diharapkan masyarakat desa dapat lebih berdaya dan memiliki kemampuan untuk berdikari.

4. Misi 4 : *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender.*

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan unggul adalah keharusan dalam meraih kemajuan. Untuk menghadapi tantangan global dan dalam mengupayakan pembangunan daerah yang berdaya saing, maka dibutuhkan penyiapan SDM. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang akan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah keharusan. Hal ini dimaksudkan agar secara bertahap, SDM

Kabupaten Katingan dapat memiliki kualitas yang unggul dan mampu bersaing dengan daerah sekitarnya serta diharapkan mampu keluar dari garis kemiskinan. Lebih lanjut, SDM yang ada dapat memberikan kontribusi aktif dan positif bagi pembangunan Katingan.

5. Misi 5 : *Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi.*

Pembangunan Kabupaten Katingan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar, antara lain jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi. Dengan pelayanan yang semakin baik dan menjangkau seluruh wilayah, diharapkan membuka keterisolasian, mendorong aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

6. Misi 6 : *Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.*

Kekayaan sumber daya alam dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan posisi strategis Kabupaten Katingan dalam konstelasi Kalimantan Tengah dan dengan mempertimbangkan kondisi lahan gambut yang tersebar di wilayah ini, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Katingan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian dalam arti luas, industri, konstruksi, pariwisata dan sebagainya, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

7. Misi 7: *Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.*

Kabupaten Katingan merupakan wilayah yang menjunjung nilai budaya falsafah Huma Betang dan Penyang Hinje Simpei. Masyarakat hidup dengan semangat persatuan dan kesatuan, serta saling menghormati keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Katingan, akan terus berupaya melestarikan adat istiadat maupun budaya masyarakat Dayak yang merupakan ciri khas Kabupaten Katingan dengan memupuk semangat gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat di Wilayah Kabupaten Katingan.

5.2. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Guna menjabarkan misi pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan didetailkan lagi ke sasaran agar memperjelas apa yang akan dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran masing-masing misi pembangunan Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut:

MISI 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 1, yaitu : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- c. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan
- d. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
- e. Meningkatnya penegakan hukum.

MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 2, yaitu : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan
- b. Meningkatnya ketahanan pangan
- c. Meningkatnya daya saing dan investasi daerah.
- d. Meningkatnya sektor UMK
- e. Meningkatnya daya saing Koperasi

MISI 3 : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 3, yaitu : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sasaran dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya pembangunan perdesaan
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 4, yaitu :

1. Meningkatnya daya saing masyarakat

Sasaran dari tujuan tersebut, meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- c. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran

2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya pengarusutamaan gender.

MISI 5 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 5, yaitu : Meningkatnya konektivitas antar wilayah. Sasaran dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga
- b. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak
- c. Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi

MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 6, yaitu: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Menurunnya pencemaran lingkungan
- b. Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam

MISI 7 : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 7, yaitu : a. Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat.
- b. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
VISI : KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA											
Misi I : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif Serta Mewujudkan Supremasi Hukum											
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel			Indeks RB	n/a					BB	BB
		1.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Indeks RB	n/a	C	CC	B	BB	BB	BB
		1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP (predikat)	CC	CC	B	BB	BB	A	A
		1.3	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD (predikat)	WDP (2017)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.4	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	74,52 (Baik) (2016)	76,88 /(B)	78,09 /(B)	79,32 /(B)	80,57 /(B)	81,83 /(A)	81,83 /(A)
		1.5	Meningkatnya penegakan hukum	Persentase penegakan perda (%)	100	100	100	100	100	100	100
Misi II : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Kemandirian Pangan											
2	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan			Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,56					6,96	6,96
		2.1	Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	- PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rp.)	1.822,9	1915,0	2006,9	2128,8	2360,7	2492,6	2492,6
				- PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rp.)	1.276,6	1295,4	1348,9	1402,4	1465,9	1509,5	1569,0
		2.2	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	84,40 (2018)	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
		2.3	Meningkatnya daya saing dan investasi daerah	Laju Investasi (PMA dan PMDN) (%)	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5
		2.4	Meningkatnya Sektor UMK	- Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (%)	-	1,99	1,20	1,21	1,22	1,23	1,23
				- Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba (unit)	1.502	1.532	1.562	1.592	1.622	1.652	1.652
		2.5	Meningkatnya daya saing Koperasi	Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh laba) (%)	40	42	44	46	48	50	50
Misi III: Memantapkan Pembangunan Perdesaan											
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan			Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65 (2018)					35	35
		3.1	Meningkatnya pembangunan perdesaan	- Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65 (2018)	59	53	47	41	35	35
				- Jumlah Desa Berkembang (desa)	12 (2018)	14	16	18	20	22	22
		3.2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif. (unit)	140 (2018)	143	146	149	152	154	154
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender											
4	Meningkatnya daya saing masyarakat			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	67,56					70,75	70,75
		4.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,64	8,85	8,95	9,06	9,17	9,28	9,28
				- Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,2	12,65	12,89	13,12	13,36	13,61	13,61
		4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas	Angka Harapan Hidup (tahun)	65,53	66,19	66,52	66,85	67,18	67,52	67,86

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
			pelayanan kesehatan yang berkualitas								
		4.3	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	- Persentase penduduk miskin (%)	5,78	5,68	5,63	5,58	5,53	5,48	5,48
				- Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat penanganan (%)	71,89	73,21	75,87	79,02	82,67	86,64	86,64
				- Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,81	3,78	3,72	3,66	3,60	3,54	3,54
5	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84,78 (2015)					86,03	86,03
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	60,79 (2015)					65,19	65,19
		5.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84,78 (2015)	85,41	85,56	85,72	85,88	86,03	86,03
				- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	60,79 (2015)	62,99	63,54	64,09	64,64	65,19	65,19
Misi V: Peningkatan Infrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih, dan Komunikasi											
6	Meningkatnya konektivitas antar wilayah			Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%)	76,92					92,3	92,3
		6.1	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga	- Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	33,42	34,21	36,84	38,72	39,83	40,34	40,34
				- Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	54,55	55,84	60,26	64,56	68,75	72,84	72,84
				- Persentase dermaga dalam kondisi baik (%)	69,77	75,00	72,34	84,78	89,36	93,75	93,75
		6.2	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak	- Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak (%)	36 (2018)	37,7	40,6	46,5	52,5	58,4	58,4
				- Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	31	36,52	37,62	38,62	41,46	44,33	44,33

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
		6.3	Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi	Persentase desa yang blankspot (%)	50,31	49,07	46,58	45,34	43,48	42,24	42,24
Misi VI: Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkesinambungan											
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75					76,85	76,85
		7.1	Menurunnya pencemaran lingkungan	- Indeks kualitas air	50	50	52	52	55	55	55
				- Indeks kualitas udara	92	92	92	92	92	92	92
				- Indeks tutupan lahan dan hutan	75,1	75,1	75,5	76,8	76,9	77	77
		7.2	Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (kunjungan)	211 (2018)	241	271	301	331	361	361
				Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (kunjungan)	32.405 (2018)	34.046	34.897	35.769	36.663	37.580	37.580
Misi VII: Membangun Semangat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Gotong Royong Serta Harmonisasi Antar Lapisan Masyarakat Dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat, Dan Sosial Budaya											
8	Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)			Jumlah kasus konflik SARA (kasus)	0					0	0
		8.1	Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	Angka kriminal (kasus)	90	80	70	60	50	40	40
		8.2	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100

5.3. Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan terpilih untuk periode 2018-2023 memiliki beberapa program unggulan yang disampaikan pada saat kampanye. Program unggulan akan diwujudkan dalam masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Program-program tersebut secara teknokratik, partisipatif dan *bottom up* dan *top down* akan distrukturkan dalam bab-bab RPJMD sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Tabel 5.2
Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Katingan
Tahun 2018-2023

MISI/PROGRAM UNGGULAN
MISI I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM
Program Unggulan:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Peningkatan disiplin dan kinerja ASN.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ASN.
4. Penataan manajemen dan peningkatan dukungan sistem informasi.
5. Peningkatan kapasitas hukum.
6. Peningkatan kualitas produk hukum.
7. Penataan peraturan perundang-undangan.
MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Program Unggulan:
1. Peningkatan produksi pertanian, mutu, dan pemasaran produksi/komoditas serta pengembangan agribisnis
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
3. Peningkatan investasi dan kemudahan pelayanan perizinan
4. Pengembangan industri, kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
MISI III : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
Program Unggulan:
1. Peningkatan kapasitas aparaturn Pemerintah Desa.
2. Peningkatan peran perempuan di pedesaan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER
Program Unggulan:
1. Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pendidikan Sembilan Tahun.
3. Peningkatan manajemen pendidikan.

MISI/PROGRAM UNGGULAN
4. Peningkatan dan peran serta masyarakat.
5. Pendidikan Non Formal.
6. Pendidikan Luar Biasa.
7. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
9. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
10. Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
11. Upaya kesehatan masyarakat.
12. Perbaikan gizi masyarakat.
13. Pengembangan lingkungan sehat.
14. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya.
15. Peningkatan pelayanan Anak Balita.
16. Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak.
17. Obat dan perbekalan kesehatan.
18. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
20. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
21. Pencegahan, penemuan dan penanganan HIV AIDS.
22. Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
23. Keluarga Berencana (KB).
24. Kesehatan reproduksi.
25. Penguatan kelembagaan pengarusutaaan gender dan anak.
26. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
27. Penanggulangan kemiskinan daerah
28. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
MISI V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI
Program Unggulan:
1. Pembangunan jalan dan jembatan.
2. Pemberdayaan jasa konstruksi.
3. Perencanaan tata ruang.
4. Pengendalian banjir.
5. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
6. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
7. Pembangunan infrastruktur Perdesaan.
8. Peningkatan dan pemerataan sumber daya energi.
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
10. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
11. Peningkatan pelayan teknologi informasi.
12. Peningkatan manajemen sumber daya yang terintegrasi.
13. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi.
MISI VI : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN
Program Unggulan:
1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

MISI/PROGRAM UNGGULAN
5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan.
6. Pengendalian kebakaran hutan.
7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
8. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
9. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan limbah B3.
10. Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
MISI VII : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA
Program Unggulan:
1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
2. Pengembangan promosi dan informasi kebudayaan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.
4. Peningkatan pelaku dan kelembagaan kebudayaan.
5. Peningkatan peran serta kepemudaan
6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
7. Pengembangan wawasan kebangsaan.
8. Penguatan hubungan kelembagaan masyarakat.
9. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ibadah.
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

5.4. Keselarasaan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Katingan, RPJMN Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN

5.4.1. Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025

Visi dan misi jangka menengah merupakan penjabaran lima tahunan dalam rangka mencapai target yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang. Misi yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran misi dan arah pembangunan jangka panjang.

Visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Katingan adalah :

“Kabupaten Katingan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025, yaitu:

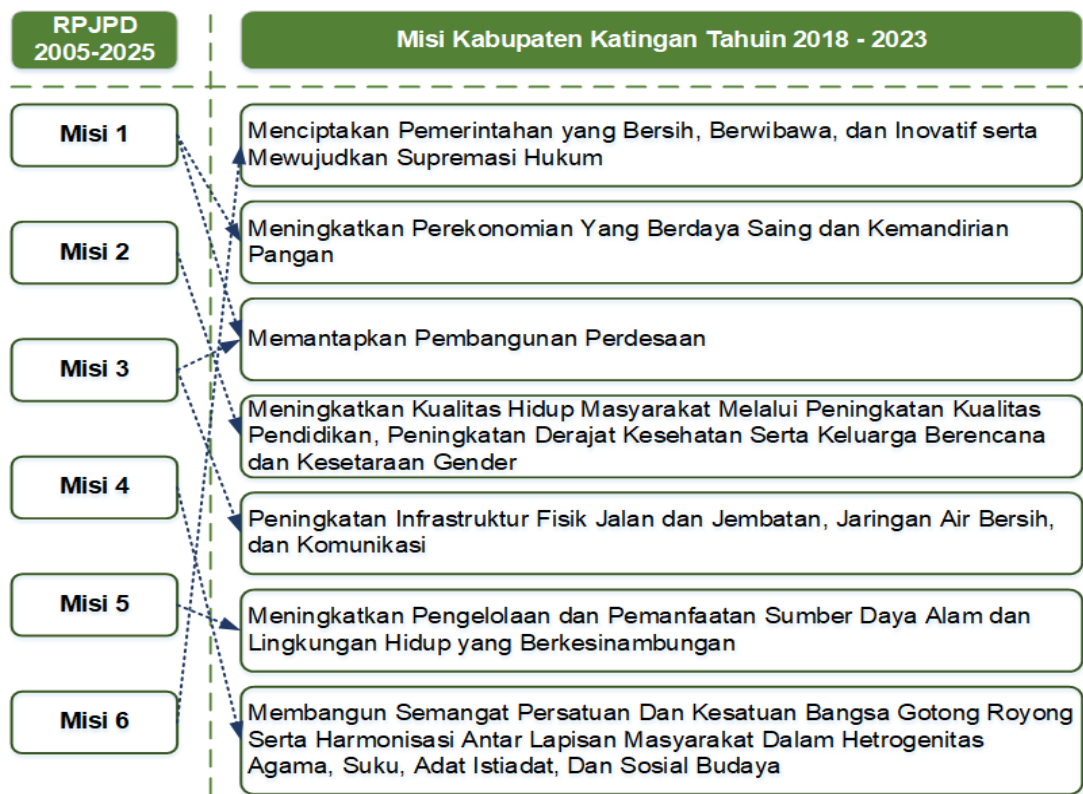
1. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat. Pembangunan Sumber Daya Manusia disamping meningkatkan kompetensi (*knowledge, skill, attitude*) juga meningkatkan derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan kualitas SDM sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan permukiman, listrik dan air bersih, penerbangan perintis (baik untuk pertahanan/keamanan dan umum/busines), akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Katingan.
4. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasuk kemitraan sosial dan kesetia-kawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui Penegakkan Hukum, Keamanan dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Hubungan antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.1 Keselarasan Misi RPJMN Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025



5.4.2. Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Visi pembangunan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 yakni : **“Katingan *“BERMARTABAT” Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera (Berbudaya, Maju, Religius, Terintegrasi, Berkesinambungan, Aman dan Terbuka)*”**, dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, menggerakkan perekonomian yang berdaya saing dan mandiri pangan, pembangunan perdesaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan infrastruktur, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Visi Kabupaten Katingan ini sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai pada tahun 2016-2021, yaitu **“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**. Visi menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan visi Provinsi Kalimantan Tengah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah. Katingan memiliki visi untuk menggerakkan perekonomian yang berdaya saing dan mandiri pangan sejalan dengan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta visi pengelolaan pendapatan daerah. Visi pembangunan perdesaan sejalan dengan visi Kalimantan Tengah untuk pengelolaan sumber daya air, pesisir dan

pantai yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Visi Katingan mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sudah sejalan dengan visi peningkatan pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Visi peningkatan infrastruktur yang tercantum dalam visi Kabupaten Katingan juga sudah sejalan dengan visi Kalimantan Tengah yang memantapkan tata ruang wilayah provinsi dan visi pengelolaan infrastruktur. Selanjutnya, visi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sejalan dengan visi pemerintah provinsi untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam serta pariwisata daerah. Terakhir, visi Katingan untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa sejalan dengan keinginan pemerintah provinsi untuk mengembangkan budaya sebagai bagian dari destinasi pariwisata daerah.

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang telah dikaji keselarasannya adalah sebagai berikut :

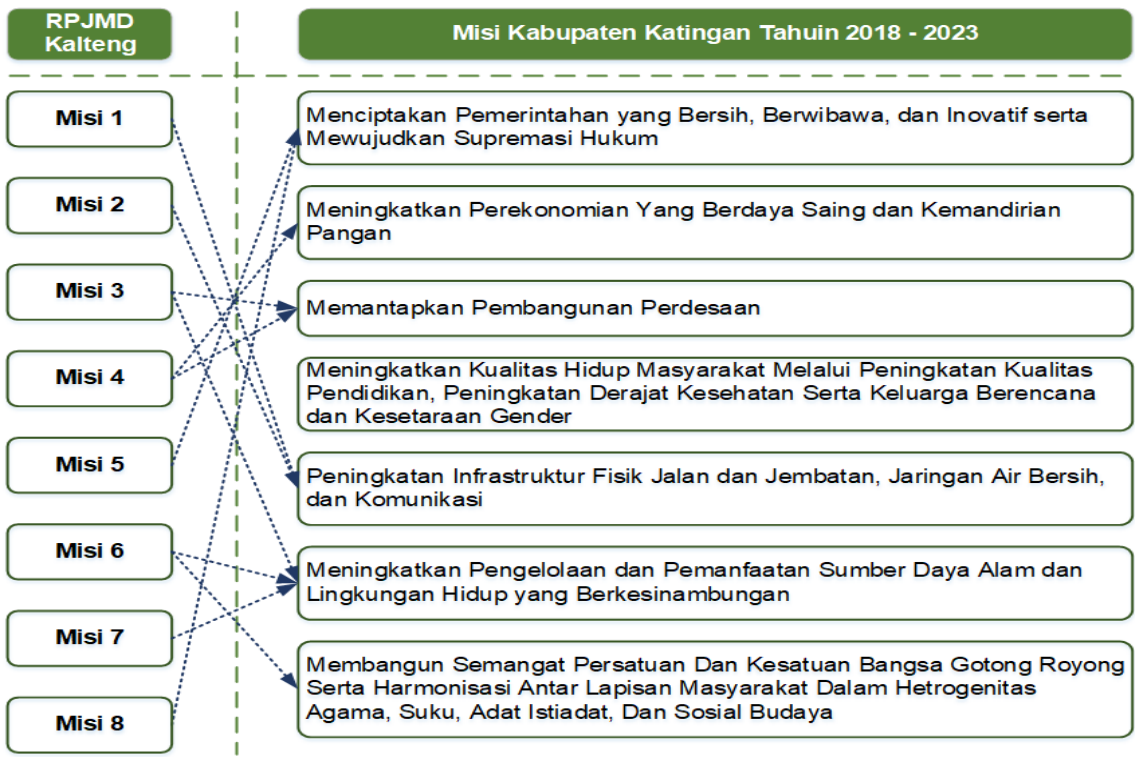
- 1. Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- 2. Misi 2: Pengelolaan Infrastruktur.
- 3. Misi 3: Pengelolaan Sumber Data Air, Pesisir, dan Pantai.
- 4. Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
- 5. Misi 5: Pemantapan tata Kelola Pemerintah Daerah.
- 6. Misi 6: Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
- 7. Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam.
- 8. Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berikut korelasi antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Katingan dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah :

MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 5 : Peningkatan Infrastruktur Fisik, Jalan dan Jembatan, JaringanAir Bersih dan Komunikasi.
Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur	Misi 5 : Peningkatan Infrastruktur Fisik, Jalan dan Jembatan, JaringanAir Bersih dan Komunikasi.
Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Pedesaan Misi 7 :

MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
	Membangun Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Gotong Royong serta Harmonisasi antar Lapisan Masyarakat dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat dan Sosial Budaya.
Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Kemandirian Pangan Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Pedesaan
Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif serta Mewujudkan Supremasi Hukum
Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan. Misi 7 : Membangun Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Gotong Royong serta Harmonisasi antar Lapisan Masyarakat dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat dan Sosial Budaya.
Misi 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan.
Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif serta Mewujudkan Supremasi Hukum

Gambar 5.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021



5.4.3. Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD 2015-2019

Visi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah “*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*”. Di dalam visi tersebut mengedepankan upaya meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah pembangunan jiwa bangsa untuk menegaskan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, menegaskan kembali fungsi publik negara, menggelorakan kembali harapan ditengah krisis sosial yang mendalam, menemukan jalan bagi masa depan bangsa, serta meneguhkan kembali jiwa gotong royong sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945. Bila ditelaah dan dibandingkan, maka visi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dan RPJM sudah mempunyai visi yang sama, khususnya untuk memberdayakan sumberdaya manusia dan daya saing, serta meningkatkan kemandirian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Misi pertama RPJMD Katingan “Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum” sejalan dengan misi pertama RPJMN “Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan”. Misi kedua RPJMD Katingan “Meningkatkan perekonomian yang

berdaya saing dan kemandirian pangan” telah selaras dengan misi kelima RPJMN “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”. Misi ketiga RPJMD Katingan “Memantapkan pembangunan perdesaan” telah selaras dengan misi pertama dan kedua RPJMN “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum”. Misi keempat RPJMD Katingan “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender” telah selaras dengan misi keempat RPJMN “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”. Misi kelima RPJMD Katingan “Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi” sudah selaras dengan misi pertama RPJMN. Misi keenam RPJMD Katingan “Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan” selaras dengan misi pertama dan misi keenam RPJMN “Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional “. Misi ketujuh RPJMD Katingan “Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya” selaras dengan misi ketujuh RPJMN “Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan”.

Berikut grafis korelasi antara RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Katingan sebagaimana gambar 5.3 :

Gambar 5.3 Keselarasan Misi RPJMN Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, strategi dijabarkan lagi menjadi arah kebijakan yang memberikan gambaran upaya lebih rinci bagi pencapaian sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Katingan selama periode 2018-2023 ditempuh dengan upaya berikut ini:

MISI 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM.

Strategi 1 : Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi*
2. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja*
3. *Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan*
4. *Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat*

Memperhatikan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, sasaran perubahan yang ingin dicapai sampai akhir tahun 2023 melalui strategi ini adalah :

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pememerintah Kabupaten Katingan
- Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemkab Katingan yang diukur dari semakin meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, mempertahankan opini WTP dari BPK, meningkatnya pencapaian dan penerapan SPM, dan optimalisasi penerapan E-Gov/PTSP.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, maka arah kebijakan daerah yang digunakan pada Strategi 1 ini, yaitu:

1. *Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
2. *Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.*
3. *Peningkatan kualitas pelaporan keuangan*
4. *Peningkatan inovasi pelayanan publik.*

Strategi 2 : Meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah.

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran : *Meningkatnya penegakan hukum.*

Salah satu isu strategis dalam mendukung terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah penegakan hukum dan keharmonisan dalam masyarakat. Adapun kondisi yang diharapkan dapat dicapai melalui penerapan strategi ini adalah semakin mantapnya peran serta masyarakat Katingan dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pengembangan wawasan kebangsaan dan semakin patuhnya masyarakat dan pelaku usaha terhadap penegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Diharapkan pula, strategi ini dapat mendukung pencapaian Misi ke-7, yakni membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya melalui penerapan falsafah Huma Betang dan Penyang Hinje Simpei, khususnya di Kabupaten Katingan

Adapun arah kebijakan yang akan digunakan untuk mewujudkan Strategi 2 ini adalah : *Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum dan HAM.*

MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.

Strategi 3 : Memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian.

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan*
2. *Meningkatnya ketahanan pangan.*

Sektor pertanian adalah sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan banyak memiliki usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam periode 2018-2023 akan lebih fokus mengembangkan sektor ini sebagai sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Untuk itu dalam lima tahun kedepan selain penguatan ketahanan pangan daerah, pengembangan komoditi unggulan sektor pertanian akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Adapun komoditi pertanian yang akan dikembangkan adalah padi, durian, pisang

dan tanaman cabai. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Katingan, sekaligus untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak.

Adapun tujuan lain dari penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dimaksudkan mendukung program pembangunan ekonomi hijau di Katingan, termasuk menjaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian (padi, buah-buahan dan hortikultura) ke perkebunan sawit. Untuk itu, kebijakan daerah terhadap pengembangan sektor pertanian akan diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan dalam pengembangan zona ekonomi, dimana Kabupaten Katingan masuk dalam zona 2 sebagai wilayah yang dikembangkan untuk potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Agar strategi pengembangan empat komoditi tersebut berhasil, perlu diperkuat pula dengan kebijakan penguatan rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan hilirisasi atau penambahan rantai nilai produk dari sektor pertanian dan perikanan yang menjadi komoditi unggulan masyarakat. Untuk itu, kebijakan ini akan diarahkan pula pada pembentukan pasar dan penyerapan produk langsung maupun olahannya. Praktek dari penerapan kebijakan yang langsung dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kedepan adalah kewajiban pembelian beras petani lokal oleh ASN Kabupaten Katingan. Selain itu perlu pula kebijakan penguatan untuk pengembangan sektor perdagangan dan industri pengolahan, yakni pengolahan sederhana, packaging, dan branding terhadap komoditi dan produk olahan khas Kabupaten Katingan.

Memperhatikan strategi tersebut, maka rumusan arah kebijakan yang akan diterapkan pada Strategi 3 ini, yaitu:

1. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.
2. Penguatan rantai nilai komoditi pertanian.
3. Peningkatan kualitas irigasi
4. Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau.

Strategi 4 : Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya daya saing dan investasi daerah*

2. *Meningkatnya sektor UMK*
3. *Meningkatnya daya saing Koperasi*

Untuk mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan Strategi 4 di atas, perlu adanya ini upaya dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat secara berkelanjutan dinikmati oleh masyarakat dan generasi muda yang akan datang. Selain itu, perlu pula penguatan regulasi untuk mempermudah proses pelayanan perizinan sebagai salah daya tarik investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesempatan kerja melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkan upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan penyiapan kompetensi dan produktivitas bagi tenaga kerja lokal, kelembagaan keuangan mikro, UMKM, dan koperasi. Pemerintah daerah Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan berkomitmen untuk penguatan industri daerah, mengembangkan sentra pertumbuhan baru, dan pengembangan produk lokal berdasarkan wilayah atau yang dikenal dengan istilah *one village one product* (OVOP) dalam upaya memperkuat terbentuknya rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk pula pengembangan potensi pada sektor pariwisata.

Adapun rumusan arah kebijakan pada Strategi 4 ini, yaitu:

1. Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara.
2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan bagi koperasi.

MISI 3 : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.

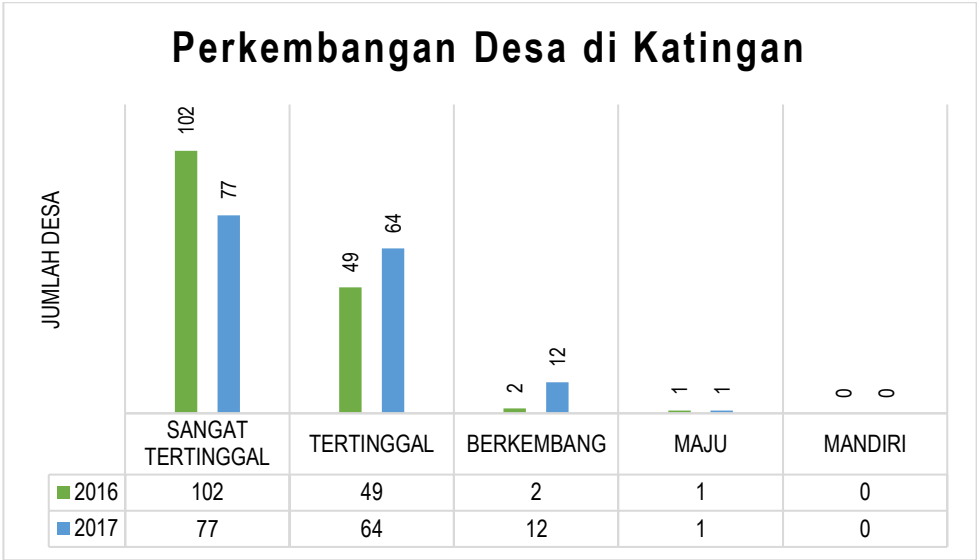
Strategi 5 : Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran :

1. *Meningkatnya pembangunan perdesaan.*
2. *Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.*

Sampai dengan akhir tahun 2017, berdasarkan penilaian Pemerintah Pusat sebagaimana tergambar dari Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kabupaten Katingan adalah salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak ada satupun desanya mencapai status desa mandiri dan hanya 1 desa yang mampu mencapai status desa maju, yakni Desa Hampalit di Kecamatan Katingan Hilir. Selebihnya berstatus desa berkembang (12 desa) dan sisanya kebanyakan status desa adalah desa

tertinggal dan sangat tertinggal dengan total 141 desa, terbanyak ada di Kecamatan Katingan Hulu dan Marikit. Merujuk pada hasil penilaian tersebut, dapat dipastikan target pengurangan desa tertinggal sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan target TPB/SDGs 2017 di Kabupaten Katingan tidak tercapai. Berikut data selengkapnya perkembangan desa di Kabupaten Katingan tahun 2016 dan 2017 :



Sumber : IDM Kabupaten Katingan 2016-2017, DPMDes Kab. Katingan, 2018

Memperhatikan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam perencanaan 5 tahun kedepan bertekad akan mengurangi jumlah desa tertinggal, melalui upaya-upaya untuk meningkat kemampuan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi di desa.

Selain itu perlu mendapat perhatian memberikan lompatan terhadap desa sangat tertinggal untuk menuju desa berkembang, sehingga tidak menjadi beban baru untuk penurunan target desa tertinggal.

Untuk prioritas dan penguatan dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa adalah desa-desa yang terkait prioritas pengembangan kawasan dan wilayah ekonomi, seperti sekitar kawasan perdesaan pertanian, kawasan pariwisata, dan desa sekitar kawasan konservasi hutan. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaannya akan diarahkan pada pengembangan inovasi desa baik yang baru maupun yang sudah berjalan, pengembangan komoditi lokal desa yang potensial, desa wisata sekitar Kawasan TN Sebangau dan desa budaya (di Dusun Betung dan Tumbang Manggu). Untuk mendukung upaya tersebut, setiap instansi terkait akan dimaksimalkan perencanaan kegiatannya, seperti :

- Pelatihan bahasa Inggris dan pelaku pariwisata

- Pelatihan membina pemukiman kawasan perdesaan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
- Menambah cakupan pelayanan komunikasi dan informasi pada desa-desa yang *blank spot* guna mendukung pengembangan ekonomi desa, teknologi, informasi dan pariwisata (seperti Desa Tumbang Kalemei) melalui jaringan internet dan penggunaan medsos aktif sampai ke desa-desa di pelosok Katingan.
- Pengembangan komoditi lokal yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan pengembangan BUMDes secara bersamaan,
- Penguatan teknologi tepat guna dan inovasi desa untuk mendukung pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) dan rantai nilai tambah dari produk pangan yang potensial dikembangkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pencapaian Strategi 5 dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes.

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.

Strategi 6 : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan.*
2. *Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.*
3. *Menurunnya kemiskinan dan pengangguran*

Strategi ini sangat mendukung upaya peningkatan angka IPM Kabupaten Katingan dari kategori sedang meningkat menjadi kategori di akhir periode RPJMD 2018-2023, dan upaya penurunan angka kemiskinan dari 5,78 di tahun 2017 menuju 5,53 pada tahun 2023. Selain itu strategi ini mendorong untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka dari 3,81 di tahun 2017 menuju 3,54 pada tahun 2023.

Prioritas pembangunan di bidang pendidikan dengan upaya mengurangi angka putus sekolah, sehingga tercapai Angka Harapan Lama Sekolah menuju 13,61 pada akhir periode RPJMD. Selain itu upaya mendorong peningkatan

partisipasi pendidikan dan melanjutkan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan Rata-rata lama Sekolah menuju 9,28 pada tahun 2023.

Untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, maka akan dilakukan penempatan tenaga kesehatan di desa sangat terpencil dan terpencil, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kehamilan, memberikan penyuluhan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, mendorong asupan gizi selama kehamilan, meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh bayi, meningkatkan cakupan imunisasi balita, meningkatkan kesadaran pemberian asi eksklusif pada bayi 0-6 bulan serta pemenuhan gizi bayi optimal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, meningkatkan pengawasan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas, mengupayakan akreditasi puskesmas untuk mendukung kualitas layanan kesehatan.

Hal ini akan dilakukan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat baik formal maupun non formal, meningkatkan ketrampilan masyarakat agar mampu untuk memanfaatkan peluang dan sumber daya alam yang ada disekitarnya, memberikan bantuan sosial berupa layanan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, pemberian bantuan jaminan hidup berupa Program Keluarga Harapan, pemberian bantuan lainnya sesuai kebutuhan.

Arah kebijakan pada strategi 6, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
4. Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang kesehatan.
5. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan sarana dan prasarana kesehatan.
6. Peningkatan preventif dan promosi kesehatan.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis.
8. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu.
9. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Strategi 7 : Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran : Meningkatnya pengarusutamaan gender.

Peranan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Katingan masih perlu menjadi perhatian utama dan ini dilakukan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Target yang ingin dicapai melalui strategi ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan

Gender dari kondisi awal 84,78 di tahun 2015 menuju 86,03 pada tahun 2023 dan angka Indeks Pemberdayaan Gender dari kondisi awal 60,79 pada tahun 2015 menuju 65,19 pada tahun 2023.

Arah kebijakan pada strategi 7, yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

MISI 5 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI.

Strategi 8 : Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga*
2. *Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak*
3. *Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi*

Guna mendukung pencapaian Misi 2, Misi 3, Misi 4 dan Misi 7, perlu ada arahan umum terhadap pengembangan infrastruktur daerah yang menjadi prioritas kepala daerah. Selain memperkuat dan memperjelas arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, secara kewilayahan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus transportasi pada daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dan perlu menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung.

Prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya adalah membangun dan melanjutkan rencana pengembangan jalan darat di wilayah utara dan wilayah selatan sampai pada rencana pembangunan dermaga pelabuhan laut Bajungkal dan dermaga Kereng Pakahi. Prioritas ini diharapkan mendukung pengembangan sektor pertanian pada sentra produksi padi dan palawija di Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai. Selain itu, dampaknya juga akan mendorong kemajuan sektor pariwisata yang melewati kawasan sekitar TN Sebangau, seperti kawasan Punggu Alas yang saat ini terkenal dengan perlindungan orang utan liar, selain wisata budaya dan wisata alam. Untuk penjelasan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan secara khusus akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Selain fokus pada pengembangan infrastruktur kewilayahan, pengembangan sanitasi Kabupaten Katingan juga menjadi perhatian khusus, mencakup pengolahan air limbah pemukiman, sistem pengelolaan persampahan, cakupan layanan air bersih dan layanan drainase, layanan komunikasi dan informasi, serta penataan kawasan permukiman. Untuk percepatan pembangunan sanitasi permukiman, secara khusus kebijakan dan perencanaannya kedepan hingga tahun 2023 disusun melalui Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai acuan

pencapaian Universal Acces di tahun 2019 dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tahun 2030 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Demikian pula untuk rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk didalamnya rencana penanganan permukiman pada kawasan kumuh di Kabupaten Katingan akan diperkuat dengan konsep yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Katingan. Kesemua rencana tersebut, tentunya akan disesuaikan dan diintegrasikan lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039.

Memperhatikan prioritas pembangunan dan arah pengembangan wilayah tersebut, maka rumusan Arah Kebijakan pada Strategi 8 ini adalah :

1. *Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten.*
2. *Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.*
3. *Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.*
4. *Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum.*
5. *Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.*
6. *Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan*
7. *Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika.*

MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN.

Strategi 9 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Menurunnya pencemaran lingkungan*
2. *Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam.*

Isu pengelolaan lingkungan yang berdampak secara global yakni emisi gas rumah kaca dan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan saat ini. Terkait isu ini, Pemerintah Kabupaten Katingan sangat mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan menetapkan visi lingkungan “Konservasi Katingan untuk Borneo” dan “Kasongan Kota Hijau”. Keseriusan pemerintah daerah terhadap perlindungan alam juga diwujudkan dengan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka di wilayah utara Katingan dan Kawasan Taman Nasional Sebagai di wilayah selatan yang berbatas juga dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Selain itu, di Kabupaten Katingan

juga dibentuk Kebun Raya Katingan sebagai pusat konservasi, pelestarian dan pengembangan tanaman buah-buahan tropis khususnya buah-buahan lokal yang ada di Kalimantan.

Selain menjadi kawasan konservasi yang dilindungi, agar kebijakan ini dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya dan pembangunan di Kabupaten Katingan, maka strategi ini diarahkan pula pengembangan wisata berbasis alam. Lokasi yang paling potensial dikembangkan dalam lima tahun kedepan adalah Kawasan Bukit Batu dan Danau Punggualas yang ada di Desa Keruing.

Selain itu perlu pula dilakukan penguatan pada desa-desa lainnya, terutama desa konservasi yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya dan TN Sebangau. Untuk itu kedepannya, konsep pengembangan jasa lingkungan akan lebih diperkuat pada wilayah ini agar memberi manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Katingan secara umum dan khususnya masyarakat sekitar kawasan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, NGO bidang lingkungan (WWF), BRG, dan instansi teknis lainnya (KPH) sangatlah diperlukan guna mendukung strategi ini.

Potensi lain yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan sudah memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pusat adalah rencana penyiapan lokasi untuk dijadikan kawasan strategis pengembangan Pusat Perfilman Asia Tenggara yang berada di Kecamatan Pulau Malan. Rencana strategi pengembangan kawasan ini tentunya masih mengacu pada konsep pembangunan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini, wewenangnya terbatas pada penyediaan lahan. Meski demikian efek domino dari terlaksananya proyek ini adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Katingan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait pengembangan sektor pariwisata, Kawasan Punggualas menjadi salah satu objek wisata minat khusus berbasis alam yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Wilayah ini secara khusus banyak diminati oleh wisatawan mancanegara dan lokal, sehingga berpotensi menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, dukungan pembangunan infrastruktur menuju dan pada wilayah ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan, termasuk pula kawasan wisata alam lainnya yang berpotensi dikembangkan dan menarik minat wisata datang berkunjung, sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 430/194.1/KPTS/2016 tentang Penetapan Zona Kreatif dan

Destinasi Pariwisata, Kesenian, Cagar Budaya dan Suku Bangsa di Wilayah Kabupaten Katingan. Penetapan ini sebagai upaya daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kepariwisataan dan cagar budaya daerah yang ada di Kabupaten Katingan sekaligus merupakan amanat dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Guna mewujudkan Strategi 9 ini, maka arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan, yaitu:

1. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3.
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5. Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam.

MISI 7 : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA.

Strategi 10 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran : *Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat.*

Masyarakat Dayak di Kalimantan secara umum dan di Katingan secara khusus, sejak dulu sudah memiliki kearifan lokal yang dapat mempererat konsep persatuan dan kesatuan bangsa serta gotong royong, dan harmonisasi antar lapisan masyarakat yang berbeda-beda adat, budaya, agama, istiadat dan sosial budaya. Falsafah Huma Betang (rumah besar) yang dimiliki masyarakat suku Dayak, lahir untuk menyatukan konsep bebas terpimpin dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna menciptakan keharmonisan dan mencegah perselisihan yang berarti. Menurut Prof. Dr. H. Norsanie Darlan, Guru Besar Universitas Palangkaraya (Kompas.com, 6 Agustus 2012), ada ruang bebas yang merupakan sarana dalam mewujudkan pembangunan masyarakat merujuk pada budaya suku Dayak. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, justru ruang publik yang bebas tersebut diharapkan menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Kearifan lokal seperti ini perlu mendapat perhatian bagi kelestariannya di masa

mendatang. Dengan menafsirkan ruang publik yang bebas dalam tatanan pembangunan masyarakat tersebut akan terjadi kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum. Bahkan, tingginya kekerabatan karena adanya rasa persaudaraan yang tinggi, tidak saling menyalahkan satu sama yang lain. Masyarakat Dayak sungguh memberikan kearifan yang sangat tinggi harganya. Tidak pernah ada perselisihan, yang berarti dalam kehidupan Huma Betang. Saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong tercipta sejak beberapa abad silam dan masih bisa dilihat hingga sekarang. Falsafah huma betang dalam kehidupan masyarakat Kalteng betul-betul hidup bersama dalam suatu suasana harmonis manakala pendatang berpegang menganut budaya "di mana bumi di injak, di situ langit dijunjung". Mencermati kehidupan yang konsisten pada kearifan lokal huma betang itu, tidak keliru manakala budaya yang berkembang dalam masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk di Katingan dipertahankan bagi kelanjutan pembangunan di masa mendatang. Adapun kata "Penyang Hinje Simpei" yang menjadi moto Kabupaten Katingan berasal dari bahasa Sangiang. Berdasarkan penjelasan dari Tengang D. Halip, artinya adalah semangat persatuan dan kesatuan.

Memperhatikan semakin berkurangnya pemahaman dan pengetahuan generasi muda terhadap kearifan lokal dan pelestarian budaya lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan akan menerapkan konsep ini menjadi kebijakan daerah guna membangun dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

Untuk itu fokus pembangunan yang dirumuskan dalam arah kebijakan daerah pada Strategi 10, yaitu:

1. Pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama.

Strategi 11 : Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran : *Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.*

Selain penerapan falsafah dan budaya Dayak dalam pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah juga tetap memprioritaskan terwujudnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal, serta pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala pembangunan. Penyiapan generasi muda perlu menjadi perhatian bersama, disamping bisa tetap melestarikan kearifan budaya Dayak, dengan peningkatan ketrampilan dan kompetensi para pemuda, diharapkan kedepannya dapat bersaing dan berkompetisi dalam segala bidang pembangunan, apalagi menghadapi Pasar Bebas Asia dan global. Pelestarian dan perlindungan terhadap situs budaya,

bangunan, benda, dan kawasan cagar budaya juga menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Katingan kedepannya.

Arah kebijakan pada strategi 11, yaitu:

1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
2. Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM								
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	1.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	1.1.1	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a.	Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	2019-2023
		1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja			b.	Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	2019-2023
		1.3	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan			c.	Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	2019-2023
		1.4	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			d.	Peningkatan inovasi pelayanan publik	2019-2023
		1.5	Meningkatnya penegakan hukum	1.5.1	Meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah.	e.	Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum	2019-2023
MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.								
2	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan	2.1	Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	2.1.1	Menguatkan ekonomi lokal berbasis pertanian	a.	Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.	2019-2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
						b.	Penguatan rantai nilai komoditi pertanian	2019-2023
						c.	Peningkatan kualitas irigasi	2019-2023
		2.2	Meningkatnya ketahanan pangan			d.	Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau	2019-2023
		2.3	Meningkatnya daya saing dan investasi daerah	2.3.1	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat	a.	Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara.	2019-2023
						b.	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	2019-2023
		2.4	Meningkatnya sektor UMK			c.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM	2019-2023
		2.5	Meningkatnya daya saing Koperasi			d.	Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembiayaan bagi koperasi	2019-2023
		MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.						
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan	3.1	Meningkatnya pembangunan perdesaan	3.1.1	Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya	a.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	2019-2022
		3.2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa			b.	Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes	2019-2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.								
4	Meningkatnya daya saing masyarakat	4.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	4.1.1	Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	a.	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	2019-2023
			b.			Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	2019-2023	
		4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas			c.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	2019-2023
						d.	Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang kesehatan	2019-2023
						e.	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan sarana dan prasarana kesehatan	2019-2023
						f.	Peningkatan preventif dan promosi kesehatan	2019-2023
						g.	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis	2019-2023
						4.3	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	h.
		i.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			2019-2023		
5	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	5.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender	5.1.1	Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	a.	Peningkatan kesejahteraan keluarga	2019-2022
						b.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	2019-2022
						c.	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.	2019-2022

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI.								
6	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	6.1	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga	6.1.1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah	a.	Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten	2019-2023
						b.	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	2019-2023
						c.	Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	2019-2023
		6.2	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak			d.	Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum	2019-2023
						e.	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	2019-2023
						f.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	2019-2022
		6.3	Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi			g.	Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	2019-2023
MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN.								
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	7.1	Menurunnya pencemaran lingkungan	7.1.1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	a.	Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3.	2019-2022
						b.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	2019-2022
						c.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2020-2022
						d.	Pengendalian kebakaran hutan.	2019-2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		TAHUN PELAKSANAAN
		7.2	Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam			e.	Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam	2019-2022
MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA								
8	Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)	8.1	Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	8.1.1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman	a.	Pengembangan wawasan kebangsaan.	2019-2022
						b.	Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama	2019-2022
		8.2	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	8.2.1	Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal	a.	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.	2019-2022
						b.	Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan	2019-2022

Sumber: hasil analisis

Gambar 6.1. Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan

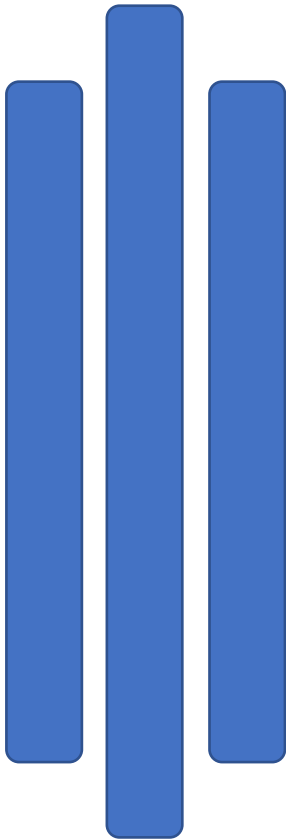


6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan yang paling berdaya ungkit untuk mencapai *outcome* program.

Program pembangunan daerah selain dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, juga dalam rangka mencapai program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Katingan periode 2018-2023. Penjabaran program-program unggulan tersebut diterjemahkan ke dalam program perangkat daerah yang selanjutnya menjadi prioritas dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah. Selain itu, penerapan dari standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang tergambar dalam program perangkat daerah perlu pula diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini berarti penerapan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 harus dimuat pula dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, di perencanaan tahunan akan dimuat dalam RKPD dan dianggarkan di APBD. Adapun program perangkat daerah yang mendukung penerapan jenis pelayanan dasar dan TPB/SDGs telah dikodefikasi akan disajikan dalam Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023



Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Katingan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	MISI 1 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum				43.994.769.649,65		48.922.662.752,85		57.420.225.323,35		58.615.674.008,52		59.578.020.877,56		268.531.352.611,93	
	Tujuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.				43.994.769.649,65		48.922.662.752,85		57.420.225.323,35		58.615.674.008,52		59.578.020.877,56		268.531.352.611,93	
	Sasaran: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi				11.710.297.978,00		17.604.501.931,85		18.734.951.802,34		20.555.861.005,59		20.711.231.233,66		89.316.843.951,45	
	Program:															
1	Program Peningkatan Kapabilitas	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	107.000.000,00	Level 3	73.974.000,00	Level 3	107.000.000,00	Level 4	107.559.668,61	Level 4	108.200.169,42	5%	503.733.838	Inspektorat
2	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang memperoleh pendidikan kedinasan	80%	90%	650.200.000,00	90%	1.426.000.000,00	90%	1.447.358.913,67	90%	1.454.929.393,62	90%	1.463.593.267,93	80%	6.442.081.575	BKPP
3	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan	80%	90%	74.500.000,00	90%	71.800.000,00	90%	322.875.434,78	90%	324.564.250,17	90%	326.496.978,92	80%	1.120.236.664	BKPP
4	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan	80%	90%	663.378.000,00	90%	625.030.000,00	90%	634.391.824,55	90%	637.710.041,30	90%	641.507.503,69	80%	3.202.017.370	BKPP
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,36%	-	-	77,94%	794.816.000,00	78,14%	806.720.913,27	78,33%	2.091.591.936,32	78,53%	2.104.047.035,33	78,53%	5.797.175.885	Dinas Pendidikan
6	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	90%	5.017.200.978,00	92%	4.517.500.000,00	95%	4.585.164.019,99	97%	4.612.467.946,18	100%	4.639.934.462,93	100%	23.372.267.407	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	153.000.000,00	100%	95.920.000,00	100%	77.658.290,00	100%	500.000.000,00	100%	502.977.420,88	100,00%	1.329.555.711	Dinas Pendidikan
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	65%	152.000.000,00	70%	5.399.789.363,85	80%	5.480.668.490,69	90%	5.513.305.004,29	100%	5.546.135.863,17	100%	22.091.898.722	Dinas Kesehatan
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	200.000.000,00	90%	300.000.000,00	90%	304.493.460,10	90%	306.086.127,69	90%	307.908.822,15	90%	1.418.488.410	DisPUPRHub
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	60.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	101.497.820,03	100%	102.028.709,23	100%	102.636.274,05	100%	466.162.803	Disperkimtan
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	200.000.000,00	90%	20.000.000,00	90%	200.000.000,00	90%	201.046.109,56	90%	202.243.307,32	80%	823.289.417	Satpol PP
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	65%	25.042.000,00	70%	25.000.000,00	75%	25.374.455,01	80%	25.507.177,31	85%	25.659.068,51	85%	126.582.701	Bakesbangpol
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	32,43%	32,43%	97.720.000,00	35,14%	100.000.000,00	40,54%	101.497.820,03	40%	102.028.709,23	40%	102.636.274,05	40%	503.882.803	BPBD
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	15%	18%	45.000.000,00	36%	50.000.000,00	49%	50.748.910,02	60%	51.014.354,62	75%	51.318.137,02	25	248.081.402	Dinas Sosial
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	130.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	730.000.000	DP3APPKB
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	85%	100.000.000,00	85%	209.000.000,00	85%	212.130.443,87	85%	213.240.002,29	85%	214.509.812,76	85%	948.880.259	DLH

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.748.910,02	100%	51.014.354,62	100%	51.318.137,02	100%	253.081.402	Disdukcapil
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	75.000.000,00	85%	75.000.000,00	90%	76.123.365,02	95%	76.521.531,92	100%	76.977.205,54	100%	379.622.102	DisPMDes
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	36%	40%	200.000.000,00	48%	228.000.000,00	56%	231.415.029,68	64%	232.625.457,04	72%	234.010.704,83	72%	1.126.051.192	DiskominfoPersan tik
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	62%	260.000.000,00	64%	160.000.000,00	66%	260.000.000,00	68%	260.000.000,00	70%	260.000.000,00	80%	1.200.000.000	DisKopUKMPP
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	62%	40.000.000,00	64%	40.000.000,00	66%	40.599.128,01	68%	40.811.483,69	70%	41.054.509,62	95%	202.465.121	DPM-PTSP
22	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	80.000.000,00	81%	33.000.000,00	82%	33.494.280,61	83%	33.669.474,05	84%	33.869.970,44	80%	214.033.725	Disbudporpora
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	40%	40%	50.000.000,00	45%	80.000.000,00	50%	60.000.000,00	65%	60.000.000,00	70%	60.000.000,00	10 org	310.000.000	Distanpaper
24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	100%	20.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	180.000.000	Distransnaker
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50%	54,05%	186.300.000,00	67,57%	106.500.000,00	81,08%	186.300.000,00	89,19%	186.300.000,00	94,59%	187.409.387,02	95%	852.809.387	Bappelitbang
26	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	84%	100.000.000,00	87%	137.500.000,00	91%	151.250.000,00	96%	166.375.000,00	100%	183.012.500,00	100%	738.137.500	BPKAD
27	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	958.000.000,00	90%	108.000.000,00	90%	109.617.645,64	90%	110.191.005,97	90%	110.847.175,97	80%	1.396.655.828	BKPP
28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	40%	40%	505.000.000,00	45%	142.500.000,00	50%	144.634.393,55	65%	145.390.910,65	70%	146.256.690,52	70%	1.083.781.995	Inspektorat
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	90%	750.000.000,00	90%	450.000.000,00	90%	750.800.000,00	100%	754.727.095,27	100%	751.600.000,00	100%	3.457.127.095	Sekretariat DPRD
30	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	75%	371.807.000,00	75%	1.372.467.000,00	75%	1.393.024.085,67	80%	1.400.310.364,71	85%	1.408.648.991,35	85%	5.946.257.442	Sekretariat Daerah
31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	-	100%	30.000.000,00	100%	30.449.346,01	100%	30.608.612,77	100%	30.790.882,21	100%	121.848.841	Kec. Katingan Kuala
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	45.000.000,00	90%	70.000.000,00	90%	71.048.474,02	90%	71.420.096,46	90%	71.845.391,83	100%	329.313.962	Kec. Kamipang
33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	94%	94%	22.500.000,00	94%	23.000.000,00	94%	27.225.000,00	94%	27.367.401,66	94%	32.942.250,00	94%	133.034.652	Kec. Tasik Payawan
34	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	85%	36.000.000,00	85%	40.000.000,00	85%	24.200.000,00	85%	26.620.000,00	95%	29.282.000,00	100%	156.102.000	Kec. Katingan Hilir

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
35	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	15.000.000,00	100%	123.855.568,00	100%	125.710.701,51	100%	126.368.237,34	100%	127.120.740,20	100%	518.055.247	Kec. Tewang Sangalang Garing
36	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	30.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.599.128,01	100%	40.811.483,69	100%	41.054.509,62	100%	192.465.121	Kec. Pulau Malan
37	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.374.455,01	100%	25.507.177,31	100%	25.659.068,51	100%	126.540.701	Kec. Katingan Tengah
38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.524.237,01	100%	35.710.048,23	100%	35.922.695,92	100%	177.156.981	Kec. Marikit
39	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	30.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	33.494.280,61	100%	33.669.474,05	100%	33.869.970,44	100%	164.033.725	Kec. Katingan Hulu
40	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	30.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	33.494.280,61	100%	33.669.474,05	100%	33.869.970,44	100%	164.033.725	Kec. Mendawai
41	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.973.583,02	100%	66.318.661,00	100%	66.713.578,13	100%	304.005.822	Kec. Bukit Raya
42	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.650.000,00	100%	50.850.000,00	100%	51.611.641,49	100%	51.881.598,64	100%	52.190.545,35	100%	247.183.785	Kec. Petak Malai
43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.000.000,00	100%	44.000.000,00	100%	44.659.040,81	100%	44.892.632,06	100%	45.159.960,58	94%	218.711.633	Kec. Sanaman Mantikei
	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Program :				8.685.309.690		6.799.302.100		9.889.344.105		9.190.426.644		9.960.906.258		44.525.288.797,62	
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	80%	82%	246.150.000,00	83%	375.698.000,00	84%	381.325.279,91	85%	313.000.000,00	85%	339.000.000,00	70%	1.655.173.280	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance	55%	60%	252.680.000,00	61%	172.900.000,00	62%	175.489.730,84	63%	200.000.000,00	64%	240.000.000,00	64%	1.041.069.731	Sekretariat Daerah
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu	100%	100%	-	100%	799.800.000,00	100%	811.779.564,62	100%	654.200.000,00	100%	662.200.000,00	100%	2.927.979.565	Sekretariat Daerah
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Daerah	100%	100%	1.334.156.290,00	100%	787.147.100,00	100%	1.334.156.290,00	100%	1.341.134.658,22	100%	1.802.211.920,00	100%	6.598.806.258	Bappelitbang
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi (%)	84%	85%	2.132.715.400,00	87%	1.327.099.000,00	90%	2.113.078.400,00	91%	1.868.886.240,00	92%	1.880.015.161,83	92%	9.321.794.202	Bappelitbang

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
6	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (%)	79%	80%	237.115.000,00	83%	253.922.000,00	86%	621.073.800,00	89%	337.476.000,00	92%	538.595.948,00	92%	1.988.182.748	Bappelitbang
7	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah	Tinggi (84,65)	Tinggi (84,65)	770.974.000,00	Tinggi (89,15)	399.366.000,00	Tinggi (90,75)	639.212.040,00	Sgt Tinggi (91)	642.555.469,11	Sgt Tinggi (92,30)	646.381.785,26	90%	3.098.489.294	Bappelitbang
8	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan	6	6	124.900.000	7	147.040.000	7	226.610.000	7	227.795.294	7	225.653.000	7	951.998.294	Bappelitbang
9	Program Pengembangan Sistem Pemerintahan dalam Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Cakupan obrik pengawasan	80%	80%	3.586.619.000,00	80%	2.536.330.000,00	85%	3.586.619.000,00	85%	3.605.378.982,04	90%	3.626.848.443,36	90%	16.941.795.425	Inspektorat
	Sasaran : Meningkatkan kepatuhan terhadap standar laporan keuangan				1.584.769.600		1.905.471.560		2.096.106.716		2.305.717.388		2.536.289.126		10.428.354.390	
	Program :															
1	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu	80%	100%	748.320.000,00	100%	895.752.000,00	100%	985.327.200,00	100%	1.083.859.920,00	100%	1.192.245.912,00	100%	4.905.505.032	BPKAD
2	Program Penatausahaan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	80%	100%	836.449.600,00	100%	1.009.719.560,00	100%	1.110.779.516,00	100%	1.221.857.467,60	100%	1.344.043.214,36	100%	5.522.849.358	BPKAD
	Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat				23.121.561.982		23.318.725.721		27.577.820.583		27.658.891.634		27.692.082.396		129.369.082.316,32	
	Program :															
1	Program Kehumasan, Informasi dan Keprotokolan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	226.800.000,00	100%	230.197.055,84	100%	231.401.112,53	100%	232.779.069,54	5 Produk	921.177.238	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kemandirian BLUD	BLUD	BLUD	13.348.810.781,65	BLUD	9.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	61.348.810.782	BLUD RSUD
3	Program Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Pelayanan RS	-	-	-	Pratama	2.048.746.800,00	Pratama	2.079.433.340,00	Madya	2.090.309.915,43	Madya	2.102.757.380,21	Madya	8.321.247.436	RSUD
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	0%	4%	7.869.800.000,00	6%	6.557.998.513,00	8%	6.656.225.528,50	10%	6.695.862.298,24	12%	6.735.735.098,68	12%	34.515.621.438	Dinas Kesehatan
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	92%	93%	1.048.401.000,00	95%	1.048.401.000,00	97%	1.064.104.160,21	98%	1.069.670.007,85	100%	1.076.039.723,49	100%	5.306.615.892	Disdukcapil
6	Program Administrasi Pencatatan Sipil	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil	55%	77%	150.000.000,00	81%	150.000.000,00	87%	152.246.730,05	92%	153.043.063,85	100%	153.954.411,07	100%	759.244.205	Disdukcapil
7	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	10.400.000,00	100%	346.372.908,00	100%	351.560.950,81	100%	353.399.807,15	100%	355.504.247,08	100%	1.417.237.913	Kec. Katingan Kuala
8	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90%	90%	229.580.000,00	90%	369.015.000,00	90%	374.542.180,60	90%	376.501.241,37	90%	378.743.246,68	100%	1.728.381.669	Kec. Kamipang
9	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85%	85%	25.310.000,00	86%	287.610.000,00	86%	336.544.000,00	88%	338.304.309,47	95%	286.218.240,00	10 Keg	1.273.986.549	Kec. Tasik Payawan
10	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	80%	80%	20.000.000,00	80%	433.470.000,00	80%	439.962.600,50	80%	442.263.845,90	90%	444.897.457,12	100%	1.780.593.904	Kec. Katingan Hilir

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
11	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	23.500.000,00	100%	353.692.000,00	100%	358.989.669,63	100%	360.867.382,25	100%	363.016.290,41	100%	1.460.065.342	Kec. Tewang Sangalang Garing
12	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	100%	211.555.000,00	100%	214.723.713,17	100%	215.846.835,81	100%	217.132.169,56	100%	859.257.719	Kec. Pulau Malan
13	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	42.285.000,00	100%	250.996.000,00	100%	254.755.468,37	100%	256.087.979,02	100%	257.612.942,41	100%	1.061.737.390	Kec. Katingan Tengah
14	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	62.715.000,00	100%	381.435.000,00	100%	387.148.209,84	100%	389.173.207,05	100%	391.490.671,92	100%	1.611.962.089	Kec. Marikit
15	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	88.040.000,00	100%	464.619.000,00	100%	471.578.156,46	100%	474.044.768,54	100%	476.867.630,12	100%	1.975.149.555	Kec. Katingan Hulu
16	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	22.000.000,00	100%	188.672.000,00	100%	191.497.967,01	100%	192.499.606,28	100%	193.645.910,97	100%	788.315.484	Kec. Mendawai
17	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	20.000.000,00	100%	187.735.000,00	100%	190.546.932,44	100%	191.543.597,27	100%	192.684.209,09	100%	782.509.739	Kec. Bukit Raya
18	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	38.180.000,00	100%	368.505.000,00	100%	374.024.541,71	100%	375.980.894,95	100%	378.219.801,68	100%	1.534.910.238	Kec. Petak Malai
19	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	21.150.000,00	100%	299.715.000,00	100%	304.204.191,31	100%	305.795.345,87	100%	307.616.308,76	95%	1.238.480.846	Kec. Sanaman Mantikei
20	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP	-	100%	52.545.200,00	100%	61.500.000,00	100%	62.421.159,32	100%	62.747.656,18	100%	63.121.308,54	100%	302.335.324	DPM-PTSP
21	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	85%	90%	48.845.000,00	91%	81.887.500,00	92%	83.114.027,38	93%	83.548.759,27	94%	84.046.278,91	90%	381.441.566	DPM-PTSP
	Sasaran: Meningkatnya penegakan hukum				477.600.000		1.200.133.000		1.218.108.832		1.210.494.725		1.213.800.989		5.320.137.546,55	
	Program:															
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	100%	100%	477.600.000,00	100%	477.600.000,00	100%	484.753.588,48	100%	566.600.000,00	100%	567.600.000,00	100%	2.574.153.588	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum	Persentase kasus yang memperoleh bantuan hukum	80%	80%	-	80%	507.533.000,00	80%	515.134.930,95	80%	424.533.000,00	80%	425.533.000,00	80%	1.872.733.931	Sekretariat Daerah
3	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan tranitibum	80%	80%	-	80%	110.000.000,00	80%	111.647.602,04	80%	112.231.580,15	80%	112.899.901,45	80%	446.779.084	Satpol PP
4	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap perda/perkada	80%	75%	-	70%	105.000.000,00	65%	106.572.711,03	60%	107.130.144,69	50%	107.768.087,75	80%	426.470.943	Satpol PP

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Misi 2: Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan Kemandirian Pangan				27.725.332.302		20.515.812.851		23.129.777.431		23.244.665.249		23.376.146.161		150.527.503.928,61	
	Tujuan: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan				27.725.332.302		20.515.812.851		23.129.777.431		23.244.665.249		23.376.146.161		150.527.503.928,61	
	Sasaran: Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan				19.358.232.502		18.211.315.851		20.790.763.213		20.893.416.705		21.010.896.305		100.264.624.577	
	Program:															
1	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai	18,34	21,69	4.794.521.473,00	35,06	4.731.711.936,05	35,32	4.802.584.465,34	35,59	4.827.704.612,83	35,86	4.856.452.829,87	35,86	24.012.975.317	Distanpaper
2	Program Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Persentase usaha dan kelembagaan kelompok tani yang berkembang	37,89	47,36	447.216.000,00	56,83	831.461.000,00	66,30	690.000.000,00	75,77	690.000.000,00	85,24	690.000.000,00	85,24	3.348.677.000	Distanpaper
3	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	64.556	69.223,72	355.000.000,00	122.982,13	1.997.491.300,00	128.188,09	2.027.410.124,85	132.603,05	2.038.014.590,37	138.187,01	2.050.150.644,76	138.187,01	8.468.066.660	Distanpaper
		- Padi (ton)	64.125	68.783,16		72.271,13		76.280,09		80.378,05		84.568,01		84.568,01		
		- Jagung (ton)	359	368,56		378,53		388,49		398,45		408,41		408		
		- Bawang Merah (ton)	18	18		30		42		54		66		66		
		- Cabe (ton)	18	18		220		240		260		280		280		
		- Pisang (pohon)	18	19.693		19.693		19.693		19.693		20.000		20.000		
		- Durian (Kg)	18	153.000		153.000		160.000		165.000		170.000		170.000		
4	Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Persentase Hasil Produksi beras yang dipasarkan dalam kemasan	15%	20%	83.000.000,00	25%	70.000.000,00	30%	475.000.000,00	35%	475.000.000,00	40%	475.000.000,00	40%	1.578.000.000	Distanpaper
5	Program Pengembangan Perkebunan	Jumlah produksi tanaman	14.167	50.961,84	255.000.000,00	53.154,21	500.000.000,00	55.448,23	1.420.000.000,00	57.846,97	1.427.427.377,84	60.362,53	1.435.927.482,00	60.362,53	5.038.354.860	Distanpaper
		- Karet (ton)	2.650	11.577,00		11.808,54		12.044,71		12.285,61		12.531,32		12.531,32		
		- Sawit (ton)	167	167,84		168,67		169,52		170,37		171,22		171,22		
		- Kelapa (ton)	11.350	39.217,00		41.177,00		43.234,00		45.391,00		47.660,00		47.660,00		
6	Program Pengembangan Peternakan	Jumlah populasi ternak	-	29.055	4.220.050.000,00	30.507	1.036.000.000,00	32.031	1.301.517.415,54	33.628	1.308.325.064,57	35.309	1.316.115.933,30	35.309	9.182.008.413	Distanpaper
		- Ternak Besar (ekor)	-	19.293		20.257		21.269		22.328		23.444		23.444		
		- Ternak Kecil (ekor)	-	9.761		10.249		10.761		11.299		11.864		11.864		
		- Ternak Unggas (ekor)	-	1		1		1		1		1		1		
7	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	429,87	5.431,87	1.491.784.000,00	5.703,47	913.694.000,00	5.988,64	1.491.784.000,00	6.288,07	1.499.586.847,48	6.602,48	1.508.516.649,87	6.602,48	6.905.365.497	Distanpaper
8	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	5427,00	5.800,10	1.396.699.029,00	6.120,30	1.051.231.000,00	6.511,70	1.396.699.029,00	6.781,90	1.404.004.530,00	7.581,71	1.412.365.154,81	7.581,71	6.660.998.743	
9	Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan	1	3	359.936.000,00	6	375.000.000,00	9	380.616.825,12	12	382.607.659,61	15	384.886.027,68	15	1.883.046.512	
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	59,23%	61,39%	5.955.026.000,00	62,47%	6.704.726.615,01	63,55%	6.805.151.353,41	64,44%	6.840.746.022,69	65,72%	6.881.481.582,78	65,72%	33.187.131.574	
	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan pangan				862.120.000		972.602.500		987.170.335		992.333.777		998.242.967		4.812.469.579,08	
	Program:															
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	- Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (beras)	37843,58	39.225,95	-	41.246,35	972.602.500,00	43.559,18	987.170.335,09	43.559,18	992.333.776,69	48.344,33	998.242.967,30	48.344,33	3.950.349.579	Distanpaper
		- Persentase Harga Gabah Kering Giling (GKG)		≥ 100%		≥ 100%		≥ 100%		≥ 100%		≥100%		≥100%		
		- Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan		90%		92%		94%		96%		98%		98%		
2	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)				862.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862.120.000	Distanpaper

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Sasaran : Meningkatnya daya saing dan investasi daerah				976.926.000		1.331.894.500		1.351.843.883		1.358.914.767		1.367.006.889	K	Rp	6.386.586.038,35	
	Program:																
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilakukan	3	4	129.200.000,00	4	133.000.000,00	4	134.992.100,64	5	135.698.183,28	5	136.506.244,48	22	669.396.528	DPM-PTSP	
2	Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	35%	35%	55.300.000,00	45%	59.988.000,00	50%	60.886.512,28	55%	61.204.982,09	60%	61.569.448,08	60%	298.948.942	DPM-PTSP	
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	85%	90%	48.845.000,00	91%	81.887.500,00	92%	83.114.027,38	93%	83.548.759,27	94%	84.046.278,91	90%	381.441.566	DPM-PTSP	
4	Program Peningkatan Produktivitas dan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	66,66%	-	75,00%	959.750.000,00	80,00%	974.125.327,77	83,33%	979.220.536,84	85,71%	985.051.640,18	85,71%	3.898.147.505	Distransnaker	
		- Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1	-	40%		42%		44%		48%		53,26%		53,26%			
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				263.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.940.000	Distransnaker	
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				404.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.530.000	Distransnaker	
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakeriaan	Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakeriaan	52%	55%	75.111.000,00	58%	97.269.000,00	60%	98.725.914,57	64%	99.242.305,18	67,00%	99.833.277,40	67,00%	470.181.497	Distransnaker	
	Sasaran : Meningkatnya Sektor UMK				6.201.203.800		5.321.615.000		6.112.182.958		6.144.153.023		6.180.740.482		29.959.895.261,94		
	Program:																
1	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM Aktif	1502 UKM aktif	90%	381.340.000,00	91%	295.225.000,00	92%	381.340.000,00	93%	383.334.617,09	94%	385.617.314,08	1 Produk	1.826.856.931	DisKopUKMPP	
2	Program Penataan Struktur Industri	Persentase IKM potensial yang mendapatkan bantuan	0%	15%	180.000.000,00	15%	915.000.000,00	15%	728.705.053,30	15%	732.516.579,90	15%	736.878.600,22	15%	3.293.100.233	DisKopUKMPP	
3	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	9,21%	9,23%	4.542.508.800,00	9,25%	3.826.035.000,00	9,27%	4.442.508.800,00	9,29%	4.465.745.554,53	9,31%	4.492.338.362,65	7,78%	21.769.136.517	DisKopUKMPP	
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM berbasis teknologi	0%	10%	411.510.000,00	12%	107.420.000,00	14%	179.028.958,28	16%	179.965.377,80	18%	181.037.043,15	18%	1.058.961.379	DisKopUKMPP	
5	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP	-	1 Produk	685.845.000,00	1 Produk	177.935.000,00	1 Produk	380.600.146,08	1 Produk	382.590.893,32	1 Produk	384.869.161,55	1 Produk	2.011.840.201	DisKopUKMPP	
		Jumlah IKM, Pengusaha, Investor yang menggunakan fasilitas kawasan industri hampangan	0	0		1		1		1		1		1			
	Sasaran : Meningkatnya daya saing Koperasi				326.850.000		181.005.000		400.000.000		402.092.219		404.486.615		1.714.433.833,76		
	Program:																
1	Program Pembinaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	40%	42%	326.850.000,00	44%	181.005.000,00	46%	400.000.000,00	48%	402.092.219,11	50%	404.486.614,65	50%	1.714.433.834	DisKopUKMPP	
	Misi 3: Memantapkan pembangunan perdesaan.		-		5.705.096.000		2.431.898.000		2.468.323.455		2.481.234.139		2.496.009.496		15.582.561.090,48		
	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan		-		5.705.096.000		2.431.898.000		2.468.323.455		2.481.234.139		2.496.009.496		15.582.561.090,48		
	Sasaran : Meningkatnya pembangunan perdesaan				3.803.261.000		430.358.000		436.803.988		439.088.712		441.703.416		5.551.215.117,08		
	Program:																

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	80%	80%	3.803.261.000,00	85%	430.358.000,00	90%	436.803.988,34	95%	439.088.712,47	100%	441.703.416,27	100%	5.551.215.117	DisPMDes
	Sasaran : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa				1.901.835.000		2.001.540.000		2.031.519.467		2.042.145.427		2.054.306.080		10.031.345.973,40	
	Program:															
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK)	80%	80%	1.338.655.000,00	85%	1.348.790.000,00	90%	1.368.992.446,82	95%	1.376.153.027,22	100%	1.384.347.800,74	100%	6.816.938.275	DisPMDes
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	80%	80%	563.180.000,00	85%	652.750.000,00	90%	662.527.020,27	95%	665.992.399,50	100%	669.958.278,85	100%	3.214.407.699	DisPMDes
	MSI 4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender				147.951.885.456		124.642.913.259		135.036.758.513		145.763.975.623		146.523.281.910		692.529.320.122,95	
	Tujuan : Meningkatkan daya saing masyarakat				147.435.322.456		123.681.341.259		133.766.399.213		144.493.616.323		145.215.509.875		687.202.694.487,95	
	Sasaran: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan				61.611.851.555		56.472.229.730		57.412.163.930		62.713.790.759		63.087.241.459		301.297.277.433,10	
	Program:															
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	86,51%	86,94%	1.988.840.509,00	87,16%	1.310.300.811,00	87,38%	1.329.926.759,04	87,60%	3.201.571.333,63	87,82%	3.220.636.184,31	87,82%	11.051.275.597	Dinas Pendidikan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan	APK SD/MI/Paket A	101,43%	101,94%	53.620.875.045,78	102,19%	51.730.839.819,00	102,45%	52.234.225.328,04	102,70%	52.545.271.874,36	102,96%	52.858.170.653,64	102,96%	262.989.382.721	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MT/Paket B	90,66%	91,11%		91,34%		91,57%		91,80%		92,03%		92,03%		
		APM SD/MI/Paket A	87,20%	87,64%		87,86%		88,07%		88,29%		88,52%		88,52%		
		APM SMP/MT/Paket B	64,72%	65,04%		65,21%		65,37%		65,53%		65,70%		65,70%		
3	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99,41%	99,43%	1.196.800.000,00	99,46%	1.301.426.500,00	99,48%	1.500.000.000,00	99,51%	1.508.932.262,64	99,53%	1.517.917.715,49	99,53%	7.025.076.478	Dinas Pendidikan
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melakukan pemuktahiran data pokok pendidikan (dapodik)	83,33%	83,75%	3.848.326.000,00	83,96%	575.658.600,00	84,17%	584.280.929,83	84,38%	2.404.407.665,50	84,59%	2.418.725.532,68	84,59%	9.831.398.728	Dinas Pendidikan
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,36%	77,75%	-	77,94%	794.816.000,00	78,14%	806.720.913,27	78,33%	2.091.591.936,32	78,53%	2.104.047.035,33	78,53%	5.797.175.885	Dinas Pendidikan
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan perpustakaan	Jumlah pengunjung ke perpustakaan	7200 org	4500 org	957.010.000,00	6000 org	759.188.000,00	7.500 org	957.010.000,00	9000 org	962.015.686,53	10.500 org	967.744.337,71	10.500 org	4.602.968.024	Sekretariat Daerah
	Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas				84.571.344.792,65		65.698.050.329,15		74.820.541.105,40		80.238.109.325,88		80.577.371.501,77		385.905.417.054,85	
	Program:															
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan keluarga siaga	60%	65%	171.500.000,00											Dinas Kesehatan
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber PHBS	60%	65%	715.610.000,00	75%	276.300.000,00	80%	280.438.476,75	90%	1.271.605.107,02	100%	1.279.177.314,21	100%	3.823.130.898	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga				50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	Dinas Kesehatan
4	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Cakupan Rumah Tangga sehat			197.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.200.000	Dinas Kesehatan
5	Program Pendataan Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga				100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	Dinas Kesehatan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting menurun	26,50%	26%	1.489.108.000,00	25,2%	1.371.749.400,00	24,4%	1.392.295.737,32	23,6%	1.400.586.638,12	22,8%	1.408.926.909,92	22,8%	7.062.666.685	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	AKABA			100.000.000,00											Dinas Kesehatan
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	85%	100%	788.982.000,00	100%	394.672.502,00	100%	400.583.985,80	100%	1.754.641.665,70	100%	1.765.090.279,16	100%	5.103.970.433	Dinas Kesehatan
9	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik				135.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		135.650.000	Dinas Kesehatan
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	0%	4%	7.869.800.000,00	6%	6.557.998.513,00	8%	6.656.225.528,50	10%	6.695.862.298,24	12%	6.735.735.098,68	12%	34.515.621.438	Dinas Kesehatan
11	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	60%	65%	3.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000.000	Dinas Kesehatan
12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75%	80%	499.534.000,00	85%	165.350.000,00	87%	624.429.330,15	90%	1.021.592.026,00	97%	1.027.675.444,85	97%	3.338.580.801	Dinas Kesehatan
13	Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya	100%	100%	23.405.584.081,00	100%	23.894.162.118,00	100%	23.894.162.118,00	100%	24.036.448.072,42	100%	24.179.581.317,18	100%	119.409.937.707	Dinas Kesehatan
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (lansia)	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	60%	65%	99.650.000,00	70%	125.000.000,00	80%	125.000.000,00	90%	667.598.080,17	100%	671.573.521,10	100%	1.688.821.601	Dinas Kesehatan
15	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	85%	65%	325.000.000,00	70%	100.000.000,00	80%	101.497.820,03	90%	451.593.386,89	100%	454.282.554,05	100%	1.432.373.761	Dinas Kesehatan
16	Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Cakupan penjarangan siswa SD dan setingkat			115.415.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		115.415.000	Dinas Kesehatan
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	51%	20 Desa	816.750.000,00	20 Desa	745.600.000,00	20 Desa	756.767.746,17	20 Desa	824.974.934,23	20 Desa	829.887.529,42	20 Desa	3.973.980.210	Dinas Kesehatan
18	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi	75%	80%	558.901.466,00	85%	258.400.000,00	90%	262.270.366,97	95%	536.660.227,84	100%	539.855.954,58	100%	2.156.088.015	Dinas Kesehatan
		- Cakupan penemuan dan penanganan kesehatan diabetes melitus														
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita gangguan jiwa berat														
19	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	80%	80%	169.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	169.290.000	Dinas Kesehatan
20	Program Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Cakupan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	80%	80%	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	30.000.000	Dinas Kesehatan
21	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin	80%	85%	3.492.160.000,00	88%	1.347.760.000,00	90%	1.367.947.019,28	95%	1.376.092.927,31	100%	1.384.287.342,94	100%	8.968.247.290	Dinas Kesehatan
22	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat	80%	70%	123.000.000,00	75%	1.270.210.636,15	80%	1.289.236.105,52	85%	1.296.913.302,52	95%	1.304.636.216,02	95%	5.283.996.260	Dinas Kesehatan
23	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu	9%	9,8%	13.796.633.945,00	10%	9.107.888.000,00	12%	13.032.640.447,80	14%	14.205.626.108,99	16%	14.290.218.364,58	16%	64.433.006.866	Dinas Kesehatan
24	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kemandirian BLUD	BLUD	BLUD	13.348.810.781,65	BLUD	9.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	61.348.810.782	BLUD RSUD
25	Program Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Pelayanan RS	-	-	-	Pratama	2.048.746.800,00	Pratama	2.079.433.340,00	Madya	2.090.309.915,43	Madya	2.102.757.380,21	Madya	8.321.247.436	RSUD

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS	80%	82%	2.361.449.519,00	85%	2.455.008.360,00	87%	2.491.779.967,03	90%	2.504.813.341,20	92%	2.519.729.108,28	92%	12.332.780.296	RSUD
27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	70%	72%	1.160.000.000,00	75%	1.591.988.000,00	77%	1.615.833.115,19	80%	1.624.284.807,50	82%	1.633.957.166,50	82%	7.626.063.089	RSUD
28	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				3.145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			RSUD
29	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	80%	85%	1.320.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			RSUD
30	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			RSUD
31	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			RSUD
32	Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi	78,69%	78,87%	4.841.316.000,00	79,05%	4.987.216.000,00	79,23%	5.450.000.000,91	79,41%	5.478.506.486,30	79,61%	5.450.000.000,08	79,61	26.207.038.487	DP3APPKB
	Sasaran : Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran				1.252.126.109		1.511.061.200		1.533.694.177		1.541.716.238		1.550.896.914		7.389.494.638,67	
	Program :															
1	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial	57,14%	57,89%	394.637.400,00	58,96%	522.149.700,00	60,45%	529.970.562,81	62,28%	532.742.599,16	64,27%	535.914.997,04	64,27%	2.515.415.259	Dinas Sosial
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	-	-	-	80%	141.060.000,00	90%	143.172.824,94	95%	143.921.697,24	95%	144.778.728,17	95,00%	#VALUE!	Dinas Sosial
3	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial	85%	90%	163.600.000,00	90%	449.783.300,00	100%	456.520.244,37	100%	458.908.095,32	100%	461.640.820,41	100%	1.990.452.460	Dinas Sosial
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS tertangani	43,84%	45,32%	693.888.709,00	49,75%	398.068.200,00	54,68%	404.030.545,24	60,10%	406.143.846,32	66,01%	408.562.368,65	66,01%	2.310.693.669	Dinas Sosial
	Tujuan : Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan				516.563.000,00		961.572.000,00		1.270.359.300,00		1.270.359.300,00		1.307.772.035,00		5.326.625.635,00	
	Sasaran : Meningkatnya pengarusutamaan gender.				516.563.000,00		961.572.000,00		1.270.359.300,00		1.270.359.300,00		1.307.772.035,00		5.326.625.635,00	
	Program :															
1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga daerah	46,37%	48,02%		49,67%	521.000.000,00	51,32%	760.359.300,00	52,97%	760.359.300,00	54,62%	760.359.300,00	54,62%	2.802.077.900	DP3APPKB
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				80.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		80.850.000	DP3APPKB
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				48.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		48.050.000	DP3APPKB
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan				239.873.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		239.873.000	DP3APPKB
5	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu	100%	100%	86.290.000,00	100%	140.572.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	247.412.735,00	100%	894.274.735	DP3APPKB
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase pemenuhan kabupaten layak anak	100%	100%	61.500.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	1.261.500.000	DP3APPKB
	Misi 5: Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi.				106.301.256.054		176.314.064.842		173.462.419.139		165.286.490.717		163.764.073.755		785.128.304.506,55	

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Tujuan : Meningkatnya konektivitas antar wilayah				106.301.256.054		176.314.064.842		173.462.419.139		165.286.490.717		163.764.073.755		785.128.304.507	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga				81.427.797.054		144.986.738.842		135.379.244.461		119.044.482.252		115.728.897.832		596.567.160.440,25	
	Program:															
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang dibangun	797,2 Km	2,51 (20,5 Km)	57.237.164.648,30	1,52 (12,61 Km)	126.792.175.409,07	1,38 (11,66 Km)	116.076.661.016,82	1,37 (11,66 Km)	100.500.000.000,00	1,35 (11,66 Km)	100.500.000.000,00	1,35 (11,66 Km)	501.106.001.074	DisPUPRHub
		Persentase jalan yang ditingkatkan	104,73 Km	13,76 (16,71 Km)		11,04 (15,08 Km)		9,95 (15,08)		9,05 (15,08 Km)		8,3 (15,08 Km)		8,3 (15,08 Km)		
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	161,86 Km	1,91 (3,15 Km)	13.905.592.405,88	2,42 (4,1 Km)	7.532.613.432,44	3,06 (5,33 Km)	8.557.267.750,90	3,82 (6,93 Km)	8.699.411.674,82	4,73 (9,01 Km)	8.840.088.521,86	4,73 (9,01 Km)	47.534.973.786	DisPUPRHub
3	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	-	1	400.820.000,00	1	707.980.000,00	1	718.584.266,27	1	722.342.855,61	1	726.644.293,01	5	3.276.371.415	DisPUPRHub
4	Program Pemberdayaan Jasa konstruksi	Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	618.220.000,00	100%	553.970.000,00	100%	562.267.473,64	100%	565.208.440,52	100%	568.574.167,35	100%	2.868.240.082	DisPUPRHub
5	Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesan	Persentase jalan desa yang dibangun	-	20%	8.270.000.000,00	30%	8.900.000.000,00	40%	8.438.463.953,17	50%	7.526.152.738,88	60%	4.056.082.683,11	60%	37.190.699.375	Disperkimtan
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	100%	100%	826.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	826.000.000,00	100%	830.320.432,46	100%	835.264.859,25	100%	3.817.585.292	DisPUPRHub
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang direhab dan dipelihara	100%	100%	170.000.000,00	-	-	100%	200.000.000,00	100%	201.046.109,56	100%	202.243.307,32	100%	773.289.417	DisPUPRHub
	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak				21.369.523.000,00		25.256.236.000,00		32.956.767.746,17		41.088.787.617,11		42.851.268.459,61		163.522.582.822,89	
	Program:															
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan	-	61,90%	10.575.476.000,00	66,91%	8.210.636.000,00	71,91%	8.200.000.000,00	76,91%	8.242.890.491,77	81,91%	8.291.975.600,30	81,91%	43.520.978.092	Disperkimtan
		Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat	-	3%		8%		12%		15%		18%			-	
2	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kawasan perkotaan dan perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai	-	29,73%	6.295.275.000,00	36,13%	12.100.000.000,00	42,53%	20.000.000.000,00	48,93%	28.000.000.000,00	55,33%	29.684.539.183,40	55,33%	96.079.814.183	Disperkimtan
4	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	Persentase bahu jalan dan drainase yang dibersihkan di wilayah perkotaan	-	40%	3.682.022.000,00	60%	4.200.000.000,00	70%	4.000.000.000,00	80%	4.020.922.191,11	90%	4.044.866.146,49	90%	19.947.810.338	Disperkimtan
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	51%	20 Desa	816.750.000,00	20 Desa	745.600.000,00	20 Desa	756.767.746,17	20 Desa	824.974.934,23	20 Desa	829.887.529,42	20 Desa	3.973.980.210	Dinas Kesehatan
	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi				3.503.936.000,00		6.071.090.000,00		5.126.406.931,98		5.153.220.848,36		5.183.907.463,07		25.038.561.243,41	
	Program:															
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat daerah yang memiliki insfrastruktur TIK sesuai ketentuan	47%	53%	3.503.936.000,00	66%	6.071.090.000,00	74%	5.126.406.931,98	84%	5.153.220.848,36	92%	5.183.907.463,07	92%	25.038.561.243	DiskominfoPersan tik

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	MISI 6 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan				200.000.000		300.000.000		304.493.460		306.086.128		307.908.822		47.072.948.480	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				5.994.345.414		11.324.897.240		9.863.824.888		9.915.418.096		9.974.462.842		47.072.948.479,73	
	Sasaran : Menurunnya pencemaran lingkungan				3.531.557.414		9.262.304.240		7.401.036.888		7.439.748.365		7.484.050.890		35.118.697.797,64	
	Program:															
1	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	-	-	-	75%	1.154.726.750,00	80%	1.172.022.478,59	85%	1.178.152.798,16	90%	1.185.168.511,64	90%	4.690.070.538	DLH
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		-	-	2.119.274.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.119.274.000	DLH
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Persentase Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	2%	3.340.350.000,00	2%	2.640.382.431,48	2%	2.654.193.077,93	2%	2.669.998.377,71	2%	11.304.923.887	DLH
4	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan Lingkungan		-	-	1.252.283.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.252.283.414	DLH
5	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indek Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	78,25	2.605.055.000,00	78,65	1.894.074.035,66	78,90	1.903.981.080,40	79,00	1.915.318.986,45	79	8.318.429.103	DLH
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	DLH
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		-	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	DLH
8	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun	-	-	-	3%	906.172.490,00	3%	919.745.323,09	3%	924.556.094,94	3%	930.061.680,19	3%	3.680.535.588	DLH
9	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air	-	-	-	76,00	87.000.000,00	76,00	88.303.103,43	76,00	88.764.977,03	76,00	89.293.558,42	76	353.361.639	DLH
10	Program Pengendalian dan Pencegahan Bencana	Presentase penurunan titik HOTSPOT kebakaran hutan	0%	19,22%	-	10%	1.169.000.000,00	10%	686.509.516,19	10%	690.100.337,01	10%	694.209.775,32	10%	3.239.819.629	BPBD
	Sasaran: Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam				2.462.788.000		2.062.593.000		2.462.788.000		2.475.669.730		2.490.411.952		11.954.250.682,09	
	Program:															
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	4 destinasi	4 destinasi	2.462.788.000,00	5 destinasi	2.062.593.000,00	6 destinasi	2.462.788.000,00	6 destinasi	2.475.669.730,30	6 destinasi	2.490.411.951,79	6 destinasi	11.954.250.682	Disbudparpora
		- Persentase pekerja pada sektor pariwisata	699 org	750 org		900 org		1.100 org		1.300 org		1.500 org		1.500 org		
	Misi 7: Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat dan sosial budaya				5.556.222.000		5.908.827.000		5.606.969.098		6.530.556.724		12.395.904.048		35.998.478.870,05	
	Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)				5.556.222.000		5.908.827.000		5.606.969.098		6.530.556.724		12.395.904.048		35.998.478.870,05	
	Sasaran: Meningkatkan keharmonisan dan kerukunan masyarakat				3.464.312.000		2.059.082.000		3.199.561.846		4.110.557.414		9.961.494.025		22.795.007.284	
	Program:															

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Program Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa	80%	85%	218.242.000,00	85%	274.325.000,00	85%	278.433.894,81	88%	279.890.256,60	90%	281.556.958,78	90%	1.332.448.110	Bakesbangpol
2	Program Kewaspadaan	Persentase kecamatan yang diawasi keamanannya	70%	75%	1.084.394.000,00	80%	645.602.000,00	85%	655.271.956,09	88%	658.699.387,36	90%	662.621.837,98	90%	3.706.589.181	Bakesbangpol
3	Program Pemeliharaan Kentrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang diselesaikan	80%	75%	1.274.085.000,00	70%	159.725.000,00	70%	162.117.393,05	60%	162.965.355,82	60%	163.935.788,72	80%	1.922.828.538	Satpol PP
4	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan trantibum	80%	80%	-	80%	110.000.000,00	80%	111.647.602,04	80%	112.231.580,15	80%	112.899.901,45	80%	446.779.084	Satpol PP
5	Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	- Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	100%	100%	887.591.000,00	100%	869.430.000,00	100%	1.992.091.000,00	100%	2.896.770.833,82	100%	8.740.479.537,63	100%	15.386.362.371	Sekretariat Daerah
		- Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	23%	10%		5%		5%		5%		5%				
		- Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	5%	2%		3%		3%		3%		3%				
	Sasaran: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal				2.091.910.000		3.849.745.000		2.407.407.252		2.419.999.310		2.434.410.023		13.203.471.585,75	
	Program:															
1	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	18,42%	18,42%	1.168.643.000,00	26,32%	1.645.705.000,00	28,95%	1.170.354.699,18	31,58%	1.176.476.295,35	34,21%	1.183.482.025,52	34,21%	6.344.661.020	Disbudporpora
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan pemuda yang berperan	3%	4%	862.037.000,00	6%	1.113.128.000,00	8%	629.800.654,18	10%	633.094.856,59	12%	636.864.836,28	12%	3.874.925.347	Disbudparpora
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah prestasi pelajar bidang olahraga	5 prestasi	7 prestasi	61.230.000,00	9 prestasi	1.090.912.000,00	11 prestasi	607.251.898,48	13 prestasi	610.428.158,55	15 prestasi	614.063.161,64	55 prestasi	2.983.885.219	Disbudparpora
	JUMLAH				337.434.561.462		379.036.178.705		397.428.966.420		402.228.682.589		408.441.345.070			

Tabel 6.3
Penjabaran Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Ke Dalam Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MISI I: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM		
Program Unggulan:		
1. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN).	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan • Semua Perangkat Daerah
	Program Pendidikan Kedinasan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
2. Peningkatan disiplin dan kinerja ASN.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Semua Perangkat Daerah
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ASN.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Semua Perangkat Daerah
4. Penataan manajemen dan peningkatan dukungan sistem informasi.	Program Pengembangan Data/Informasi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5. Peningkatan kapasitas hukum.	Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum	Sekretariat Daerah
6. Peningkatan kualitas produk hukum.	Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum	Sekretariat Daerah
7. Penataan peraturan perundang-undangan.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah
MISI II: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN		
Program Unggulan:		
1. Peningkatan Produksi Pertanian, Mutu, dan Pemasaran Produksi/ Komoditas serta Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengembangan Peternakan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perkebunan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2. Peningkatan Investasi dan kemudahan pelayanan perizinan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. Pengembangan industri, kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.	Program Pembinaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Peningkatan Produktivitas dan Kesempatan Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
MISI III: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN		
Program Unggulan:		
1. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2. Peningkatan peran perempuan di pedesaan.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
MISI IV: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER		
Program Unggulan:		
1. Pendidikan Anak Usia Dini.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
2. Pendidikan Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
3. Peningkatan manajemen pendidikan.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4. Peningkatan dan peran serta masyarakat.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Pendidikan Non Formal.	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
6. Pendidikan Luar Biasa.	Bukan kewenangan kabupaten, namun kewenangan provinsi	-
7. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
9. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	Sekretariat Daerah
10. Pelayanan kesehatan penduduk miskin.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (lansia)	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	Dinas Kesehatan
11. Upaya kesehatan masyarakat.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	Dinas Kesehatan
12. Perbaikan gizi masyarakat.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
13. Pengembangan lingkungan sehat.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya.	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
15. Peningkatan pelayanan Anak Balita.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
16. Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
17. Obat dan perbekalan kesehatan.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
18. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
19. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
20. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSUD
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSUD
21. Pencegahan, penemuan dan penanganan HIV AIDS	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
22. Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Dinas Kesehatan
23. Keluarga Berencana (KB).	Program Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
24. Kesehatan reproduksi.	Program Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
25. Penguatan kelembagaan pengarusuteraan gender dan anak.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
26. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
27. Penanggulangan kemiskinan daerah.	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Dinas Sosial
28. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
MISI V: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI		
Program Unggulan:		
1. Pembangunan jalan dan jembatan.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2. Pemberdayaan jasa konstruksi.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
3. Perencanaan tata ruang.	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
4. Pengendalian banjir.	Program Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
5. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
7. Pembangunan infrastruktur perdesaan.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8. Peningkatan dan pemerataan sumber daya energi.	Bukan kewenangan kabupaten, namun kewenangan provinsi	-
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
10. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
11. Peningkatan pelayanan teknologi informasi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
12. Peningkatan manajemen sumber daya yang terintegrasi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
13. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN		
Program Unggulan:		
1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup
4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi.	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6. Pengendalian kebakaran hutan.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian dan Pencegahan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
8. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup.	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
9. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan limbah B3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
10. Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
MISI VII: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA		

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Program Unggulan:		
1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2. Pengembangan promosi dan informasi kebudayaan.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4. Peningkatan pelaku dan kelembagaan kebudayaan.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5. Peningkatan peran serta kepemudaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7. Pengembangan wawasan kebangsaan.	Program Ketahanan Ideologi Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Penguatan hubungan kelembagaan masyarakat.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ibadah.	Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Sekretariat Daerah
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.	Program Kewaspadaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: hasil analisis

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya pada Bab VI ini perlu dilengkapi dengan aspek spasial. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan mempertimbangkan dimensi keruangan, sebagaimana telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan dan arahan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan 2019-2039, arahan kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang potensial untuk dikembangkan, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi
- b. kawasan peruntukan pertanian
- c. kawasan peruntukan perkebunan
- d. kawasan peruntukan pertambangan
- e. kawasan peruntukan industri
- f. kawasan peruntukan pariwisata
- g. kawasan peruntukan permukiman
- h. kawasan peruntukan budidaya lain
- i. kawasan peruntukan Bandar Udara
- j. kawasan peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara

Berikut ini akan diuraikan potensi pengembangan masing-masing kawasan yang disebutkan diatas.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:

1) Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala.

2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai.

3) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.

- b. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:
 - 1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tersebar di seluruh kecamatan.
 - 2) Kawasan Pertanian Hortikultura
Kawasan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan.
 - 3) Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan.
- c. Kawasan Peruntukan Perkebunan, meliputi:
Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa wilayah pertambangan mineral dan batubara, meliputi:
 - 1) Wilayah Usaha Pertambangan Logam
Wilayah Usaha Pertambangan Logam, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Matikei, dan Kecamatan Katingan Tengah.
 - 2) Wilayah Usaha Pertambangan Bukan Logam
Wilayah usaha pertambangan bukan logam, meliputi: Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Meridawai, dan Kecamatan Katirigan Kuala.
 - 3) Wilayah Usaha Pertambangan Batubara
Wilayah usaha pertambangan batubara, meliputi: Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, dan Kecamatan Mendawai.
 - 4) Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif
Wilayah usaha pertambangan radioaktif, meliputi:

Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai Katingan Tengah, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan.

5) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah pertambangan rakyat, meliputi: Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di setiap kecamatan.
- 2) Kawasan peruntukan industri sedang dan besar terkonsentrasi di Kecamatan Katingan Hilir.
- 3) Kawasan peruntukan industri minapolitan terkonsentrasi di kecamatan Katingan Kuala.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman, meliputi a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- 1) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi kawasan perkotaan ibu kota kecamatan.
- 2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di setiap kecamatan.

h. Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Kawasan peruntukan budidaya lainnya meliputi:

- 1) Kawasan perikanan tangkap laut disesuaikan dengan kewenangan kabupaten dan perikanan tangkap perairan umum tersebar di wilayah kecamatan yang memiliki potensi
- 2) Kawasan pertahanan, keamanan dan perlindungan masyarakat
- 3) Hutan pendidikan
- 4) Kebun raya
- 5) Kawasan budidaya perikanan tersebar pada seluruh kecamatan di kabupaten katingan; dan
- 6) Kawasan konservasi perairan laut

i. Kawasan Peruntukan Bandar Udara

Kawasan peruntukan bandar udara, meliputi: Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Hilir dan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hulu, dan Kecamatan Katingan Kuala.

- j. Kawasan Peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara
Kawasan peruntukan pusat perfilman asia tenggara berada di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Jaringan jalan, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri meliputi:
 1. Kasongan-Tangkling; dan
 2. Pelantaran-Kasongan.
- b. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan strategis nasional yaitu:
 1. batas Kalimantan Barat- Tumbang Kaburai;
 2. Tumbang Kaburai-Tumbang Sanarnang;
 3. Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran; dan
 4. Tumbang Hiran-Tumbang Samba.
- c. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 yaitu jaringan jalan Tumbang Samba-Rabambang.
- d. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 3 yaitu jaringan jalan Pundu-Tumbang Samba;
- e. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- f. jaringan jalan strategis kabupaten yaitu jaringan jalan Hampangen-Mendawai-Selat Jeruju;
- g. jaringan jalan lingkaran dalam; dan
- h. jaringan jalan lingkaran luar;

Jaringan angkutan sungai, meliputi:

- a. Katingan Kuala - Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir- Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Marikit - Katingan Hulu - Bukit Raya (jalur Sungai Katingan); dan
- b. Katingan Kuala - Meridawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir- Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Sanaman Mantikei - Petak Malai (jalur Sungai Katingan - Sungai Samba).

Sedangkan Jaringan prasarana angkutan sungai, meliputi dermaga pengumpan di Jahanjang.

3. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan yang merupakan kawasan strategis di kabupaten meliputi:

- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.

Kawasan strategis nasional, terdiri atas:

- a. kawasan strategis dan sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau; dan
- b. kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*).

Kawasan strategis provinsi, meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1) kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet);
 - 2) kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Katingan Kuala;
 - 3) kawasan minapolitan; dan
 - 4) kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan Kalaru.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1) Kawasan Strategis DAS Terpadu;
 - 2) Taman Nasiorial Bukit Baka Bukit Raya; dan
 - 3) Taman Nasiorial Sebangau.
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi, meliputi:
 - 1) Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi kabupaten; dan
 - 2) Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut kabupaten.

Kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi;
- b. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya;
- c. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan; dan
- d. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.

Selain arah kebijakan pengembangan kewilayahan yang telah diuraikan diatas, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan 2018-2023

juga perpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan daerah. Untuk itu skenario rencana pembangunan Kabupaten Katingan pada tahun 2018-2023 berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada rencana pembangunan wilayah pengembangan adalah:

6.3.1. Pembangunan Wilayah Pengembangan Sektor Pertanian dan Pengembangan Komoditi Unggulan

Berdasarkan kajian terhadap potensi lahan pertanian dengan mempertimbangkan indikator luas pertanaman, penyerapan tenaga kerja, trend produksi dan sumbangsih ekonomi keluarga petani di Kabupaten Katingan diperoleh tiga komoditas utama yang akan dikembangkan, yaitu padi, durian dan pisang, sedangkan tanaman cabai menjadi salah satu komoditi utama dikarenakan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Pengembangan keempat komoditi ini tersebar pada 3 zona / wilayah di Kabupaten Katingan, yaitu Zona Utara, Zona tengah dan Zona Selatan Kabupaten Katingan. Adapun Zona Utara meliputi Kecamatan Sanaman Mantikei, Marikit, Katingan Hulu, Petak Malai dan Bukit Raya; Zona Tengah meliputi Kecamatan Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dan Katingan Tengah; sedangkan Zona Selatan meliputi Kecamatan Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang dikonsentrasikan pada wilayah/zona tengah dan selatan yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan 2 komoditi ini sekaligus untuk menekan inflasi pada kedua wilayah tersebut.

Pertanian tanaman pangan bagi petani di Zona Utara dan Tengah lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi pangan dan masih dilakukan setahun sekali. Kondisi ini sangat berbeda dengan Zona Selatan yang sebagian sudah melakukan sistem pertanian padi sawah yang intensif dengan tujuan untuk dijual. Potensi pertanian hortikultura sangat besar di Kabupaten Katingan meskipun sampai saat ini baru komoditas durian dan pisang yang menjadi unggulan daerah. Petani yang membudidayakan jenis komoditas hortikultura yang lain terutama sayur mayur masih sangat terbatas. Tanaman hortikultura sejauh ini merupakan tanaman komersial yang banyak diusahakan oleh petani transmigran atau pendatang. Karena itu ke depan potensi pengembangan komoditas ini masih sangat terbuka.

Berikut rencana pengembangan komoditi unggulan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Katingan berbasis kewilayahan.

A. Padi

Kabupaten Katingan memiliki potensi padi sawah/rawa dan padi ladang yang masih dapat terus dikembangkan. Komoditi padi di Kabupaten Katingan diusahakan pada beberapa tipe lahan meliputi sawah/rawa dan ladang (lahan kering). Pengembangan padi sawah dipusatkan pada zona yang memiliki ketersediaan lahan sawah/rawa yang potensial diolah untuk meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Katingan.

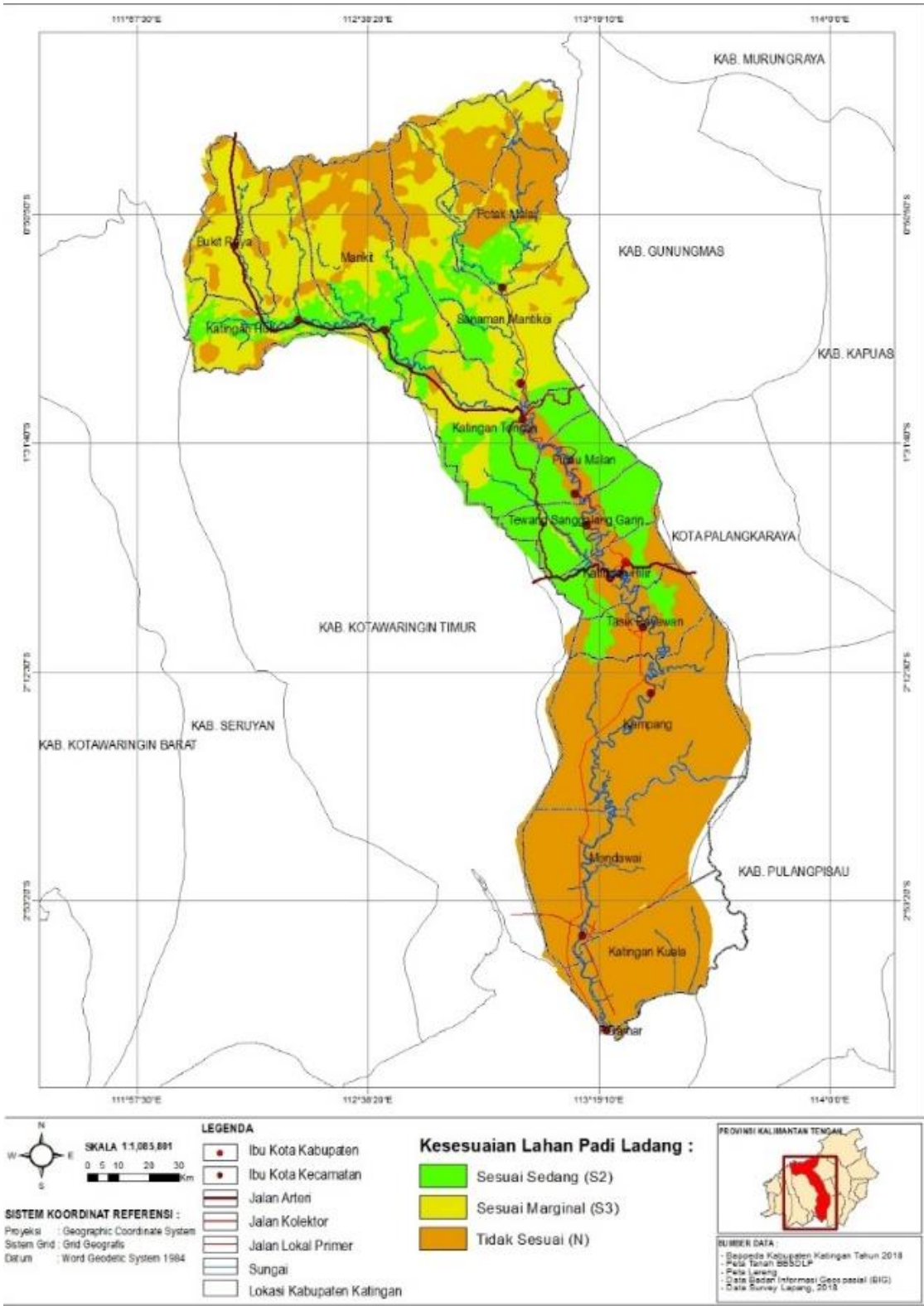
Beberapa jenis padi ladang memiliki rasa yang khas dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengembangan padi ladang dapat dilakukan dengan melakukan eksplorasi dan pendaftaran pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terhadap padi ladang di sentra-sentra produksi agar diperoleh varietas lokal yang unggul dan layak untuk dikembangkan. Sampai saat ini, sudah ada tujuh varietas lokal padi di Kabupaten Katingan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu varietas Babilem Hai, Babilem Kurik, Sirandah, Hiup, Jaragan Mayang, Jaragan Baputi dan Pudak.

Berdasarkan kajian kesesuaian lahan jenis tanah, lereng dan curah hujan), daerah di Kabupaten Katingan yang memiliki potensi dan dikembangkan sebagai lahan padi ladang berada pada zona tengah dan zona utara dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona tengah yaitu Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dan Katingan Tengah.

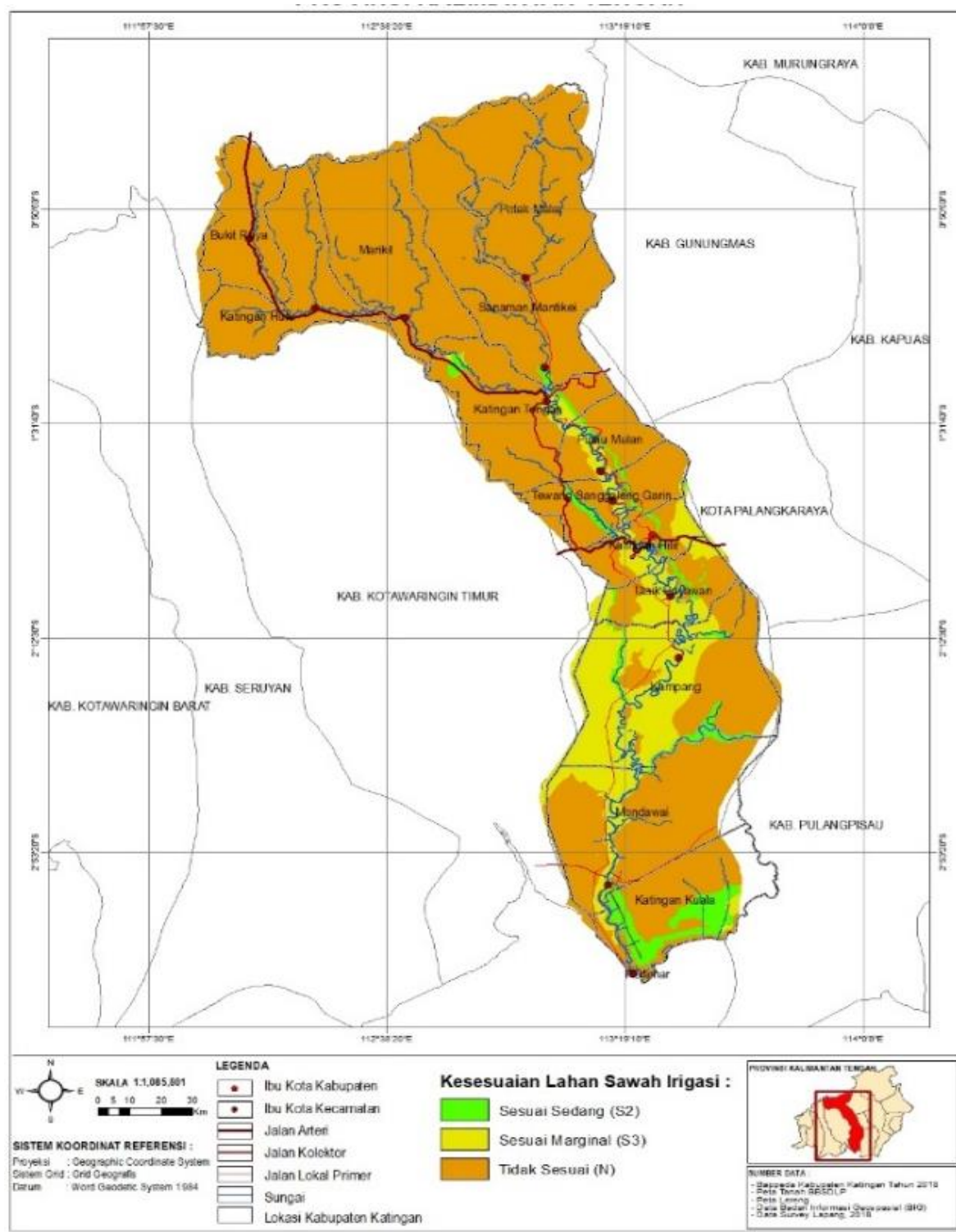
Untuk padi sawah, daerah yang berpotensi akan dikembangkan dan memiliki lahan sawah irigasi berada pada zona selatan dan sebagian kecamatan yang berada di zona tengah Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona selatan yaitu Kecamatan Katingan Kuala, sedangkan untuk zona tengah dikembangkan untuk irigasi sederhana. Khusus zona tengah, pada tahun 2019 dibangun Bendung Sungai Manten yang diharapkan dapat mengalir areal sawah seluas ± 3.000 ha, meliputi Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

Berikut peta kesesuaian lahan untuk kedua jenis padi ini berdasarkan zona wilayah yang akan dikembangkan :

Gambar 6.2 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Padi Ladang Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah



Gambar 6.3 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah



B. Durian

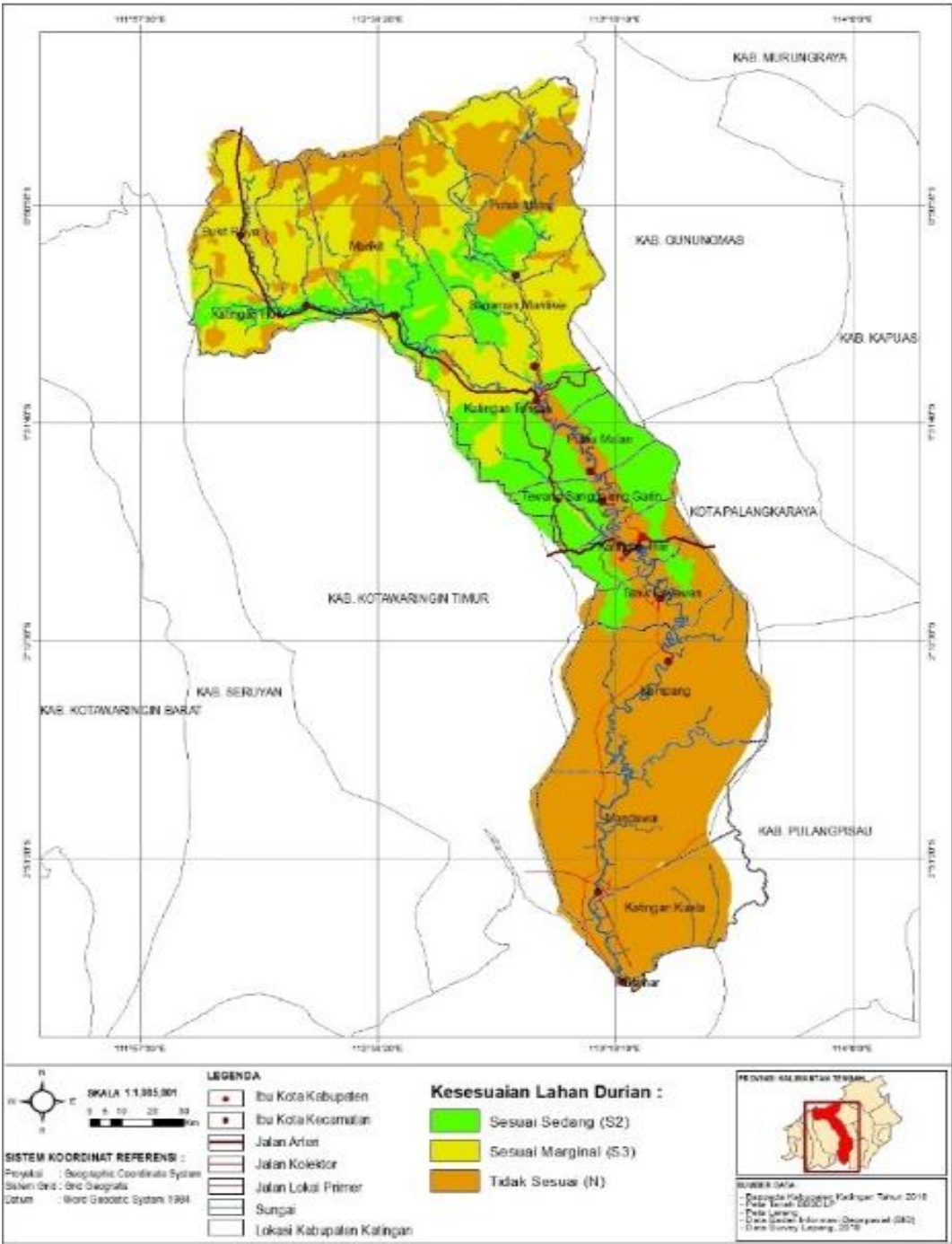
Durian Katingan adalah jenis buah musiman yang memiliki banyak varian dan memiliki citra khas yang membedakan dengan varian jenis durian lain yang tumbuh di wilayah Kalimantan. Durian dari Katingan saat ini menjadi salah satu komoditi unggulan buah-buahan yang sudah dikenal bahkan sampai keluar pulau Kalimantan.

Memperhatikan peluang ini, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam lima tahun ke depan berencana akan meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan

jenis durian unggul dari bibit lokal sebagai upaya regenerasi tanaman agar produksi durian dari Katingan tetap ada dan berkelanjutan.

Jenis bibit yang akan dikembangkan adalah Undang, Lunek, Lagas, Undang Buyu, Koko, Kalasi, dan Gelapir, dengan wilayah pengembangan berada pada zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona tengah yaitu Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

Gambar 6.4 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

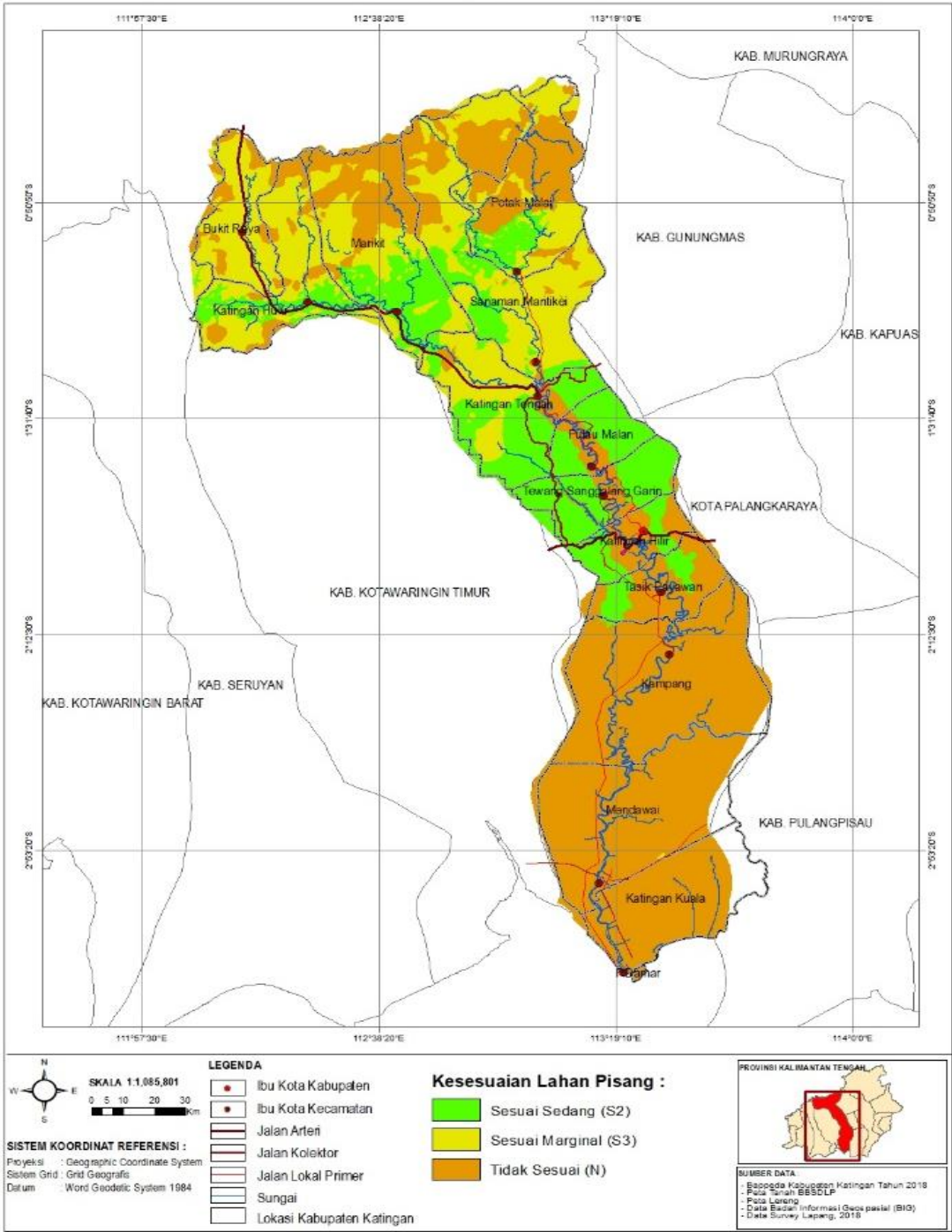


C. Pisang

Komoditi pisang saat ini juga menjadi salah satu produk unggulan masyarakat Katingan. Hanya saja yang dimanfaatkan masih pada buah segar, dan

belum berkembang sampai pada produk olahan dan industri skala kecil dan menengah. Komoditi ini juga akan menjadi salah satu produk daerah yang akan dikembangkan kedepan, terutama nilai tambah dan produk olahannya. Daerah yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan komoditi pisang berada di zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan.

Gambar 6.5 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

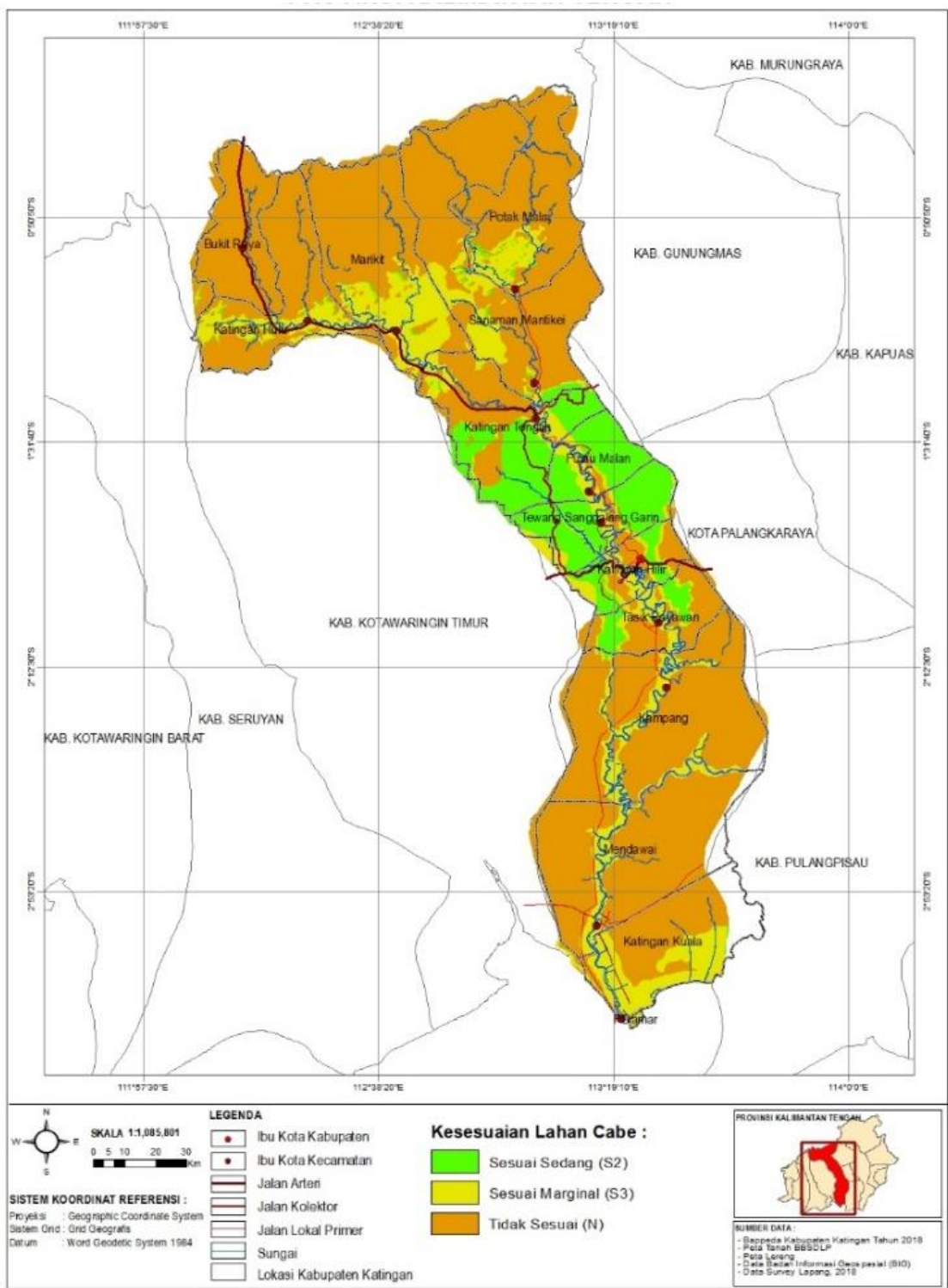


D. Cabai

Daerah yang akan dikembangkan dan memiliki potensi terbesar untuk lahan cabai berada pada zona tengah dan selatan Kabupaten Katingan, dengan dominasi

potensi tertinggi berada zona tengah yaitu pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Katingan Hilir.

Gambar 6.6 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah



E. Jagung

Pemerintah Kabupaten Katingan berencana mengembangkan pertanian jagung sebagai salah satu komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan, hal ini dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sedang berupaya mewujudkan swasembada jagung melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan. Produksi jagung

di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan produksi dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 luas tanam jagung 1.732 hektar yang terdiri dari 1.597 hektar merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan 135 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen jagung pipilan 48 hektar dengan produksi 133 ton. Sedangkan pada tahun 2018 luas tanam 1.129 hektar yang terdiri dari bantuan Pemerintah Pusat seluas 987 hektar dan 142 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen (jagung pipilan) 146 hektar dengan produksi 973 ton, selebihnya dipanen muda (untuk sayuran). Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan.

F. Bawang Merah

Selain jagung, komoditi bawang merah juga menjadi komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan. Pemilihan komoditi ini untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak. Tahun 2018, telah dilakukan penanaman (Luas Tambah Tanam) seluas 3 hektar di Kecamatan Katingan Hilir dengan produktivitas sebesar 3 ton/hektar dan produksi sebesar 9 ton, sedangkan tahun 2019 akan dilakukan pengembangan pada kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan. Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman bawang merah di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan.

Untuk mendukung pengembangan beberapa komoditi ini, Pemerintah Daerah berencana mengembangkan kawasan-kawasan agrowisata di Kabupaten Katingan, dengan memadukan variasi komoditi-komoditi unggulan dan komoditi non unggulan yang merupakan buah lokal, yakni langsung/tanggu madu dan nangkadak (nangka cempedak).

6.3.2. Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan untuk mendukung Kegiatan Pertanian, Industri dan Pariwisata

A. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pengembangan Infrastruktur terutama jalan dan jembatan masih merupakan salah prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan. Selain untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, rencana pengembangan infrastruktur juga akan difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi pusat pengembangan pertanian, perindustrian dan pariwisata.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Katingan melanjutkan kebijakan ini guna tercapainya aksesibilitas angkutan barang, orang/tenaga kerja/jasa yang memadai, yakni hasil produksi pertanian, barang kebutuhan rumah tangga dan industri,

pengangkutan material konstruksi, serta pariwisata sehingga secara umum memacu pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Kabupaten Katingan yang Bermartabat.

Pengembangan Infrastruktur jalan di Kabupaten Katingan dimaksud diatas Pemerintah Daerah kedepan memprioritaskan Pembangunan jalan antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan ruas jalan Mendawai sampai ke Pelabuhan Laut Bajungkal (Sei Kaki) dimana jalan ini direncanakan melewati kawasan industri dan kawasan Agropolitan.
2. Pembangunan Ruas Jalan Kereng Pangi-Baun Bango–Kampung Keramat-Pagatan, sekaligus akses untuk menuju obyek wisata Punggualas yang berada di jalan masuk Taman Nasional Sebangau di Desa Keruing.
3. Pembangunan trase jalan Tumbang Sanamang sampai batas dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.
4. Peningkatan Jalan Mendawai – Katingan I – Katingan II, jalan ini merupakan jalan Poros/Penghubung Desa sekaligus Jalan yang berada pada Kawasan Agropolitan dan Pertanian serta Industri Pertanian dan Gudang Bulog.
5. Pembangunan Jalan Telangkah – Tumbang Samba, jalan ini berada pada di sebelah kiri mudik sungai Katingan yang menghubungkan desa-desa dan kawasan-kawasan pertanian.

Selain itu, sedang dibangun melalui kerjasama antar pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintahan Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringan Timur trase jalan penghubung antar kabupaten yaitu Trase Jalan Pegatan-Kampung Melayu-batas Kotawaringin Timur.

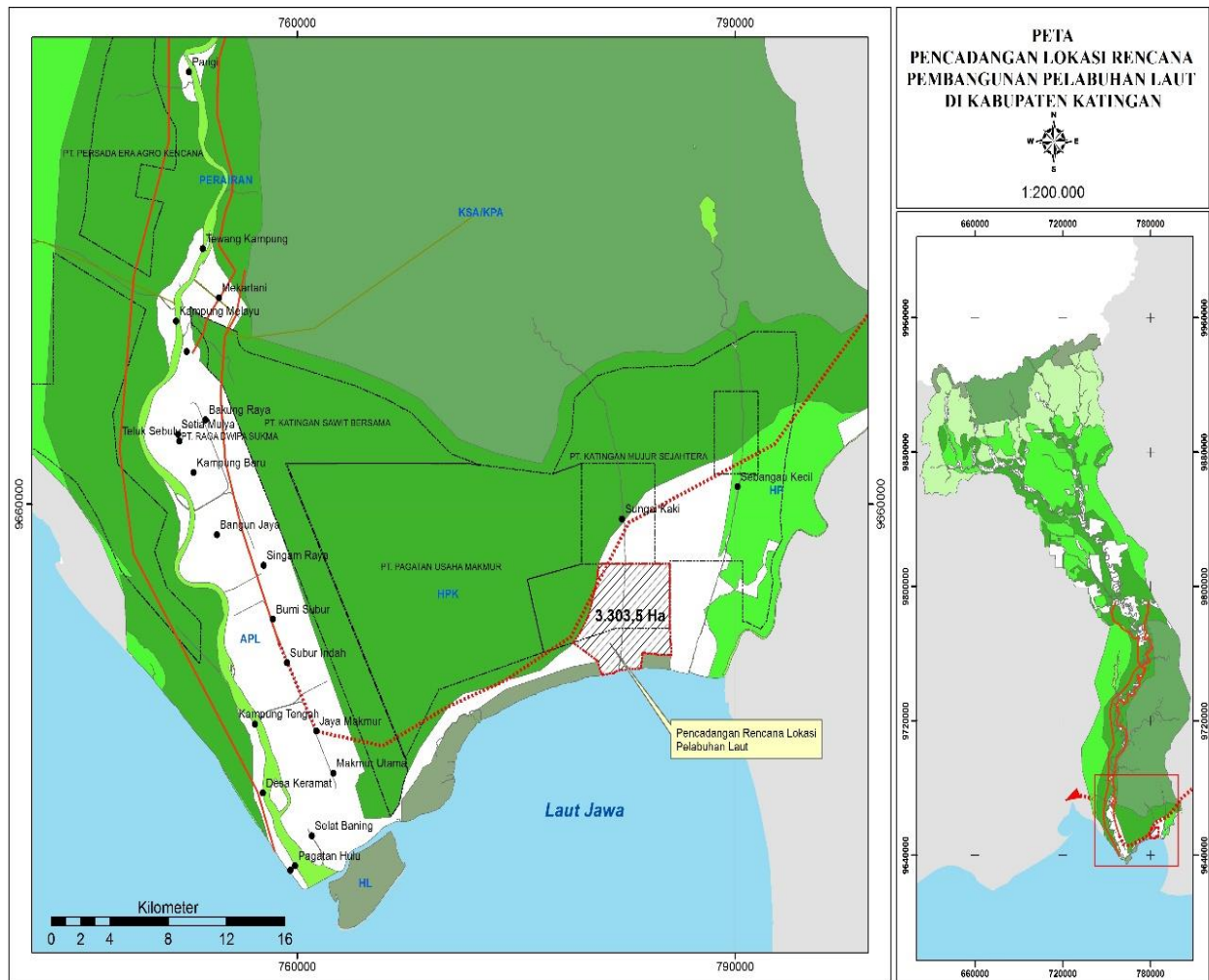
B. Pembangunan Pelabuhan

Kabupaten Katingan dalam perkembangannya lebih diarahkan sebagai wilayah dengan fungsi utama regional dan menjadi outlet ekonomi dan produksi yang diharapkan dapat melayani Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangkaraya.

Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah pengembangan kawasan juga didukung dengan pengembangan transportasi laut berupa pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Pegatan-Mendawai serta pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Katingan Kuala. Pada saat ini baik Pemerintah Kabupaten maupun melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya mendorong Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Pelabuhan Pegatan-Mendawai di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten Katingan memantapkan pencadangan kawasan pengembangan Pelabuhan Mendawai-Pegatan (Pelabuhan Bajungkal) di daerah Sei Kaki. Pencadangan rencana lokasi pelabuhan laut dicadangkan seluas 3.303,5 Ha sepenuhnya pada kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL) berdasarkan RTRW Provinsi perda Nomor 5 tahun 2015 dan Perda RTRW Kabupaten Katingan.

Gambar 6.7 Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut



C. Pembangunan Jaringan Irigasi

Kabupaten Katingan mempunyai potensi Bidang Pertanian tanaman pangan, sehingga untuk rencana lima tahun kedepan fokus pemeliharaan jaringan irigasi yang diarahkan pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) melalui pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Adapun jumlah Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang dikelola adalah 46 DIR dengan Luas Baku 18.482 Ha, Luas Potensial 10.946 Ha dan Luas Fungsional 3.344 Ha, tersebar hampir diseluruh kecamatan.

Di Kabupaten Katingan juga terdapat beberapa Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha dan kewenangan pusat luasan lebih dari 3.000 Ha, tersebar di 5 kecamatan yang potensial dan fungsional dikembangkan, yakni Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing.

Kabupaten Katingan juga mengupayakan Pembangunan Irigasi Permukaan dalam hal ini Irigasi Teknis dengan rencana pembangunan Bendung Manten di desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dengan harapan pola tanam dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) kali setahun, dengan adanya ketersediaan air untuk lahan sawah disekitarnya melalui Bendung Manten tersebut.

Kondisi Jaringan Irigasi masih perlu mendapat perhatian dengan perlu dilengkapi Bangunan dan Bangunan Pelengkap seperti : Pintu Air, Tabat / Drumple, Gorong-gorong, jalan Inspeksi dan Jembatan serta infrastruktur lainnya, Selanjutnya guna menjaga kondisi Jaringan tetap dalam kondisi baik diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan.

Pengelolaan di Bidang Sumber Daya Air juga dilaksanakan Program Pengendalian Banjir, hal ini dilakukan melalui kegiatan Normalisasi Sungai dan Pengendalian genangan / banjir melalui pembangunan Kanal Pengendalian Banjir.

Kondisi sungai dan anak anak sungai yang ada masih sangat diperlukan dilakukannya Normalisasi dan Pemeliharaan guna membentuk profil sungai dengan daya tampung debit yang memadai dan juga tetap dilakukan kegiatan yang perlu secara konsisten untuk mengatasi banjir, genangan dan limpasan air permukaan dengan sistem Kanal Pengendali Banjir khususnya mengatasi genangan di wilayah strategis seperti di Kota Kasongan.

6.3.3. Pengembangan Ekowisata pada Kawasan Punggualas Taman Nasional Sebangau untuk Kegiatan Pariwisata berbasis Alam

Sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengembangan obyek-obyek pariwisata, dimana salah satu lokasi yang secara bersama-sama akan dikembangkan dengan Pemerintah Kabupaten Katingan adalah Kawasan Ekowisata Punggualas yang merupakan kawasan pelestarian ekosistem hutan rawa gambut dan menjadi habitat orang utan liar, hewan dan tumbuhan endemik lainnya.

Lokasi ini berada di Kecamatan Kamipang dan menjadi bagian dari Taman Nasional Sebangau. Dalam lima tahun kedepan kawasan ini didorong menjadi lokasi kawasan wisata yang akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdesaan meliputi Desa Baun Bango, Jahanjang, Keruing dan Muara Bulan. Untuk mendukung pengembangan kawasan ini, pemerintah daerah akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas menuju lokasi
- Meningkatkan kegiatan promosi wisata daerah
- Pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata daerah

- Meningkatkan pemberdayaan dan pengetahuan masyarakat sekitar tentang konsep ekowisata dan konservasi cagar budaya
- Secara intens membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk dukungan pendanaan dan pengembangannya.

Untuk kawasan lain yang saat ini sudah berkembang seperti obyek wisata Bukit Batu (Kasongan), Danau Bulat (Jahanjang). Riam Mangkikit (Tumbang Kalemei) dan obyek wisata lain ditambah dengan beberapa situs/cagar budaya, bangunan dan atraksi budaya lokal akan tetap dikembangkan secara bersama-sama dalam beberapa paket wisata daerah. Kedepannya pengembangan wisata daerah dan kebijakannya secara khusus akan dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Wisata Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2024.

6.3.4. Pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara

Katingan memiliki lahan dan kawasan hutan yang masih luas yang bila dikelola secara produktif dan berkelanjutan akan meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi. Rencana penyediaan lahan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan strategis di Kalimantan Tengah menjadi salah satu dasar yang melatarbelakangi rencana pengembangan pusat produksi perfilman di Asia Tenggara. Kebijakan ketataruangan Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam Perda RTRW Kabupaten Katingan, kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan strategis yang berada di Kecamatan Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing.

Keuntungan yang didapat oleh Kabupaten Katingan dengan adanya Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara secara sosial ekonomi adalah peningkatan status sosial ekonomi Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum di Asia Tenggara karena lokasi ini akan menjadi pusat perfilman, wisata sekaligus konservasi alam yang terbesar di Asia Tenggara.

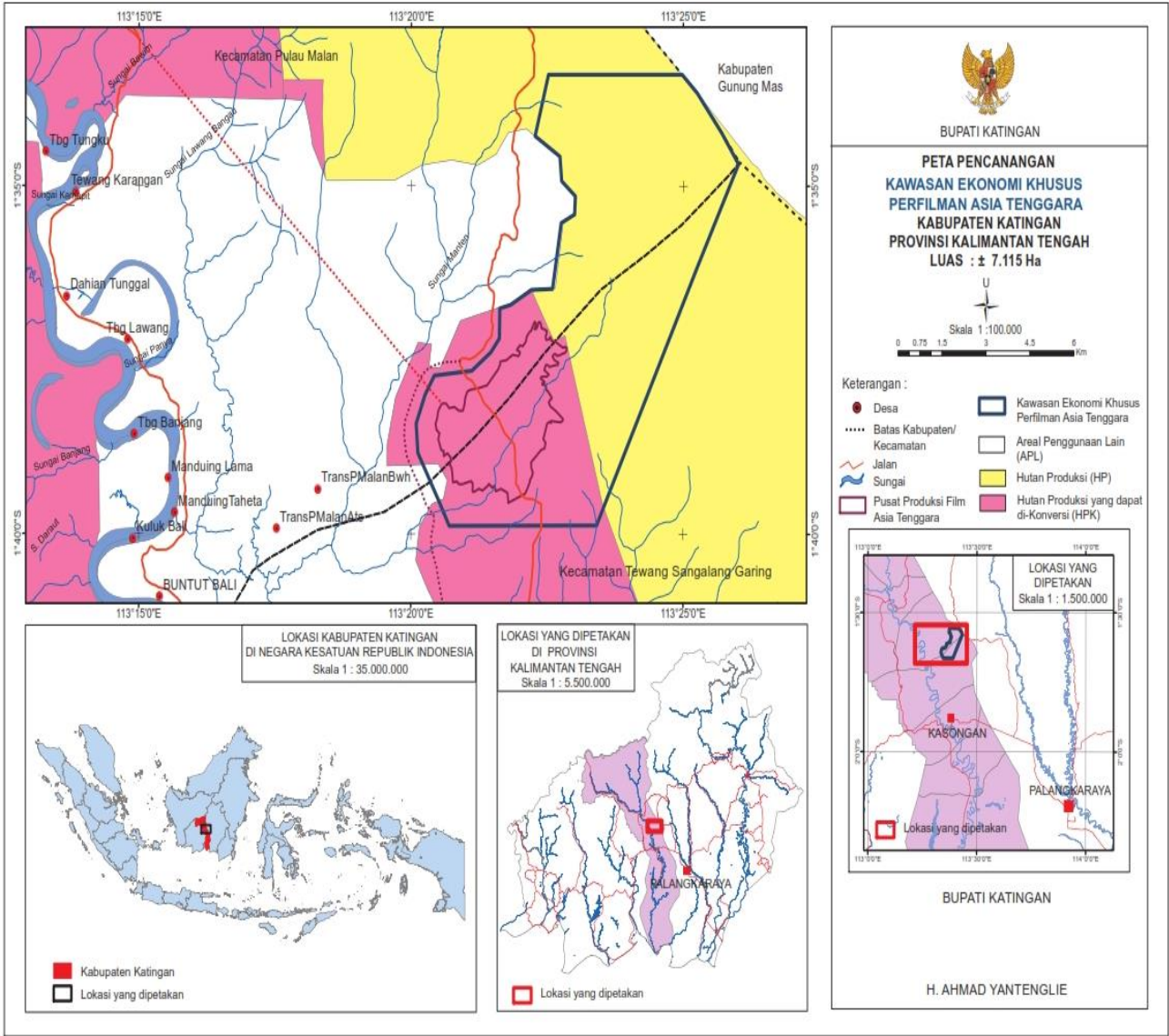
Warga Kalimantan Tengah bisa menikmati aneka rumah tradisional Indonesia yang akan dibangun sebagai sarana shooting film. Selain itu Rumah Betang dan Rumah adat berbagai suku khas Kalteng akan menjadi terkenal seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung. Bahkan bangunan-bangunan bercirikan mancanegara serta bangunan modern sesuai kebutuhan akan dibangun menjadi fasilitas utama.

Lebih jauh bila Thailand, Malayasia, Filipina dan Singapura ataupun negara lain memproduksi film mereka di sini maka bangunan tradisional khas negara mereka tidak akan dibongkar, sehingga bisa menjadi obyek wisata bagi Kalteng dan

wisatawan yang berkunjung. Kawasan ini diharapkan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Berikut ini disajikan peta lokasi perfinan Asia Tenggara di Kabupaten Katingan:

Gambar 6.8 Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2018

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kerangka pendanaan pembangunan akan memberikan gambaran besaran alokasi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, alokasi Belanja Langsung akan digunakan untuk mendanai Program Perangkat Daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kerangka pendanaan pembangunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.1. Selanjutnya, pada Tabel 7.2 disajikan Program Perangkat Daerah yang disertai dengan pagu indikatifnya. Rencana Program Perangkat Daerah dan Pagu Indikatifnya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun kegiatan di Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

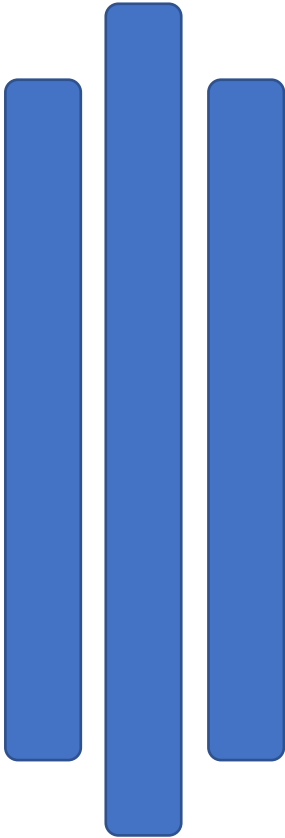
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan demikian, program perangkat daerah dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan merupakan program yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan visi dan misi kepala daerah pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Katingan

Uraian	APBD	APBD	Proyeksi			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	1.328.762.409.460,00	1.319.711.596.079,38	1.297.437.777.783,61	1.302.303.917.886,78	1.313.083.869.142,95	1.323.876.756.102,07
BELANJA TIDAK LANGSUNG	679.982.076.425,00	729.173.685.858,45	714.026.628.455,55	716.604.618.745,60	719.211.232.957,96	721.846.700.084,02
Belanja Pegawai	424.218.174.412,00	443.699.192.713,84	447.248.786.255,55	450.826.776.545,60	454.433.390.757,96	458.068.857.884,02
Belanja Subsidi	1.332.222.142,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
Belanja Hibah	43.512.758.513,00	21.656.400.000,00	10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	6.282.000.000,00	32.701.395.344,61	25.661.144.400,00	25.661.144.400,00	25.661.144.400,00	25.661.144.400,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.722.406.858,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	201.814.514.500,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00	225.266.697.800,00
Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	648.780.333.035,00	590.537.910.220,93	583.411.149.328,06	585.699.299.141,18	593.872.636.184,99	602.030.056.018,04
Belanja Pegawai	51.909.427.766,00	57.735.742.350,00	58.341.114.932,81	61.498.426.409,82	64.732.117.344,16	66.223.306.161,98
Belanja Barang dan Jasa	232.329.562.598,00	298.380.729.862,78	204.193.902.264,82	202.066.258.203,71	201.916.696.302,90	198.669.918.485,95
Belanja Modal	364.541.342.671,00	234.421.438.008,15	320.876.132.130,44	322.134.614.527,65	327.223.822.537,93	337.136.831.370,10

Sumber: hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah												PERANGKAT DAERAH
				APBD 2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar			355.545.648.869,20		375.067.137.987,64		369.104.400.876,18		372.839.959.956,38		372.476.222.308,55		1.845.033.369.998		
1	Pendidikan			70.446.669.254,78		67.054.745.149,00		67.652.812.220,19		73.917.278.331,82		74.357.444.027,66		353.428.948.983		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	9.544.827.700,00	100%	11.173.403.419,00	100%	11.000.000.000,00	100%	11.065.503.259,37	100%	11.131.396.580,28	100,00%	53.915.130.959	Dinas Pendidikan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%	75%	44.000.000,00	80%	72.380.000,00	85%	120.000.000,00	90%	600.000.000,00	95%	603.572.905,06	100,00%	1.439.952.905	Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	50.000.000	Dinas Pendidikan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	153.000.000,00	100%	95.920.000,00	100%	77.658.290,00	100%	500.000.000,00	100%	502.977.420,88	100,00%	1.329.555.711	Dinas Pendidikan
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	86,51%	86,94%	1.988.840.509,00	87,16%	1.310.300.811,00	87,38%	1.329.926.759,04	87,60%	3.201.571.333,63	87,82%	3.220.636.184,31	87,82%	11.051.275.597	Dinas Pendidikan
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	APK SD/MI/Paket A	101,43%	101,94%	53.620.875.045,78	102,19%	51.730.839.819,00	102,45%	52.234.225.328,04	102,70%	52.545.271.874,36	102,96%	52.858.170.653,64	102,96%	262.989.382.721	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MT/Paket B	90,66%	91,11%		91,34%		91,57%		91,80%		92,03%		92,03%		
		APM SD/MI/Paket A	87,20%	87,64%		87,86%		88,07%		88,29%		88,52%		88,52%		
		APM SMP/MT/Paket B	64,72%	65,04%		65,21%		65,37%		65,53%		65,70%		65,70%		
7	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99,41%	99,43%	1.196.800.000,00	99,46%	1.301.426.500,00	99,48%	1.500.000.000,00	99,51%	1.508.932.262,64	99,53%	1.517.917.715,49	99,53%	7.025.076.478	Dinas Pendidikan
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,36%	77,75%	-	77,94%	794.816.000,00	78,14%	806.720.913,27	78,33%	2.091.591.936,32	78,53%	2.104.047.035,33	78,53%	5.797.175.885	Dinas Pendidikan
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan (dapodik)	83,33%	83,75%	3.848.326.000,00	83,96%	575.658.600,00	84,17%	584.280.929,83	84,38%	2.404.407.665,50	84,59%	2.418.725.532,68	84,59%	9.831.398.728	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan			101.271.634.729,57		81.723.804.688,00		90.698.247.942,93		96.214.312.797,35		96.709.840.862,28		466.617.841.020		
	Kesehatan			72.475.390.478,92		66.628.061.528,00		71.511.201.520,71		76.994.904.733,22		77.453.397.207,29		365.062.955.468		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	60%	65%	6.155.181.008,92	70%	10.052.680.870,00	80%	10.203.251.937,93	90%	10.264.010.688,67	100%	10.325.131.248,15	100%	47.000.255.754	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	65%	1.984.000.000,00	70%	830.000.125,00	75%	842.432.033,15	80%	847.448.582,60	95%	852.495.004,81	95%	5.356.375.746	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	112.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	112.500.000	Dinas Kesehatan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	65%	152.000.000,00	70%	5.399.789.363,85	80%	5.480.668.490,69	90%	5.513.305.004,29	100%	5.546.135.863,17	100%	22.091.898.722	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	70%	213.000.000,00	80%	216.190.356,67	90%	217.477.736,03	100%	218.772.781,54	100%	865.440.874	Dinas Kesehatan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60%	65%	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	55.000.000,00	Dinas Kesehatan
7	Program Pelayanan Administrasi Umum	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	60%	65%	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
8	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	60%	65%	499.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	499.740.000,00	Dinas Kesehatan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan keluarga siaqa	60%	65%	171.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	171.500.000,00	Dinas Kesehatan
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber PHBS	60%	65%	715.610.000,00	75%	276.300.000,00	80%	280.438.476,75	90%	1.271.605.107,02	100%	1.279.177.314,21	100%	3.823.130.898	Dinas Kesehatan
11	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksananya cakupan program kesehatan kerja dan olahraga	12 bulan	12 bulan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		50.000.000	Dinas Kesehatan
12	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Cakupan Rumah Tangga sehat			197.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		197.200.000	Dinas Kesehatan
13	Program Pendataan Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga	terlaksana pertemuan PIS-PK	16 UPTD	16 UPTD	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		100.000.000	Dinas Kesehatan
14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting menurun	26,50%	26%	1.489.108.000,00	25,2%	1.371.749.400,00	24,4%	1.392.295.737,32	23,6%	1.400.586.638,12	22,8%	1.408.926.909,92	22,8%	7.062.666.685	Dinas Kesehatan
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	AKABA			100.000.000,00											Dinas Kesehatan
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	85%	100%	788.982.000,00	100%	394.672.502,00	100%	400.583.985,80	100%	1.754.641.665,70	100%	1.765.090.279,16	100%	5.103.970.433	Dinas Kesehatan
17	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	menurunnya kasus penyakit DBD	50%	50%	135.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		135.650.000	Dinas Kesehatan
18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	0%	4%	7.869.800.000,00	6%	6.557.998.513,00	8%	6.656.225.528,50	10%	6.695.862.298,24	12%	6.735.735.098,68	12%	34.515.621.438	Dinas Kesehatan
19	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	60%	65%	3.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000.000	Dinas Kesehatan
20	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75%	80%	499.534.000,00	85%	165.350.000,00	87%	624.429.330,15	90%	1.021.592.026,00	97%	1.027.675.444,85	97%	3.338.580.801	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21	Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya	100%	100%	23.405.584.081,00	100%	23.894.162.118,00	100%	23.894.162.118,00	100%	24.036.448.072,42	100%	24.179.581.317,18	100%	119.409.937.707	Dinas Kesehatan
22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (lansia)	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	60%	65%	99.650.000,00	70%	125.000.000,00	80%	125.000.000,00	90%	667.598.080,17	100%	671.573.521,10	100%	1.688.821.601	Dinas Kesehatan
23	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	85%	65%	325.000.000,00	70%	100.000.000,00	80%	101.497.820,03	90%	451.593.386,89	100%	454.282.554,05	100%	1.432.373.761	Dinas Kesehatan
24	Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Cakupan penjarangan siswa SD dan setingkat	60%	60%	115.415.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.415.000	Dinas Kesehatan
25	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	51%	20 Desa	816.750.000,00	20 Desa	745.600.000,00	20 Desa	756.767.746,17	20 Desa	824.974.934,23	20 Desa	829.887.529,42	20 Desa	3.973.980.210	Dinas Kesehatan
26	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi	75%	80%	558.901.466,00	85%	258.400.000,00	90%	262.270.366,97	95%	536.660.227,84	100%	539.855.954,58	100%	2.156.088.015	Dinas Kesehatan
		- Cakupan penemuan dan penanganan kesehatan diabetes miletus														
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita gangguan jiwa berat														
27	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	80%	80%	169.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	169.290.000	Dinas Kesehatan
28	Program Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Cakupan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	80%	80%	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	30.000.000	Dinas Kesehatan
29	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin	80%	85%	3.492.160.000,00	88%	1.347.760.000,00	90%	1.367.947.019,28	95%	1.376.092.927,31	100%	1.384.287.342,94	100%	8.968.247.290	Dinas Kesehatan
30	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat	80%	70%	123.000.000,00	75%	1.270.210.636,15	80%	1.289.236.105,52	85%	1.296.913.302,52	95%	1.304.636.216,02	95%	5.283.996.260	Dinas Kesehatan
31	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	90%	5.017.200.978,00	92%	4.517.500.000,00	95%	4.585.164.019,99	97%	4.612.467.946,18	100%	4.639.934.462,93	100%	23.372.267.407	Dinas Kesehatan
32	Program Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	90%	140.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	140.000.000	Dinas Kesehatan
33	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu	9%	9,8%	13.796.633.945,00	10%	9.107.888.000,00	12%	13.032.640.447,80	14%	14.205.626.108,99	16%	14.290.218.364,58	16%	64.433.006.866	Dinas Kesehatan
RSUD					28.796.244.250,65		15.095.743.160,00		19.187.046.422,22		19.219.408.064,13		19.256.443.654,99		101.554.885.552	
1	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kemandirian BLUD	BLUD	BLUD	13.348.810.781,65	BLUD	9.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	13.000.000.000,00	BLUD	61.348.810.782	BLUD RSUD
2	Program Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Pelayanan RS	-	-	-	Pratama	2.048.746.800,00	Pratama	2.079.433.340,00	Madya	2.090.309.915,43	Madya	2.102.757.380,21	Madya	8.321.247.436	RSUD
3	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS	80%	82%	2.361.449.519,00	85%	2.455.008.360,00	87%	2.491.779.967,03	90%	2.504.813.341,20	92%	2.519.729.108,28	92%	12.332.780.296	RSUD
4	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	70%	72%	1.160.000.000,00	75%	1.591.988.000,00	77%	1.615.833.115,19	80%	1.624.284.807,50	82%	1.633.957.166,50	82%	7.626.063.089	RSUD
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan keluarga siaga	60%	65%	3.145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	80%	85%	1.320.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber PHBS	60%	65%	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	51%	20 Desa	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	65%	124.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	6.816.983.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.816.983.950	RSUD
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	RSUD
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				110.501.092.233,68		158.663.279.053,94		140.678.591.482,74		125.327.996.764,73		125.564.716.783,80		660.735.676.319	
					111.988.092.233,68		161.126.279.053,94		143.583.848.267,92							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	5.039.240.000,00	90%	4.971.489.900,00	90%	5.045.953.871,67	90%	5.072.346.974,47	90%	5.102.551.998,06	90%	25.231.582.744	DisPUPRHub
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	1.704.810.000,00	90%	1.589.910.000,00	90%	1.613.723.990,49	90%	1.622.164.650,92	90%	1.631.824.384,73	90%	8.162.433.026	DisPUPRHub
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	200.000.000,00	90%	300.000.000,00	90%	304.493.460,10	90%	306.086.127,69	90%	307.908.822,15	90%	1.418.488.410	DisPUPRHub

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	59,23%	61,39%	5.955.026.000,00	62,47%	6.704.726.615,01	63,55%	6.805.151.353,41	64,44%	6.840.746.022,69	65,72%	6.881.481.582,78	65,72%	33.187.131.574	DisPUPRHub
7	Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjir yang dilakukan peninokatan/pemeliharaan	9,26%	16,43%	200.000.000,00	19,28%	350.000.000,00	22,13%	379.817.501,32	24,98%	381.804.154,90	27,83%	384.077.738,23	27,83%	1.695.699.394	DisPUPRHub
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang dibangun	797,2 Km	2,51 (20,5 Km)	57.237.164.648,30	1,52 (12,61 Km)	126.792.175.409,07	1,38 (11,66 Km)	116.076.661.016,82	1,37 (11,66 Km)	100.500.000.000,00	1,35 (11,66 Km)	100.500.000.000,00	1,35 (11,66 Km)	501.106.001.074	DisPUPRHub
		Persentase jalan yang ditingkatkan	104,73 Km	13,76 (16,71 Km)		11,04 (15,08 Km)		9,95 (15,08)		9,05 (15,08 Km)		8,3 (15,08 Km)		8,3 (15,08 Km)		
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	161,86 Km	1,91 (3,15 Km)	13.905.592.405,88	2,42 (4,1 Km)	7.532.613.432,44	3,06 (5,33 Km)	8.557.267.750,90	3,82 (6,93 Km)	8.699.411.674,82	4,73 (9,01 Km)	8.840.088.521,86	4,73 (9,01 Km)	47.534.973.786	DisPUPRHub
10	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	-	1	400.820.000,00	1	707.980.000,00	1	718.584.266,27	1	722.342.855,61	1	726.644.293,01	5	3.276.371.415	DisPUPRHub
11	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Pola Ruang	-	-	0	80%	205.600.000,00	80%	208.679.517,99	80%	209.771.026,18	80%	211.020.179,44	80%	835.070.724	DisPUPRHub
12	Program Pemberdayaan Jasa konstruksi	Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	618.220.000,00	100%	553.970.000,00	100%	562.267.473,64	100%	565.208.440,52	100%	568.574.167,35	100%	2.868.240.082	DisPUPRHub
13	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Alat Berat	Tingkat Capaian Pemasukan Asli Daerah melalui Alat Berat	50%	70%	-	70%	400.000.000,00	70%	405.991.280,13	70%	408.114.836,92	70%	410.545.096,19	70%	1.624.651.213,25	DisPUPRHub
14	Penanaman Pohon Pada DAS Kritis (DBH-DR)	Persentase Terlaksananya Penanaman Pohon Pada DAS Kritis Sebagai Kewajiban Pemegang IPPKH	-	90%	25.000.219.179,50	90%	8.554.813.697,43	-	-	-	-	-	-	90%	33.555.032.877	DisPUPRHub
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				36.779.828.725,00		44.106.478.570,00		51.767.279.719,83		58.976.990.990,99		57.331.106.149,56		248.961.684.155	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.018.715.000,00	100%	2.804.000.000,00	100%	2.845.998.873,73	100%	2.860.885.006,81	100%	2.877.921.124,32	100%	14.407.520.005	Disperkimtan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapat layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	911.760.000,00	100%	840.500.000,00	100%	853.089.177,38	100%	857.551.301,08	100%	862.657.883,38	100%	4.325.558.362	Disperkimtan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	30.000.000	Disperkimtan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	60.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	101.497.820,03	100%	102.028.709,23	100%	102.636.274,05	100%	466.162.803	Disperkimtan
5	Program Peningkatan dan Pemerataan Sumber Daya Energi	Persentase jaringan LPJU yang berfungsi baik	-	36%	1.850.000.000,00	41%	3.850.000.000,00	46%	3.907.666.071,27	51%	3.928.105.305,36	56%	3.951.496.550,87	56%	17.487.267.927	Disperkimtan
6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kawasan perkotaan dan perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai	-	29,73%	6.295.275.000,00	36,13%	12.100.000.000,00	42,53%	20.000.000.000,00	48,93%	28.000.000.000,00	55,33%	29.684.539.183,40	55,33%	96.079.814.183	Disperkimtan
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan	-	61,90%	10.575.476.000,00	66,91%	8.210.636.000,00	71,91%	8.200.000.000,00	76,91%	8.242.890.491,77	81,91%	8.291.975.600,30	81,91%	43.520.978.092	Disperkimtan
		Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat	-	3%		8%		12%		15%		18%			-	
8	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase jalan desa yang dibangun	-	20%	8.270.000.000,00	30%	8.900.000.000,00	40%	8.438.463.953,17	50%	7.526.152.738,88	60%	4.056.082.683,11	60%	37.190.699.375	Disperkimtan
9	Program Pembangunan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan SPM Perumahan Rakvat	-	26,14%	972.560.000,00	30,40%	1.121.342.570,00	34,67%	1.410.906.987,59	38,93%	1.418.286.804,00	43,19%	1.426.732.477,49	43,19%	6.349.828.839	Disperkimtan
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase taman yang dibangun	-	20%	1.114.020.725,00	20%	1.980.000.000,00	20%	2.009.656.836,66	20%	2.020.168.442,75	20%	2.032.198.226,16	20%	9.156.044.231	Disperkimtan
		Persentase taman yang dipelihara	-	100%		100%		100%		100%		100%			-	
11	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Perkotaan	Persentase bahu jalan dan drainase yang dibersihkan di wilayah perkotaan	-	40%	3.682.022.000,00	60%	4.200.000.000,00	70%	4.000.000.000,00	80%	4.020.922.191,11	90%	4.044.866.146,49	90%	19.947.810.338	Disperkimtan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				33.678.667.417,17		20.039.620.935,48		14.776.147.621,03		14.853.588.434,17		14.942.183.394,49		98.290.207.802	
	Satuan Polisi Pamong Praja				9.637.018.579,50		7.764.318.950,00		8.225.008.670,13		8.268.029.970,94		8.317.264.781,09		42.211.640.952	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	7.896.742.000,00	100%	7.269.593.950,00	100%	7.378.479.384,51	100%	7.417.072.873,45	100%	7.461.240.368,74	100%	37.423.128.577	Satpol PP
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	143.575.829,50	80%	10.000.000,00	80%	143.575.829,50	80%	144.326.809,74	85%	145.186.253,05	80%	586.664.722	Satpol PP
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	200.000.000,00	90%	20.000.000,00	90%	200.000.000,00	90%	201.046.109,56	90%	202.243.307,32	80%	823.289.417	Satpol PP
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	100%	10.000.000,00	100%	23.100.750,00	100%	23.221.579,58	100%	23.359.860,41	100%	79.682.190	Satpol PP
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	23.100.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.100.750	Satpol PP
6	Program Pemeliharaan Kentrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang diselesaikan	80%	75%	1.274.085.000,00	70%	159.725.000,00	70%	162.117.393,05	60%	162.965.355,82	60%	163.935.788,72	80%	1.922.828.538	Satpol PP
7	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.	Jumlah korban jiwa akibat kebakaran	0	0	99.515.000,00	0	80.000.000,00	0	99.515.000,00	0	100.035.517,96	0	100.631.213,64	80%	479.696.732	Satpol PP

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah harta benda akibat kebakaran	0	0		0		0		0		0		0	-	
8	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan trantibum	80%	80%	-	80%	110.000.000,00	80%	111.647.602,04	80%	112.231.580,15	80%	112.899.901,45	80%	446.779.084	Satpol PP
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap perda/perkada	80%	75%	-	70%	105.000.000,00	65%	106.572.711,03	60%	107.130.144,69	50%	107.768.087,75	80%	426.470.943	Satpol PP
Kesatuan Bangsa dan Politik					2.716.456.400,00	2.636.149.770,00		2.691.378.549,36		2.705.609.400,49		2.721.865.067,95		13.471.459.188		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	50%	60%	1.199.655.400,00	70%	1.403.055.770,00	75%	1.424.071.020,40	75%	1.431.519.691,91	80%	1.440.044.165,15	80%	6.898.346.047	Bakesbangpol
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	70%	73.975.000,00	75%	146.388.000,00	75%	148.580.628,79	75%	149.357.786,87	75%	150.247.188,85	75%	668.548.605	Bakesbangpol
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	65%	25.042.000,00	70%	25.000.000,00	75%	25.374.455,01	80%	25.507.177,31	85%	25.659.068,51	85%	126.582.701	Bakesbangpol
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	-	100%	15.744.000,00	100%	15.979.816,79	100%	16.219.165,68	100%	47.942.982	Bakesbangpol
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15.744.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15.744.000	Bakesbangpol
6	Program Pendidikan Politik dan Kemasyarakatan	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	70%	80%	99.404.000,00	85%	141.779.000,00	88%	143.902.594,26	90%	144.655.283,66	95%	145.516.682,98	95%	675.257.561	Bakesbangpol
7	Program Kewaspadaan	Persentase kecamatan yang diawasi keamanannya	70%	75%	1.084.394.000,00	80%	645.602.000,00	85%	655.271.956,09	88%	658.699.387,36	90%	662.621.837,98	90%	3.706.589.181	Bakesbangpol
8	Program Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa	80%	85%	218.242.000,00	85%	274.325.000,00	85%	278.433.894,81	88%	279.890.256,60	90%	281.556.958,78	90%	1.332.448.110	Bakesbangpol
Penanggulangan Bencana					21.325.192.437,67	9.639.152.215,48		3.859.760.401,55		3.879.949.062,74		3.903.053.545,45		42.607.107.663		
1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Presentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.260.574.370,00	100%	1.519.106.953,00	100%	1.241.860.441,27	100%	1.248.356.051,64	100%	1.255.789.814,38	100%	6.525.687.630	BPBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	143.300.000,00	100%	678.000.000,00	100%	388.155.219,82	100%	390.185.484,25	100%	392.508.977,06	100%	1.992.149.681	BPBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	32,43%	32,43%	97.720.000,00	35,14%	100.000.000,00	40,54%	101.497.820,03	40%	102.028.709,23	40%	102.636.274,05	40%	503.882.803	BPBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20%	60%	-	60%	11.000.000,00	60%	11.164.760,20	60%	11.223.158,02	60%	11.289.990,15	60%	44.677.908	BPBD
5.	Program Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase cakupan kecamatan siapsiaga menghadapi bencana	84,62%	84,62%	146.600.000,00	84,62%	400.000.000,00	100%	205.991.280,13	100%	207.068.727,36	100%	208.301.788,87	100%	1.167.961.796	BPBD
6.	Program Logistik dan Peralatan	Jumlah posko yang mendapat ketersediaan logistik	5 posko	5 posko	169.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.200.000	BPBD
7.	Program Pengendalian dan Pencegahan Bencana	Presentase penurunan titik HOTSPOT kebakaran hutan dan lahan	0%	19,22%	-	10%	1.169.000.000,00	10%	686.509.516,19	10%	690.100.337,01	10%	694.209.775,32	10%	3.239.819.629	BPBD
		Persentase Penurunan Luasan Wilayah terdampak banjir	100%	0%		0%		0%		0%		0%		0%	-	
8.	Program Penanganan Bencana (Tanggap Darurat)	Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat	55,16%	88,89%	-	88,89%	1.496.180.000,00	88,89%	1.018.590.083,77	88,89%	1.023.917.867,87	88,89%	1.030.015.136,75	89%	4.568.703.088	BPBD
9.	Program Pasca Bencana	Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0%	20%	81.540.000,00	40%	400.000.000,00	40%	205.991.280,13	42,86%	207.068.727,36	42,86%	208.301.788,87	43%	1.102.901.796	BPBD
10	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH - DR)	Cakupan luasan resiko bencana akibat kebakaran hutan dan lahan			19.426.258.067,67		3.865.865.262,48		-		-		-		23.292.123.330	BPBD
6 Sosial					2.867.756.509,00	3.479.209.591,22		3.531.321.889,47		3.549.792.637,33		3.570.931.090,77		16.999.011.718		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.486.140.400,00	100%	1.723.251.891,22	100%	1.749.063.103,27	100%	1.758.211.661,39	100%	1.768.681.533,62	100	8.485.348.590	Dinas Sosial
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	60%	65%	10.000.000,00	71%	177.826.500,00	77%	180.490.020,94	84%	181.434.082,62	92%	182.514.493,87	92%	732.265.097	Dinas Sosial
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	33.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.750.000	Dinas Sosial

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		2020		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2019				2021								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	15%	18%	45.000.000,00	36%	50.000.000,00	49%	50.748.910,02	60%	51.014.354,62	75%	51.318.137,02	25	248.081.402	Dinas Sosial
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	90%	17.070.000,00	90%	17.325.677,88	90%	17.416.300,67	100%	17.520.011,98	100%	69.331.991	Dinas Sosial
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	90%	14.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	14.940.000	Dinas Sosial
7	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial	57,14%	57,89%	394.637.400,00	58,96%	522.149.700,00	60,45%	529.970.562,81	62,28%	532.742.599,16	64,27%	535.914.997,04	64,27%	2.515.415.259	Dinas Sosial
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	-	-	-	80%	141.060.000,00	90%	143.172.824,94	95%	143.921.697,24	95%	144.778.728,17	95,00%	#VALUE!	Dinas Sosial
9	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	55%	60%	25.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	25.800.000	Dinas Sosial
10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS tertangani	43,84%	45,32%	693.888.709,00	49,75%	398.068.200,00	54,68%	404.030.545,24	60,10%	406.143.846,32	66,01%	408.562.368,65	66,01%	2.310.693.669	Dinas Sosial
11	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial	85%	90%	163.600.000,00	90%	449.783.300,00	100%	456.520.244,37	100%	458.908.095,32	100%	461.640.820,41	100%	1.990.452.460	Dinas Sosial
II	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar	-	-	-	64.897.156.027,71	-	75.970.068.630,81	-	69.910.747.246,34	-	70.250.195.155,33	-	70.624.453.728,46	-	351.652.620.789	
1	Tenaga Kerja				743.581.000,00		1.057.019.000,00		1.072.851.242,34		1.078.462.842,02		1.084.884.917,59		5.036.799.002	
1	Program Peningkatan Produktivitas dan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan - Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1	-	66,66%	-	75,00%	959.750.000,00	80,00%	974.125.327,77	83,33%	979.220.536,84	85,71%	985.051.640,18	85,71%	3.898.147.505	Distransnaker
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				263.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.940.000	Distransnaker
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				404.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.530.000	Distransnaker
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan	52%	55%	75.111.000,00	58%	97.269.000,00	60%	98.725.914,57	64%	99.242.305,18	67,00%	99.833.277,40	67,00%	470.181.497	Distransnaker
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2.848.993.850,00		3.820.917.803,00		4.566.919.231,00		4.566.919.231,00		4.627.772.035,00		20.431.522.150	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.939.424.850,00	100%	2.161.845.803,00	100%	2.500.000.000,00	100%	2.500.000.000,00	100%	2.500.000.000,00	100%	11.601.270.653	DP3APPKB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	227.006.000,00	100%	537.500.000,00	100%	656.559.931,00	100%	656.559.931,00	100%	660.000.000,00	100%	2.737.625.862	DP3APPKB
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.000.000	DP3APPKB
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	130.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	730.000.000	DP3APPKB
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga daerah	46,37%	48,02%	239.873.000,00	49,67%	521.000.000,00	51,32%	760.359.300,00	52,97%	760.359.300,00	54,62%	760.359.300,00	54,62%	3.041.950.900	DP3APPKB
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kelembagaan PUG Meningkat	100,00%	100,00%	80.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.850.000	DP3APPKB
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Terhadap Perlindungan Perempuan	100,00%	100,00%	48.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.050.000	DP3APPKB
9	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu	100%	100%	86.290.000,00	100%	140.572.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	247.412.735,00	100%	894.274.735	DP3APPKB
10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase pemenuhan kabupaten layak anak	100%	100%	61.500.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	1.261.500.000	DP3APPKB
3	Pangan				862.120.000,00		972.602.500,00		987.170.335,09		992.333.776,69		998.242.967,30		4.812.469.579	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase penurunan kecamatan rawan pangan	7,7	7,70	-	7,70	972.602.500,00	7,70	987.170.335,09	7,70	992.333.776,69	7,70	998.242.967,30	7,70	3.950.349.579	Distanpaper
		Jumlah data ketersediaan dan kerawanan pangan	24	24		24		24		24		24		24,00		
		Jumlah ragam pangan dan pangan olahan	48	48		48		48		48		48		48		
2	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)				862.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862.120.000	Distanpaper
4	Pertanahan				2.827.400.000,00		11.398.730.000,00		11.569.462.461,46		11.629.977.087,62		11.699.231.760,85		49.124.801.310	
1	Program Pengaturan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Persentase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan		20%	2.827.400.000,00	40%	11.398.730.000,00	60%	11.569.462.461,46	80%	11.629.977.087,62	100%	11.699.231.760,85	100%	49.124.801.310	Disperkimtan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		2020		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah								PERANGKAT DAERAH
				2019				2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Lingkungan Hidup				19.028.842.264,47		16.620.182.009,15		11.784.019.097,32		11.845.804.377,03		11.916.483.702,98		71.195.331,451	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%	70%	3.439.688.850,47	72%	4.012.151.819,15	75%	4.072.246.632,86	80%	4.093.546.713,43	90%	4.117.923.136,35	90%	19.735.557,152	DLH
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	85%	85%	100.000.000,00	85%	1.251.150.000,00	85%	769.889.975,34	85%	773.916.921,64	85%	778.525.474,45	85%	3.673.482,371	DLH
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	83.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.000.000	DLH
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	85%	100.000.000,00	85%	209.000.000,00	85%	212.130.443,87	85%	213.240.002,29	85%	214.509.812,76	85%	948.880,259	DLH
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	85%	15.000.000,00	-	15.224.673,00	-	15.452.711,21	-	15.684.165,01	-	61.361,549	DLH
6	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun	-	-	-	3%	906.172.490,00	3%	919.745.323,09	3%	924.556.094,94	3%	930.061.680,19	3%	3.680.535,588	DLH
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		-	-	361.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.775.000	DLH
8	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indek Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	78,25	2.605.055.000,00	78,65	1.894.074.035,66	78,90	1.903.981.080,40	79,00	1.915.318.986,45	79	8.318.429,103	DLH
9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	DLH
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		-	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	DLH
11	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	-	-	-	75%	1.154.726.750,00	80%	1.172.022.478,59	85%	1.178.152.798,16	90%	1.185.168.511,64	90%	4.690.070,538	DLH
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan		-	-	2.119.274.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.119.274.000	DLH
13	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air	-	-	-	76,00	87.000.000,00	76,00	88.303.103,43	76,00	88.764.977,03	76,00	89.293.558,42	76	353.361,639	DLH
14	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		-	-	118.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.500.000	DLH
15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penerimaan Asli Daerah	-	-	-	2%	3.340.350.000,00	2%	2.640.382.431,48	2%	2.654.193.077,93	2%	2.669.998.377,71	2%	11.304.923,887	DLH
16	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan Lingkungan		-	-	1.252.283.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.252.283.414	DLH
17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH - DR)	Jumlah Titik Api	-	100	7.234.396.000,00	-	3.039.575.950,00	-	-	-	-	-	-	-	10.273.971,950	DLH
18	Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan (DBH - DR)	Jumlah Bibit	-	214.698,00	2.424.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.424.250.000	DLH
19	Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah. (DBH-DR)	Jumlah Bibit Pohon	-	31.455,00	1.635.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.635.675.000	DLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.445.435.686,00		3.142.301.290,00		3.514.367.308,22		3.532.749.374,33		3.553.786.337,84		17.188.639.996	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.500.394.686,00	100%	1.497.260.290,00	100%	1.519.686.554,57	100%	1.527.635.347,70	100%	1.536.732.174,46	100%	7.581.709,053	Disdukcapil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	100%	100%	300.000.000,00	100%	-	100%	300.000.000,00	100%	301.569.164,33	100%	303.364.960,99	100%	1.204.934,125	Disdukcapil
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.748.910,02	100%	51.014.354,62	100%	51.318.137,02	100%	253.081,402	Disdukcapil
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	-	-	-	-	100%	25.000.000,00	100%	25.130.763,69	100%	25.280.413,42	100%	75.411,177	Disdukcapil
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	92%	93%	1.048.401.000,00	95%	1.048.401.000,00	97%	1.064.104.160,21	98%	1.069.670.007,85	100%	1.076.039.723,49	100%	5.306.615,892	Disdukcapil
6	Program Administrasi Pencatatan Sipil	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil	55%	77%	150.000.000,00	81%	150.000.000,00	87%	152.246.730,05	92%	153.043.063,85	100%	153.954.411,07	100%	759.244,205	Disdukcapil
7	Program Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi kependudukan	100%	100%	396.640.000,00	100%	396.640.000,00	100%	402.580.953,38	100%	404.686.672,29	100%	407.096.517,39	100%	2.007.644,143	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				7.902.549.902,00		5.600.291.992,15		5.684.174.287,52		5.713.905.632,70		5.747.931.036,58		30.648.852,851	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	80%	1.701.553.902,00	85%	2.195.173.992,15	90%	2.228.053.747,97	95%	2.239.707.689,54	100%	2.253.044.794,43	100%	10.617.534,126	DisPMDes
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	80%	80%	330.900.000,00	85%	898.220.000,00	90%	911.673.719,10	95%	916.442.272,05	100%	921.899.540,76	100%	3.979.135,532	DisPMDes
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	90.000.000	DisPMDes

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah												PERANGKAT DAERAH
				APBD 2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	75.000.000,00	85%	75.000.000,00	90%	76.123.365,02	95%	76.521.531,92	100%	76.977.205,54	100%	379.622.102	DisPMDes
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK)	80%	80%	1.338.655.000,00	85%	1.348.790.000,00	90%	1.368.992.446,82	95%	1.376.153.027,22	100%	1.384.347.800,74	100%	6.816.938.275	DisPMDes
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	80%	80%	563.180.000,00	85%	652.750.000,00	90%	662.527.020,27	95%	665.992.399,50	100%	669.958.278,85	100%	3.214.407.699	DisPMDes
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	80%	80%	3.803.261.000,00	85%	430.358.000,00	90%	436.803.988,34	95%	439.088.712,47	100%	441.703.416,27	100%	5.551.215.117	DisPMDes
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.671.487.000,00		5.833.258.000,00		6.690.000.000,91		6.724.992.365,54		6.690.000.000,08		31.609.737.367	
1	Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78,69%	78,87%	4.841.316.000,00	79,05%	4.987.216.000,00	79,23%	5.450.000.000,91	79,41%	5.478.506.486,30	79,61%	5.450.000.000,08	79,61	26.207.038.487	DP3APPKB
2	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Persentase Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	12,42%	27,87%	381.150.000,00	43,32%	293.080.000,00	58,77%	590.000.000,00	74,22%	593.086.023,19	89,67%	590.000.000,00	89,67	2.447.316.023	DP3APPKB
3	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Kualitas Pemberdayaan Keluarga	36,65%	44,75%	449.021.000,00	52,85%	552.962.000,00	60,95%	650.000.000,00	69,05%	653.399.856,05	77,15%	650.000.000,00	77,15	2.955.382.856	DP3APPKB
9	Perhubungan				1.487.000.000,00		2.463.000.000,00		2.905.256.785,18		2.920.452.869,60		2.937.843.704,31		12.713.553.359	
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Kelaikan Pengoperasian Angkutan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	60%	-	-	62%	210.000.000,00	64%	300.000.000,00	66%	301.569.164,33	67%	303.364.960,99	67%	1.114.934.125	DisPUPRHub
2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Rambu-Rambu Terpasang	28%	30%	491.000.000,00	32%	1.753.000.000,00	34%	1.779.256.785,18	36%	1.788.563.272,80	38%	1.799.213.884,07	90%	7.611.033.942	DisPUPRHub
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	100%	100%	826.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	826.000.000,00	100%	830.320.432,46	100%	835.264.859,25	100%	3.817.585.292	DisPUPRHub
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang direhab dan dipelihara	100%	100%	170.000.000,00	-	-	100%	200.000.000,00	100%	201.046.109,56	100%	202.243.307,32	100%	773.289.417	DisPUPRHub
10	Komunikasi dan Informatika				7.684.509.931,80		8.623.588.780,00		7.717.137.550,05		7.757.502.406,71		7.803.697.106,00		39.586.435.775	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60%	67%	2.575.897.451,80	67%	2.219.273.000,00	67%	2.252.513.715,58	67%	2.264.295.596,19	67%	2.277.779.118,17	67%	11.589.758.882	DiskominfoPersantik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	40%	47%	1.381.176.480,00	60%	42.105.780,00	73%	42.736.448,81	80%	42.959.983,85	87%	43.215.803,75	87%	1.552.194.496	DiskominfoPersantik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	23.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.500.000	DiskominfoPersantik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	36%	40%	200.000.000,00	48%	228.000.000,00	56%	231.415.029,68	64%	232.625.457,04	72%	234.010.704,83	72%	1.126.051.192	DiskominfoPersantik
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%	80%	-	80%	63.120.000,00	80%	64.065.424,00	80%	64.400.521,27	80%	64.784.016,18	80%	256.369.961	DiskominfoPersantik
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat daerah yang memiliki infrastruktur TIK sesuai ketentuan	47%	53%	3.503.936.000,00	66%	6.071.090.000,00	74%	5.126.406.931,98	84%	5.153.220.848,36	92%	5.183.907.463,07	92%	25.038.561.243	DiskominfoPersantik
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				3.746.516.150,00		4.262.510.846,00		3.871.497.876,11		3.889.263.420,53		3.909.594.818,93		19.679.383.112	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	2.579.126.150,00	100%	2.403.805.846,00	100%	2.579.126.150,00	100%	2.592.616.392,55	100%	2.608.055.012,91	80%	12.762.729.551	DisKopUKMPP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	17.000.000,00	100%	1.186.975.000,00	100%	215.000.000,00	100%	215.000.000,00	100%	215.000.000,00	80%	1.848.975.000	DisKopUKMPP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	182.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	182.200.000	DisKopUKMPP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	62%	260.000.000,00	64%	160.000.000,00	66%	260.000.000,00	68%	260.000.000,00	70%	260.000.000,00	80%	1.200.000.000	DisKopUKMPP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%	80%	-	80%	35.500.000,00	80%	36.031.726,11	80%	36.220.191,78	80%	36.435.877,29	80%	144.187.795	DisKopUKMPP
5	Program Pembinaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	40%	42%	326.850.000,00	44%	181.005.000,00	46%	400.000.000,00	48%	402.092.219,11	50%	404.486.614,65	50%	1.714.433.834	DisKopUKMPP
6	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM Aktif	1502 UKM aktif	90%	381.340.000,00	91%	295.225.000,00	92%	381.340.000,00	93%	383.334.617,09	94%	385.617.314,08	1 Produk	1.826.856.931	DisKopUKMPP
12	Penanaman Modal				2.149.781.753,44		2.347.748.560,51		2.382.913.608,78		2.395.377.552,25		2.409.641.646,54		11.685.463.122	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	89%	90%	1.324.841.553,39	91%	1.418.019.060,51	92%	1.439.258.434,07	93%	1.446.786.544,07	94%	1.455.401.929,01	95%	7.084.307.521	DPM-PTSP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	89%	90%	456.450.000,00	91%	526.630.000,00	92%	534.517.969,64	93%	537.313.791,42	94%	540.513.410,02	95%	2.595.425.171	DPM-PTSP

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah												PERANGKAT DAERAH
				APBD		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	42.600.000,05	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	42.600.000	DPM-PTSP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	62%	40.000.000,00	64%	40.000.000,00	66%	40.599.128,01	68%	40.811.483,69	70%	41.054.509,62	95%	202.465.121	DPM-PTSP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%	80%	-	80%	26.724.000,00	80%	27.124.277,43	80%	27.266.152,25	80%	27.428.517,88	80%	108.542.948	DPM-PTSP
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilakukan	3	4	129.200.000,00	4	133.000.000,00	4	134.992.100,64	5	135.698.183,28	5	136.506.244,48	22	669.396.528	DPM-PTSP
7	Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	35%	35%	55.300.000,00	45%	59.988.000,00	50%	60.886.512,28	55%	61.204.982,09	60%	61.569.448,08	60%	298.948.942	DPM-PTSP
8	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP	-	100%	52.545.200,00	100%	61.500.000,00	100%	62.421.159,32	100%	62.747.656,18	100%	63.121.308,54	100%	302.335.324	DPM-PTSP
9	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	85%	90%	48.845.000,00	91%	81.887.500,00	92%	83.114.027,38	93%	83.548.759,27	94%	84.046.278,91	90%	381.441.566	DPM-PTSP
13	Kepemudaan dan Olah Raga				923.267.000,00		2.204.040.000,00		1.237.052.552,66		1.243.523.015,14		1.250.927.997,92		6.858.810.566	
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	95	100	862.037.000,00	105	1.113.128.000,00	110	629.800.654,18	115	633.094.856,59	120	636.864.836,28	120	3.874.925.347	Disbudparpora
		Persentase Pemuda Yang Berwirausaha	0,23%	0,28%		0,33%		0,37%		0,42%		0,47%		0,47%		
		Jumlah Pemuda Yang lulus seleksi mengikuti pemuda pelopor tingkat nasional	0	0		0		0		1		1		1		
		Jumlah peserta yang lulus seleksi mengikuti paskibra tingkat nasional	0	0		0		0		0		1		1		
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even Olahraga	0	50 org	61.230.000,00	67 org	1.090.912.000,00	85 org	607.251.898,48	100 org	610.428.158,55	120 org	614.063.161,64	442 org	2.983.885.219	Disbudparpora
		Jumlah pelajar yang lulus seleksi mengikuti event olahraga	0	0		67 org		70 org		75 org		80 org		292		
		Jumlah pelajar yang memenangkan medali pada even olah raga kabupaten	0	0		2 org		3 org		4 org		5 org		14		
14	Statistik				356.400.000,00		200.000.000,00		356.400.000,00		358.264.167,23		360.397.573,65		1.631.461.741	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Persentase data statistik yang terpublikasi	8%	14%	356.400.000,00	28%	200.000.000,00	56%	356.400.000,00	69%	358.264.167,23	83%	360.397.573,65	83%	1.631.461.741	Diskominfoersantik
15	Persandian				-		95.400.000,00		96.828.920,31		97.335.388,61		97.915.005,44		387.479.314	
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Penanaman Informasi	Persentase penggunaan sandi dalam berkomunikasi	5%	-	-	25%	95.400.000,00	35%	96.828.920,31	45%	97.335.388,61	60%	97.915.005,44	60%	387.479.314	Diskominfoersantik
16	Kebudayaan				4.106.611.490,00		6.168.858.850,00		4.111.257.253,67		4.132.761.381,16		4.157.371.321,22		22.676.860.296	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.639.295.690,00	100%	2.377.739.050,00	100%	2.413.353.301,83	100%	2.425.976.461,57	100%	2.440.422.767,52	100%	12.296.787.271	Disbudporpora
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	202.712.800,00	100%	2.082.864.800,00	100%	464.062.366,24	100%	466.489.666,61	100%	469.267.538,76	100%	3.685.397.172	Disbudporpora
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	80.000.000,00	81%	33.000.000,00	82%	33.494.280,61	83%	33.669.474,05	84%	33.869.970,44	80%	214.033.725	Disbudporpora
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	100%	-	100%	29.550.000,00	100%	29.992.605,82	100%	30.149.483,58	100%	30.329.018,98	100%	120.021.108	Disbudporpora
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	100%	15.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15.960.000	Disbudporpora
6	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Peningkatan Sanggar Seni Budaya Yang Aktif	8 sanggar	12,50%	1.168.643.000,00	25,00%	1.645.705.000,00	37,50%	1.170.354.699,18	50,00%	1.176.476.295,35	62,50%	1.183.482.025,52	62,50%	6.344.661.020	Disbudporpora
		Persentase Peningkatan Pelaku Seni dan Budaya Yang Aktif	70 orang	14,29%		29%		43%		57%		71%		71,43%		
		Persentase Peningkatan Situs dan Cagar Budaya Yang Memenuhi Ketentuan	2 situs	0		100%		200%		300%		400%		400,00%		
17	Perpustakaan				957.010.000,00		759.188.000,00		957.010.000,00		962.015.686,53		967.744.337,71		4.602.968.024	
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung ke perpustakaan	7200 org	4500 org	957.010.000,00	6000 org	759.188.000,00	7.500 org	957.010.000,00	9000 org	962.015.686,53	10.500 org	967.744.337,71	10.500 org	4.602.968.024	Sekretariat Daerah
18	Kearsipan				155.650.000,00		400.431.000,00		406.428.735,74		408.554.580,66		410.987.458,54		1.782.051.775	
1	Program Pengelolaan dan Dokumentasi Arsip Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	20%	24%	-	28%	400.431.000,00	32%	406.428.735,74	32%	408.554.580,66	36%	410.987.458,54	36%	1.626.401.775	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah				66.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.500.000	Sekretariat Daerah
3	Program Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah				89.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.150.000	Sekretariat Daerah
III	Urusan Pilihan	-	-		30.338.331.756,02		28.696.381.687,95		30.087.847.530,11		30.255.819.518,89		30.438.565.606,48		149.816.946,099	

No	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD 2019		2020		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah						PERANGKAT DAERAH		
				K	Rp	K	Rp	2021		2022		2023			Kondisi Akhir RPJMD	
1	Kelautan dan Perikanan				3.248.419.029,00		2.339.925.000,00	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	429,87	5.431,87	1.491.784.000,00	5.703,47	913.694.000,00	5.988,64	1.491.784.000,00	6.288,07	1.499.586.847,48	6.602,48	1.508.516.649,87	6.602,48	6.905.365,497	Distanpaper
2	Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	1	3	359.936.000,00	6	375.000.000,00	9	380.616.825,12	12	382.607.659,61	15	384.886.027,68	15	1.883.046,512	Distanpaper
3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	5427,00	5.800,10	1.396.699.029,00	6.120,30	1.051.231.000,00	6.511,70	1.396.699.029,00	6.781,90	1.404.004.530,00	7.581,71	1.412.365.154,81	7.581,71	6.660.998,743	Distanpaper
2	Pariwisata				2.462.788.000,00		2.062.593.000,00		2.462.788.000,00		2.475.669.730,30		2.490.411.951,79		11.954.250,682	
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar	5%	10%	2.462.788.000,00	15%	2.062.593.000,00	20%	2.462.788.000,00	25,00%	2.475.669.730,30	30%	2.490.411.951,79	30%	11.954.250,682	Disbudparpora
		Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan	29.113 kunjungan	17,49%		20,45%		23,52%		26,65%		29,87%		29,87%		
3	Pertanian				16.253.597.927,02		17.045.192.830,05		16.281.269.220,56		16.369.619.354,85		16.469.913.511,48		82.419.592,844	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.487.807.547,02	100%	2.952.013.800,00	100%	2.996.229.654,08	100%	3.011.901.576,43	100%	3.029.836.973,72	100%	14.477.789,551	Distanpaper
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	81.250.000,00	100%	3.067.976.857,95	100%	1.613.929.629,94	100%	1.622.371.365,98	100%	1.632.032.330,74	19 unit	8.017.560,185	Distanpaper
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	94.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	94.000,000	Distanpaper
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	40%	40%	50.000.000,00	45%	80.000.000,00	50%	60.000.000,00	65%	60.000.000,00	70%	60.000.000,00	10 org	310.000,000	Distanpaper
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	-	-	100%	38.220.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	263.220,000	Distanpaper
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	20.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20.150,000	Distanpaper
7	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai	18,34	21,69	4.794.521.473,00	35,06	4.731.711.936,05	35,32	4.802.584.465,34	35,59	4.827.704.612,83	35,86	4.856.452.829,87	35,86	24.012.975,317	Distanpaper
8	Program Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Persentase usaha dan kelembagaan kelompok tani yang berkembang	37,89	47,36	447.216.000,00	56,83	831.461.000,00	66,30	690.000.000,00	75,77	690.000.000,00	85,24	690.000.000,00	85,24	3.348.677,000	Distanpaper
9	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	64.556	69.223,72	355.000.000,00	122.982,13	1.997.491.300,00	128.188,09	2.027.410.124,85	132.603,05	2.038.014.590,37	138.187,01	2.050.150.644,76	138.187,01	8.468.066,660	Distanpaper
		- Padi (ton)	64.125	68.783,16		72.271,13		76.280,09		80.378,05		84.568,01		84.568,01		
		- Jagung (ton)	359	368,56		378,53		388,49		398,45		408,41		408		
		- Bawang Merah (ton)	18	18		30		42		54		66		66		
		- Cabe (ton)	18	18		220		240		260		280		280		
		- Pisang (pohon)	18	19.693		19.693		19.693		19.693		20.000		20.000		
		- Durian (Kg)	18	153.000		153.000		160.000		165.000		170.000		170.000		
10	Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Persentase Hasil Produksi beras yang didasarkan dalam kemasan	15%	20%	83.000.000,00	25%	70.000.000,00	30%	475.000.000,00	35%	475.000.000,00	40%	475.000.000,00	40%	1.578.000,000	Distanpaper
11	Program Pengembangan Perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan	14.167	50.961,84	255.000.000,00	53.154,21	500.000.000,00	55.448,23	1.420.000.000,00	57.846,97	1.427.427.377,84	60.362,53	1.435.927.482,00	60.362,53	5.038.354,860	Distanpaper
		- Karet (ton)	2.650	11.577,00		11.808,54		12.044,71		12.285,61		12.531,32		12.531,32		
		- Sawit (ton)	167	167,84		168,67		169,52		170,37		171,22		171,22		
		- Kelapa (ton)	11.350	39.217,00		41.177,00		43.234,00		45.391,00		47.660,00		47.660,00		
12	Program Pengembangan Peternakan	Jumlah populasi ternak	-	29.055	4.220.050.000,00	30.507	1.036.000.000,00	32.031	1.301.517.415,54	33.628	1.308.325.064,57	35.309	1.316.115.933,30	35.309	9.182.008,413	Distanpaper
		- Ternak Besar (ekor)	-	19.293		20.257		21.269		22.328		23.444		23.444		
		- Ternak Kecil (ekor)	-	9.761		10.249		10.761		11.299		11.864		11.864		
		- Ternak Unggas (ekor)	-	1		1		1		1		1		1		
13	Program Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Masvarakat Veteriner	Persentase jumlah ternak yang terobati (%)	100	100	60.000.000,00	100	305.000.000,00	100	457.869.850,00	100	470.254.650,00	100	483.611.900,00	100	1.776.736,400	Distanpaper
14	Program Pengembangan Data dan Informasi Pertanian dan Perikanan	Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%)	100	100	71.500.000,00	100	356.390.000,00	100	361.728.080,82	100	363.620.116,82	100	365.785.417,08	100	1.519.023,615	Distanpaper
15	Program Grand Desain dan Base Potensi Pertanian				25.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.250,000	Distanpaper
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah luasan PLTB tertanami dan terolah		152 Ha	3.208.852.907,00	152 Ha	1.078.927.936,05	-	-	-	-	-	-	-	4.287.780,843	Distanpaper
4	Perdagangan				4.749.708.800,00		4.132.515.000,00		4.842.459.318,84		4.875.403.142,58		4.904.435.396,81		23.504.521,658	
1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	9,21%	9,23%	4.542.508.800,00	9,25%	3.826.035.000,00	9,27%	4.442.508.800,00	9,29%	4.465.745.554,53	9,31%	4.492.338.362,65	7,78%	21.769.136,517	DiskopUKMPP
2	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga	-	80%	80.800.000,00	-	-	80%	88.880.000,00	80%	96.960.000,00	80%	97.537.381,46	80%	364.177,381	DiskopUKMPP
3	Program Peningkatan Layanan Kemetrolgian	Persentase Alat UTPP yang sesuai standar	-	80%	126.400.000,00	80%	306.480.000,00	80%	311.070.518,84	80%	312.697.588,05	80%	314.559.652,70	80%	1.371.207,760	DiskopUKMPP
5	Perindustrian				1.277.355.000,00		1.200.355.000,00		1.288.334.157,66		1.295.072.851,02		1.302.784.804,92		6.363.901,814	
1	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM berbasis teknologi	0%	10%	411.510.000,00	12%	107.420.000,00	14%	179.028.958,28	16%	179.965.377,80	18%	181.037.043,15	18%	1.058.961,379	DiskopUKMPP
2	Program Penataan Struktur Industri	Persentase IKM potensial yang mendapatkan bantuan	0%	15%	180.000.000,00	15%	915.000.000,00	15%	728.705.053,30	15%	732.516.579,90	15%	736.878.600,22	15%	3.293.100,233	DiskopUKMPP

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah												PERANGKAT DAERAH
				APBD 2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP	-	1 Produk	685.845.000,00	1 Produk	177.935.000,00	1 Produk	380.600.146,08	1 Produk	382.590.893,32	1 Produk	384.869.161,55	1 Produk	2.011.840.201	DiskopUKMPP
		Jumlah IKM, Pengusaha, Investor yang menggunakan fasilitas kawasan industri hampangan	0	0		1		1		1		1		1		
6	Transmigrasi				2.346.463.000,00		1.915.800.857,90		1.943.896.978,93		1.953.855.403,04		1.965.252.109,12		10.125.268.349	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.119.763.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	1.268.722.750,41	100%	1.275.358.865,38	100%	1.282.953.425,61	100%	6.196.798.041	Distransnaker
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	40%	43,24%	1.030.000.000,00	54,05%	247.800.857,90	64,86%	251.512.468,79	75,67%	252.828.016,78	86,48%	254.333.567,61	86,48%	2.036.474.911	Distransnaker
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	25.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25.200.000	Distransnaker
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	100%	20.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	180.000.000	Distransnaker
5	Program Pengembangan dan Peningkatan Transmigrasi	Persentase sarana dan prasarana transmigrasi	-			30%	378.000.000,00	50%	383.661.759,73	70%	385.668.520,89	100%	387.965.115,90	100%	1.535.295.397	Distransnaker
6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	persentase wilayah transmigrasi yang dikembangkan		10%	151.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	151.500.000	Distransnaker
IV	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		139.756.773.568,00		103.677.561.021,66		116.596.303.488,55		120.526.661.554,39		128.490.814.374,55		609.048.114.007	
1	Perencanaan				11.133.514.775,00		7.957.962.757,00		10.928.326.283,00		10.704.027.707,97		11.438.587.942,09		52.162.419.465	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	95%	95%	3.856.603.585,00	96%	3.331.285.607,00	97%	4.049.653.603,00	100%	4.070.835.509,65	100%	4.095.076.690,94	100%	19.403.454.996	Bappelitbang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	1.567.935.500,00	96%	885.143.050,00	97%	885.143.050,00	100%	1.151.378.650,00	100%	1.158.234.927,67	100%	5.647.835.178	Bappelitbang
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	226.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	226.540.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50%	54,05%	186.300.000,00	67,57%	106.500.000,00	81,08%	186.300.000,00	89,19%	186.300.000,00	94,59%	187.409.387,02	95%	852.809.387	Bappelitbang
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	0	-	96%	200.320.000,00	97%	279.589.100,00	100%	281.051.504,15	100%	282.725.121,38	100%	1.043.685.726	Bappelitbang
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	95%	102.765.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	102.765.000	Bappelitbang
6	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah	Tinggi (84,65)	Tinggi (84,65)	770.974.000,00	Tinggi (89,15)	399.366.000,00	Tinggi (90,75)	639.212.040,00	Sgt Tinggi (91)	642.555.469,11	Sgt Tinggi (92,30)	646.381.785,26	90%	3.098.489.294	Bappelitbang
7	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan	6,00	6,00	124.900.000,00	7,00	147.040.000,00	7,00	226.610.000,00	7,00	227.795.294,43	7,00	225.653.000,00	7,00	951.998.294	Bappelitbang
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Daerah	100%	100%	1.334.156.290,00	100%	787.147.100,00	100%	1.334.156.290,00	100%	1.341.134.658,22	100%	1.802.211.920,00	100%	6.598.806.258	Bappelitbang
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi (%)	84%	85%	2.132.715.400,00	87%	1.327.099.000,00	90%	2.113.078.400,00	91%	1.868.886.240,00	92%	1.880.015.161,83	92%	9.321.794.202	Bappelitbang
10	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (%)	79%	80%	237.115.000,00	83%	253.922.000,00	86%	621.073.800,00	89%	337.476.000,00	92%	538.595.948,00	92%	1.988.182.748	Bappelitbang
11	Program Perencanaan Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyusun dokumen penganggaran	100%	100%	593.510.000,00	100%	520.140.000,00	100%	593.510.000,00	100%	596.614.382,41	100%	622.284.000,00	100%	2.926.058.382	Bappelitbang
2	Keuangan				21.908.379.457,00		14.062.833.610,89		12.737.162.440,10		13.660.746.819,13		14.869.269.408,17		77.238.391.735	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	5.770.810.457,00	100%	5.873.828.502,89	100%	7.007.425.152,92	100%	7.708.167.668,21	100%	8.478.984.435,04	100%	34.839.216.216	BPKAD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	100%	12.726.500.000,00	100%	3.305.955.708,00	100%	579.850.000,00	100%	422.835.000,00	100%	442.618.500,00	100%	17.477.759.208	BPKAD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2019												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	84%	100.000.000,00	87%	137.500.000,00	91%	151.250.000,00	96%	166.375.000,00	100%	183.012.500,00	100%	738.137.500	BPKAD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	-	-	100%	338.208.000,00	100%	343.273.747,18	100%	345.069.256,91	100%	347.124.089,73	100%	1.373.675.094	BPKAD
5	Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran	Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat waktu	80%	100%	575.000.000,00	100%	632.500.000,00	100%	695.750.000,00	100%	765.325.000,00	100%	841.857.500,00	100%	3.510.432.500	BPKAD
6	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu	80%	100%	748.320.000,00	100%	895.752.000,00	100%	985.327.200,00	100%	1.083.859.920,00	100%	1.192.245.912,00	100%	4.905.505.032	BPKAD
7	Program Penatausahaan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	80%	100%	836.449.600,00	100%	1.009.719.560,00	100%	1.110.779.516,00	100%	1.221.857.467,60	100%	1.344.043.214,36	100%	5.522.849.358	BPKAD
8	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Jumlah Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	2500 OP	5000 OP	509.145.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5000 OP	5000 OP	509.145.000	BPKAD
9	Program Peningkatan Penerimaan Pajak	Pertumbuhan PAD	-	-	-	1.70%	1.126.000.000,00	1.8%	1.026.000.000,00	1.9%	1.026.000.000,00	2%	1.026.000.000,00	2%	4.204.000.000	BPKAD
10	Program Pembukuan dan Pelaporan	Persentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tepat waktu	80%	100%	262.604.400,00	100%	288.864.840,00	100%	317.751.324,00	100%	349.526.456,40	100%	384.479.102,04	100%	1.603.226.122	BPKAD
11	Program Penagihan dan Keberatan	Persentase Objek Pajak yang ditagih	66%	69%	379.550.000,00	72%	454.505.000,00	75%	519.755.500,00	78%	571.731.050,00	80%	628.904.155,00	80%	2.554.445.705	BPKAD
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				4.687.405.000,00		4.048.071.091,80		4.758.823.013,06		4.783.714.264,20		4.857.469.769,63		23.135.483.139	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.114.827.000,00	100%	1.809.741.091,80	100%	1.836.847.756,42	100%	1.846.455.476,37	100%	1.857.450.826,55	100%	9.465.322.151	BKPP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	180.000.000,00	100%	7.500.000,00	100%	180.000.000,00	100%	180.941.498,60	100%	182.018.976,59	100%	730.460.475	BKPP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	46.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	46.500.000	BKPP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	958.000.000,00	90%	108.000.000,00	90%	109.617.645,64	90%	110.191.005,97	90%	110.847.175,97	80%	1.396.655.828	BKPP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%	90%	-	-	-	90%	227.731.438,00	90%	228.922.598,17	90%	275.555.039,98	80%	732.209.076	BKPP
6	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang memperoleh pendidikan kedinasan	80%	90%	650.200.000,00	90%	1.426.000.000,00	90%	1.447.358.913,67	90%	1.454.929.393,62	90%	1.463.593.267,93	80%	6.442.081.575	BKPP
7	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan	80%	90%	74.500.000,00	90%	71.800.000,00	90%	322.875.434,78	90%	324.564.250,17	90%	326.496.978,92	80%	1.120.236.664	BKPP
8	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan	80%	90%	663.378.000,00	90%	625.030.000,00	90%	634.391.824,55	90%	637.710.041,30	90%	641.507.503,69	80%	3.202.017.370	BKPP
4	Penelitian dan Pengembangan				2.254.102.000,00		1.887.234.000,00		1.915.501.368,92		1.925.520.490,35		2.211.970.000,00		10.194.327.859	
1	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah yang ditindak lanjuti	81,82%	82%	2.254.102.000,00	82%	1.887.234.000,00	85%	1.915.501.368,92	85%	1.925.520.490,35	85%	2.211.970.000,00	85%	10.194.327.859	Bappelitbang
5	Pengawasan				5.681.959.000,00		5.855.122.000,00		6.070.534.474,49		6.102.286.695,09		6.138.624.846,73		29.848.527.016	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	80%	1.483.340.000,00	80%	2.000.446.000,00	90%	2.030.409.080,94	100%	2.041.029.232,64	100%	2.053.183.238,75	100%	9.608.407.552	Inspektorat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	-	80%	1.101.872.000,00	85%	201.872.000,00	85%	202.927.901,14	90%	204.136.304,68	90%	1.710.808.206	Inspektorat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	40%	40%	505.000.000,00	45%	142.500.000,00	50%	144.634.393,55	65%	145.390.910,65	70%	146.256.690,52	70%	1.083.781.995	Inspektorat
4	Program Pengembangan Sistem Pemerintahan dalam Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Cakupan obrik pengawasan	80%	80%	3.586.619.000,00	80%	2.536.330.000,00	85%	3.586.619.000,00	85%	3.605.378.982,04	90%	3.626.848.443,36	90%	16.941.795.425	Inspektorat
5	Program Peningkatan Kapabilitas	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	107.000.000,00	Level 3	73.974.000,00	Level 3	107.000.000,00	Level 4	107.559.668,61	Level 4	108.200.169,42	5%	503.733.838	Inspektorat
6	Sekretariat Dewan				17.077.483.024,00		11.646.767.349,25		17.165.297.675,00		17.255.081.584,59		16.438.097.675,00		79.582.727.308	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	5.782.556.079,00	100%	5.471.328.000,00	100%	5.981.956.079,00	100%	6.013.244.986,07	100%	5.989.156.079,00	100%	29.238.241.223	Sekretariat DPRD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	3.662.985.350,00	90%	2.494.560.000,00	90%	4.594.500.000,00	100%	4.618.531.751,76	100%	4.602.500.000,00	100%	19.973.077.102	Sekretariat DPRD
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	617.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617.500.000	Sekretariat DPRD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	90%	750.000.000,00	90%	450.000.000,00	90%	750.800.000,00	100%	754.727.095,27	100%	751.600.000,00	100%	3.457.127.095	Sekretariat DPRD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	-	-	100%	307.195.000,00	100%	396.822.000,00	100%	398.897.596,43	100%	399.622.000,00	100%	1.502.536.596	Sekretariat DPRD
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	204.584.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.584.000	Sekretariat DPRD

No	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Program Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi	100%	100%	96.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.900.000	Sekretariat DPRD
8	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	92.538.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.538.000	Sekretariat DPRD
9	Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pembentukan Perda	Persentase fasilitas rapat-rapat DPRD	90%	92%	-	92%	1.641.269.650,00	95%	2.079.619.596,00	100%	2.090.497.145,65	100%	2.082.019.596,00	100%	7.893.405.988	Sekretariat DPRD
10	Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPRD	Persentase fasilitas tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD	89,50%	93%	-	95%	1.282.414.699,25	100%	3.361.600.000,00	100%	3.379.183.009,41	100%	2.613.200.000,00	100%	10.636.397.709	Sekretariat DPRD
11	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				5.870.419.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.870.419.595	Sekretariat DPRD
7	Sekretariat Daerah				61.451.754.680,00		38.245.560.477,00		42.156.980.512,49		45.129.263.149,10		51.486.240.203,19		238.469.799.022	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	11.028.720.000,00	100%	15.110.457.477,00	100%	15.336.784.936,18	100%	15.417.004.722,54	100%	15.508.810.546,08	100%	72.401.777.682	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	11.541.650.000,00	100%	4.997.650.000,00	100%	7.296.250.000,00	100%	9.502.250.000,00	100%	9.509.250.000,00	100%	42.847.050.000	Sekretariat Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	195.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	195.000.000	Sekretariat Daerah
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan publik	100%	100%	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.000.000	Sekretariat Daerah
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	75%	371.807.000,00	75%	1.372.467.000,00	75%	1.393.024.085,67	80%	1.400.310.364,71	85%	1.408.648.991,35	85%	5.946.257.442	Sekretariat Daerah
6	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				91.975.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.975.000	Sekretariat Daerah
7	Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				131.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.000.000	Sekretariat Daerah
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Persentase laporan perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan yang tepat waktu	100%	100%	-	100%	799.800.000,00	100%	811.779.564,62	100%	654.200.000,00	100%	662.200.000,00	100%	2.927.979.565	Sekretariat Daerah
		- Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%				
		- Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%				
		- Persentase laporan pengadaan barang dan jasa pmda yang tepat waktu	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%				
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				530.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.200.000	
10	Program Pelayanan Administrasi Umum				40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	Sekretariat Daerah
11	Program Administrasi Kerjasama Pembangunan				65.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000.000	Sekretariat Daerah
12	Program Kehumasan, Informasi dan Keprotokolan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	226.800.000,00	100%	230.197.055,84	100%	231.401.112,53	100%	232.779.069,54	5 Produk	921.177.238	Sekretariat Daerah
13	Program Penunjang Kehumasan				600.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.850.000	Sekretariat Daerah
14	Program Kerjasama dengan Media Massa	Persentase jumlah kerjasama dengan media massa	100%	100%	2.389.600.000,00	100%	2.410.000.000,00	100%	2.446.097.462,80	100%	2.458.891.892,44	100%	2.473.534.204,57	15 media	12.178.123.560	Sekretariat Daerah
15	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	100%	100%	477.600.000,00	100%	477.600.000,00	100%	484.753.588,48	100%	566.600.000,00	100%	567.600.000,00	100%	2.574.153.588	Sekretariat Daerah
16	Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum	Persentase kasus yang memperoleh bantuan hukum	80%	80%	-	80%	507.533.000,00	80%	515.134.930,95	80%	424.533.000,00	80%	425.533.000,00	80%	1.872.733.931	Sekretariat Daerah
17	Program Peningkatan Kepastian Hukum				259.596.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.596.000	Sekretariat Daerah
18	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum				247.937.000,00	-	-	-	-	-	-	-	247.937.000,00	-	247.937.000	Sekretariat Daerah
19	Program Pengendalian dan Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial	Persentase penerima dana hibah dan dana bantuan sosial yang tepat				90%	29.000.000,00	91%	29.300.000,00	91%	29.400.000,00	92%	29.500.000,00	92%	117.200.000	Sekretariat Daerah
20	Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana		90%	90%	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000.000	Sekretariat Daerah
21	Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	- Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah	100%	100%	887.591.000,00	100%	869.430.000,00	100%	1.992.091.000,00	100%	2.896.770.833,82	100%	8.740.479.537,63	100%	15.386.362.371	Sekretariat Daerah
		- Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	23%	10%		5%		5%		5%		5%				
		- Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	5%	2%		3%		3%		3%		3%				
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah				20.150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.150.000.000	Sekretariat Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23	Program Koordinasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase koordinasi pemberantasan penyakit masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	154.975.000,00	100%	150.750.000,00	100%	158.330.000,00	100%	159.330.000,00	100%	160.330.000,00	100%	783.715.000	Sekretariat Daerah
24	Program Administrasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase administrasi dan koordinasi Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dengan baik	55%	60%	1.362.890.000,00	65%	1.984.150.000,00	70%	2.013.868.996,19	75%	2.024.402.634,19	80%	2.036.457.631,53	80%	9.421.769.262	Sekretariat Daerah
25	Program Administrasi dan Koordinasi Perekonomian	Persentase administrasi dan koordinasi perekonomian yang dilaksanakan dengan baik	70%	-	-	80%	707.000.000,00	85%	717.589.587,63	90%	955.000.000,00	95%	970.000.000,00	95%	3.349.589.588	Sekretariat Daerah
26	Program Administrasi Pengembangan Perekonomian				250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	Sekretariat Daerah
27	Program Administrasi Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM, BUMD Dan Perbankan				480.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.000.000	Sekretariat Daerah
28	Program Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Menengah				36.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.500.000	Sekretariat Daerah
29	Program Pembinaan dan Pengawasan Inflasi Daerah				128.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.250.000	Sekretariat Daerah
30	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE	100%	-	-	100%	597.525.000,00	100%	606.474.849,15	100%	263.603.680,00	100%	263.603.680,00	100%	1.731.207.209	Sekretariat Daerah
31	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			100%	263.603.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.603.680	Sekretariat Daerah
32	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	80%	82%	246.150.000,00	83%	375.698.000,00	84%	381.325.279,91	85%	313.000.000,00	85%	339.000.000,00	70%	1.655.173.280	Sekretariat Daerah
33	Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance	55%	60%	252.680.000,00	61%	172.900.000,00	62%	175.489.730,84	63%	200.000.000,00	64%	240.000.000,00	64%	1.041.069.731	Sekretariat Daerah
34	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang prima	100%	100%	7.650.000.000,00	100%	6.091.800.000,00	100%	6.183.044.200,78	100%	6.215.384.908,87	100%	6.252.396.542,49	100%	32.392.625.652	Sekretariat Daerah
35	Program Administrasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	-	100%	1.365.000.000,00	100%	1.385.445.243,45	100%	1.417.180.000,00	100%	1.418.180.000,00	100%	5.585.805.243	Sekretariat Daerah
36	Program Peningkatan Administrasi Pertanahan				169.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.000.000	Sekretariat Daerah
37	Program Peningkatan Otonomi Daerah				1.320.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.180.000	Sekretariat Daerah
8	Kecamatan				15.562.175.632,00		19.974.009.735,72		20.863.677.721,49		20.966.020.843,96		21.050.554.529,73		98.416.438.463	
	Kecamatan Katingan Kuala				1.376.007.000,00		1.903.272.908,00		1.920.277.253,05		1.926.304.294,27		1.933.201.813,05		9.059.063.268	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	914.403.500,00	100%	688.900.000,00	100%	699.218.482,21	100%	702.875.777,89	100%	707.061.291,92	100%	3.712.459.052	Kec. Katingan Kuala
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	159.232.500,00	100%	70.000.000,00	100%	71.048.474,02	100%	71.420.096,46	100%	71.845.391,83	100%	443.546.462	Kec. Katingan Kuala
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	17.000.000	Kec. Katingan Kuala
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	-	100%	30.000.000,00	100%	30.449.346,01	100%	30.608.612,77	100%	30.790.882,21	100%	121.848.841	Kec. Katingan Kuala
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	10.400.000,00	100%	346.372.908,00	100%	351.560.950,81	100%	353.399.807,15	100%	355.504.247,08	100%	1.417.237.913	Kec. Katingan Kuala
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-	-	50%	768.000.000,00	60%	768.000.000,00	70%	768.000.000,00	80%	768.000.000,00	80%	3.072.000.000	Kec. Katingan Kuala
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	-	250.971.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.971.000	Kec. Katingan Kuala
8	Program Kabupaten Layak Anak (KLA)		-	-	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	Kec. Katingan Kuala
	Kecamatan Kampang		-		1.545.479.607,00		1.873.947.567,00		1.902.015.929,07		1.911.964.514,26		1.923.349.960,39		9.156.757.578	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	964.449.607,00	90%	980.847.771,00	90%	995.539.105,41	90%	1.000.746.320,26	90%	1.006.705.606,24	100%	4.948.288.410	Kec. Kampang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	195.000.000,00	90%	454.084.796,00	90%	460.886.169,04	90%	463.296.856,17	90%	466.055.715,64	100%	2.039.323.537	Kec. Kampang
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10.000.000	Kec. Kampang
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	45.000.000,00	90%	70.000.000,00	90%	71.048.474,02	90%	71.420.096,46	90%	71.845.391,83	100%	329.313.962	Kec. Kampang
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90%	90%	229.580.000,00	90%	369.015.000,00	90%	374.542.180,60	90%	376.501.241,37	90%	378.743.246,68	100%	1.728.381.669	Kec. Kampang
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	-	70.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.800.000	Kec. Kampang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Program Perencanaan Pembangunan Desa		-	-	30.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.650.000	Kec. Kampang
	Kecamatan Tasik Payawan	-	-	-	1.030.465.000,00	-	1.096.732.790,00	-	1.160.214.026,75	-	1.166.282.581,65	-	1.141.299.343,01	-	5.594.993.741	
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	740.513.000,00	90%	701.620.790,00	90%	712.129.806,75	90%	715.854.635,73	90%	720.117.436,81	90%	3.590.235.669	Kec. Tasik Payawan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	51.682.000,00	95%	84.502.000,00	95%	84.315.220,00	95%	84.756.234,79	95%	102.021.416,20	95%	407.276.871	Kec. Tasik Payawan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	18.000.000	Kec. Tasik Payawan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	94%	94%	22.500.000,00	94%	23.000.000,00	94%	27.225.000,00	94%	27.367.401,66	94%	32.942.250,00	94%	133.034.652	Kec. Tasik Payawan
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85%	85%	25.310.000,00	86%	287.610.000,00	86%	336.544.000,00	88%	338.304.309,47	95%	286.218.240,00	10 Keg	1.273.986.549	Kec. Tasik Payawan
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		85%	85%	172.460.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	172.460.000	Kec. Tasik Payawan
	Kecamatan Katingan Hilir	-	-	-	1.603.521.000,00	-	2.531.873.785,00	-	2.545.186.490,90	-	2.559.642.346,42	-	2.575.944.127,84	-	11.816.167.750	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	835.291.000,00	100%	1.034.843.785,00	100%	1.050.343.882,52	100%	1.055.837.756,38	100%	1.062.125.103,15	100%	5.038.441.527	Kec. Katingan Hilir
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	241.000.000,00	80%	229.000.000,00	80%	232.430.007,88	80%	233.645.744,14	90%	235.037.067,57	100%	1.171.112.820	Kec. Katingan Hilir
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	31.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	31.000.000	Kec. Katingan Hilir
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	85%	36.000.000,00	85%	40.000.000,00	85%	24.200.000,00	85%	26.620.000,00	95%	29.282.000,00	100%	156.102.000	Kec. Katingan Hilir
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	85%	26.560.000,00	85%	30.250.000,00	85%	33.275.000,00	85%	36.602.500,00	95%	126.687.500	Kec. Katingan Hilir
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	26.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.560.000	Kec. Katingan Hilir
7	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	80%	80%	20.000.000,00	80%	433.470.000,00	80%	439.962.600,50	80%	442.263.845,90	90%	444.897.457,12	100%	1.780.593.904	Kec. Katingan Hilir
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-	-	50%	768.000.000,00	60%	768.000.000,00	70%	768.000.000,00	80%	768.000.000,00	80%	3.072.000.000	Kec. Katingan Hilir
9	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	-	402.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.470.000	Kec. Katingan Hilir
10	Program Perencanaan Pembangunan Desa		-	-	11.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000	Kec. Katingan Hilir
	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	-	-	-	1.135.314.875,00	-	1.756.947.568,00	-	1.777.511.851,72	-	1.784.800.682,04	-	1.793.142.228,44	-	8.247.717.205	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	711.814.875,00	100%	788.300.000,00	100%	800.107.315,32	100%	804.292.314,86	100%	809.081.748,32	100%	3.913.596.254	Kec. Tewang Sangalang Garing
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	240.000.000,00	100%	107.100.000,00	100%	108.704.165,26	100%	109.272.747,59	100%	109.923.449,51	100%	675.000.362	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	15.000.000,00	100%	123.855.568,00	100%	125.710.701,51	100%	126.368.237,34	100%	127.120.740,20	100%	518.055.247	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
4	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	23.500.000,00	100%	353.692.000,00	100%	358.989.669,63	100%	360.867.382,25	100%	363.016.290,41	100%	1.460.065.342	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-	-	50%	384.000.000,00	60%	384.000.000,00	70%	384.000.000,00	80%	384.000.000,00	80%	1.536.000.000	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	-	145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
	Kecamatan Pulau Malan	-	-	-	904.111.000,00	-	954.001.042,21	-	1.096.049.532,81	-	1.103.896.647,36	-	1.112.456.573,27	-	5.170.514.796	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	623.836.000,00	100%	488.756.042,21	100%	623.836.000,00	100%	627.099.004,00	100%	630.833.279,34	100%	2.994.360.326	Kec. Pulau Malan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	21.000.000,00	100%	213.690.000,00	100%	216.890.691,63	100%	220.139.323,86	100%	223.436.614,75	100%	895.156.630	Kec. Pulau Malan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	24.000.000	Kec. Pulau Malan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	30.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.599.128,01	100%	40.811.483,69	100%	41.054.509,62	100%	192.465.121	Kec. Pulau Malan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD 2019		2020		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah								PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	100%	211.555.000,00	100%	214.723.713,17	100%	215.846.835,81	100%	217.132.169,56	100%	859.257.719	Kec. Pulau Malan
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				185.275.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		185.275.000	Kec. Pulau Malan
7	Program Kabupaten Layak Anak (KLA)				20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		20.000.000	Kec. Pulau Malan
	Kecamatan Katingan Tengah		-		1.569.400.000,00		1.605.719.109,00		2.093.066.455,41		2.102.005.809,16		2.112.236.261,90		9.482.427.635	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	982.318.000,00	100%	752.006.109,00	100%	1.232.318.000,00	100%	1.238.763.698,18	100%	1.246.140.339,98	100%	5.451.546.147	Kec. Katingan Tengah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	154.087.000,00	100%	193.717.000,00	100%	196.618.532,03	100%	197.646.954,66	100%	198.823.911,00	100%	940.893.398	Kec. Katingan Tengah
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	20.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20.580.000	Kec. Katingan Tengah
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.374.455,01	100%	25.507.177,31	100%	25.659.068,51	100%	126.540.701	Kec. Katingan Tengah
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	42.285.000,00	100%	250.996.000,00	100%	254.755.468,37	100%	256.087.979,02	100%	257.612.942,41	100%	1.061.737.390	Kec. Katingan Tengah
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-	-	50%	384.000.000,00	60%	384.000.000,00	70%	384.000.000,00	80%	384.000.000,00	80%	1.536.000.000	Kec. Katingan Tengah
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				325.130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.130.000	Kec. Katingan Tengah
8	Program Kabupaten Layak Anak (KLA)				20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	Kec. Katingan Tengah
	Kecamatan Marikit		-		968.875.000,00		1.257.729.000,00		1.276.567.516,92		1.283.244.664,31		1.290.886.183,23		6.077.302.364	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	555.380.000,00	100%	598.300.000,00	100%	607.261.457,26	100%	610.437.767,32	100%	614.072.827,63	100%	2.985.452.052	Kec. Marikit
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	90.000.000,00	100%	242.994.000,00	100%	246.633.612,81	100%	247.923.641,71	100%	249.399.987,76	100%	1.076.951.242	Kec. Marikit
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15.000.000	Kec. Marikit
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.524.237,01	100%	35.710.048,23	100%	35.922.695,92	100%	177.156.981	Kec. Marikit
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	62.715.000,00	100%	381.435.000,00	100%	387.148.209,84	100%	389.173.207,05	100%	391.490.671,92	100%	1.611.962.089	Kec. Marikit
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	-	210.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.780.000	Kec. Marikit
	Kecamatan Katingan Hulu		-		1.159.040.000,00		1.815.722.000,00		1.837.166.618,93		1.844.767.476,36		1.853.466.115,53		8.510.162.211	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	721.884.500,00	100%	768.255.000,00	100%	779.762.077,30	100%	783.840.660,10	100%	788.508.307,19	100%	3.842.250.545	Kec. Katingan Hulu
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	84.262.500,00	100%	165.848.000,00	100%	168.332.104,57	100%	169.212.573,68	100%	170.220.207,78	100%	757.875.386	Kec. Katingan Hulu
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	30.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	33.494.280,61	100%	33.669.474,05	100%	33.869.970,44	100%	164.033.725	Kec. Katingan Hulu
4	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	88.040.000,00	100%	464.619.000,00	100%	471.578.156,46	100%	474.044.768,54	100%	476.867.630,12	100%	1.975.149.555	Kec. Katingan Hulu
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-	-	50%	384.000.000,00	60%	384.000.000,00	70%	384.000.000,00	80%	384.000.000,00	80%	1.536.000.000	Kec. Katingan Hulu
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				234.853.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.853.000	Kec. Katingan Hulu
	Kecamatan Mendawai		-		1.100.153.150,00		1.210.166.265,00		1.228.292.377,75		1.234.717.019,72		1.242.069.564,19		6.015.398.377	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	747.944.150,00	100%	841.436.365,00	100%	854.039.567,44	100%	858.506.662,20	100%	863.618.933,53	100%	4.165.545.678	Kec. Mendawai
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	130.689.000,00	100%	147.057.900,00	100%	149.260.562,69	100%	150.041.277,19	100%	150.934.749,25	100%	727.983.489	Kec. Mendawai
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20.000.000	Kec. Mendawai

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal RPJMD	APBD 2019		2020		Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kinerja Program Perangkat Daerah						PERANGKAT DAERAH		
				K	Rp	K	Rp	2021		2022		2023			Kondisi Akhir RPJMD	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	30.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	33.494.280,61	100%	33.669.474,05	100%	33.869.970,44	100%	164.033.725	Kec. Mendawai
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	22.000.000,00	100%	188.672.000,00	100%	191.497.967,01	100%	192.499.606,28	100%	193.645.910,97	100%	788.315.484	Kec. Mendawai
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				149.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.520.000	Kec. Mendawai
	Kecamatan Bukit Raya	-			942.699.000,00		1.208.568.961,00		1.226.671.149,01		1.233.087.311,06		1.240.430.150,88		5.851.456.572	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	510.024.000,00	100%	743.493.961,00	100%	754.630.162,49	100%	758.577.291,61	100%	763.094.499,35	100%	3.529.819.914	Kec. Bukit Raya
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	180.000.000,00	100%	212.340.000,00	100%	215.520.471,06	100%	216.647.761,18	100%	217.937.864,31	100%	1.042.446.097	Kec. Bukit Raya
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.973.583,02	100%	66.318.661,00	100%	66.713.578,13	100%	304.005.822	Kec. Bukit Raya
4	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	20.000.000,00	100%	187.735.000,00	100%	190.546.932,44	100%	191.543.597,27	100%	192.684.209,09	100%	782.509.739	Kec. Bukit Raya
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				186.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.675.000	Kec. Bukit Raya
6	Program Perencanaan Pembangunan Desa				6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	Kec. Bukit Raya
	Kecamatan Petak Malai	-			1.206.792.500,00		1.586.350.575,00		1.610.111.251,71		1.618.533.015,54		1.628.171.123,53		7.649.958.466	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	391.487.500,00	100%	493.495.575,00	100%	500.887.250,58	100%	503.507.165,28	100%	506.505.470,77	100%	2.395.882.962	Kec. Petak Malai
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	378.450.000,00	100%	673.500.000,00	100%	683.587.817,92	100%	687.163.356,66	100%	691.255.305,72	100%	3.113.956.480	Kec. Petak Malai
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.000.000	Kec. Petak Malai
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.650.000,00	100%	50.850.000,00	100%	51.611.641,49	100%	51.881.598,64	100%	52.190.545,35	100%	247.183.785	Kec. Petak Malai
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	38.180.000,00	100%	368.505.000,00	100%	374.024.541,71	100%	375.980.894,95	100%	378.219.801,68	100%	1.534.910.238	Kec. Petak Malai
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				326.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.425.000	Kec. Petak Malai
7	Program Perencanaan Pembangunan Desa				17.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600.000	Kec. Petak Malai
	Kecamatan Sanaman Mantikei	-			1.020.317.500,00		1.172.978.165,51		1.190.547.267,46		1.196.774.481,82		1.203.901.084,48		5.784.518.499	
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	519.484.500,00	100%	662.518.165,51	100%	672.441.495,32	100%	675.958.732,68	100%	679.983.959,97	90%	3.210.386.853	Kec. Sanaman Mantikei
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	97.050.000,00	100%	166.745.000,00	100%	169.242.540,01	100%	170.127.771,21	100%	171.140.855,16	95%	774.306.166	Kec. Sanaman Mantikei
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	36.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.150.000	Kec. Sanaman Mantikei
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.000.000,00	100%	44.000.000,00	100%	44.659.040,81	100%	44.892.632,06	100%	45.159.960,58	94%	218.711.633	Kec. Sanaman Mantikei
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	21.150.000,00	100%	299.715.000,00	100%	304.204.191,31	100%	305.795.345,87	100%	307.616.308,76	95%	1.238.480.846	Kec. Sanaman Mantikei
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				286.483.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.483.000	Kec. Sanaman Mantikei
7	Program Kabupaten Layak Anak (KLA)				20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	Kec. Sanaman Mantikei
	JUMLAH	-			590.537.910.220,93		583.411.149.328,06		585.699.299.141,18		593.872.636.184,99		602.030.056.018,04		2.955.551.050,893	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan IKU sesuai dengan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam Bab V RPJMD, selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1. Sementara itu, IKK disajikan pada Tabel 8.2 berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah memuat indikator kinerja *impact*, sedangkan Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja *outcome*.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Kabupaten Katingan 2018-2023

A. Indikator Kinerja Tujuan

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	BB
2.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,56	6,96
3.	Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65 (2018)	35
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	67,56	70,75
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84,78 (2015)	86,03
6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	60,79 (2015)	65,19
7.	Persentase Kecamatan yang terhubung dengan poros Kabupaten (%)	76,92	92,3
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75	76,85
9.	Jumlah Kasus Konflik SARA (Kasus)	0	0

B. Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (predikat)	n/a	C	CC	B	B	BB	BB
2.	Nilai SAKIP (predikat)	CC	CC	B	BB	BB	A	A
3.	Opini BPK terhadap LKPD (predikat)	WDP (2017)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik (poin)	74,52/B (2016)	76,88/(B)	78,09/(B)	79,32/(B)	80,57/(B)	81,83/(A)	81,83/(A)
5.	Persentase penegakan perda (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rp.)	1.822,9	1915,0	2006,9	2128,8	2360,7	2492,6	2492,6
7.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rp.)	1.276,6	1295,4	1348,9	1402,4	1465,9	1509,5	1569,0
8.	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	84,40 (2018)	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00
9.	Laju Investasi (PMA dan PMDN) (%)	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5
10.	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (%)	n/a	1,99	1,20	1,21	1,22	1,23	1,23
11.	Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba (unit)	1.502	1.532	1.562	1.592	1.622	1.652	1.652
12.	Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh laba) (%)	40	42	44	46	48	50	50
13.	Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65 (2018)	59	53	47	41	35	35
14.	Jumlah Desa Berkembang (desa)	12 (2018)	14	16	18	20	22	22
15.	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif (unit)	140 (2018)	143	146	149	152	154	154
16.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,64	8,85	8,95	9,06	9,17	9,28	9,28
17.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,2	12,65	12,89	13,12	13,36	13,61	13,61
18.	Angka Harapan Hidup (tahun)	65,53	66,19	66,52	66,85	67,18	67,52	67,52
19.	Persentase penduduk miskin (%)	5,78	5,68	5,63	5,58	5,53	5,48	5,48

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
20.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat penanganan (%)	71,89	73,21	75,87	79,02	82,67	86,64	86,64
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81	3,67	3,61	3,54	3,48	3,42	3,42
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84,78 (2015)	85,41	85,56	85,72	85,88	86,03	86,03
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	60,79 (2015)	62,99	63,54	64,09	64,64	65,19	65,19
24.	Persentase Jalan dalam kondisi mantap (%)	33,42	34,21	36,84	38,72	39,83	40,34	40,34
25.	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap (%)	54,55	55,84	60,26	64,56	68,75	72,84	72,84
26.	Persentase Dermaga dalam kondisi baik (%)	69,77	75,00	72,34	84,78	89,36	93,75	93,75
27.	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	36 (2018)	34,7	40,6	46,5	52,5	58,4	58,4
28.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	31	36,52	37,62	38,62	41,46	44,33	44,33
29.	Persentase desa yang blankspot (%)	50,31	49,07	46,58	45,34	43,48	42,24	42,24
30.	Indeks kualitas air	50	50	52	52	55	55	55
31.	Indeks kualitas udara	92	92	92	92	92	92	92
32.	Indek tutupan lahan dan hutan	75,1	75,1	75,5	76,8	76,9	77	77
33.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (kunjungan)	211 (2018)	241	271	301	331	361	361
34.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (kunjungan)	32.405 (2018)	34.046	34.897	35.769	36.663	37.580	37.580
35.	Angka Kriminal (Kasus)	90	80	70	60	50	40	40
36.	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Katingan 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	6,56	6,68	6,75	6,82	6,89	6,96	6,96
2.	Inflasi	3,11	1,74	1,66	1,58	1,51	1,44	1,44
3.	PDRB per kapita (ADHB) (Juta Rp.)	41,17	43,41	48,25	52,42	56,95	61,87	61,87
4.	PDRB per kapita (ADHK) (Juta Rp.)	27,41	28,13	29,19	30,30	31,44	32,63	32,63
5.	Indeks Gini	0,266	0,250	0,243	0,235	0,228	0,222	0,222
6.	Persentase penduduk miskin (%)	5.78	5,68	5,63	5,58	5,53	5,48	5,48
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,56	68,61	69,14	69,67	70,21	70,75	70,75
8.	Angka Melek Huruf	99,47	99,60	99,67	99,73	99,80	99,86	99,86
9.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,64	8,85	8,95	9,06	9,17	9,28	9,28
10.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,2	12,65	12,89	13,12	13,36	13,61	13,61
11.	Angka Usia Harapan Hidup	65.53	66,19	66,52	66,85	67,18	67,52	67,52
12.	Prevalensi balita gizi buruk (%)	2,54	2,36	2,34	2,32	2,29	2,27	2,27
13.	Prevalensi balita gizi kurang (%)	13,21	12,82	12,56	12,31	12,06	11,82	11,82
14.	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (%)	68,94	72,05	73,29	74,53	75,78	77,02	77,02
15.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,97	67,78	68,70	69,63	70,58	71,54	71,54
16.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	96,19	96,29	96,43	96,57	97,21	97,86	97,86
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81	3,67	3,61	3,54	3,48	3,42	3,42
18.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Keluarga)	2.108 (2016)	1.848	1.731	1.620	1.517	1.421	1.421

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
19.	Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat atas Pelayanan Publik (poin)	74,52/B (2016)	76,88/(B)	78,09/(B)	79,32/(B)	80,57/(B)	81,83/(A)	81,83/(A)
20.	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	4,558	4,142	4,304	4,460	4,611	4,757	4,757
21.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	26,78	26,25	25,98	25,72	25,47	25,21	25,21
23.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB (%)	7,47	7,85	8,04	8,23	8,42	8,61	8,61
24.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	14,97	15,65	16,03	16,43	16,83	17,24	17,24
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
A	Pendidikan							
1.	APK PAUD	86,51	86,94	87,16	87,38	87,60	87,82	87,82
2.	APK SD	101,43	101,94	102,19	102,45	102,70	102,96	102,96
3.	APM SD/SDLB/MI	87,20	87,64	87,86	88,07	88,29	88,52	88,52
4.	APK SMP/MTs	90,66	91,11	91,34	91,57	91,80	92,03	92,03
5.	APM SMP/MTs	64,72	65,04	65,21	65,37	65,53	65,70	65,70
6.	Angka melek huruf	99,41	99,43	99,46	99,48	99,51	99,53	99,53
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	77,36	77,75	77,94	78,14	78,33	78,53	78,53
8.	Persentase sekolah yang melakukan pemuktahiran data pokok pendidikan (dapodik) (%)	83,33	83,75	83,96	84,17	84,38	84,59	84,59

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
B	Kesehatan							
	Pelayanan Kesehatan Dasar							
9.	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	2.91	1.64	1.50	1.41	1.30	1.28	1.28
10.	Angka Kematian Balita per 1000 KH	8.73	8.01	7.68	7.36	7.05	6.75	6.75
11.	Angka Kematian Ibu	96.96	83.64	75.73	68.57	62.08	56.21	56.21
12.	Persentase rumah tangga ber PHBS (%)	60	65	75	80	90	100	100
13.	Persentase balita stunting menurun (%)	26,50	26	25,2	24,4	23,6	22,8	22,8
14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (%)	85	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya (%)	0	4	6	8	10	12	12
16.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	75	80	85	87	90	97	97
17.	Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya (%)	100	100	100	100	100	100	100
18.	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	60	65	70	80	90	100	100
19.	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja (%)	85	65	70	80	90	100	100
20.	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa
21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi (%)	75	80	85	90	95	100	100
22.	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin (%)	80	85	88	90	95	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
23.	Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat (%)	80	70	75	80	85	95	95
24.	Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (%)	9	9,8	10	12	14	16	16
	Pelayanan Kesehatan Rujukan							
25.	Tingkat Pelayanan RS	Perdana	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
26.	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS (%)	80	82	85	87	90	92	92
27.	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%)	70	72	75	77	80	82	82
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.	Persentase jalan yang dibangun (%)	797,2 Km (panjang jalan)	2,51 (20,5 Km)	1,52 (12,61 Km)	1,38 (11,66 Km)	1,37 (11,66 Km)	1,35 (11,66 Km)	941,98
2.	Persentase jalan yang ditingkatkan (%)	-	13,76 (16,71 Km)	11,04 (15,08 Km)	9,95 (15,08)	9,05 (15,08 Km)	8,3 (15,08 Km)	8,3 (15,08 Km)
3.	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara (%)	-	1,91 (3,15 Km)	2,42 (4,1 Km)	3,06 (5,33 Km)	3,82 (6,93 Km)	4,73 (9,01 Km)	1,91 (3,15 Km)
4.	Persentase Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	59,23	61,39	62,47	63,55	64,44	65,72	65,72
6.	Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjir yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan (%)	9,26	16,43	19,28	22,13	24,98	27,83	27,83

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang (%)	n/a	80	80	80	80	80	80
8.	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun (buku)	n/a	1	1	1	1	1	5
9.	Tingkat Capaian Pemasukan Asli Daerah Melalui Alat Berat (%)	50,33	70	70	70	70	70	70
D	Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
1.	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan (%)	n/a	61,90	66,91	71,91	76,91	81,91	81,91
2.	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat (%)	n/a	3	8	12	15	18	18
3.	Persentase jalan desa yang dibangun (%)	n/a	20	30	40	50	60	60
4.	Persentase Rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan SPM Perumahan Rakyat (%)	n/a	26,14	30,40	34,67	38,93	43,19	43,19
5.	Persentase jaringan LPJU yang berfungsi baik (%)	n/a	36	41	46	51	56	56
6.	Persentase kawasan Perkotaan dan Perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai (%)	n/a	29,73	36,13	42,53	48,93	55,33	55,33
7.	Persentase taman yang dibangun (%)	n/a	20	20	20	20	20	20
8.	Persentase taman yang dipelihara (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase bahu jalan dan drainase yang dibersihkan di wilayah perkotaan Kabupaten Katingan (%)	n/a	40	60	70	80	90	90

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1.	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang diselesaikan (%)	59.53	63.57	65.69	67.89	70.15	72.50	72.50
2.	Persentase korban jiwa yang selamat akibat kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	100.00
3.	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan trantibum (%)	80	80	80	80	80	80	80
4.	Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap Perda/Perkada	77.78	79.34	80.14	80.94	81.75	82.57	82.57
5.	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan (%)	70	80	85	88	90	95	95
6.	Persentase kecamatan yang diawasi keamanannya (%)	70	75	80	85	88	90	90
7.	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa (%)	80	85	85	85	88	90	90
8.	Prosentase cakupan kecamatan siapsiaga menghadapi bencana (%)	84,62	84,62	84,62	100	100	100	100
9.	Presentase penurunan titik HOTSPOT kebakaran hutan dan lahan (%)	n/a	19,22	10	10	10	10	10
10.	Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat (%)	55,16	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89
11.	Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	0	20	40	40	42,86	42,86	42,86

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
F	Sosial							
1.	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial (%)	57,14	57,89	58,96	60,45	62,28	64,27	64,27
2.	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	55	60	80	90	95	95	95
3.	Persentase PMKS tertangani (%)	43,84	45,32	49,75	54,68	60,10	66,01	66,01
4.	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan social (%)	85	90	90	100	100	100	100
G	Tenaga Kerja							
1.	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	n/a	66,66	75,00	80,00	83,33	85,71	85,71
2.	Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1 (%)	n/a	40	42	44	48	53,26	53,26
3.	Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan (%)	52	55	58	60	64	67	67
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	46,37	48,02	49,67	51,32	52,97	54,62	54,62
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.	Persentase pemenuhan kabupaten layak anak (%)	100	100	100	100	100	100	100
I	Pangan							
1.	Persentase penurunan kecamatan rawan pangan (%)	7,7	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
2.	Jumlah data ketersediaan dan kerawanan pangan	24	24	24	24	24	24	24
3.	Jumlah ragam pangan dan pangan olahan	48	48	48	48	48	48	48
J	Pertanahan							
1.	Persentase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan (%)	n/a	20	40	60	80	100	100
K	Lingkungan Hidup							
1.	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun (%)	n/a	3	3	3	3	3	3
2.	Indek Kualitas Tutupan Lahan	n/a	77,75	78,25	78,65	78,90	79,00	79,00
3.	Persentase jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (%)	n/a	70	75	80	85	90	90
4.	Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air	n/a	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
5.	Peningkatan Persentase Pendapatan Asli Daerah (%)	n/a	2	2	2	2	2	2
L	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan (%)	92	93	95	97	98	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
2.	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil (%)	55	77	81	87	92	100	100
3.	Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	100
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK) (%)	n/a	80	85	90	95	100	100
2.	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	n/a	80	85	90	95	100	100
3.	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik (%)	n/a	80	85	90	95	100	100
N	Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana							
1.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	78,69	78,87	79,05	79,23	79,41	79,61	79,61
2.	Persentase Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	12,42	27,87	43,32	58,77	74,22	89,67	89,67
3.	Persentase Kualitas Pemberdayaan Keluarga (%)	36,65	44,75	52,85	60,95	69,05	77,15	77,15
O	Perhubungan							
1.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	60	60	62	64	66	67	67
2.	Persentase Rambu-Rambu Terpasang (%)	28	30	32	34	36	38	38

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dibangun (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100	100	100
P	Komunikasi dan Informatika							
1.	Persentase Perangkat daerah yang memiliki insfrastruktur TIK sesuai ketentuan (%)	47	53	66	74	84	92	92
Q	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1.	Persentase Koperasi aktif (%)	40	42	44	46	48	50	50
2.	Persentase UKM aktif (%)	n/a	90	91	92	93	94	94
R	Penanaman Modal							
1.	Jumlah promosi investasi yang dilakukan (promosi)	3	4	4	4	5	5	22
2.	Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	35	35	45	50	55	60	60
3.	Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP(%)	85	90	91	92	93	94	94
S	Kepemudaan dan Olahraga							
1.	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	95	100	105	110	115	120	120

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
2.	Persentase Pemuda Yang Berwirausaha (%)	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,47	0,47
3.	Jumlah Pemuda Yang lulus seleksi mengikuti pemuda pelopor tingkat nasional (orang)	0	0	0	0	1	1	1
4.	Jumlah peserta yang lulus seleksi mengikuti paskibra tingkat nasional (orang)	0	0	0	0	0	1	1
5.	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even Olahraga (orang)	0	50	67	85	100	120	442
6.	Jumlah pelajar yang lulus seleksi mengikuti event olahraga (orang)	0	0	67	70	75	80	292
7.	Jumlah pelajar yang memenangkan medali pada even olah raga kabupaten (orang)	0	0	2	3	4	5	14
T	Statistik							
1.	Persentase data statistik yang terpublikasi (%)	8	14	28	56	69	83	83
U	Kebudayaan							
1.	Persentase Peningkatan Sanggar Seni Budaya Yang Aktif (%)	8 sanggar	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	62,50
2.	Persentase Peningkatan Pelaku Seni dan Budaya Yang Aktif (%)	70 orang	14,29	29	43	57	71	71,43
3.	Persentase Peningkatan Situs dan Cagar Budaya Yang Memenuhi Ketentuan (%)	2 situs	0	100	200	300	400	400

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
V	Perpustakaan							
1.	Jumlah pengunjung ke Perpustakaan (orang)	n/a	4.500	6.000	7.500	9.000	10.500	10.500
W	Kearsipan							
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang mengelola Arsip secara baku (%)	20	24	28	32	32	36	36
X	Persandian							
1.	Persentase penggunaan sandi dalam berkomunikasi (%)	5	15	25	35	45	60	60
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
A	Kelautan dan Perikanan							
1.	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	1	3	6	9	12	15	15
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5427,00	5.800,10	6.120,30	6.511,70	6.781,90	7.581,71	7.581,71
3.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	429,87	5.431,87	5.703,47	5.988,64	6.288,07	6.602,48	6.602,48
B	Pariwisata							
1.	Persentase Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar (%)	5	10	15	20	25,	30	30
2.	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan (%)	29.113 kunjungan	17,49	20,45	23,52	26,65	29,87	29,87

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
C	Pertanian							
1.	Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai (%)	18,34	21,69	35,06	35,32	35,59	35,86	35,86
2.	Persentase usaha dan kelembagaan kelompok tani yang berkembang (%)	37,89	47,36	56,83	66,30	75,77	85,24	85,24
3.	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	64.556	69.223,72	122.982,13	128.188,09	132.603,05	138.187,01	138.187,01
4.	Persentase hasil produksi beras yang dipasarkan dalam kemasan (%)	15	20	25	30	35	40	40
5.	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)	14.167	50.961,84	53.154,21	55.448,23	57.846,97	60.362,53	60.362,53
6.	Jumlah populasi ternak (ekor)	n/a	29.055	30.507	32.031	33.628	35.309	35.309
7.	Persentase jumlah ternak yang terobati (%)	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%)	100	100	100	100	100	100	100
F	Perdagangan							
1.	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran (%)	9,21	9,23	9,25	9,27	9,29	9,31	9,31
2.	Persentase Tertib Niaga (%)	80	80	80	80	80	80	80
3.	Persentase Alat UTTP yang sesuai standar (%)	80	80	80	80	80	80	80

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
G	Perindustrian							
1.	Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP (produk)	n/a	1	1	1	1	1	5
2.	Jumlah IKM, Pengusaha, Investor yang menggunakan fasilitas kawasan industri hampangan	0	0	1	1	1	1	4
3.	Persentase IKM berbasis teknologi (%)	0	10	12	14	16	18	18
4.	Persentase IKM potensial yang mendapatkan bantuan (%)	0	15	15	15	15	15	15
H	Transmigrasi							
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Transmigrasi (%)	n/a	10	30	50	70	100	100
2.3.3	Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan							
A	Perencanaan							
1.	Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1	1
3.	Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi (%)	84	85	87	90	91	92	92

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
5.	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (%)	79	80	83	86	89	92	92
6.	Tingkat Ketepatan waktu penyusun dokumen penganggaran (%)	100	100	100	100	100	100	100
B	Penelitian dan Pengembangan							
1.	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang ditindaklanjuti (%)	81,82	82	82	85	85	85	85
C	Keuangan							
1.	Persentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	100	100
2.	Pertumbuhan PAD (%)	n/a	n/a	1,70	1,8	1,9	2	2
3.	Persentase Objek Pajak yang ditagih (%)	66	69	72	75	78	80	80
4.	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah (%)	80	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	100	100
D	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan							
1.	Persentase aparatur yang memperoleh pendidikan kedinasan (%)	80	90	90	90	90	90	90

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
2.	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan (%)	80	90	90	90	90	90	90
3.	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan (%)	80	90	90	90	90	90	90
E	Pengawasan							
1.	Cakupan obrik Pengawasan (%)	80	80	80	85	85	90	90
2.	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
F	Sekretariat Daerah							
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.	- Persentase laporan perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.	- Persentase laporan keuangan yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.	- Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase jumlah kerjasama dengan Media Massa (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi (%)	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.	Persentase kasus yang memperoleh bantuan hukum (%)	80	80	80	80	80	80	80
8.	Persentase penerima dana hibah dan dana bantuan sosial yang tepat sasaran (%)	90	90	90	91	91	92	92
9.	- Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
10.	- Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda (%)	23	10	5	5	5	5	5
11.	- Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda (%)	5	2	3	3	3	3	3
12.	Persentase masyarakat/sekolah yang memperoleh sosialisasi anti narkoba (%)	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase administrasi dan koordinasi Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dengan baik (%)	55	60	65	70	75	80	80
14.	Persentase administrasi dan koordinasi perekonomian yang dilaksanakan dengan baik (%)	70	75	80	85	90	95	95
15.	Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE (%)	100	100	100	100	100	100	100
16.	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	80	82	83	84	85	85	85
17.	Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (%)	55	60	61	62	63	64	64
18.	Cakupan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang prima (%)	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
19.	Persentase administrasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100
G	Sekretariat Dewan							
1.	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD (%)	90	92	92	95	100	100	100
2.	Persentase fasilitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD (%)	89,50	93	95	100	100	100	100
H	Kecamatan							
1.	Persentase pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (%)	90	90	90	90	90	90	90
2.	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (%)	-	-	50	60	70	80	80
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Rupiah per kapita sebulan)	1.039.384	1,190,321	1,257,329	1,264,877	1,309,435	1,471,508	1,471,508
2.	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	38,63	39,12	39,61	40,11	40,61	41,13	41,64
3.	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000 penduduk)	7,26	6,75	6,28	5,84	5,43	5,05	4,70
4.	Rasio ketergantungan	53,63	54,17	54,71	55,26	55,81	56,37	56,93

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan secara terpadu dan konsisten, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Katingan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan Renstra PD. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan berkewajiban untuk menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun.
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Katingan setiap tahun.
3. Bupati berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
5. Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi urusan perencanaan daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil evaluasi Renstra PD Kabupaten

Katingan Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

6. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
7. DPRD Kabupaten Katingan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023.

9.2. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ini, akan menjadi pedoman pembangunan sampai dengan Tahun 2023. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Katingan Tahun 2024.

Pemerintah daerah Kabupaten Katingan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 sesuai periode/tahapan berkenaan. Penyusunan RKPD Tahun 2024 tersebut, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025, serta mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan Rancangan RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional bila ada yang berlokasi di Kabupaten Katingan. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha, dengan demikian visi **“Katingan Bermartabat Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”** dapat terwujud.

BUPATI KATINGAN


SAKARIYAS